



LAPORAN AKHIR

**RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
IPTEK DAERAH (RIP-JPID)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025 - 2029**

EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai panduan dalam mengembangkan dan memperkuat ekosistem riset dan inovasi di tingkat daerah. Dokumen ini menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah (RPJMD 2025–2029) maupun jangka panjang (RPJPD 2025–2045), yang bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah yang mapan, mandiri, maju, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini dilakukan berdasarkan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, yang mengharuskan setiap daerah menyusun RIPJPID sebagai kerangka kebijakan pengembangan riset dan inovasi berbasis potensi dan kebutuhan lokal.

RIPJPID Kabupaten Kepulauan Selayar difokuskan pada empat tema prioritas yang selaras dengan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah, yaitu: (1) peningkatan produktivitas daerah untuk mendukung transformasi ekonomi; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi sosial; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran; serta (4) peningkatan kualitas layanan publik berbasis riset dan inovasi. Keempat tema ini dirumuskan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis pada kajian mendalam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan tata kelola daerah, serta diarahkan untuk menghasilkan evidence-based policy yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam kerangka implementatif, RIPJPID mengidentifikasi empat Produk Unggulan Daerah (PUD) yang menjadi tumpuan pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu pengembangan kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok, dan sektor pariwisata. Keempat komoditas ini dipilih karena memiliki potensi besar sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan. Pengembangan PUD tersebut tidak hanya dilakukan pada aspek hulu seperti budidaya, tetapi juga menysasar aspek hilirisasi melalui industri pengolahan dan jasa, yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara signifikan dan mendorong transformasi struktural daerah dari ketergantungan pada sektor ekstraktif ke sektor yang berbasis inovasi dan pengetahuan.

RIPJPID ini disusun secara sistematis dalam tujuh bab, yang meliputi: (1) Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sistematika penulisan; (2) Gambaran umum dan kondisi riset serta inovasi di daerah, termasuk potensi sumber daya, demografi, dan infrastruktur kelembagaan; (3) Tantangan dan peluang pengembangan riset dan inovasi, yang menyoroti isu-isu seperti rendahnya anggaran riset, keterbatasan SDM peneliti, dan lemahnya integrasi kelembagaan; (4) Analisis

kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari ekosistem riset dan inovasi berbasis produk unggulan dan tema prioritas; (5) Strategi daerah dalam mengembangkan riset dan inovasi melalui kolaborasi multi-aktor dan multi-level; (6) Peta jalan riset dan inovasi yang merinci program, kegiatan, dan indikator capaian berdasarkan sasaran jangka pendek hingga menengah; serta (7) Penutup yang merangkum hasil perencanaan dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong akselerasi pelaksanaan RIPJPID secara efektif.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat adaptif dan berbasis bukti, RIPJPID ini diharapkan menjadi landasan dalam membangun sistem riset dan inovasi daerah yang kuat, responsif terhadap isu lokal dan global, serta mampu menghasilkan terobosan kebijakan yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan implementasi dokumen ini. Dengan arah kebijakan yang terstruktur, RIPJPID 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam mendorong Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi pusat pertumbuhan baru berbasis inovasi di kawasan timur Indonesia.

KATA PENGANTAR KEPALA DAERAH

DAFTAR ISI

Contents

<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	<i>i</i>
<i>KATA PENGANTAR KEPALA DAERAH</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>iv</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
<i>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH</i>	<i>7</i>
2.1 Gambaran Umum Daerah	7
2.2 Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah	52
<i>BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH</i>	<i>207</i>
3.1 Tantangan.....	207
3.2 Peluang	214
<i>BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH</i>	<i>222</i>
<i>BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH</i>	<i>290</i>
<i>BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH</i>	<i>293</i>
6.1 Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah.....	293
6.2 Program Indikatif Riset dan Inovasi di Daerah	348
<i>BAB VII PENUTUP</i>	<i>362</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	9
Tabel 2. 2 Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024.....	16
Tabel 2. 3 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024.....	17
Tabel 2. 4 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	18
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.....	19
Tabel 2. 6 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024 (Jiwa).....	26
Tabel 2. 7 Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024 (Miliar Rupiah)	29
Tabel 2. 8 Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024 (Miliar Rupiah)	31
Tabel 2. 9 Jumlah Regulasi Terkait Riset & Inovasi Terkait Produktivitas Daerah	56
Tabel 2. 10 Sistem Informasi Tematik Aktif Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	58
Tabel 2. 11 Jumlah Laboratorium dan Kelengkapan Alat.....	59
Tabel 2. 12 Ketersediaan Program Riset di Kebun Raya Gojang Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	61
Tabel 2. 13 Jumlah Ide/Paten/Inovasi Terkait Komoditas Unggulan	64
Tabel 2. 14 Jumlah Kerjasama Riset Terkait Produktivitas Daerah.....	65
Tabel 2. 15 Ketersediaan Website Jaringan Produktivitas Daerah.....	67
Tabel 2. 16 Jumlah Pengetahuan/Teknologi Masyarakat Lokal yang Dimanfaatkan untuk Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024.....	74
Tabel 2. 17 Jumlah Perda/Perkada Terkait Riset & Inovasi SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	84
Tabel 2. 18 Keberadaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	85
Tabel 2. 19 Persentase dan Nominal Anggaran Riset SDM dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	91
Tabel 2. 20 Ketersediaan Website Tematik Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	95
Tabel 2. 21 Ketersediaan Program Daerah yang Mengintegrasikan SDM dengan Isu Global Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024.....	112
Tabel 2. 22 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Produk Unggulan Daerah	123

Tabel 2. 23 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Tema Prioritas Daerah	168
Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Produk Unggulan Daerah	223
Tabel 4. 2 Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Tema Prioritas Daerah	258
Tabel 5.1 Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi Terkait Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	290
Tabel 5. 2 Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah Terkait Tema Prioritas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	291
Tabel 6.1 Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Produk Unggulan Daerah	293
Tabel 6. 2 Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Tema Prioritas Daerah	322
Tabel 6. 3 Program Indikatif Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Produk Unggulan Daerah	348
Tabel 6. 4 Program Indikatif Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Tema Prioritas Daerah	355

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar per Kecamatan ..	10
Gambar 2.2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar	11
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar (Jiwa)	14
Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar 2024.....	20
Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	21
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024.....	23
Gambar 2.7 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Beberapa Kabupaten di Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024.....	24
Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan dan Kab/Kota (Jiwa) 2020 - 2024	25
Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020 - 2024	27
Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024.....	33
Gambar 2.11 Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024	34
Gambar 2.12 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024.....	36
Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024.....	37
Gambar 2.14 Jumlah Produksi Kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024 (Ton)	39
Gambar 2.15 Nilai Ekspor Kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024 (Juta Rupiah)	40
Gambar 2.16 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024 (Ton).....	42
Gambar 2.17 Perkembangan Jeruk Keprok Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2023	47
Gambar 2.18 Perkembangan Volume Produksi Jeruk Keprok 2020 - 2023 (Kuintal)	48
Gambar 2.19 Jumlah Wisatawan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 - 2024 (Orang)..	50
Gambar 2.20 Jumlah Wisatawan Menurut Objek Wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar 2024 (Orang)	51
Gambar 2.21 Jumlah Kajian/Policy Brief Terkait Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020-2024.....	54

Gambar 2.22 Jumlah Dataset Riset/Inovasi Terkait Produktivitas Daerah yang Terunggah dalam Platform Digital Resmi Kabupaten Kepulauan Selayar 2020-2024	Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025	57
Gambar 2.23 Cakupan Internet pada Lembaga Riset Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		60
Gambar 2.24 Persentase dan Nominal Anggaran Riset terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Kepulauan Selayar 2020-2024		63
Gambar 2.25 Jumlah Adopsi/Implementasi Hasil Riset Terkait Produktivitas Daerah		69
Gambar 2.26 Jumlah Start-up/UMKM Produktif Berbasis Riset Daerah		72
Gambar 2.27 Jumlah Tema Riset yang Mendukung Pengembangan Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		75
Gambar 2.28 Jumlah Klaster Inovasi Produktivitas Daerah		76
Gambar 2.29 Ketersediaan Kegiatan/Program Riset Produktivitas Daerah yang Sesuai RPJMN/RPJPN/Kementerian Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 – 2024		77
Gambar 2.30 Program Daerah yang Mengintegrasikan Produktivitas Daerah dengan Isu Global Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		79
Gambar 2.31 Jumlah Kerja Sama Internasional Terkait Produktivitas Daerah		79
Gambar 2.32 Jumlah Kajian dan Policy Brief Terkait Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		83
Gambar 2.33 Jumlah Dataset Riset/Inovasi Pendidikan dan Kesehatan Terunggah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		85
Gambar 2.34 Jumlah Laboratorium dan Kelengkapan Alat Riset SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		88
Gambar 2.35 Cakupan Internet pada Lembaga Riset Pendukung SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		89
Gambar 2.36 Jumlah Pengelola Kebun Raya Gojang Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		90
Gambar 2.37 Jumlah Ide/Paten/Inovasi SDM yang Didaftarkan atau Dimanfaatkan Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		92
Gambar 2.38 Jumlah Kerjasama Riset Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		94
Gambar 2.39 Jumlah Mitra Antar Kelembagaan Untuk Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		97
Gambar 2.40 Jumlah Adopsi/Implementasi Hasil Riset SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		98
Gambar 2.41 Jumlah Hasil Riset yang Didiseminasikan kepada Pelaku Inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		99
Gambar 2.42 Jumlah Inovasi Terkait SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024		101

Gambar 2.43 Jumlah Penghargaan/Kegiatan Kompetisi Inovasi SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	103
Gambar 2.44 Jumlah Start-up/UMKM SDM yang Dibina melalui Inkubasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	104
Gambar 2.45 Jumlah Pengetahuan atau Teknologi Masyarakat Lokal yang Dimanfaatkan Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	105
Gambar 2.46 Jumlah Tema Riset yang Mendukung Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	107
Gambar 2.47 Jumlah Klaster Inovasi yang Memberdayakan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	108
Gambar 2.48 Kegiatan/Program Riset SDM yang Sesuai dengan Dokumen Pusat (RPJMN/RPJPN/Kementerian) Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	110
Gambar 2.49 Jumlah Kerjasama Internasional Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	113
Gambar 2.50 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024	114
Gambar 2.51 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dan Prov. Sulawesi Selatan 2020 - 2024	115
Gambar 2.52 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	116
Gambar 2.53 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	119
Gambar 2.54 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024	120

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipasi memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. RIPJPID Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 ini merupakan salah satu dokumen penting dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kabupaten Kepulauan Selayar dan disusun untuk jangka waktu lima tahun mengikuti dan diintegrasikan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar periode yang sama 2025-2029. Untuk itu, dokumen ini senantiasa merujuk pada visi, misi dan kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai leluhur Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga menjadi spirit masyarakat untuk mewujudkan visi jangka Panjang 2025-2045 **‘Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan’**.

Dokumen RIPJPID ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga mengamanahkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Regulasi yang lebih operasional seiring dengan terbitnya Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah yang mempertegas kewajiban daerah menyusun RIPJPID mengikuti periode penyusunan RPJMD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam proses penyusunannya, RIPJPID Kabupaten Kepulauan Selayar memperhatikan RIPJPID Provinsi Sulawesi Selatan periode yang sama. Disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Mengingat RIPJPID ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2025-2029, sehingga disusun secara terintegrasi dengan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar,

mewujudkan visi jangka menengah 2025-2029 **‘Bersama Membangun Selayar Maju dan Sejahtera’**.

Secara substansial, RIPJPID Kabupaten Kepulauan Selayar ini secara garis besar memuat: (1) Pendahuluan; (2) Gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di daerah; (3) Tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah; (4) Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah; (5) Strategi riset dan inovasi di daerah; (6) Peta jalan riset dan inovasi di daerah; serta (7) Penutup.

RIPJPID 2025-2029 ini difokuskan pada empat tema prioritas, terkait dengan permasalahan pembangunan jangka menengah daerah. Pertama, peningkatan produktivitas daerah untuk mendukung transformasi ekonomi. Kedua, peningkatan kualitas SDM untuk mendukung transformasi sosial. Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung transformasi sosial (Penurunan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran). Keempat, peningkatan kualitas layanan publik.

Dikaitkan dengan analisis sumberdaya potensial daerah sebagai *game changer* dalam mengatasi permasalahan sekaligus untuk mengoptimalkan pencapaian pembangunan daerah melalui produk unggulan daerah (PUD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Empat potensi sumberdaya daerah yang potensial menjadi fokus pengembangan riset dan inovasi untuk menghasilkan *evidence-based policy* Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2025-2029. Pertama, pengembangan kelapa. Kedua, perikanan tangkap. Ketiga, pengembangan jeruk keprok. Keempat, pariwisata. Fakta menunjukkan keempat komoditi ini sangat potensial pengembangannya untuk menjadi produk unggulan daerah, dimana pengembangannya secara terintegrasi dan terpadu mulai dari kegiatan sosial ekonomi sektor hulu (budidaya) hingga pengembangan hilirisasi pada kegiatan ekonomi industri pengolahan dan jasa. Secara berkelanjutan, keempat komoditi ini diharapkan mampu muncul sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat diandalkan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka panjang di tengah fluktuatifnya pertumbuhan industri ekstraktif yang selama ini menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Integrasi permasalahan pembangunan dan pengembangan produk unggulan daerah menjadi fokus perumusan peta jalan serta pemajuan riset dan IPTEK Kabupaten

Kepulauan Selayar selama periode 2025-2029. Selama periode ini pengembangan riset, kajian dan pemajuan IPTEK dilakukan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang tepat, sesuai potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menyelesaikan dan mengoptimalkan pencapaian pembangunan daerah. Perspektif ini menjadi kerangka berpikir yang menuntun proses, mekanisme dan substansi penyusunan dokumen RIPJPID 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Selayar ini.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Tahapan Penelitian dan Pengembang di Kemeneterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneiti;
15. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Tujuan tersebut agar terciptanya keterpaduan, keberlanjutan dan tepat sasaran dalam memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Berikut rincian tujuan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK

1. Menjelaskan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Menetapkan dan menjelaskan produk unggulan daerah dan tema prioritas daerah riset dan inovasi di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Menetapkan dan menjelaskan tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Menetapkan dan menjelaskan kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Menetapkan dan menjelaskan strategi riset dan inovasi di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Menetapkan dan menjelaskan peta jalan dan program indikatif riset dan inovasi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah paling sedikit memuat (Pasal 28 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah):

1. Gambaran Potensi Sumber Daya Alam/Potensi Ekonomi Daerah;
2. Gambaran/Kondisi Riset Dan Inovasi di Daerah;
3. Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Dan Potensi Pemecahannya;
4. Tema Prioritas Riset Dan Inovasi di Daerah;
5. Tantangan Dan Peluang Riset Dan Inovasi Di Daerah;
6. Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti Dan Ekosistem Riset Dan Inovasi di Daerah;
7. Strategi Riset Dan Inovasi di Daerah; dan
8. Peta Jalan Riset Dan Inovasi di Daerah.

Dokumen ini disusun berdasarkan landasan analisis akademik yang kuat, logis dan terstruktur serta dituangkan dengan sistematika berikut ini:

Bab I, Bab Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II, Bab Gambaran Umum Dan Kondisi Riset Dan Inovasi di Daerah, memuat gambaran umum wilayah mencakup aspek geografi; kependudukan; ketenagakerjaan; dan aspek kesejahteraan masyarakat; produk unggulan daerah, serta gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah yang meliputi kemampuan melakukan kajian untuk

menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), penentuan tema prioritas, dan kondisi ekosistem riset dan inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai tema prioritas.

Bab III, Bab Tantangan Dan Peluang Riset Dan Inovasi di Daerah, memuat tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan riset dan inovasi di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bab IV, Bab Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah, memuat analisis kesenjangan (*gap analysis*) kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan kondisi ekosistem riset dan inovasi saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama terkait pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah.

Bab V, Bab Strategi Riset Dan Inovasi di Daerah, memuat strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan strategi pengembangan produk unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bab VI, Bab Peta Jalan Riset Dan Inovasi di Daerah, memuat sasaran strategis dan focus kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan sasaran strategis dan fokus pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah, terutama terkait pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah, serta pada bagian ini ditutup dengan program indikatif berdasarkan elemen – elemen yang dikombinasikan antara prioritas dan pengembangan unggulan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bab VII, Bab Penutup, memuat Kesimpulan dan saran dari penyusunan rencana induk dan peta jalan pemaajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki keunikan geografis karena merupakan satu-satunya kabupaten di provinsi tersebut yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan utama Pulau Sulawesi. Terletak di ujung selatan provinsi, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar membentang dari utara ke selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau, dengan Pulau Selayar sebagai pulau utama.

Kabupaten ini secara resmi berdiri pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Namun, sejarah panjang daerah ini telah dimulai jauh sebelumnya, dengan hari jadi yang diperingati setiap tanggal 29 November, menandai berdirinya pemerintahan lokal sejak tahun 1605. Tanggal ini merujuk pada peristiwa penting dalam sejarah lokal, yaitu masuknya Islam secara resmi ke wilayah Selayar, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang, Pangali Patta Raja. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Benteng, yang juga menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, yang terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Wilayah daratan mencakup Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu. Sementara itu, wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.

Berdasarkan Tabel 2.1, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah daratan sekitar 1.357,03 km² dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 137.071 jiwa, serta kepadatan penduduk sekitar 101 jiwa per km². Perlu dicatat bahwa angka tersebut hanya mencakup wilayah daratan, sementara wilayah lautannya jauh lebih luas, mencapai sekitar 9.146,66 km² atau sekitar 87% dari total wilayah administratif.

Dengan potensi wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alam, Kabupaten Kepulauan Selayar terus berkembang sebagai daerah otonom yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Salah satu daya tarik utamanya adalah Taman Nasional Takabonerate, yang dikenal sebagai kawasan atol terbesar ketiga di dunia dan menjadi destinasi wisata bahari unggulan.

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat dengan dukungan dari seluruh perangkat daerah baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakteristik berupa gugus kepulauan yang terletak antara 5°40' - 7°35' LS dan 120°15' - 122°30' BT dengan luas wilayah sebesar 10.503,69 km², terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km², dan luas wilayah laut 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai 670 km. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki distribusi wilayah yang cukup beragam di antara kecamatannya. Kecamatan Bontosikuyu tercatat sebagai wilayah terluas, mencakup sekitar 18,29% dari total luas kabupaten. Luas wilayah yang signifikan ini menunjukkan peran penting Bontosikuyu dalam aspek geografis, serta potensi sumber daya alam yang mungkin dimilikinya. Selain itu, Kecamatan Pasimarannu dan Bontomatene juga memberikan kontribusi besar terhadap total luas wilayah, masing-

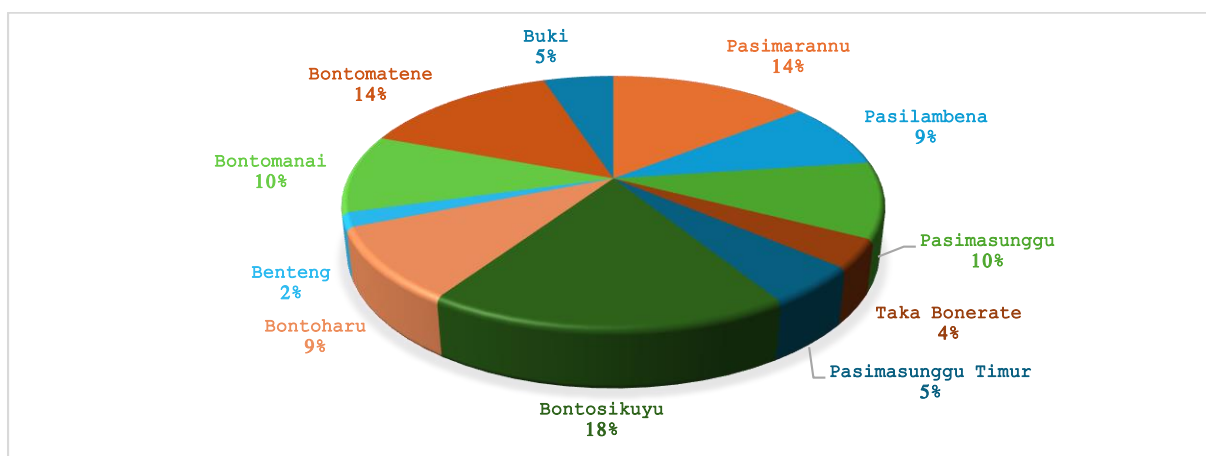
masing sekitar 14,39% dan 14,23%. Kedua kecamatan ini menempati posisi strategis dalam struktur wilayah kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Benteng merupakan wilayah dengan luas terkecil, hanya sekitar 1,81% dari total kabupaten. Benteng merupakan pusat kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Pasimarannu	195,33
2	Pasilambena	114,88
3	Pasimasunggu	131,8
4	Taka Bonerate	49,3
5	Pasimasunggu Timur	67,14
6	Bontosikuyu	248,22
7	Bontoharu	128,12
8	Benteng	24,63
9	Bontomanai	136,42
10	Bontomatene	193,05
11	Buki	68,14
Total (Kepulauan Selayar)		1.357,03

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Kecamatan-kecamatan lain seperti Bontomanai, Pasimasunggu, dan Bontoharu memiliki kontribusi sedang terhadap total luas wilayah, berkisar antara 9% hingga 10%, yang menunjukkan peran sebagai wilayah penyangga dengan potensi pembangunan yang seimbang. Sementara itu, wilayah seperti Taka Bonerate dan Pasimasunggu Timur memiliki persentase yang lebih kecil terhadap total luas kabupaten. Meskipun demikian, wilayah-wilayah ini bisa jadi memiliki nilai ekologis atau strategis tertentu, seperti kawasan konservasi laut, kepulauan, atau destinasi wisata alam yang khas. Distribusi ini mencerminkan keragaman karakteristik geografis dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang di gambarkan pada Gambar 2.1 di bawah.



Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar per Kecamatan

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas 130 pulau dengan pulau berpenghuni sebanyak 34 buah, terletak di tengah bentangan Barat dan Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan ALKI III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Kabupaten Kepulauan Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Disamping itu, pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sangat didukung oleh potensi sumber daya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan Utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan Selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.

Bontosikuyu (607 m). Wilayah ini tersusun atas endapan hasil aktivitas vulkanik berupa breksi, lava, konglomerat, dan tufa yang berselingan dengan batuan sedimen laut.

Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar didominasi oleh lereng landai (2–15%). Kecamatan Bontosikuyu memiliki kelas kelerengan sangat terjal (>40%) sebesar 43,97% dari luas wilayahnya, diikuti oleh Kecamatan Bontoharu sebesar 33,12%. Sebaliknya, Kecamatan Bontomatene hanya memiliki 4,21% wilayah dengan kelerengan sangat terjal.

2.1.1.2. Kondisi Geologi

Secara umum, kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian selatan, sedangkan pulau-pulau kecil yang berada di Laut Flores kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton. Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan vulkanik dari Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Formasi ini terdiri dari breksi, lava, konglomerat, dan tufa, serta batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan vulkanik. Di atas Formasi Camba terdapat Formasi Walanae yang menjemari batu gamping Selayar, terdiri dari batu pasir, batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping, berumur Miosen Tengah hingga Pliosen. Pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya tersusun oleh terumbu karang.

Namun, beberapa pulau memiliki kondisi geologi berbeda, seperti Pulau Jampea yang tersusun oleh batuan beku granit, dan bagian utara Pulau Kayuadi yang tersusun oleh batuan beku menengah. Keberadaan pulau-pulau ini menjadi objek penelitian geologi yang menarik. Batuan penyusun Pulau Selayar umumnya memiliki kekuatan lemah hingga sedang, dengan kemiringan ke arah barat dan jurus perlapisan relatif utara-selatan.

2.1.1.3. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologis Pulau Selayar sangat dipengaruhi oleh tipe iklim dan kondisi geologi. Hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai kecil dengan debit air yang relatif rendah, karena sempitnya daerah aliran sungai dan sistem pengaliran langsung ke

laut. Selain itu, kondisi batuan yang memiliki kelurusan rendah dan curah hujan yang terbatas juga memengaruhi debit sungai.

Wilayah bagian tengah Pulau Selayar yang merupakan sebaran endapan Formasi Walanae mengandung lapisan batuan pembawa air (akuifer tertekan) dengan debit kecil hingga sedang (kurang dari 1–3 liter/detik). Air tanah bebas ditemukan pada endapan alluvial, endapan pantai, dan lembah-lembah yang ditempati oleh batuan Formasi Camba. Kedalaman muka air tanah bervariasi, berkisar antara 5–6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas juga ditemukan pada daerah yang ditutupi oleh batu gamping Formasi Walanae, berupa aliran terbatas melalui rekahan atau ruang pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air ini sangat terbatas dan telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk. Beberapa mata air ditemukan di wilayah Batangmata Sapu, Lembang-lembang, Bonto, dan sebelah timur Tile-tile, dengan debit air antara 1–4 liter/detik. Sistem aliran hidrogeologi menunjukkan pergerakan air menuju laut, baik air permukaan maupun air tanah. Di daerah batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan atau ruang pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah, seperti di wilayah Tajuiya dan Tamasongia.

2.1.1.4. Kondisi Iklim

Curah hujan di Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh iklim, kondisi geografis, dan pergerakan arus udara. Berdasarkan data tahun 2023, rata-rata jumlah hari hujan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 9,6 hari per bulan dengan curah hujan rata-rata 106,6 mm. Pada tahun 2022, rata-rata hari hujan tercatat sebesar 11,08 hari dengan curah hujan rata-rata 120,78 mm.

Hujan tersebar sepanjang tahun dengan bulan-bulan basah (≥ 100 mm) terjadi pada Februari hingga Juli dan Desember, dengan curah hujan rata-rata 168,06 mm. Bulan-bulan lembab (60–100 mm) terjadi pada Januari, Juni, dan November dengan curah hujan rata-rata 86,89 mm. Sementara itu, bulan-bulan kering (< 60 mm) terjadi pada Agustus hingga Oktober dengan curah hujan rata-rata hanya 3,44 mm.

2.1.2 Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kondisi aspek tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 pada gambar 2.3 dimana jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mencapai 143.096 jiwa. Penduduk ini tersebar di 11 kecamatan, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kecamatan Benteng yang mencapai 24.378 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Buki tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit selama lima tahun terakhir, yakni 6.925 jiwa pada tahun 2024.



Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar (Jiwa)

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

2.1.2.2. Pertumbuhan Penduduk

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Meskipun laju pertumbuhannya tidak selalu sama setiap tahun, arah pergerakannya tetap positif, mencerminkan kondisi demografis yang stabil dan berkembang.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 137.071 jiwa. Setahun kemudian angka ini naik menjadi 137.974 jiwa menandai pertumbuhan sekitar 0,66 persen. Tahun 2022 mencatat peningkatan yang sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 0,85 persen, dengan jumlah penduduk mencapai 139.145 jiwa.

Pertumbuhan paling mencolok terjadi pada tahun 2023, ketika jumlah penduduk melonjak menjadi 142.100 jiwa. Kenaikan ini setara dengan pertumbuhan sekitar 2,12 persen, menjadikannya tahun dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam periode ini. Sementara itu, pada tahun 2024, penduduk kembali bertambah menjadi 143.096 jiwa, dengan pertumbuhan sekitar 0,70 persen.

2.1.2.3. Distribusi Penduduk

Distribusi persebaran jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat dari 101 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 105 jiwa/km² pada tahun 2024. Ketimpangan distribusi terlihat dari data pertumbuhan penduduk yang walaupun tidak terlalu besar namun kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan variasi yang cukup mencolok antar wilayah. Hal ini tercermin dari perbedaan karakteristik geografis, tingkat urbanisasi, serta distribusi penduduk di masing-masing kecamatan.

Kecamatan Benteng secara konsisten menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 1.031 jiwa/km² pada tahun 2022 menjadi 990 jiwa/km² pada tahun 2024. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, tingginya kepadatan di Benteng mencerminkan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan.

Di sisi lain, kecamatan dengan kepadatan tertinggi berikutnya adalah Taka Bonerate, yang meskipun memiliki luas wilayah terkecil (49,3 km²), mencatat kepadatan yang terus meningkat dari 274 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 306 jiwa/km² pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Kecamatan seperti Pasimasunggu Timur, Bontoharu, dan Bontomanai juga menunjukkan kepadatan yang relatif tinggi dan terus meningkat, mencerminkan

pertumbuhan penduduk yang stabil di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, kecamatan seperti Pasimarannu, Pasilambena, dan Bontosikuyu memiliki kepadatan yang lebih rendah, berkisar antara 54 hingga 76 jiwa/km² pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini cenderung lebih jarang penduduk memiliki karakteristik geografis yang lebih terpencil.

Tabel 2. 2 Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pasimarannu	195,33	54	54	55	56	57
Pasilambena	114,88	70	70	71	75	76
Pasimasunggu	131,8	66	66	67	70	72
Taka bonerate	49,3	274	275	276	301	306
Pasimasunggu Timur	67,14	117	117	118	121	122
Bontosikuyu	248,22	62	62	62	65	65
Bontoharu	128,12	114	115	117	120	121
Benteng	24,63	1.009	1.019	1.031	996	990
Bontomanai	136,42	100	101	102	104	103
Bontomatene	193,05	69	69	70	70	70
Buki	68,14	99	99	100	102	102
Kepulauan selayar	1.357,03	101	102	103	105	105

Sumber Data : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2024

2.1.2.4. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dalam persentase. Rasio sebesar 100 persen menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan yang seimbang, sementara angka di bawah 100 menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Kestabilan rasio jenis kelamin ini menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan sosial, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, agar kebijakan yang diambil dapat merespons kebutuhan penduduk secara proporsional berdasarkan struktur gender.

Selama lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan sedikit lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Secara umum, rasio jenis kelamin di tingkat kabupaten berada pada kisaran 96,36% hingga 96,86% mencerminkan keseimbangan yang cukup baik antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Beberapa kecamatan mencatat rasio seimbang, bahkan mencapai titik ideal. Kecamatan Bontoharu dan Taka Bonerate menjadi contoh utama dengan rasio mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama persis. Sementara itu, Kecamatan Bontobaharu mencatat rasio tertinggi pada tahun 2023 sebesar 99% menunjukkan distribusi gender yang hampir seimbang.

Di sisi lain, Kecamatan Benteng dan Bontomatene secara konsisten mencatat rasio jenis kelamin terendah yaitu sekitar 93% hingga 94%, yang berarti jumlah perempuan lebih dominan di wilayah tersebut. Kecamatan Bontomatene bahkan mencatat rasio terendah sebesar 92% pada tahun 2022. Kecamatan lainnya seperti Pasimarannu, Pasilambena, Pasimasunggu, dan Bontomanai menunjukkan fluktuasi kecil namun tetap berada dalam kisaran 97% hingga 99% mencerminkan distribusi gender yang cukup seimbang dan stabil dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 3 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pasimarannu	98	99	97	97	97
Pasilambena	98	98	98	98	98
Pasimasunggu	96	96	97	97	97
Taka bonerate	98	98	99	100	100
Pasimasunggu Timur	96	96	97	96	96
Bontosikuyu	96	96	98	99	99
Bontoharu	100	100	99	99	99
Benteng	93	93	94	94	94
Bontomanai	98	98	99	99	99
Bontomatene	93	93	92	93	93

Buki	97	97	96	97	97
Kepulauan selayar	96,36	96,37	96,40	96,83	96,86

Sumber Data: BPS Kab.Kepulauan Selayar 2025

2.1.2.5. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa struktur penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk kategori sedang, karena proporsi penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40 persen atau pada tahun 2024 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun 22,61 persen dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 97.824 jiwa (68,84 persen) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas sekitar 8,55 persen atau 12.150 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2. 4 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2024	70.405	72.405	143.096	96,86
2023	69.907	72.193	142.100	96,83
2022	68.296	70.849	139.147	96,40
2021	67.713	70.261	137.974	96,37
2020	67.262	69.809	137.071	96,35

Sumber Data: BPS Kab.Kepulauan Selayar 2025

Data sex ratio berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 96,86, menunjukkan bahwa penduduk laki-laki 3,14 persen lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan. perkembangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Tabel 2.4 memperlihatkan perbandingan data pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 137.071 jiwa, dan meningkat menjadi 143.096 jiwa pada tahun 2024. Jumlah perempuan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki

setiap tahunnya. Hal ini tercermin dari nilai sex ratio yaitu perbandingan jumlah laki-laki terhadap perempuan yang berada di bawah angka 100 selama periode tersebut. Sex ratio terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 96,35, dan sedikit meningkat menjadi 96,86 pada tahun 2024. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat sekitar 96 hingga 97 laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penduduk cenderung stabil, dengan pertumbuhan yang seimbang antara kedua jenis kelamin, meskipun perempuan tetap mendominasi secara jumlah. Kenaikan sex ratio yang perlahan juga dapat mengindikasikan perbaikan dalam keseimbangan gender dalam populasi.

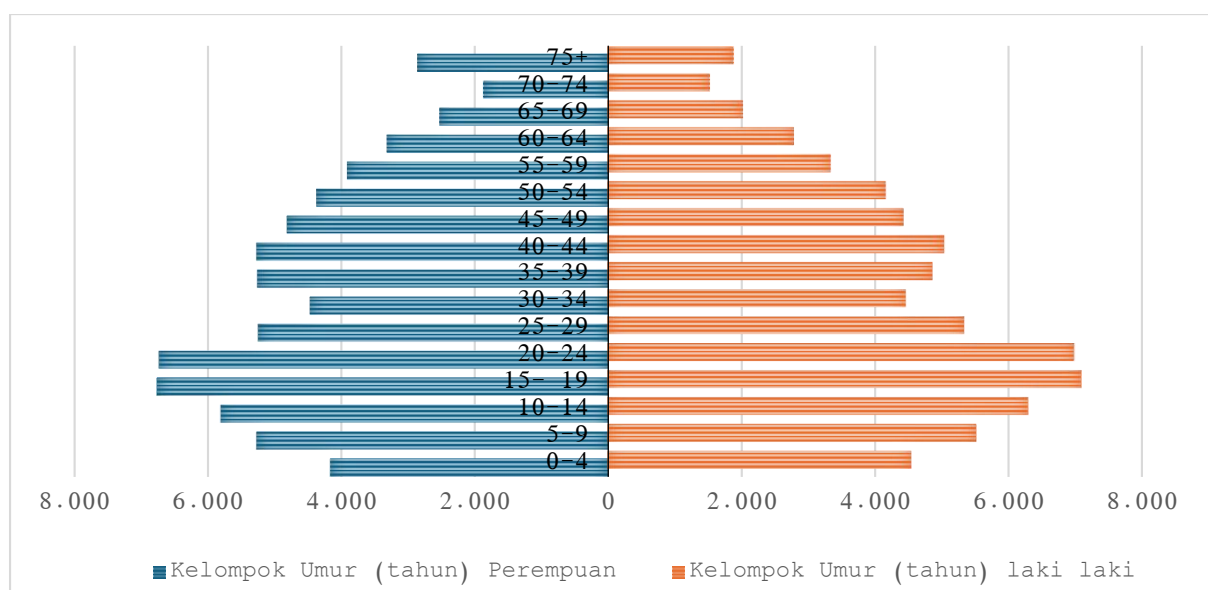
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

NO	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk			
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Seks Rasio
1	0-4	4.542	4.168	8.710	108,97
2	5-9	5.513	5.273	10.986	108,34
3	10-19	6.286	5.807	12.093	108,25
4	15- 19	7.083	6.761	13.844	104,76
5	20-24	6.976	6.730	13.706	103,66
6	25-29	5.334	5.247	10.581	101,66
7	30-34	4.456	4.472	8.928	99,64
8	35-39	4.857	5.260	10.117	92,34
9	40-44	5.034	5.271	10.305	95,5
10	45-49	4.425	4.815	9.240	91,9
11	50-54	4.156	4.376	8.532	94,97
12	55-59	3.331	3.915	7.246	85,08
13	60-64	2.784	3.322	6.106	83,8
14	65-69	2.020	2.531	4.551	79,81
15	70-74	1.526	1.878	3.404	81,26
16	75+	1.882	2.865	4.747	65,69
Jumlah		70.205	72.691	143.096	94,1019

Sumber Data: BPS Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Piramida penduduk pada Gambar 2.4. di bawah menunjukkan struktur demografis didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya usia 15–24 tahun, yang

mencerminkan potensi besar dalam pembangunan ekonomi. Kelompok usia muda juga cukup besar, menandakan adanya regenerasi penduduk. Sementara itu, jumlah perempuan lebih tinggi pada usia lanjut, mencerminkan harapan hidup yang lebih panjang. Secara keseluruhan, bentuk piramida mengarah pada struktur yang mulai stabil, dengan indikasi awal menuju penuaan penduduk di masa depan.



Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar 2024

Sumber Data: BPS Kab. Kepulauan Selayar, 2025

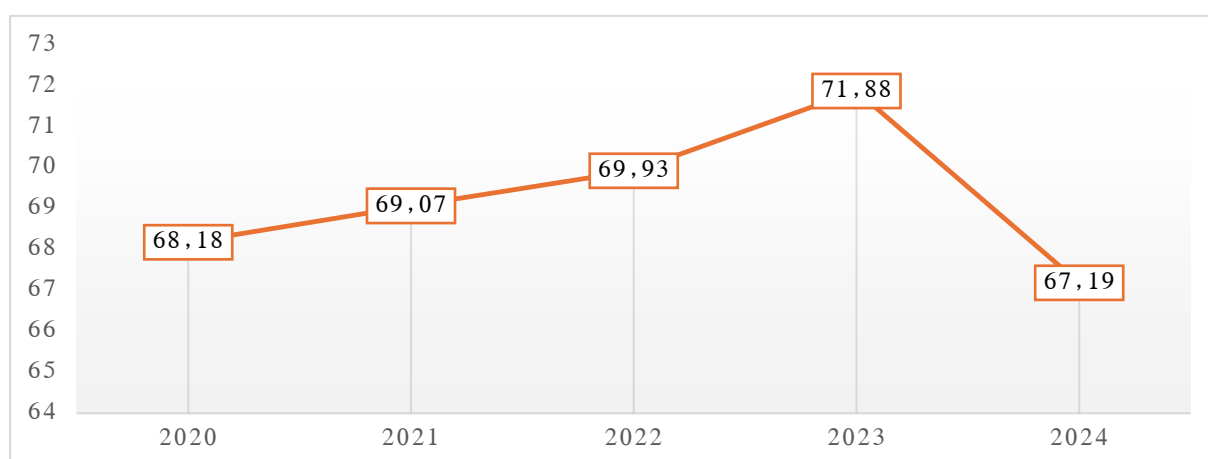
2.1.3. Aspek Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan meliputi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kualitas angkatan kerja, Kondisi aspek tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam pasar tenaga kerja dan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai dinamika ketenagakerjaan suatu wilayah.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, TPAK mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi tercatat sebesar 68,18 persen dan mengalami peningkatan berturut-turut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 71,88 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 67,19 persen. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, dan perubahan demografis. Peningkatan TPAK hingga tahun 2023 dipicu oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi. Peningkatan tersebut dapat dilihat secara detail pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: BPS Kab. Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah, karena mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, perkembangan TPT selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, namun tetap berada pada tingkat yang relatif rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan maupun tingkat nasional.

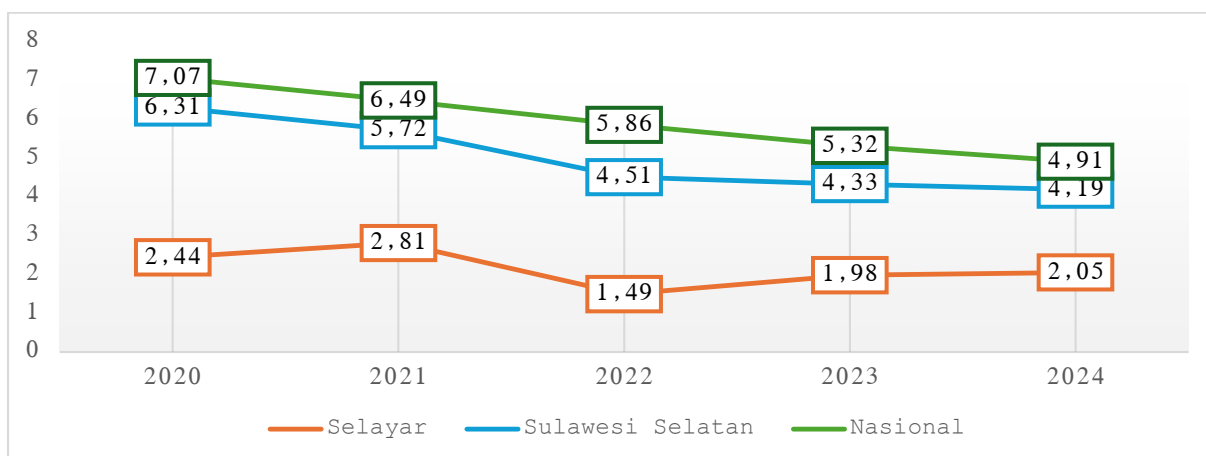
Pada tahun 2020, TPT di Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat sebesar 2,44 persen. Angka ini meningkat menjadi 2,81 persen pada tahun 2021, yang secara langsung

berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap pasar tenaga kerja. Pada tahun tersebut, sekitar 8.000 jiwa penduduk usia kerja terdampak pandemi, terdiri dari 121 jiwa yang menganggur, 658 jiwa yang sementara tidak bekerja, dan 7.221 jiwa yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi ini mencerminkan tekanan besar terhadap sektor ketenagakerjaan lokal.

Seiring dengan meredanya dampak pandemi, situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai membaik. Pada tahun 2022, jumlah penduduk terdampak menurun drastis menjadi hanya 199 jiwa. Tidak ada lagi pengangguran yang secara langsung disebabkan oleh pandemi, sementara jumlah penduduk yang sementara tidak bekerja turun menjadi 70 jiwa, dan yang mengalami pengurangan jam kerja tinggal 129 jiwa. Perbaikan ini turut mendorong penurunan signifikan pada TPT yang tercatat sebesar 1,49 persen—penurunan terbesar dalam lima tahun terakhir.

Namun, pada tahun 2023, TPT kembali mengalami kenaikan menjadi 1,98 persen. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan masa awal pandemi, dan mencerminkan pemulihan ekonomi yang cukup kuat. Pada tahun 2024, TPT sedikit meningkat menjadi 2,05 persen. Meski terjadi kenaikan, angka ini tetap menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Selayar relatif stabil dan lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain.

Sebagai perbandingan, TPT di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 6,31 persen pada tahun 2020 menjadi 4,19 persen pada tahun 2024. Sementara itu, TPT nasional juga menunjukkan tren penurunan dari 7,07 persen menjadi 4,91 persen pada periode yang sama. Dengan demikian, capaian TPT Kabupaten Kepulauan Selayar secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, seperti terlihat pada Gambar 2.6.

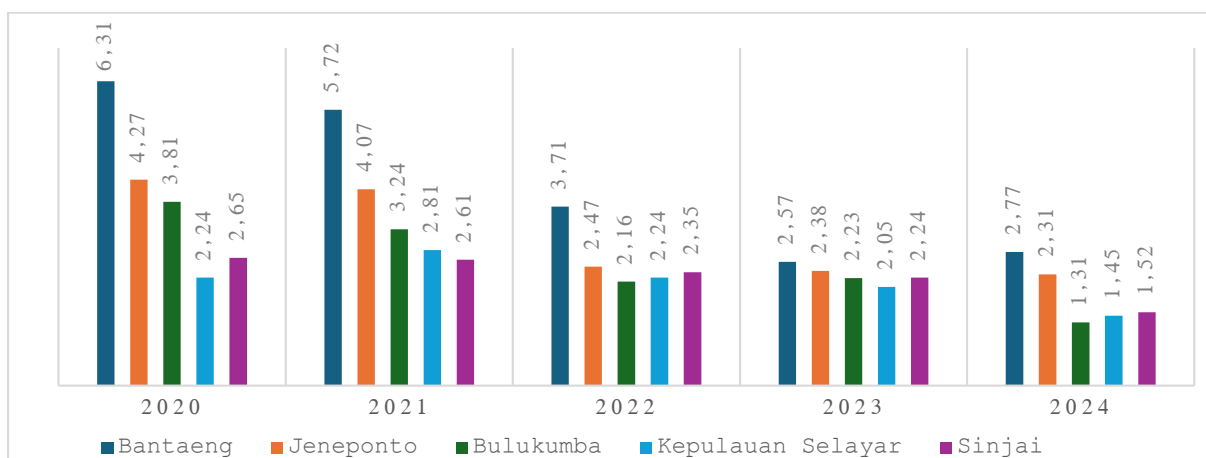


Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2025

Sebagai pembandingan dengan kabupaten sekitar, pada tahun 2023, capaian TPT Selayar menjadi yang terendah ketiga di antara kabupaten/kota dalam wilayah setara. Kabupaten Bulukumba mencatat TPT terendah sebesar 1,31 persen, sementara Kabupaten Bantaeng mencatat TPT tertinggi sebesar 2,77 persen. Posisi Kabupaten Kepulauan Selayar berada di tingkat menengah. Kabupaten Sinjai menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 2,65% pada 2020 menjadi 1,52% pada 2024, mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Bulukumba mengalami penurunan tajam hingga 1,31% pada 2024. Jeneponto mengalami penurunan dari 4,27% menjadi 2,31% selama periode tersebut. Sementara itu, Bantaeng mencatat TPT tertinggi di antara kabupaten sekitar, dengan puncak 6,31% pada 2020 dan menurun menjadi 2,77% pada 2024.

Dengan TPT sebesar 1,45% pada tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan performa yang relatif baik dibandingkan dengan kabupaten sekitar, serta jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini dapat menjadi indikator positif dalam konteks lokal, menunjukkan ketahanan ekonomi dan potensi pemulihan yang kuat di wilayah ini



Gambar 2.7 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Beberapa Kabupaten di Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2025

2.1.3.3. Kualitas Angkatan Kerja

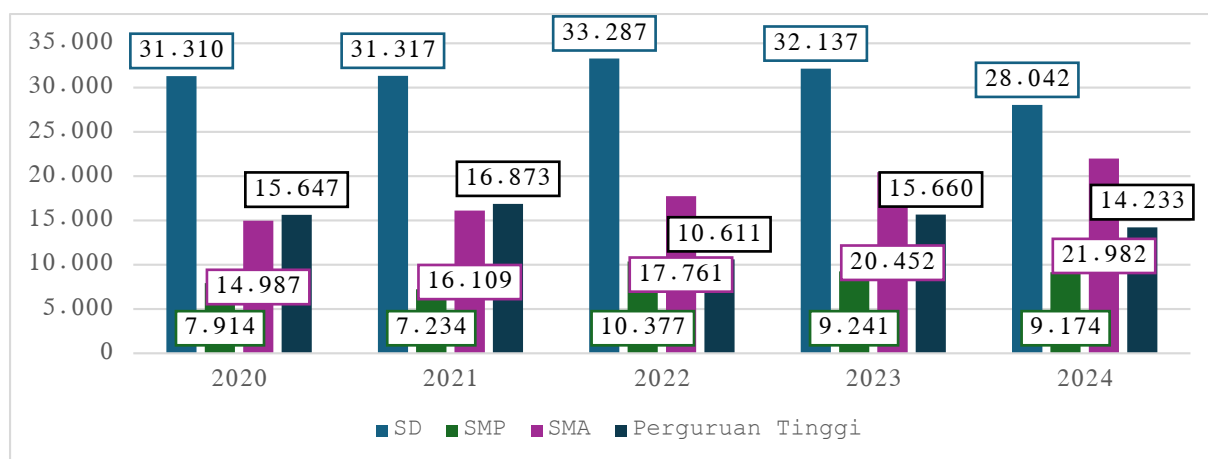
Kualitas angkatan kerja merujuk pada kemampuan, keterampilan, dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kualitas ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan, karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan produktivitas, daya saing, dan kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan pasar kerja. Selama periode 2020 hingga 2024, terdapat dinamika yang menarik dalam distribusi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perubahan signifikan dalam struktur angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Perubahan ini mencerminkan arah positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang sejalan dengan tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada Gambar 2.8 memperlihatkan data jumlah pekerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) mengalami penurunan dari 31.310 jiwa pada tahun 2020 menjadi 28.042 jiwa pada tahun 2024, atau turun sebesar 10,44%. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah karena meningkatnya akses pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan lanjutan.

Pekerja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) justru mengalami peningkatan sebesar 15,92%, dari 7.914 jiwa pada tahun 2020 menjadi 9.174 jiwa pada tahun 2024. Meskipun sempat fluktuatif, peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah pertama sebagai titik masuk ke dunia kerja.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada kelompok pekerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang naik dari 14.987 jiwa menjadi 21.982 jiwa, atau meningkat sebesar 46,67%. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan partisipasi tenaga kerja dengan pendidikan menengah, yang juga mendukung peningkatan IPM, khususnya pada dimensi rata-rata lama sekolah.

Sementara itu, pekerja lulusan perguruan tinggi mengalami penurunan dari 15.647 jiwa pada tahun 2020 menjadi 14.233 jiwa pada tahun 2024, atau turun sebesar 9,04%. Penurunan ini dapat mencerminkan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi di pasar kerja lokal, serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.



Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan dan Kab/Kota (Jiwa) 2020 - 2024

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2025

Tabel 2.6. memperlihatkan perbandingan data jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Selayar Selama periode lima tahun terakhir. Posisi Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang relatif stabil. Berdasarkan data dari BPS

Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah yang bekerja tercatat sebesar 68.156 jiwa pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 77.490 jiwa pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 73.431 jiwa.

Namun, secara keseluruhan, selama periode 2020 hingga 2024, jumlah tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat sebesar 7,74%. Sebagai pembandingan data Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren pertumbuhan tenaga kerja yang lebih konsisten dan signifikan. Jumlah tenaga kerja di provinsi ini meningkat dari 4.006.620 jiwa pada tahun 2020 menjadi 4.680.928 jiwa pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan sebesar 16,83% dalam lima tahun.

Tabel 2. 6 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024 (Jiwa)

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kepulauan Selayar	68.156	69.522	72.036	77.490	73.431
Prov Sulawesi Selatan	4.006.620	4.160.433	4.353.650	4.490.983	4.680.928

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2025

2.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

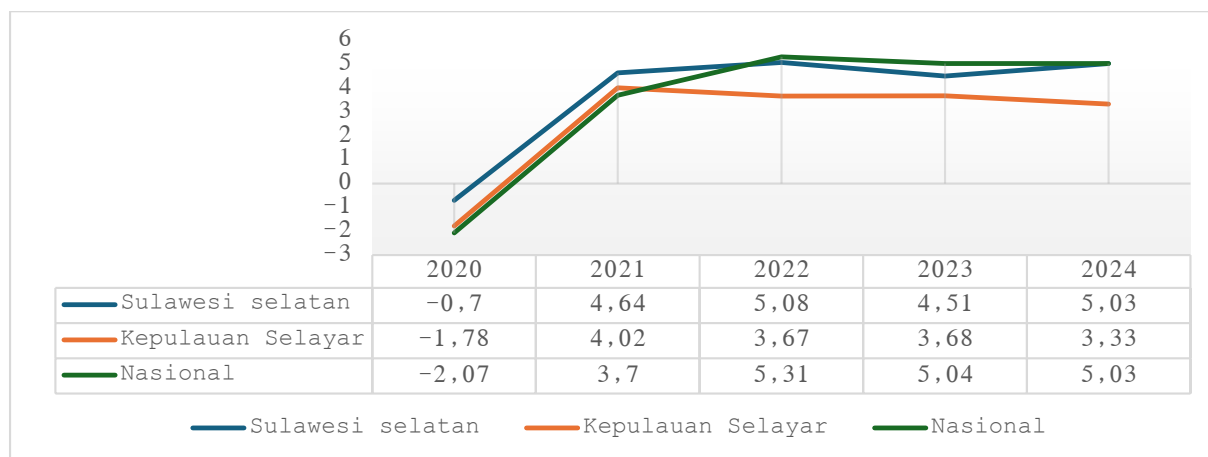
Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB perkapita, indeks gini, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut :

2.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ekonomi suatu daerah dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 1,78 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas pariwisata, perdagangan, dan perikanan sebagai

sektor unggulan daerah. Tahun 2021 mencatat pemulihan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 4,02 persen, didorong oleh pelonggaran pembatasan sosial, peningkatan mobilitas masyarakat, serta mulai pulihnya sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga.

Namun, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,67 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh, serta belum optimalnya pemulihan sektor produktif. Tahun 2023 menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 3,68 persen, yang mencerminkan stabilisasi ekonomi lokal meskipun belum mampu mengejar laju pertumbuhan provinsi dan nasional. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan kembali melambat menjadi 3,33 persen. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya investasi baru, ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi cuaca dan harga komoditas, serta tantangan dalam peningkatan produktivitas dan inovasi ekonomi lokal.



Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020 - 2024

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2025

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat nasional, posisi Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung berada di bawah rata-rata. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar -2,07% dan Sulawesi Selatan -0,7%, sementara Kabupaten Kepulauan Selayar -1,78%. Tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi konsisten berada di atas 4,5% hingga 5%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak pernah melampaui angka 4,1%. Kesenjangan ini

menunjukkan bahwa meskipun pemulihan ekonomi terjadi secara umum, Kabupaten Kepulauan Selayar masih menghadapi tantangan struktural dan sektoral yang berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya tergambar dari Gambar 2.9.

2.1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2023, nilai PDRB tercatat sebesar Rp4.047,38 miliar dan meningkat menjadi Rp4.182,33 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,33%, yang menunjukkan adanya pergerakan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai lapangan usaha, meskipun dengan variasi tingkat pertumbuhan antar sektor.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi sektor utama penyumbang terbesar terhadap total PDRB, dengan kontribusi sebesar 39,83% pada tahun 2024. Meskipun dominan, laju pertumbuhan sektor ini menunjukkan kecenderungan melambat. Setelah tumbuh sebesar 2,62% pada tahun 2022 dan 3,26% pada tahun 2023, pertumbuhan sektor ini menurun menjadi hanya 1,38% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Sektor konstruksi menempati posisi kedua dalam kontribusi terhadap PDRB, dengan pertumbuhan yang stabil dan mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Nilai sektor ini meningkat dari Rp661,28 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp760,50 miliar pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan berkisar antara 2% hingga 4%.

Sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan dinamika yang aktif, mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi dan distribusi barang di masyarakat. Pertumbuhan tertinggi sektor ini terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,86%, dan tetap kuat pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 5,66%.

Sektor administrasi pemerintahan juga memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi lokal. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, sektor ini pulih dengan pertumbuhan signifikan sebesar 8,06% pada tahun 2024,

mencerminkan peran belanja pemerintah yang kembali aktif dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Selain sektor-sektor utama tersebut, beberapa sektor lain menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang menarik. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tajam sebesar 11,67% pada tahun 2022, didorong oleh peningkatan mobilitas dan aktivitas logistik setelah pelonggaran pembatasan sosial. Sektor akomodasi dan makan minum juga mengalami lonjakan signifikan di tahun yang sama, seiring dengan pemulihan sektor pariwisata.

Sektor jasa lainnya menunjukkan akselerasi yang kuat pada tahun 2024, tumbuh sebesar 11,73%, menandakan ekspansi kegiatan ekonomi informal dan sektor kreatif yang mulai berkembang. Sementara itu, sektor-sektor seperti informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, dengan laju pertumbuhan tahunan berada pada kisaran 3–4%.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir mencerminkan struktur ekonomi yang mulai bergerak ke arah yang lebih beragam dan dinamis. Meskipun sektor primer masih dominan, kontribusi sektor sekunder dan tersier semakin menguat, menandakan arah pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara detail dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha/ Industri	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.501,47	1.550,58	1.591,13	1.643,05	1.665,77
B	Pertambangan dan Penggalian	29,55	31,6	34,02	35,22	35,2
C	Industri Pengolahan	118,44	124,49	133,48	138,53	146,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,48	5,71	5,76	6,21	6,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,51	5,51	5,74	5,75	5,79
F	Konstruksi	661,28	688,54	719,95	744,81	760,5

Kategori	Lapangan Usaha/ Industri	2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	322,96	340,01	366,73	384,71	406,5
H	Transportasi dan Pergudangan	77,05	84,74	94,63	99,21	101,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minurn	8,88	9,24	10,49	11,03	11,71
J	Informasi dan Komunikasi	139,5	141,47	143,78	153,05	160,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,68	44,97	45,17	46,46	47,59
L	Real Estat	64,47	65,27	65,74	68,95	71,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,57	0,57	0,58	0,6	0,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Walb	306,42	319,14	312,04	318,64	344,33
P	Jasa Pendidikan	233,89	244,96	257,68	268,07	282,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,21	87,76	95,22	100,31	109,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	19,84	20,99	21,64	22,77	25,44
Produk Domestik Regional Bruto		3.620,20	3.765,56	3.903,80	4.047,38	4.182,33

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2025

Selama periode 2020 hingga 2024 data tren pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kepulauan Selayar, mengalami fluktuasi namun tetap bergerak ke arah positif secara keseluruhan. Pada tahun 2021, PDRB mengalami lonjakan signifikan sebesar 38,21% dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan pemulihan ekonomi yang mulai menguat pasca pandemi. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar -15,34%, yang dipengaruhi oleh penyesuaian pasar akibat pandemi covid. Meski demikian, ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar kembali menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 6,76% di tahun 2023 dan 4,44% di tahun 2024.

Pada Tabel 2.8 memperlihatkan tren pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2024, sektor ini mencatat pertumbuhan nilai sebesar 32,52% sebesar Rp3.595,17 miliar, meningkat dari Rp2.712,90 miliar di tahun 2020.

Sektor konstruksi juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah. Dengan nilai PDRB yang meningkat dari Rp1.401,65 miliar menjadi Rp1.781,79 miliar, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 27,12%, menandakan adanya investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur dan fasilitas publik.

Begitu juga dengan sektor perdagangan besar dan eceran mencerminkan dinamika konsumsi masyarakat yang terus berkembang. Nilainya meningkat dari Rp499,08 miliar di tahun 2020 menjadi Rp692,55 miliar di tahun 2024, atau tumbuh sebesar 38,77%.

Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan paling tinggi di antara sektor-sektor utama, yakni sebesar 53,83%, dari Rp127,02 miliar menjadi Rp195,39 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik yang semakin intensif.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami pemulihan yang kuat, seiring dengan bangkitnya sektor pariwisata. Nilainya meningkat dari Rp14,32 miliar menjadi Rp20,33 miliar, atau tumbuh sebesar 41,97% selama lima tahun terakhir. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menunjukkan lonjakan yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 47,31%. Sektor administrasi pemerintahan, meskipun sempat mengalami fluktuasi, berhasil tumbuh dari Rp501,07 miliar menjadi Rp594,19 miliar, atau meningkat sebesar 18,58%. Sektor jasa pendidikan mencatat pertumbuhan yang stabil sebesar 27,43%, dari Rp371,18 miliar menjadi Rp473 miliar, seiring dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Sementara itu, sektor jasa lainnya menunjukkan ekspansi yang kuat, tumbuh sebesar 36,31%, dari Rp32,75 miliar menjadi Rp44,64 miliar. Secara detail terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 8 Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.712,90	2.913,58	3.268,73	3.504,83	3.595,17
B	Pertambangan dan Penggalian	59,7	64,26	71,11	75,72	75,34
C	Industri Pengolahan	179,4	191,83	207,73	224,94	244,51

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
D	Pengadaan Lis tnk dan Gas	5,54	5,88	5,99	6,43	6,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,98	7,07	7,45	7,55	7,59
F	Konstruksi	1.401,65	1.494,77	1.621,33	1.732,60	1.781,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	499,08	532,85	599,82	645,43	692,55
H	Transportasi dan Pergudangan	127,02	142,5	169,67	187,92	195,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,32	15,07	17,31	18,74	20,33
J	Informasi dan Komunikasi	160,6	165,03	167,74	178,76	188,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	86,62	89,01	95,55	100,94	106,01
L	Real Estat	93,31	94,78	96,44	102,09	107,39
M .N	Jasa Perusahaan	1,06	01,08	1,16	1,22	1,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	501,07	526,87	518,76	537,26	594,19
P	Jasa Pendidikan	371,18	397,82	420,18	437,27	473
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	139,66	157,9	173,45	184,75	205,73
R,S,T,U	Jasa Lainnya	32,75	35,1	37,63	39,81	44,64
Produk Domestik Regional Bruto		6.392,72	8.835,40	7.480,47	7.986,24	8.340,51

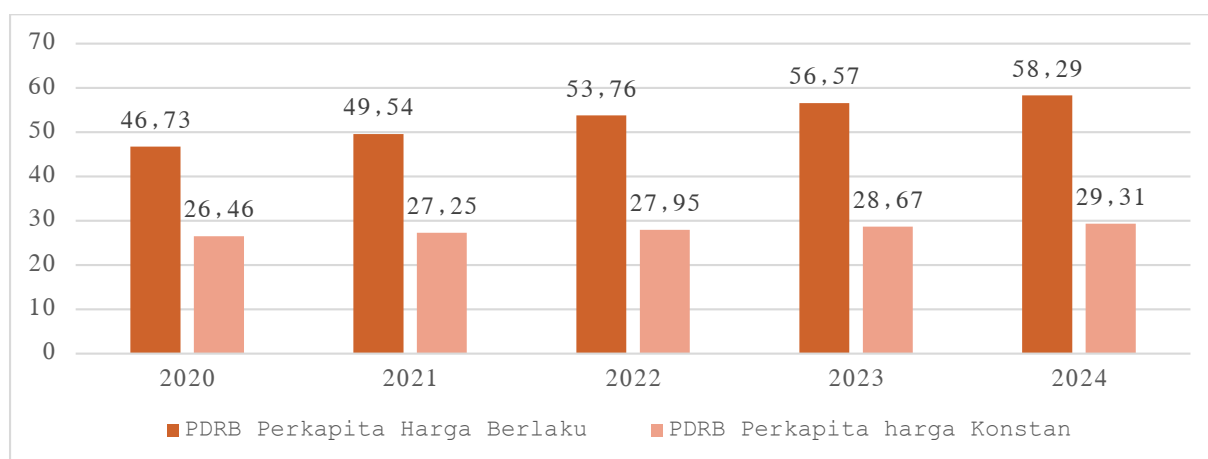
Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2025

2.1.4.3. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan

perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Namun, pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) seluruh lapangan usaha meningkat dari Rp6.392,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp7.480,47 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini turut mendorong peningkatan PDRB Perkapita, yang pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp49,54 juta, naik menjadi Rp53,76 juta pada tahun 2022, Rp56,57 juta pada tahun 2023, dan mencapai Rp58,29 juta pada tahun 2024. Pertumbuhan ini juga tercermin dari peningkatan ekonomi nominal, yang dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan harga pasar. Sementara itu, PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan yang menghilangkan efek inflasi juga menunjukkan tren positif, dari Rp26,46 juta pada tahun 2020 menjadi Rp29,31 juta pada tahun 2024. Pertumbuhan riil ini lebih stabil dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai peningkatan output ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, tren positif dalam PDRB Perkapita menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi. Berikut ini perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2020-2024.



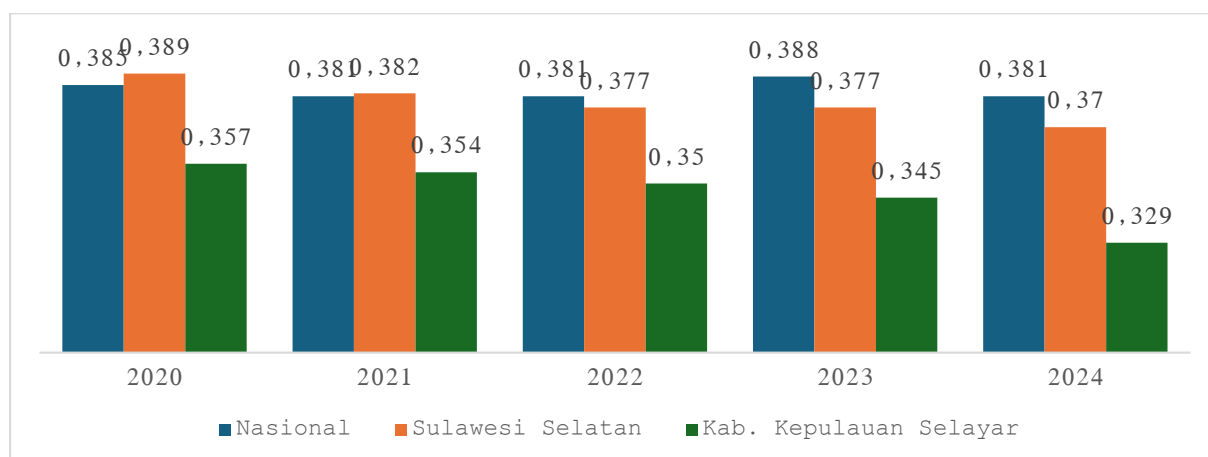
Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2025

2.1.4.4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Rasio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi.

Selama periode lima tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 0,357 dan terus menurun hingga mencapai 0,329 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan nilai Indeks Gini yang lebih rendah. Sebagai gambaran, Indeks Gini nasional pada tahun 2024 berada di angka 0,381, sementara Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan angka 0,370. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kepulauan Selayar relatif lebih kecil dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas.



Gambar 2.11 Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024

Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

Penurunan Indeks Gini di Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh perubahan struktur pengeluaran masyarakat. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita kurang dari 300 ribu rupiah mengalami penurunan dari 0,80 persen pada tahun 2021 menjadi 0,64 persen pada tahun 2023.

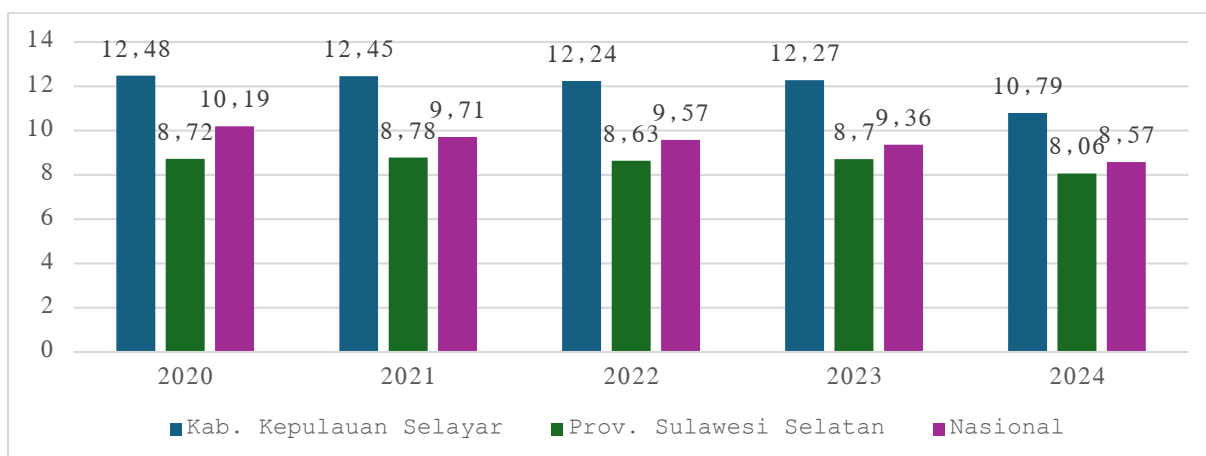
Sebaliknya, kelompok dengan pengeluaran lebih dari atau sama dengan 300 ribu rupiah mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya pergeseran ke arah kesejahteraan yang lebih baik. Hal tersebut dapat di lihat dari Gambar 2.11.

2.1.4.5. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 12,48 persen, dan menurun menjadi 10,79 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di daerah tersebut.

Namun, jika dilihat secara tahunan, terdapat sedikit fluktuasi. Misalnya, antara tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,03 poin, dari 12,24 persen menjadi 12,27 persen. Meski demikian, secara keseluruhan, rata-rata penurunan angka kemiskinan selama lima tahun terakhir mencapai 0,14 persen per tahun, yang setara dengan penurunan sekitar 117 jiwa per tahun. Salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan angka kemiskinan adalah peningkatan Garis Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Garis Kemiskinan menunjukkan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam lima tahun terakhir, garis kemiskinan terus meningkat, dari Rp406.762,- pada tahun 2021 menjadi Rp430.976,- pada tahun 2022, dan naik lagi menjadi Rp453.432,- pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya perubahan dalam standar hidup dan kebutuhan dasar masyarakat.

Meskipun menunjukkan tren penurunan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan secara nasional. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar berada di angka 10,79 persen, sementara Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan 8,06 persen dan nasional sebesar 8,57 persen. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar masih diatas tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Secara detail dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024

Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

2.1.4.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

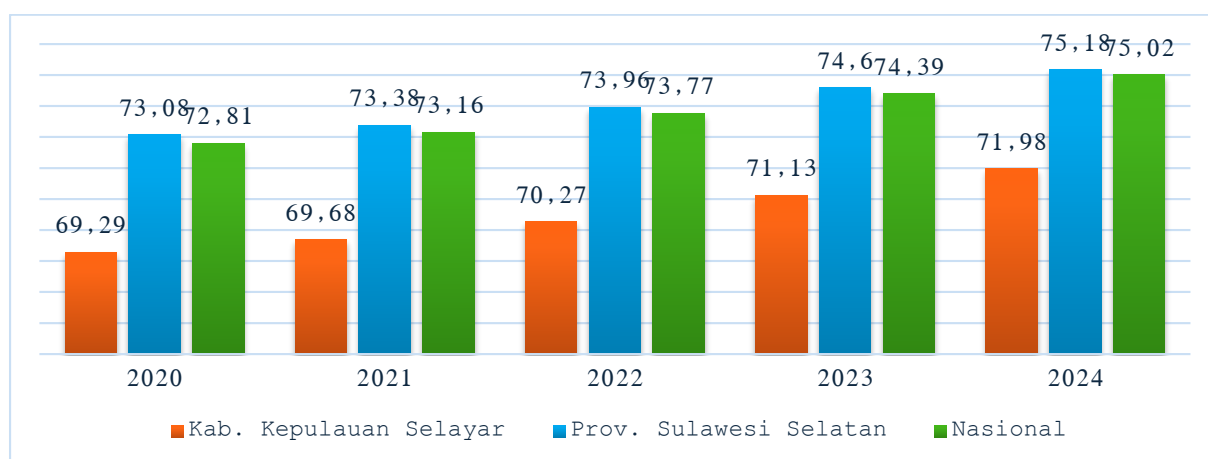
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek kesejahteraan lainnya. IPM dibentuk dari empat dimensi dasar, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita. Oleh karena itu, IPM menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh.

Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan IPM yang konsisten selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 tercatat sebesar 69,29, meningkat menjadi 69,68 pada tahun 2021, lalu naik lagi menjadi 70,27 pada tahun 2022, dan mencapai 71,13 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar melonjak ke angka 71,98, yang menandai bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar telah masuk dalam kategori tinggi (IPM \geq 70).

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk akses terhadap pendidikan yang lebih baik, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang mendukung standar hidup masyarakat. Upaya pemerintah daerah dalam memperluas layanan dasar dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah memberikan dampak positif terhadap capaian IPM.

Jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar memang masih berada di bawah rata-rata. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 75,18, sementara IPM nasional berada di angka 75,02. Meski demikian, laju peningkatan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar cukup signifikan dan menunjukkan arah pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2020–2024 masuk IPM ke kategori tinggi, menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan telah memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara detail dapat dilihat pada Gambar 2.13. di bawah ini.



Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024

Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

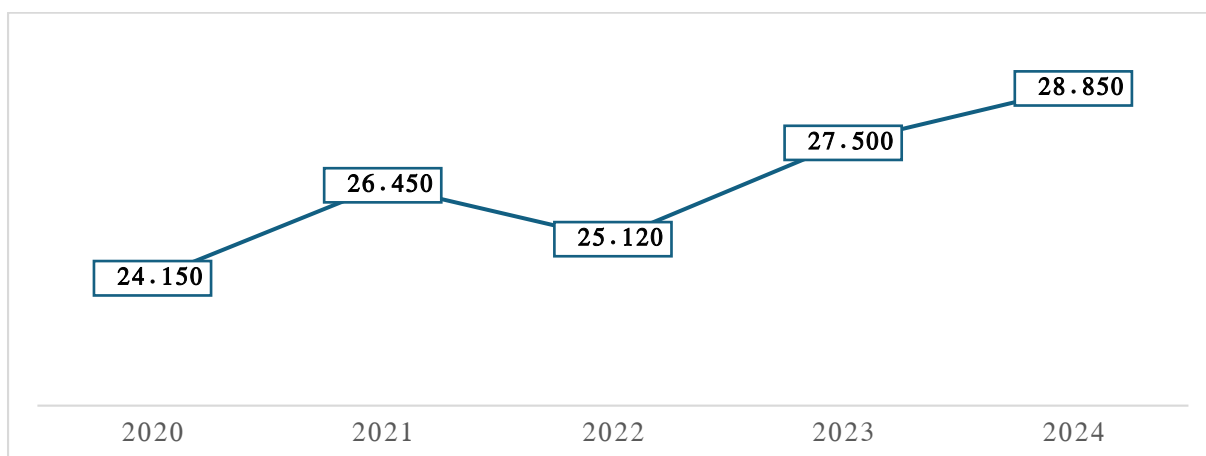
2.1.5. Produk Unggulan Daerah

2.1.5.1. Kelapa

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kelapa sebagai komoditas unggulan. Tanaman kelapa telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan luas areal lebih

dari 19.000 hektare, kelapa menyebar hampir di seluruh kecamatan, dan dikenal sebagai “emas hijau” oleh masyarakat setempat. Namun, dalam lima tahun terakhir (2020–2024), produksi kelapa menunjukkan tren fluktuatif.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar 2.14, jumlah produksi kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami tren yang cenderung meningkat selama periode tahun 2020 hingga 2024, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2020, produksi kelapa tercatat sebesar 24.150 ton dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 26.450 ton, menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 9,52%. Namun, pada tahun 2022 produksi mengalami penurunan menjadi 25.120 ton atau menurun sekitar 5,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca, serangan hama, atau kendala distribusi. Meski demikian, produksi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 27.500 ton dan terus naik hingga mencapai 28.850 ton pada tahun 2024. Kenaikan berkelanjutan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan sektor perkebunan kelapa, yang kemungkinan didukung oleh intervensi kebijakan atau peningkatan kapasitas petani. Secara umum, tren ini mencerminkan potensi besar komoditas kelapa sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah dalam bentuk dukungan teknis, akses pembiayaan, serta penguatan rantai pasok dan pengembangan produk turunan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di masa mendatang.



Gambar 2.14 Jumlah Produksi Kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024 (Ton)

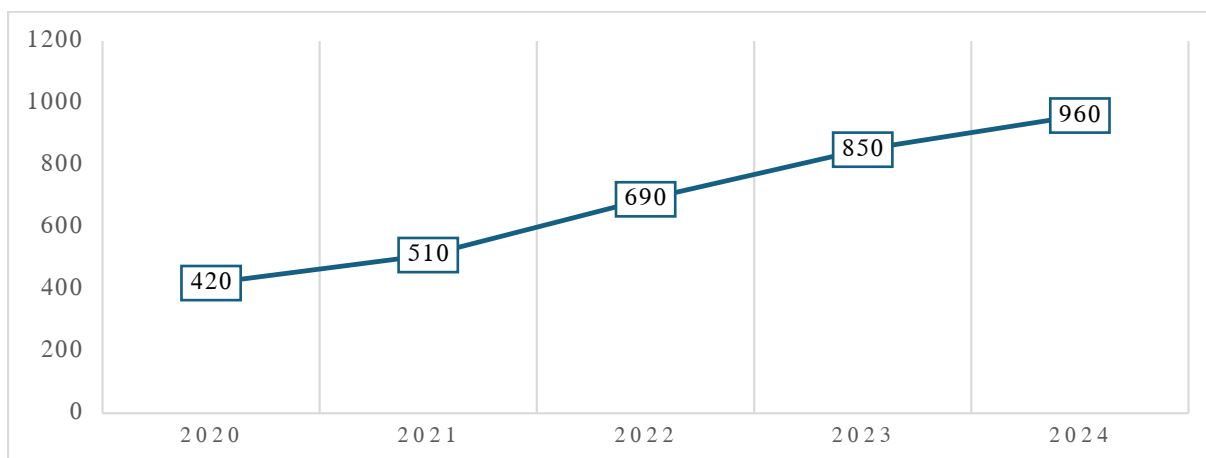
Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

Dari sisi hilirisasi, Kabupaten Kepulauan Selayar telah mulai memasuki tahap awal transformasi ekonomi berbasis inovasi. Riset bersama antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Universitas Hasanuddin menghasilkan gagasan hilirisasi kelapa menjadi produk bernilai tambah seperti VCO (*Virgin Coconut Oil*), *Cocopeat*, *Cocofiber*, serta produk turunan lain yang kini mulai dikembangkan oleh UMKM lokal.

Salah satu capaian penting adalah keberhasilan ekspor briket arang batok kelapa dari pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar ke pasar Eropa dan Timur Tengah pada tahun 2022, dengan volume mencapai 40 ton dan nilai transaksi ratusan juta rupiah. Meski sebagian besar industri VCO dan produk turunan masih berskala rumah tangga, namun inisiasi riset teknologi pengolahan telah membuka peluang besar untuk mendorong efisiensi dan perluasan pasar. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam industri pengolahan kelapa juga meningkat, terutama dalam produksi VCO, nata de coco, dan aneka pangan lokal berbasis kelapa. Kenaikan ini mencerminkan tumbuhnya permintaan pasar luar daerah dan membaiknya kapasitas hilirisasi industri lokal.

Berdasarkan gambar 2.15 nilai ekspor kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai ekspor tercatat sebesar 420 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 510 juta rupiah pada tahun 2021 atau naik sekitar 21,4%. Kenaikan ini terus berlanjut secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 690 juta rupiah (naik 35,3%), lalu

pada tahun 2023 mencapai 850 juta rupiah (naik 23,2%), dan akhirnya pada tahun 2024 sebesar 960 juta rupiah (naik 12,9%). Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor kelapa tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi produksi, tetapi juga berhasil memberikan kontribusi ekonomi melalui peningkatan nilai ekspor. Peningkatan ini dapat mencerminkan perbaikan dalam kualitas produk, perluasan pasar ekspor, serta adanya dukungan dari sisi kebijakan atau infrastruktur ekspor. Keberhasilan ini menjadi peluang besar bagi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terus mengembangkan komoditas kelapa sebagai sektor andalan, sekaligus mendorong penguatan daya saing produk kelapa di pasar internasional. Diperlukan strategi lanjutan berupa peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk olahan kelapa, serta promosi dan penetrasi pasar ekspor yang lebih luas agar pertumbuhan ini dapat berkelanjutan.



Gambar 2.15 Nilai Ekspor Kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024 (Juta Rupiah)

Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

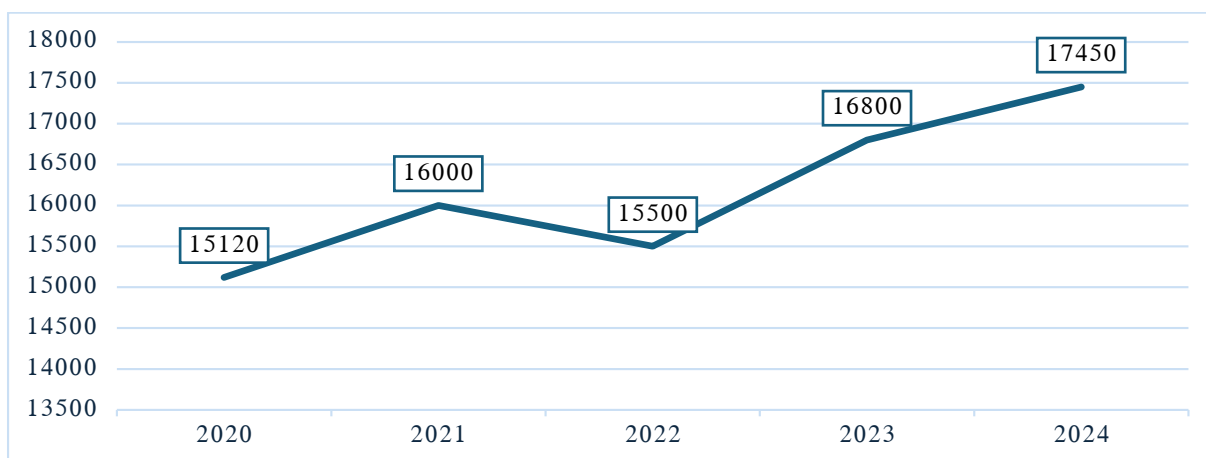
Namun, tantangan utama dalam pengembangan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak sedikit. Selain produktivitas lahan yang belum optimal, sebagian besar pohon kelapa berumur tua, dan tingkat adopsi teknologi pengolahan masih rendah. Keterbatasan infrastruktur pascapanen, peralatan, serta akses ke pasar ekspor juga menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, riset-riset lanjutan dibutuhkan, baik dari sisi varietas unggul, efisiensi sistem irigasi, mekanisasi pascapanen, hingga sertifikasi dan standar mutu produk ekspor.

Secara keseluruhan, pengembangan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan pendekatan ekosistem inovasi yang menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media), untuk menciptakan sistem produksi dan pengolahan kelapa yang berkelanjutan. Potensi kelapa bukan hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai pemicu tumbuhnya ekonomi kreatif dan industri hijau lokal. Dengan tata kelola inovasi yang terstruktur, kelapa dapat menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi Selayar menuju daerah maritim-agraris yang berdaya saing global.

2.1.5.2. Perikanan Tangkap

Kabupaten Kepulauan Selayar juga merupakan wilayah yang secara geografis terdiri dari gugusan pulau-pulau yang berada di selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, terutama dalam subsektor perikanan tangkap. Perairan di sekitar Kepulauan Selayar masuk dalam wilayah Laut Flores dan Selat Makassar yang dikenal kaya akan sumber daya ikan pelagis dan demersal, seperti tuna, cakalang, tongkol, kakap, kerapu, dan lain sebagainya.

Tren produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan secara keseluruhan. Dari data yang tersedia, produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 tercatat sebesar 15.120 ton. Angka ini merepresentasikan titik awal pada masa pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap seluruh sektor ekonomi, termasuk sektor perikanan. Pembatasan aktivitas masyarakat, keterbatasan distribusi bahan bakar dan es batu, serta menurunnya permintaan pasar saat itu menyebabkan sebagian besar nelayan mengurangi intensitas melaut.



Gambar 2.16 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024 (Ton)

Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

Memasuki tahun 2021, terdapat peningkatan produksi menjadi 16.000 ton atau naik sekitar 5,8% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi lokal dan regional, serta adanya penyesuaian dan adaptasi yang dilakukan oleh para nelayan terhadap kondisi pandemi. Pemerintah daerah juga telah menyalurkan bantuan alat tangkap dan memberikan subsidi bahan bakar dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nelayan, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya jumlah tangkapan ikan.

Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan produksi menjadi 15.500 ton. Penurunan sekitar 3,1% ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya selama musim angin timur. Cuaca buruk yang berkepanjangan menyebabkan penurunan frekuensi melaut oleh nelayan, serta meningkatnya risiko kerusakan pada alat tangkap tradisional. Selain itu, terdapat hambatan pada rantai distribusi hasil tangkapan yang turut menekan semangat produksi nelayan.

Tahun 2023 menjadi titik balik pemulihan produksi yang lebih kuat, dengan jumlah tangkapan melonjak menjadi 16.800 ton. Ini merupakan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbaikan infrastruktur perikanan seperti dermaga dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), peningkatan penggunaan alat tangkap yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta

adanya pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Dinas Perikanan bersama lembaga mitra. Tahun ini juga menandai awal integrasi teknologi digital dalam prediksi lokasi ikan berbasis satelit (Fishing Ground Information System), yang membantu nelayan dalam menentukan area penangkapan yang optimal.

Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan produksi perikanan tangkap mencapai puncaknya pada angka 17.450 ton. Capaian ini menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan produksi sebesar 3,9% dari tahun 2023 menunjukkan bahwa transformasi sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar berjalan ke arah yang positif. Pemerintah daerah semakin aktif mendorong penerapan konsep perikanan berkelanjutan, serta mendorong diversifikasi produk hasil tangkapan untuk meningkatkan nilai tambah.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, tren produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar memperlihatkan daya tahan dan resiliensi yang tinggi. Peningkatan produktivitas ini bukan hanya hasil dari faktor alamiah, tetapi juga mencerminkan peran aktif pemerintah, lembaga riset, dan masyarakat nelayan dalam berkolaborasi mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan terus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi besar untuk menjadikan perikanan tangkap sebagai motor penggerak utama pembangunan wilayah pesisir di masa depan.

Selama periode 2020 – 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan sektor perikanan tangkap sebagai produk unggulan daerah melalui dukungan riset dan inovasi. Kegiatan riset dan inovasi ini berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan aktivitas penangkapan ikan, sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi bagi masyarakat nelayan.

Salah satu riset penting yang telah dilakukan adalah kajian potensi dan sebaran sumber daya ikan pelagis dan demersal di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dilakukan bekerja sama dengan Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) dan LIPI (sekarang BRIN). Kajian ini menghasilkan peta sebaran wilayah penangkapan ikan

berbasis data oseanografi, suhu permukaan laut, dan *chlorophyll-a*, yang kemudian dikembangkan menjadi sistem informasi lokasi fishing ground berbasis satelit. Teknologi ini membantu nelayan dalam menentukan waktu dan lokasi penangkapan yang optimal, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan hasil tangkapan secara signifikan.

Di sisi inovasi alat tangkap, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan mendorong penerapan alat tangkap ramah lingkungan seperti *pancing ulur*, *bubu lipat*, dan *gill net* ukuran tertentu yang disesuaikan dengan ketentuan keberlanjutan. Inovasi ini juga dibarengi dengan pelatihan teknis kepada kelompok nelayan untuk penggunaan dan perawatan alat tangkap modern, termasuk sistem pendingin sederhana berbasis es blok efisien yang dikembangkan oleh mahasiswa KKN tematik dari universitas mitra. Inovasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan mutu ikan sejak di atas kapal hingga tiba di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Riset lain yang juga signifikan yaitu studi sosial-ekonomi rumah tangga nelayan yang dilakukan oleh perguruan tinggi lokal dan nasional. Studi ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi nelayan, mulai dari akses pembiayaan, fluktuasi harga ikan, hingga minimnya akses pasar digital. Berdasarkan hasil studi ini, pemerintah daerah bersama startup lokal mulai mendorong digitalisasi TPI melalui sistem pencatatan hasil tangkapan berbasis aplikasi, yang juga memungkinkan transparansi harga jual dan distribusi hasil tangkapan langsung ke pasar besar di Makassar dan sekitarnya.

Inovasi dalam aspek keberlanjutan juga menjadi sorotan penting, seperti uji coba teknologi *Vessel Monitoring System (VMS)* skala kecil pada kapal-kapal penangkap ikan di atas 5 GT. Tujuannya adalah memantau aktivitas penangkapan, menjaga kepatuhan terhadap zona konservasi, serta memperkuat tata kelola perikanan berbasis data. Inisiatif ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor antara BRIDA, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan mitra LSM kelautan.

Berbagai inovasi tersebut semakin diperkuat oleh penyusunan dokumen perencanaan dan *roadmap* pengembangan perikanan tangkap berbasis riset, yang disusun oleh BRIDA Kabupaten Kepulauan Selayar dan didukung oleh akademisi dari Universitas Hasanuddin. Dokumen ini menjadi acuan strategis untuk memastikan bahwa

pembangunan sektor perikanan tangkap berjalan secara berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan inklusif bagi masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah daerah, institusi riset, perguruan tinggi, dan masyarakat nelayan dalam bidang riset dan inovasi telah menghasilkan berbagai capaian positif. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah yang menjadi fondasi penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi biru Kabupaten Kepulauan Selayar di masa mendatang.

2.1.5.3. Jeruk Keprok

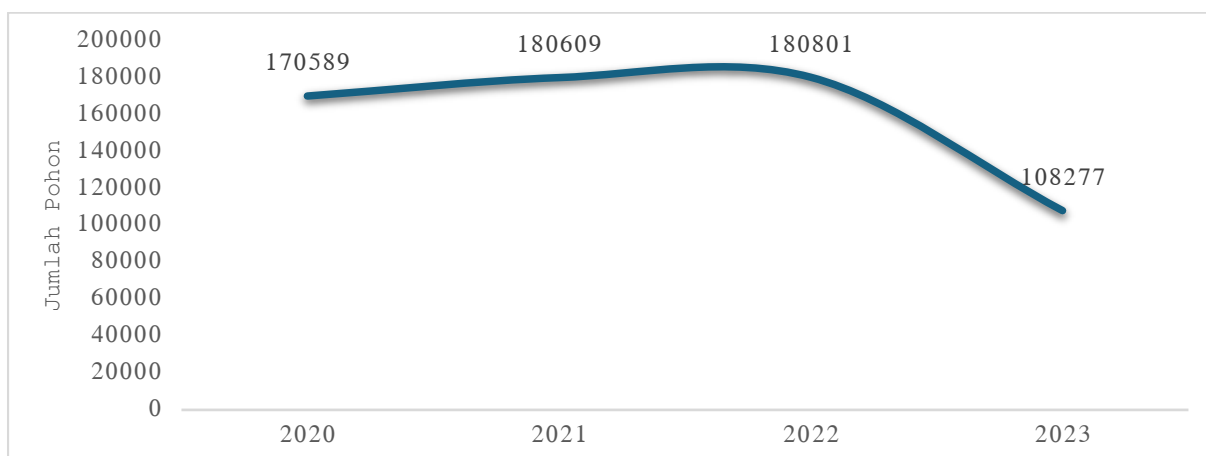
Jeruk keprok merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara historis telah tumbuh dan berkembang sejak tahun 1920-an. Berdasarkan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, tanaman ini unggul dari segi ketersediaan pasar, sarana dan prasarana produksi, serta kesesuaian dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar (Bank Indonesia & ISEI, 2020). Jeruk ini dikenal dengan ciri khasnya yang memiliki kombinasi rasa manis segar berpadu sedikit asam, aroma harum, serta bentuk buah bulat agak gepeng yang membedakannya dengan varietas jeruk lainnya.

Berdasarkan data BPS (2024), jumlah pohon jeruk keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 108.277 di tahun 2023, dengan total produksi mencapai 3.455 kuintal. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas jeruk keprok berada pada kisaran 0,03 kuintal per pohon. Komoditas ini tersebar di tiga kecamatan utama, yaitu Kecamatan Bontomatene sebagai wilayah dengan jumlah pohon dan produksi terbesar, kemudian disusul oleh Kecamatan Bontosikuyu dan Bontomanai. Jeruk ini memiliki permintaan yang cukup stabil, terutama di pasar Sulawesi Selatan dan luar daerah seperti Kalimantan dan Jawa. Selain itu, komoditas ini juga menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak rumah tangga petani di dataran tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar seperti Kecamatan Bontomate'ne, Bontomainai, dan Buki. Dengan demikian, pengembangan jeruk keprok ini juga berkontribusi langsung terhadap

penguatan ketahanan pangan lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Secara skala, komoditas ini memiliki skala budidaya yang cukup luas. Luas lahan potensial untuk pengembangan jeruk keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 6.750 hektare, dengan luas panen aktif tercatat sekitar 1.935 hektare (Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar & PPKP-LPPM Universitas Hasanuddin, 2023). Ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 4.815 hektare areal tanaman yang berada dalam fase belum produktif, atau dalam masa peremajaan dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi peningkatan produksi ke depan apabila sistem budidaya dan dukungan kelembagaan pertanian dapat dikelola secara efektif. Sejauh ini, pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk pendirian pusat pembibitan, bantuan mesin kultivator, dan bantuan pupuk (Bank Indonesia & ISEI, 2020).

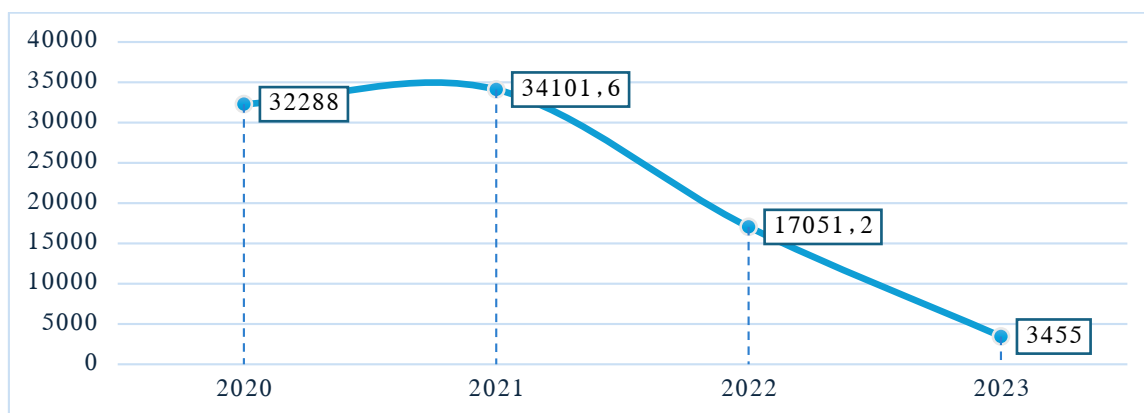
Meskipun demikian, pengembangan jeruk keprok masih menghadapi sejumlah tantangan yang belum teratasi. Salah satu tantangan utamanya adalah menurunnya kapasitas produksi akibat berkurangnya ketersediaan jumlah pohon yang produktif. Selama periode 2020-2022, jumlah pohon jeruk keprok cenderung meningkat, namun mengalami penurunan drastis di tahun 2023 (BPS, 2024). Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 170.589 pohon, kemudian menurun drastis menjadi 108.277 pohon di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunannya mencapai 40 persen. Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain usia tanaman yang sudah tua dan tidak diremajakan, penurunan tingkat kesuburan tanah akibat praktik budidaya yang tradisional, serangan hama dan penyakit, serta kurangnya perawatan intensif dari sisi pemupukan.



Gambar 2.17 Perkembangan Jeruk Keprok Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2023

Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

Penurunan jumlah pohon tersebut berimplikasi pada berkurangnya volume produksi jeruk keprok secara signifikan di dua tahun terakhir. Di tahun 2020, total produksi mencapai 32.288 kuintal. Namun, produksi menurun dua kali lipat pada tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan tajam sebesar 80 persen di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan penurunan kapasitas produksi yang cukup tinggi di sektor tanaman hortikultura selayar. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan petani, terutama bagi mereka yang bergantung pada jeruk sebagai sumber penghidupan utama. Selain itu, tren ini juga dapat menghambat upaya hilirisasi dan industrialisasi komoditas, karena volume bahan baku yang tidak stabil akan membuat investasi di sektor pengolahan menjadi kurang menarik.



Gambar 2 18 Perkembangan Volume Produksi Jeruk Keprok 2020 - 2023 (Kuintal)

Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

Tantangan lainnya adalah belum adanya hilirisasi atau pengolahan hasil panen ke dalam produk bernilai tambah (ISEI BI, 2020). Jeruk keprok masih dijual dalam bentuk asli tanpa melalui proses transformasi menjadi produk turunan seperti sari buah, minuman kemasan, atau minyak kilit jeruk, yang sebenarnya berpotensi memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, rantai tataniaga juga masih bersifat tradisional, dimana petani menjual langsung ke pedagang pengumpul tanpa kelembagaan yang kuat, membuat pola bisnis cenderung stagnan. Menurunnya kesuburan tanah akibat praktik budidaya tradisional juga merupakan tantangan utama petani yang berdampak langsung pada penurunan produktivitas pertanian jeruk keprok. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan benih unggul bersertifikat sehingga regenerasi tanaman seringkali tidak optimal dan menyebabkan penurunan pada kualitas buah. Serangan hama dan penyakit, khususnya penyakit blendok juga menjadi ancaman serius bagi kelangsungan produksi. Dari sisi ekonomi, akses petani jeruk terhadap pembiayaan dan modal usaha masih rendah. Sebagian besar petani belum terhubung dengan Lembaga keuangan formal dan masih mengandalkan modal pribadi, sehingga masih sulit untuk melakukan peremajaan tanaman atau investasi dalam sarana produksi modern.

Oleh karena itu, penguatan riset dan inovasi yang bersifat multidisipliner menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengembangan jeruk ini. Riset di bidang budidaya pertanian dapat menjadi fondasi utama, dengan focus pada peningkatan efisiensi

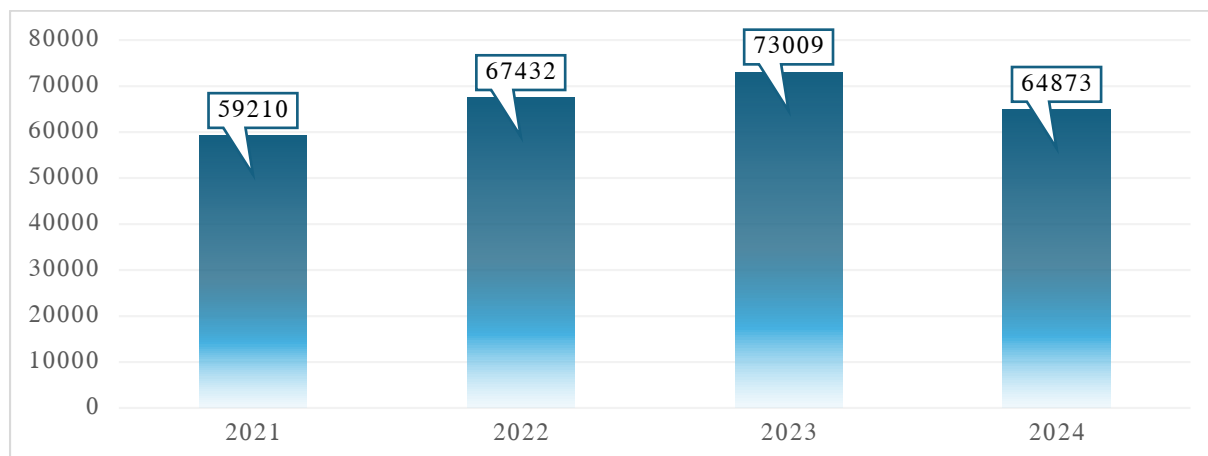
produksi melalui penggunaan benih unggul bersertifikat, penerapan Teknik budidaya modern yang ramah lingkungan, serta pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Selain itu, pendekatan riset juga perlu menysasar aspek hilirisasi dan pengolahan hasil panen untuk mendorong diversifikasi produk turunan yang sesuai dengan kapasitas daerah.

Pendekatan riset ekonomi dan kelembagaan juga penting dilakukan. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap akses permodalan petani, struktur pasar, serta model kemitraan dan kelembagaan tani yang efektif. Dukungan riset ini dapat memperkuat posisi petani dalam rantai pasok dan membuka peluang yang lebih besar dalam memasarkan jeruk keprok ke pasar yang lebih luas. Hasil riset-riset tersebut tidak hanya menjadi bahan akademik tetapi perlu ditransformasikan menjadi kebijakan berbasis bukti. Dengan fondasi tersebut, jeruk keprok memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan secara ekonomi maupun lingkungan.

2.1.5.4. Pariwisata

Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, terutama di sektor wisata bahari dan ekowisata. Salah satu objek wisata unggulan di daerah ini adalah Taman Nasional Takabonerate, yang memiliki luas wilayah sebesar 530.765 Ha sehingga menjadikannya sebagai salah satu kawasan konservasi laut terbesar di dunia. Taman nasional ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang terdiri atas karang, ikan, moluska, reptilia, krustasea, ekinodermata, makro alga, burung, maupun flora barat (BPS, 2025). Selain itu, terdapat berbagai Pantai indah yang juga menjadi objek wisata unggulan di daerah ini, seperti Pantai Punagaan, Pantai Pinang, Pantai Sunari, Pantai Karang Indah, Pantai Tamamelong, dan Pantai Bonetappalang yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata keluarga. Terdapat pula objek wisata budaya seperti Gong Nekara, Museum Nekara, dan Kampung Tua Bitombang yang merepresentasikan kekayaan tradisi daerah, warisan Sejarah, serta komunitas yang masih menjaga kearifan lokal sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis budaya dan edukasi. Di sisi lain, terdapat pula objek

wisata lainnya yang juga populer di daerah ini seperti Halona Waterboom, Puncak Tanadoang, dan Athalia Waterpark.



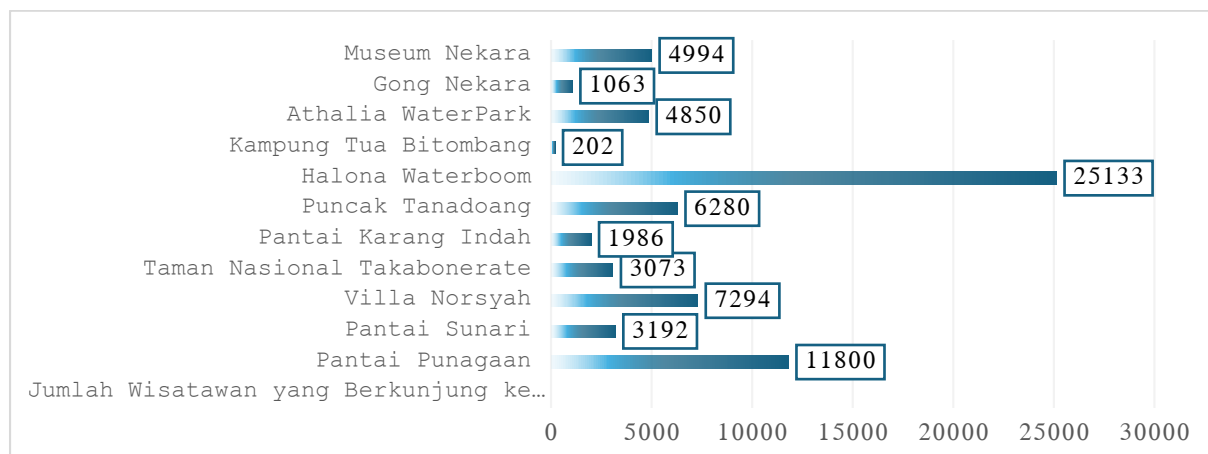
Gambar 2.19 Jumlah Wisatawan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 - 2024 (Orang)

Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

Secara keseluruhan, jumlah wisatawan yang berkunjung di berbagai objek wisata Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat sebesar 64.873 orang di tahun 2024. Selama tahun tersebut, TPK Tertinggi terjadi di bulan September (10,65%) sementara yang terendah di bulan Januari (3,77%). Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar 11,14 persen jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap beberapa aspek sistem pariwisata, terutama terkait pengelolaan destinasi wisata, aksesibilitas, dan promosi digital.

Jika dirinci berdasarkan objek wisata, sebagian besar wisatawan di tahun 2024 mengunjungi objek wisata Halona Waterboom, dengan jumlah kunjungan mencapai 25.133 orang atau sebesar 38,74 persen dari total wisatawan di kabupaten tersebut. Pantai Punagaan menempati urutan kedua sebagai destinasi terpopuler dengan jumlah kunjungan sebanyak 11.800 orang (18,19 persen), diikuti oleh Villa Norsyah yang mencatat sebesar 7.294 kunjungan. Sementara itu, destinasi unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar yakni Taman Nasional Takabonerate menerima kunjungan dari 2.634 wisatawan nusantara dan 439 wisatawan mancanegara. Meskipun jumlah kunjungannya relatif lebih rendah dibanding destinasi lain, Kawasan konservasi ini tetap memberikan

kontribusi yang signifikan dari sisi pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dengan estimasi penerimaan mencapai Rp 184, 64 juta selama tahun 2024.



Gambar 2 20 Jumlah Wisatawan Menurut Objek Wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar 2024 (Orang)

Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan 2025

Di sisi lain, data tahun 2024 juga menunjukkan bahwa terdapat 14.464 wisatawan yang menginap di hotel-hotel yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari jumlah tersebut, 394 orang merupakan wisatawan asing dan 14.070 lainnya merupakan wisatawan domestik (BPS, 2025). Rata-rata lama tinggalnya adalah sekitar 4,25 hari untuk wisatawan asing, dan 1,76 hari untuk wisatawan lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini lebih banyak dikunjungi untuk tujuan rekreasi singkat, atau sebagai bagian dari rangkaian perjalanan ke destinasi lain di Sulawesi Selatan. Kondisi ini memberikan peluang dalam pengembangan daya tarik wisata, terutama dalam hal membuat wisatawan tinggal dalam waktu yang lebih lama.

Selain akomodasi, sektor pendukung lainnya seperti kuliner juga menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung ekosistem pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2024, terdapat 165 rumah makan yang beroperasi di daerah ini (BPS, 2025). Keberadaan rumah makan tersebut memainkan peran penting dalam menunjang kenyamanan dan kepuasan wisatawan, sekaligus menjadi bagian integral dalam menciptakan pengalaman wisata yang lebih lengkap dan berkesan. Selain

sebagai tempat konsumsi, rumah makan juga dapat menjadi sarana promosi budaya lokal melalui penyajian kuliner khas Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini berpotensi meningkatkan lama tinggal wisatawan serta memperkuat daya tarik destinasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan daerah. Sektor ini mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui efek multiplier terhadap sektor lainnya seperti transportasi, UMKM, penginapan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan pariwisata tersebut akan mendorong munculnya peluang usaha baru, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mampu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja. Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat menjanjikan, terutama jika didukung dengan riset terapan dan inovasi dalam aspek perencanaan destinasi, pelatihan SDM, penguatan kelembagaan, dan promosi berbasis teknologi.

2.2 Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah

2.2.1. Penentuan Tema Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam rangka mendorong transformasi pembangunan daerah menuju ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, diperlukan perumusan tema-tema prioritas yang selaras dengan potensi unggulan dan tantangan struktural Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis tema prioritas ini disusun berdasarkan tujuh indikator strategis pembangunan, yaitu kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, perkembangan sektor pariwisata, dinamika industri ekonomi kreatif, produktivitas UMKM dan kelembagaan ekonomi daerah (koperasi dan BUMD), tingkat pengangguran terbuka, partisipasi angkatan kerja—khususnya perempuan, serta tingkat penguasaan IPTEK dan kapabilitas inovasi daerah.

Pendekatan ini menempatkan inovasi sebagai pengungkit utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah (kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok), memperluas dampak ekonomi pariwisata, serta mendorong keterlibatan pelaku

ekonomi lokal secara lebih produktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tema-tema prioritas yang diidentifikasi diharapkan mampu menjadi fondasi kebijakan dan program lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan sosial di Kabupaten Kepulauan Selayar pada periode 2025–2029.

2.2.1.1. Peningkatan Produktivitas Daerah Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu daerah kepulauan strategis di Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan pariwisata. Namun, tantangan produktivitas yang masih rendah di berbagai sektor ekonomi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan **Peningkatan Produktivitas untuk Mendukung Transformasi Ekonomi** sebagai salah satu tema prioritas pembangunan daerah.

Tema ini diarahkan untuk mempercepat pergeseran struktur ekonomi daerah dari sektor primer yang berorientasi komoditas mentah menuju sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan berbasis inovasi. Upaya ini ditempuh melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta optimalisasi rantai nilai komoditas unggulan daerah seperti perikanan tangkap, kelapa, dan pariwisata bahari.

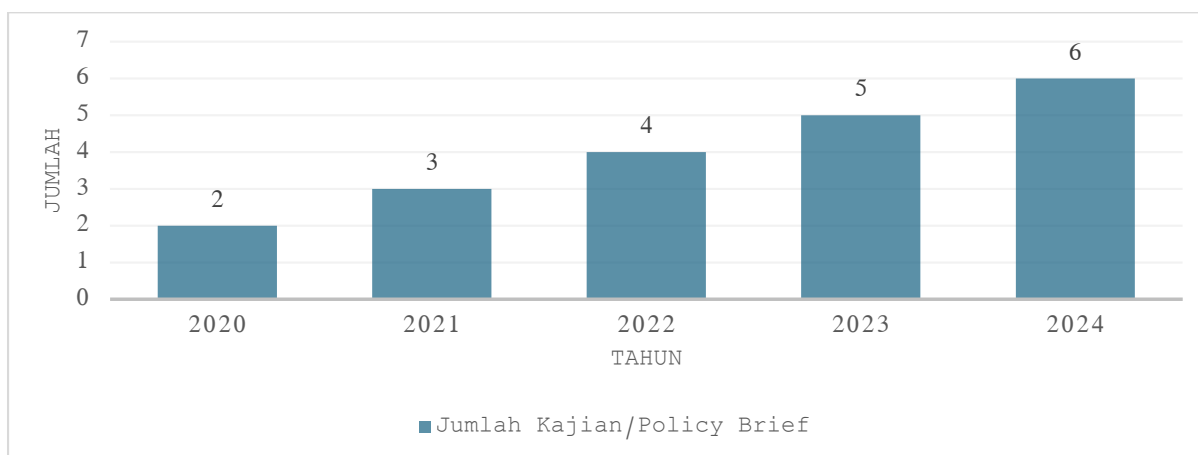
Transformasi ekonomi yang dicanangkan juga bertujuan memperluas lapangan kerja produktif, mendorong pertumbuhan UMKM dan start-up daerah, serta meningkatkan daya saing kawasan dengan memperkuat infrastruktur ekonomi dan konektivitas antar pulau. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal dan keterlibatan aktif masyarakat, tema ini diharapkan mampu menjadi fondasi menuju Selayar sebagai kawasan maritim yang produktif, tangguh, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. Tema prioritas ini dituangkan ke dalam Enam elemen dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dan Infrastruktur Riset serta Inovasi Daerah

Dalam mendukung transformasi ekonomi yang berbasis potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus mendorong reformasi kebijakan riset dan inovasi, terutama melalui penyediaan kajian dan *policy brief* sebagai instrumen penting perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Jumlah kajian dan *policy brief* yang dihasilkan menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan riset ke dalam siklus perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat, adaptif, dan produktif.

Selama periode 2020–2024, pemerintah daerah melalui Bapperida dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi penelitian, serta mitra pembangunan lainnya, telah menghasilkan sejumlah kajian strategis yang fokus pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti perikanan tangkap, pertanian kelapa, dan UMKM berbasis potensi lokal. Kajian ini telah digunakan dalam penyusunan RKPD, penajaman Renstra OPD, dan advokasi kebijakan lintas sektor.

Tahun demi tahun, tren penyusunan *policy brief* menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah maupun keragaman tematik. Hal ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan riset daerah dan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya kebijakan yang berbasis data, terutama dalam menjawab tantangan produktivitas dan pengembangan ekonomi lokal. Berikut gambaran data jumlah kajian/*policy brief* terkait produktifitas daerah periode tahun 2020-2024:



Gambar 2.21 Jumlah Kajian/Policy Brief Terkait Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020-2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan jumlah kajian/policy brief selama 2020–2024 menunjukkan bahwa reformasi kebijakan riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai bergerak menuju sistem yang lebih terstruktur dan responsif terhadap tantangan produktivitas daerah. Ke depan, penting untuk memperluas kolaborasi dengan pihak eksternal dan memastikan hasil kajian benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan, sebagai bagian dari ekosistem inovasi daerah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap transformasi ekonomi.

Sebagai langkah nyata dalam mendukung peningkatan produktivitas daerah berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan reformasi kebijakan riset dan inovasi melalui penguatan regulasi formal. Reformasi ini ditandai dengan disusunnya sejumlah **Peraturan Daerah (Perda)** dan **Peraturan Kepala Daerah (Perkada)** yang mendukung tata kelola riset dan inovasi sebagai pilar utama dalam transformasi ekonomi daerah.

Regulasi yang dibentuk selama periode 2020–2024 tidak hanya bersifat normatif, tetapi diarahkan untuk memperkuat tata kelola riset, membangun ekosistem inovasi daerah, serta mendorong keterlibatan multipihak dalam peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti perikanan tangkap, pertanian kelapa, dan pengembangan UMKM lokal. Penyusunan perda/perkada ini juga menjadi bentuk komitmen daerah dalam menjalankan prinsip *evidence-based policy*, dengan menjadikan riset dan inovasi sebagai landasan utama pengambilan keputusan.

Regulasi-regulasi tersebut telah mengatur berbagai aspek, mulai dari kelembagaan litbang, insentif inovasi, pengembangan klaster inovatif, hingga mekanisme integrasi hasil riset ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya regulasi yang memadai, peran riset dan inovasi semakin mendapat tempat yang strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Peningkatan jumlah Perda dan Perkada selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam membangun kerangka regulasi yang mendukung riset dan inovasi sebagai pengungkit produktivitas daerah. Reformasi kebijakan ini diharapkan terus berlanjut secara progresif, dengan

regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang berdampak nyata terhadap transformasi ekonomi lokal.

Tabel 2. 9 Jumlah Regulasi Terkait Riset & Inovasi Terkait Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

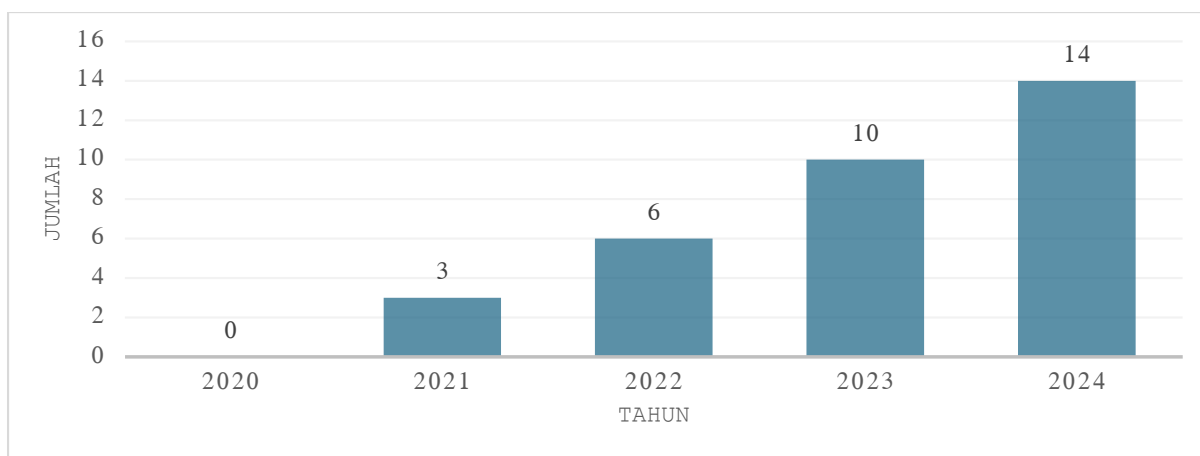
Tahun	Jumlah Perda/Perkada	Jenis Regulasi	Fokus/Substansi Utama	Keterangan
2020	0	–	–	Belum terdapat regulasi spesifik tentang riset dan inovasi
2021	1	Perkada No. 9/2021	Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan Daerah	Menjadi dasar pembentukan unit fungsional litbang
2022	1	Perda No. 3/2022	Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Mengatur ekosistem inovasi berbasis potensi unggulan
2023	2	- Perkada No. 4/2023- Perkada No. 7/2023	- Insentif dan Penghargaan Inovator Daerah- Integrasi Hasil Riset ke RKPD	Mendukung produktivitas sektor UMKM dan pertanian lokal
2024	2 (realisasi hingga Q3)	- Perda No. 2/2024- Perkada No. 5/2024	- Rencana Induk Riset dan Inovasi Daerah (RIRID)- Kemitraan Riset Daerah	Mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dalam mendorong produktivitas dan transformasi ekonomi berbasis pengetahuan, akses terhadap data riset dan inovasi yang terbuka dan terintegrasi menjadi prasyarat penting. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui reformasi kebijakan riset telah memfokuskan perhatian pada penataan basis data riset dan inovasi yang dapat diakses secara digital melalui satu platform resmi pemerintah daerah.

Upaya penataan ini bertujuan untuk menjadikan data riset sebagai referensi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta mempercepat difusi inovasi daerah. Dataset yang dikembangkan mencakup hasil riset terkait sektor unggulan, kajian produktivitas, inovasi teknologi tepat guna, serta hasil evaluasi program litbang.

Sejak tahun 2021, Pemda mulai mengembangkan sistem digital berbasis web untuk menyimpan dan mempublikasikan dataset riset. Inisiatif ini terus ditingkatkan melalui pemetaan data dari berbagai OPD, integrasi dengan sistem perencanaan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan mitra riset. Hingga tahun 2024, jumlah dataset yang terunggah terus meningkat, menunjukkan progres positif dalam penguatan infrastruktur data riset dan inovasi yang terbuka dan terstandarisasi. Berikut gambaran dataset riset terkait produktivitas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode tahun 2020-2024:



Gambar 2.22 Jumlah Dataset Riset/Inovasi Terkait Produktivitas Daerah yang Terunggah dalam Platform Digital Resmi Kabupaten Kepulauan Selayar 2020-2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penguatan pada aspek penataan basis data riset melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi (Sisfo) yang mendukung dokumentasi, pemanfaatan, serta diseminasi hasil riset dan inovasi yang relevan dengan sektor-sektor produktif daerah. Keberadaan sistem informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*), memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memperluas akses publik terhadap informasi pembangunan daerah.

Sejak 2021, Pemda mulai merintis pengembangan Sisfo berbasis web yang fokus pada riset dan inovasi sektor unggulan. Pengembangan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari digitalisasi data manual, integrasi sistem dengan OPD teknis, hingga peluncuran dashboard publik pada tahun 2023. Tahun 2024 ditandai dengan penguatan

fitur analitik dan interoperabilitas sistem agar mendukung perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika produktivitas daerah. Berikut tabel yang menunjukkan bahwa sistem informasi mulai berkembang secara sektoral dan mengarah pada integrasi lintas sektor di tahun terakhir.

Tabel 2. 10 Sistem Informasi Tematik Aktif Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Status Sistem Informasi	Nama/Fitur Utama	Keterangan
2020	Belum tersedia	–	Data riset masih tersimpan secara manual dalam unit litbang
2021	Dalam pengembangan	Prototype awal basis data riset sektor unggulan	Inisiasi digitalisasi dan pemetaan data produktivitas oleh Bapperida
2022	Uji coba internal	Sisfo-RIDA (Riset dan Inovasi Daerah)	Berisi data riset klaster kelapa, perikanan, dan UMKM
2023	Beroperasi terbatas	Dashboard Riset & Inovasi Selayar (DRIS)	Terintegrasi dengan perencanaan daerah dan tersedia untuk akses OPD
2024	Beroperasi penuh	DRIS + Modul Analitik Produktivitas	Dilengkapi fitur peta tematik, grafik tren, dan akses publik terbatas

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas daerah berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi, pembangunan infrastruktur dasar riset dan inovasi menjadi langkah strategis yang terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu bentuk nyata dari penguatan tersebut adalah pengadaan dan pengembangan laboratorium serta kelengkapan alat riset yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor unggulan seperti perikanan, kelautan, pertanian kelapa, dan pengolahan hasil laut.

Pada awal periode 2020, infrastruktur riset masih sangat terbatas dan belum mampu menjawab kebutuhan teknis pelaku riset maupun pelaku usaha lokal. Seiring berjalannya waktu, berbagai laboratorium mulai dikembangkan, baik di lingkup pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun melalui kerja sama dengan mitra eksternal. Investasi dilakukan tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga pengadaan alat analisis, laboratorium keliling, serta fasilitas pengolahan berbasis teknologi tepat guna.

Hingga tahun 2024, jumlah laboratorium riset dan inovasi beserta kelengkapan alatnya menunjukkan tren peningkatan yang positif. Peran laboratorium ini tidak hanya terbatas untuk kegiatan penelitian, tetapi juga sebagai pusat pelatihan, inkubasi, dan pengujian produk inovasi lokal yang bertujuan langsung untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan pelaku ekonomi daerah.

Tabel 2. 11 Jumlah Laboratorium dan Kelengkapan Alat
Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

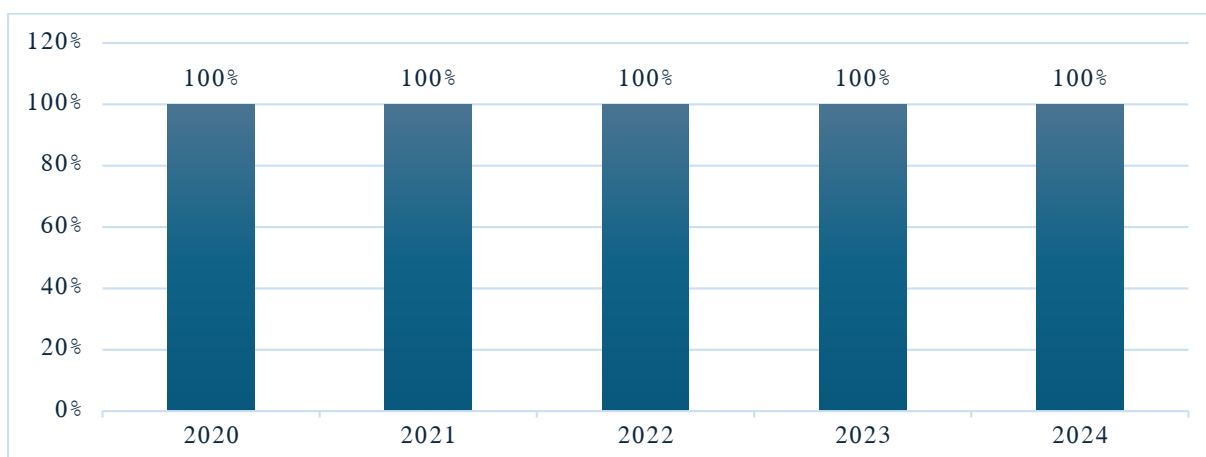
Tahun	Jumlah Lab & Unit Fasilitas	Jenis/Spesifikasi Utama	Keterangan
2020	1 unit (laboratorium mini)	Laboratorium kelautan dasar (manual)	Belum memiliki alat modern, berfungsi terbatas di lingkup Bapperida
2021	2 unit	Penambahan alat uji mutu sederhana produk hasil laut	Dikelola bersama Dinas Kelautan dan mitra akademik
2022	3 unit	Pengembangan laboratorium pengolahan kelapa dan UMKM	Termasuk alat pengering, pengepakan, dan pengujian kualitas produk
2023	5 unit	- Laboratorium inovasi kelautan- Lab mini pertanian & pasca panen	Didukung DAK fisik & kerja sama dengan politeknik bidang perikanan
2024	6 unit (hingga Q3)	- Alat digitalisasi laboratorium- Unit laboratorium keliling (mobile lab)	Digunakan untuk edukasi dan uji lapangan produk inovasi masyarakat

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dalam rangka memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang mendukung peningkatan produktivitas daerah, ketersediaan akses internet yang andal pada lembaga-lembaga riset menjadi komponen krusial. Akses internet bukan hanya menjadi sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga memungkinkan integrasi data riset, kolaborasi daring, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses inovasi dan diseminasi hasil penelitian.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai memetakan kebutuhan konektivitas di lembaga-lembaga riset lokal, baik yang berada di bawah naungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun mitra riset lainnya. Awalnya, keterbatasan infrastruktur jaringan menjadi kendala besar, terutama bagi unit riset yang berada di wilayah kepulauan atau pinggiran.

Namun dengan dukungan program nasional perluasan jaringan digital, sinergi antar-OPD, serta penguatan sistem informasi riset daerah, cakupan internet pada lembaga riset mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini mendukung pengembangan riset produktivitas di sektor perikanan tangkap, pertanian kelapa, pengolahan hasil laut, serta pengembangan UMKM berbasis inovasi lokal. Berikut gambaran cakupan internet pada lembaga riset di Kabupaten Kepulauan Selayar periode tahun 2020-2024:



Gambar 2.23 Cakupan Internet pada Lembaga Riset Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan produktivitas daerah berbasis keanekaragaman hayati, Kebun Raya Gojang di Kabupaten Kepulauan Selayar telah dikembangkan tidak hanya sebagai ruang konservasi, tetapi juga sebagai pusat riset dan inovasi lokal. Dalam kerangka prioritas “Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi”, keberadaan program riset di Kebun Raya menjadi indikator penting dalam menciptakan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya hayati lokal, khususnya tanaman potensial seperti kelapa, tanaman obat, dan pangan lokal.

Pada awal periode 2020, belum tersedia program riset terstruktur di Kebun Raya Gojang. Namun mulai tahun 2021, Pemerintah Daerah melalui Bapperida bersama mitra akademik dan komunitas konservasi mulai merintis program riset eksploratif dan pendataan jenis tanaman lokal. Upaya ini berkembang ke arah penelitian terapan, seperti budidaya kelapa varietas unggul, pengembangan biofarmaka, serta identifikasi potensi ekonomi dari spesies endemik.

Seiring dengan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas dasar riset, dan kemitraan dengan perguruan tinggi, ketersediaan program riset di Kebun Raya Gojang terus meningkat. Program ini menjadi bagian dari ekosistem inovasi daerah yang tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat produktivitas sektor pertanian, kesehatan tradisional, dan wisata edukatif berbasis riset.

Tabel 2. 12 Ketersediaan Program Riset di Kebun Raya Gojang Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Status Program Riset	Jenis Kegiatan Riset Utama	Keterangan
2020	Belum tersedia	–	Kebun Raya Gojang masih berfungsi sebagai ruang konservasi dasar
2021	Riset awal eksploratif	- Inventarisasi tumbuhan lokal- Pengumpulan data potensi tanaman kelapa	Dilakukan oleh tim Bapperida dan komunitas pelestari lokal
2022	Program riset tematik dimulai	- Budidaya kelapa unggul lokal- Pengembangan tanaman obat (biofarmaka)	Kemitraan dengan perguruan tinggi mitra (UIN Alauddin, Unhas)

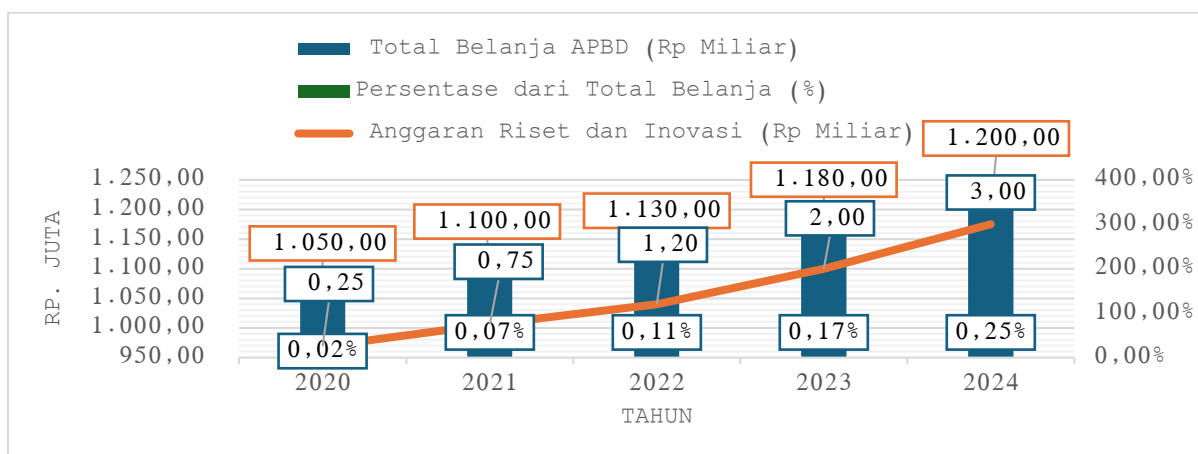
Tahun	Status Program Riset	Jenis Kegiatan Riset Utama	Keterangan
2023	Penguatan riset terapan	- Pemuliaan kelapa produktivitas tinggi- Kajian potensi ekonomi tanaman endemik	Didukung kegiatan magang/PKL mahasiswa dan pelatihan teknis lokal
2024	Riset berkelanjutan dan terbuka	- Pengembangan peta varietas tanaman- Riset wisata edukasi dan konservasi	Platform data digital riset mulai dibangun; sinergi dengan program RPJPD

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dalam konteks peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi, alokasi anggaran riset dan inovasi menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong penciptaan nilai tambah di berbagai sektor unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan sebagian dari belanja daerah untuk mendukung kegiatan riset terapan dan inovasi lokal, khususnya di sektor perikanan, pertanian, dan UMKM berbasis sumber daya lokal.

Pada tahun 2020, alokasi anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi masih bersifat terbatas dan belum menjadi prioritas eksplisit dalam struktur belanja daerah. Namun sejak tahun 2021, seiring dengan penguatan peran Bapperida dan dukungan kebijakan nasional terkait penguatan ekosistem riset, alokasi anggaran mulai meningkat. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, ditandai dengan peluncuran program riset strategis daerah dan dukungan pendanaan terhadap kemitraan riset dengan perguruan tinggi serta lembaga swasta.

Anggaran ini tidak hanya dialokasikan untuk kegiatan penelitian, tetapi juga untuk pengembangan laboratorium dasar, digitalisasi hasil riset, dan penyusunan regulasi berbasis kajian ilmiah. Ini mencerminkan transisi dari pendekatan administratif ke arah kebijakan berbasis pengetahuan (*evidence-based policy*), yang sangat penting dalam mendorong produktivitas daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2 24 Persentase dan Nominal Anggaran Riset terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Kepulauan Selayar 2020-2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dalam upaya mendorong produktivitas daerah berbasis inovasi, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) menjadi bagian penting dari strategi transformasi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. KI seperti paten, hak cipta, merek, dan desain industri tidak hanya mencerminkan kapasitas kreatif dan teknologi lokal, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai tambah dan keunggulan kompetitif daerah.

Pada tahun 2020, belum tercatat adanya kekayaan intelektual yang diajukan secara formal oleh individu, komunitas, maupun lembaga pemerintah daerah. Namun seiring dengan meningkatnya literasi inovasi, pelatihan hak kekayaan intelektual, dan kolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham dan perguruan tinggi, jumlah ide dan inovasi yang didaftarkan mulai meningkat secara bertahap.

Inovasi yang tercatat berasal dari berbagai sektor unggulan daerah, seperti pengolahan hasil perikanan, teknologi sederhana pertanian (khususnya kelapa), dan produk UMKM berbasis kearifan lokal. Pada tahun 2023, Pemda mulai memberikan insentif dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku lokal. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah proposal paten sederhana, terutama dari kelompok inovator muda dan lembaga riset daerah.

Selama periode 2020–2024, jumlah ide dan inovasi yang dilindungi melalui mekanisme kekayaan intelektual di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren positif. Kenaikan dari 0 ke 12 KI tercatat mencerminkan tumbuhnya ekosistem riset dan

inovasi yang didorong oleh fasilitasi pemerintah daerah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kebutuhan komersialisasi produk unggulan lokal. Inisiatif ini menjadi kunci penting dalam menghubungkan kreativitas dengan produktivitas, sekaligus memperkuat posisi daya saing ekonomi daerah di era transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Tabel 2. 13 Jumlah Ide/Paten/Inovasi Terkait Komoditas Unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Ide/Inovasi Tercatat	Jenis Kekayaan Intelektual	Sektor Terkait	Keterangan
2020	0	–	–	Belum ada program fasilitasi dan pelatihan KI
2021	2	1 Merek lokal UMKM, 1 Hak Cipta	Pengolahan rumput laut dan label produk lokal	Didampingi oleh Bapperida dan Disperindagkop
2022	4	2 Paten Sederhana, 2 Hak Cipta	Alat pasca panen kelapa, kemasan produk UMKM	Mulai kolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel
2023	7	3 Paten Sederhana, 3 Merek, 1 Desain Industri	Inovasi teknologi tepat guna, olahan perikanan, kemasan herbal	Penerima manfaat insentif pemda dan inkubasi inovasi
2024	12	6 Paten Sederhana, 4 Merek, 2 Hak Cipta	Produk turunan kelapa, alat tangkap ramah lingkungan, agroeduwisata	Terjadi peningkatan signifikan pasca peluncuran Klinik KI Daerah

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2) Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Daerah

Transformasi ekonomi berbasis peningkatan produktivitas daerah memerlukan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam ekosistem riset dan inovasi. Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap membangun kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama riset dengan berbagai institusi, baik dari kalangan akademisi, dunia usaha, komunitas inovator, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Pada tahun 2020, kolaborasi masih bersifat informal dan sporadis, terbatas pada pendampingan teknis dan kunjungan lapangan. Namun mulai tahun 2021, Pemkab Selayar mulai menyusun skema kerja sama riset secara lebih terstruktur, ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi lokal dan regional. Fokus utama kolaborasi ini adalah peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti kelautan, pertanian, dan UMKM.

Tahun 2022 hingga 2023 menjadi fase penguatan, dengan lahirnya sejumlah penelitian terapan bersama yang menghasilkan rekomendasi teknis dan produk inovasi sederhana. Di tahun 2024, kolaborasi riset berkembang ke arah yang lebih kompleks, mencakup pendanaan bersama (*co-funding*), program matching fund riset, dan integrasi hasil riset ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Model kolaboratif ini menjadi katalisator penting dalam menciptakan nilai tambah lokal dan peningkatan daya saing daerah. Berikut tabel kerja sama riset terkait produktivitas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode tahun 2020–2024:

Tabel 2. 14 Jumlah Kerjasama Riset Terkait Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Kerja Sama Riset	Mitra Utama	Fokus Riset Produktivitas	Keterangan
2020	1	Universitas Hasanuddin (Unhas)	Potensi perikanan tangkap berkelanjutan	Kegiatan baseline data, belum ada implementasi riset lanjutan
2021	3	Politeknik KP Bone, STIE Muhammadiyah	Olahan kelapa, pengolahan hasil laut	Ditandatangani melalui MoU lintas sektor
2022	5	Unhas, Balitbang KKP, UMKM lokal	Diversifikasi produk kelautan, biofarmaka	Menghasilkan 2 rekomendasi teknologi tepat guna
2023	7	Kementerian Desa, BRIN, Inkubator Riset	Alat tangkap ramah lingkungan, agroeduwisata	Terdapat kegiatan pilot project inovasi produktivitas berbasis desa

Tahun	Jumlah Kerja Sama Riset	Mitra Utama	Fokus Riset Produktivitas	Keterangan
2024	10	BRIN, Unhas, Dunia Usaha, NGO, Startup	Inovasi pertanian tropis, maritim digital	Ada program co-funding dan integrasi riset dalam RKPD dan Renstra OPD

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pemanfaatan teknologi informasi melalui website jaringan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung riset dan inovasi, khususnya untuk mendorong produktivitas daerah secara terbuka dan kolaboratif. Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap mulai mengembangkan sarana digital untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi lokal, termasuk dalam bentuk platform web yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan di berbagai sektor.

Pada tahun 2020, belum terdapat situs khusus yang mengelola atau mempublikasikan informasi riset dan inovasi yang berkaitan langsung dengan produktivitas daerah. Perkembangan mulai terjadi pada tahun 2021, dengan integrasi konten riset dan data produktivitas dalam subdomain situs resmi Bapperida. Inisiatif ini kemudian diperkuat pada tahun 2022 dengan peluncuran **Portal Inovasi Daerah** berbasis WordPress yang menyajikan data riset, hasil kajian, dan kolaborasi aktif dengan OPD serta perguruan tinggi.

Tahun 2023 menjadi titik penting digitalisasi, dengan dibentuknya **Selayar Research & Innovation Network (SRIN)** dalam bentuk website jejaring riset lintas sektor, yang juga memuat fitur pengusulan inovasi, repository publikasi, dan forum interaktif. Tahun 2024, sistem ini terus dikembangkan agar terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah (*e-Planning*), serta kompatibel dengan dashboard data statistik sektoral, menjadikan web jaringan ini sebagai simpul informasi riset daerah yang mendukung peningkatan produktivitas secara terukur.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar telah berhasil membangun dan mengembangkan website jaringan riset dan inovasi yang mendukung peningkatan produktivitas daerah. Dari ketidakhadiran sistem digital pada 2020, kini telah tersedia sebuah platform yang bersifat terbuka, integratif, dan fungsional. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan transparansi data riset, namun juga memperkuat jejaring antar pelaku inovasi, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi digital. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Ketersediaan Website Jaringan Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Ketersediaan Website Jaringan	Nama/Alamat Situs	Fitur Utama	Keterangan
2020	Tidak tersedia	–	–	Belum ada sistem atau media digital khusus riset daerah
2021	Terbatas	Bapperida.selayarkab.go.id	Submenu kajian riset dan program inovasi	Integrasi awal dengan website OPD teknis
2022	Tersedia (mandiri)	inovasidaerah.selayarkab.go.id	Publikasi kajian, data produktivitas, unggahan proposal	Portal khusus riset dan inovasi berbasis WordPress
2023	Tersedia dan aktif	srin.selayarkab.go.id	Forum interaktif, data statistik, usulan inovasi masyarakat	SRIN (Selayar Research & Innovation Network) diluncurkan
2024*	Tersedia dan terintegrasi	srin.selayarkab.go.id + e-Planning	Dashboard riset, modul integrasi RKPD, statistik produktivitas	Sistem dikembangkan dan dihubungkan dengan perencanaan daerah

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

3) Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

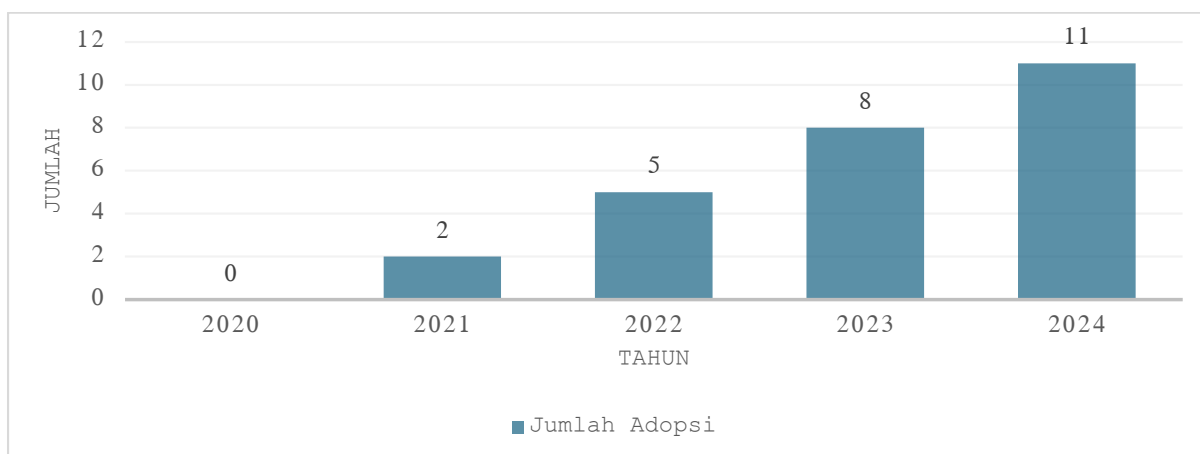
Kemitraan antarlembagaan merupakan pilar penting dalam mendorong penguatan ekosistem riset dan inovasi yang produktif di daerah. Kabupaten Kepulauan Selayar menyadari bahwa peningkatan produktivitas ekonomi tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga riset, dunia usaha, dan sektor masyarakat sipil.

Pada tahun 2020, kerja sama riset dan inovasi masih bersifat terbatas, dengan hanya satu mitra aktif dari kalangan akademisi. Namun, mulai 2021, Pemerintah Daerah mulai membuka jalur kemitraan yang lebih luas melalui penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama teknis dengan berbagai pemangku kepentingan.

Peningkatan signifikan terjadi pada 2022 dan 2023, di mana kemitraan strategis meluas ke lembaga kementerian, NGO nasional, dunia usaha, serta institusi pendidikan tinggi di luar daerah. Mitra ini berperan aktif dalam mendukung riset terapan, pelatihan teknologi, hingga pendampingan inovasi produktivitas pada sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan UMKM.

Hingga triwulan III tahun 2024, tercatat 15 mitra aktif yang secara langsung terlibat dalam pengembangan program atau riset untuk peningkatan produktivitas daerah. Hal ini menjadi indikator positif atas transformasi pendekatan pembangunan yang lebih kolaboratif dan berbasis ilmu pengetahuan.

Proses adopsi dan pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang disebut dengan difusi inovasi, menunjukkan tren positif di Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir. Difusi inovasi menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pemanfaatan hasil riset untuk mendorong peningkatan produktivitas daerah. Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir berupaya memperkuat ekosistem hilirisasi riset dengan mendorong implementasi teknologi dan inovasi di berbagai sektor strategis, terutama pada sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan UMKM.



Gambar 2.25 Jumlah Adopsi/Implementasi Hasil Riset Terkait Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Tahun 2020 menjadi titik awal dengan minimnya adopsi inovasi di lapangan akibat keterbatasan akses terhadap hasil riset dan rendahnya kapasitas kelembagaan lokal. Namun, mulai tahun 2021, hasil riset internal dan eksternal mulai dikemas dalam format yang aplikatif, termasuk inovasi alat tangkap ramah lingkungan, sistem budidaya terintegrasi, serta pengolahan pascapanen berbasis rumah tangga.

Pada tahun 2022, beberapa hasil riset berhasil diadopsi oleh kelompok nelayan dan pelaku UMKM, dengan dukungan pelatihan teknis dan insentif dari pemerintah daerah. Tren ini terus meningkat pada 2023 dan 2024, terutama dengan keterlibatan mitra perguruan tinggi dan BRIN dalam proses uji coba dan pendampingan teknologi. Adopsi inovasi tidak hanya terjadi di sektor produksi primer, tetapi juga mulai menyentuh aspek digitalisasi pemasaran dan manajemen usaha mikro berbasis data.

Peningkatan produktivitas daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan inovasi, tetapi juga pada sejauh mana hasil riset yang relevan dapat didiseminasikan dan dimanfaatkan oleh pelaku inovasi di lapangan. Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas riset yang mendukung sektor produktif lokal, melalui kemitraan riset, dukungan pendanaan, serta penguatan komunikasi hasil riset kepada stakeholder.

Pada tahun 2020, jumlah hasil riset yang dihasilkan masih sangat terbatas dan bersifat deskriptif awal. Mulai 2021, kegiatan riset mulai diarahkan untuk menjawab

kebutuhan lapangan, terutama di sektor perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, pertanian lahan kering, dan kelapa sebagai komoditas unggulan.

Tren peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga 2024, didorong oleh kolaborasi antara OPD teknis, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian nasional seperti BRIN. Diseminasi dilakukan melalui forum riset, pelatihan teknis, dan dokumen ringkasan kebijakan (*policy brief*) yang mudah diakses oleh pelaku inovasi, termasuk UMKM, koperasi, dan komunitas desa inovatif.

4) Budaya Riset dan Inovasi Daerah

Untuk memperkuat budaya inovasi yang mendukung peningkatan produktivitas daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap telah membangun sistem promosi dan kampanye inovasi yang lebih terstruktur dan inklusif. Pada awal tahun 2020, kegiatan promosi inovasi masih bersifat terbatas dan belum terlembaga, ditandai dengan minimnya jumlah inovasi serta belum tersedianya forum resmi sebagai ruang diseminasi ide-ide inovatif.

Seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2021 hingga 2024, pemerintah daerah mulai memfasilitasi terbentuknya **Forum Inovasi Daerah** sebagai wadah dialog, kolaborasi, dan diseminasi inovasi lintas sektor. Forum ini mendorong pelaku inovasi lokal baik dari unsur ASN, akademisi, pelajar, hingga komunitas dan pelaku UMKM untuk menyampaikan dan mengembangkan solusi kreatif terhadap berbagai tantangan produktivitas lokal, khususnya di sektor unggulan seperti perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, pertanian, dan pariwisata.

Jumlah inovasi yang tercatat mengalami peningkatan setiap tahun, seiring dengan penyelenggaraan berbagai bentuk kampanye seperti lomba inovasi daerah, promosi digital hasil riset, expo inovasi, hingga roadshow ke desa dan sekolah. Pendekatan ini turut membangun kesadaran kolektif akan pentingnya inovasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Upaya ini juga menjadi bukti bahwa budaya riset dan inovasi tidak hanya tumbuh dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari partisipasi publik yang aktif dan sistematis. Kabupaten Kepulauan Selayar pun telah menempatkan promosi inovasi sebagai agenda strategis dalam mewujudkan ekosistem inovasi daerah yang dinamis dan produktif.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan penguatan ekosistem inovasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara aktif mendorong partisipasi daerah dalam berbagai ajang penghargaan dan kompetisi inovasi tingkat regional maupun nasional. Upaya ini menjadi salah satu bentuk konkret dari pembangunan budaya riset dan inovasi yang diapresiasi, sekaligus menjadi insentif bagi perangkat daerah maupun pelaku inovasi lokal.

Pada tahun 2020, partisipasi dalam penghargaan inovasi masih terbatas karena minimnya fasilitasi dan keterbatasan informasi. Namun, sejak 2021, Selayar mulai mengikuti beberapa ajang seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), *Innovative Government Award (IGA)*, dan Kompetisi Inovasi Daerah (KID) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan lembaga lainnya.

Jumlah partisipasi meningkat secara signifikan pada tahun 2022 hingga 2024, didorong oleh terbentuknya tim koordinasi inovasi daerah serta pelaksanaan seleksi internal inovasi di lingkungan OPD, desa, dan sekolah. Bahkan, beberapa inovasi dari Selayar berhasil memperoleh penghargaan sebagai Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan masuk nominasi nasional dalam ajang IGA.

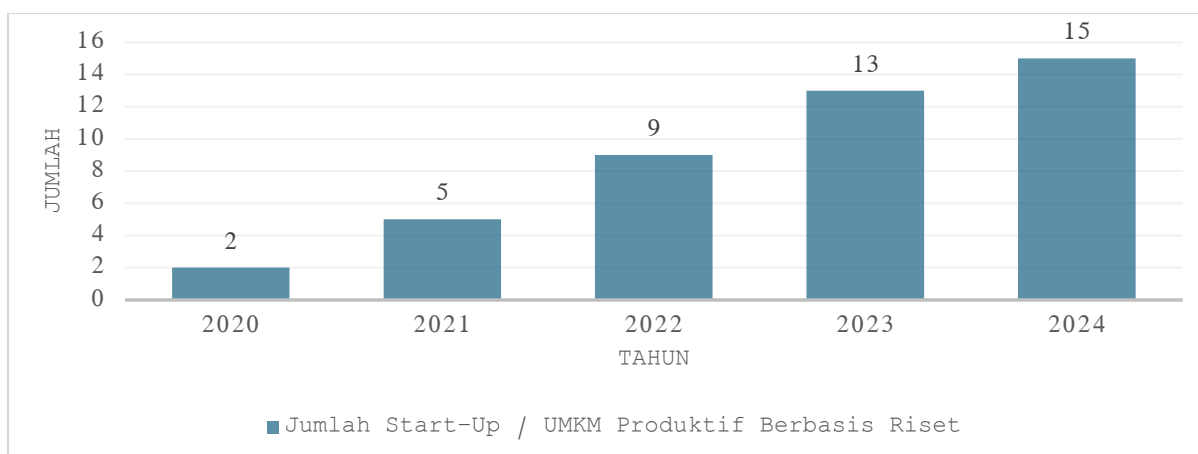
Partisipasi dalam kompetisi inovasi tidak hanya memberikan pengakuan atas capaian inovasi yang dilakukan, tetapi juga menjadi media pembelajaran lintas daerah, memperluas jejaring kerja sama, serta memicu replikasi inovasi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas di sektor unggulan daerah.

Dengan meningkatnya partisipasi dalam penghargaan inovasi, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan komitmen untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja yang produktif, adaptif, dan mampu mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen mengembangkan perusahaan pemula berbasis riset sebagai salah satu pendorong utama peningkatan produktivitas. Perusahaan pemula baik berbentuk start-up maupun UMKM didorong untuk mengintegrasikan hasil riset, teknologi tepat guna, dan inovasi lokal dalam produk dan layanan yang dihasilkan.

Selama periode 2020–2024, pertumbuhan jumlah *start-up* atau UMKM yang mengembangkan produktivitas daerah menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten. Pada awal tahun 2020, hanya terdapat dua UMKM yang memanfaatkan hasil riset lokal dalam proses produksinya, khususnya dalam pengolahan hasil laut secara tradisional.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hilirisasi riset, pemerintah daerah mulai melakukan fasilitasi pendampingan dan inkubasi bisnis sejak 2021. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta dunia usaha mendorong munculnya lebih banyak pelaku usaha lokal yang berani mengadopsi pendekatan berbasis inovasi. Berikut gambarannya:



Gambar 2.26 Jumlah Start-up/UMKM Produktif Berbasis Riset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pada Gambar 2.26 menunjukkan pada tahun 2022 dan 2023, upaya peningkatan produktivitas UMKM mulai terlihat hasilnya melalui pendampingan yang terstruktur, pemberian akses teknologi tepat guna, dan dukungan promosi digital. Pemerintah juga memberikan insentif melalui penguatan inkubator bisnis daerah serta program pelatihan berbasis riset untuk sektor unggulan seperti kelautan-perikanan, agroindustri kelapa, dan pariwisata bahari.

Tahun 2024 ditandai dengan stabilnya jumlah pelaku usaha yang mengembangkan inovasi berbasis riset, termasuk beberapa di antaranya yang mulai menjalin kerja sama dengan mitra ekspor dan marketplace nasional.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki beragam kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai pengetahuan dan teknologi tradisional, terutama dalam bidang kelautan, pertanian, perikanan, dan pengolahan pangan. Dalam kerangka mendukung transformasi ekonomi berbasis peningkatan produktivitas, pemerintah daerah mulai menggali dan memanfaatkan pengetahuan masyarakat lokal sebagai sumber inovasi dan penguatan daya saing daerah.

Sejak tahun 2020, inventarisasi terhadap teknologi masyarakat lokal mulai dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan lembaga riset, akademisi, dan komunitas lokal. Teknologi seperti pembuatan perahu tradisional, metode pengawetan ikan secara alami, pengolahan kelapa menjadi minyak dan gula semut, serta pengelolaan kawasan perikanan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, menjadi contoh nyata bagaimana pengetahuan masyarakat dapat diangkat sebagai bagian dari inovasi daerah.

Pemanfaatan pengetahuan lokal ini tidak hanya membantu masyarakat mempertahankan budaya mereka, tetapi juga meningkatkan produktivitas usaha dan memperluas pasar melalui pendekatan inovatif. Misalnya, teknik fermentasi tradisional rumput laut mulai dikembangkan untuk produksi makanan sehat yang bernilai jual tinggi, dan teknik pertanian organik lokal diintegrasikan dengan konsep pertanian wisata.

Tren pemanfaatan teknologi masyarakat ini terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa transformasi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya bertumpu pada teknologi modern, tetapi juga menghargai dan mengembangkan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari inovasi berkelanjutan. Berikut tabel jumlah pengetahuan/teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan untuk produktivitas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode tahun 2020–2024.

Tabel 2. 16 Jumlah Pengetahuan/Teknologi Masyarakat Lokal yang Dimanfaatkan untuk Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Pengetahuan/ Teknologi Lokal yang Dimanfaatkan	Contoh Teknologi Lokal yang Dikembangkan
2020	2	Teknik pengolahan abon ikan dan perahu katinting tradisional
2021	3	Fermentasi rumput laut untuk bahan makanan dan teknik pengawetan ikan secara alami
2022	5	Pengolahan minyak kelapa murni, pemanfaatan arang tempurung kelapa untuk pupuk organik
2023	7	Sistem budidaya ikan terintegrasi dan pertanian tumpangsari berbasis kearifan lokal
2024	9	Produk wisata budaya berbasis pengetahuan lokal dan teknologi pangan inovatif tradisional

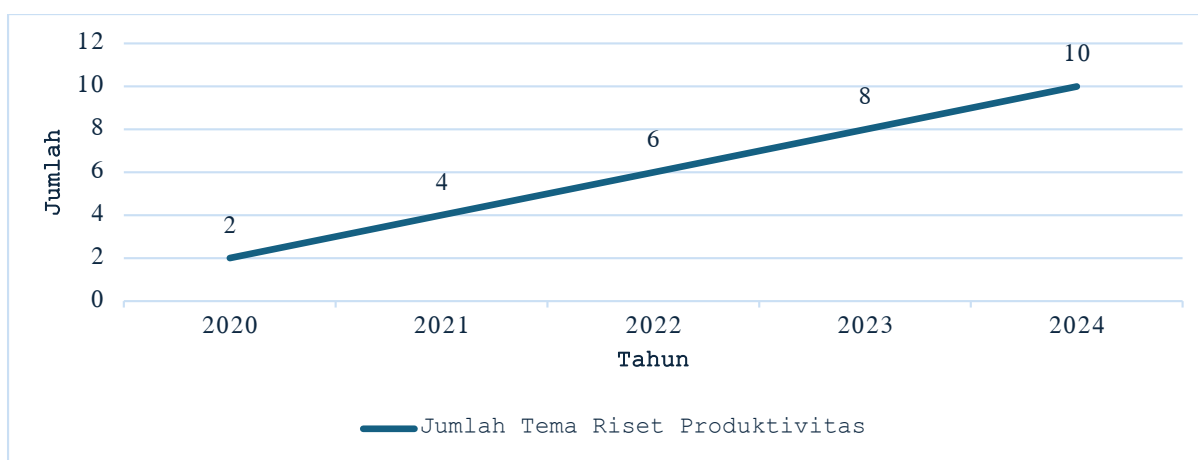
Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

5) Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi Daerah

Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki potensi unggulan di sektor kelautan, perikanan, pertanian tropis, dan pariwisata bahari, Kabupaten Kepulauan Selayar secara aktif mendorong pengembangan riset yang berbasis pada kebutuhan lokal. Pendekatan ini penting agar hasil-hasil riset dan inovasi yang dilakukan memiliki keterpaduan (koherensi) dengan permasalahan aktual daerah dan dapat dimanfaatkan secara langsung dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten mulai memetakan kebutuhan riset daerah melalui forum inovasi, musrenbang riset, dan sinergi dengan perguruan tinggi serta lembaga litbang. Hasilnya, tema-tema riset mulai diarahkan untuk menjawab tantangan nyata di daerah, seperti peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan, pengolahan hasil laut berbasis teknologi tepat guna, pertanian ramah lingkungan di lahan terbatas, pengembangan produk lokal untuk pasar digital, hingga inovasi dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Peningkatan jumlah tema riset dari tahun ke tahun mencerminkan upaya konsisten untuk menjadikan riset sebagai bagian integral dalam strategi pembangunan ekonomi lokal. Melalui keterpaduan antara kebijakan, pelaku riset, dan kebutuhan masyarakat, hasil riset menjadi lebih aplikatif, terukur, dan mendukung promosi serta pengembangan produk unggulan daerah. Berikut gambarannya:



Gambar 2.27 Jumlah Tema Riset yang Mendukung Pengembangan Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

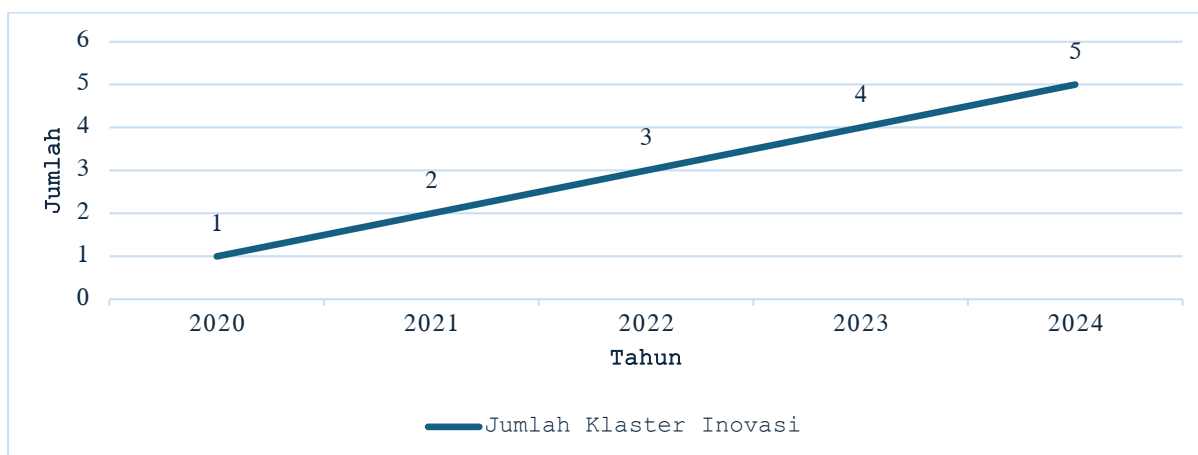
Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Gambar tersebut menunjukkan peningkatan signifikan jumlah tema riset produktivitas daerah dari tahun 2020 hingga 2024. Pada awal periode, riset masih bersifat eksploratif dan difokuskan pada identifikasi potensi. Namun, sejak 2021 hingga 2024, tema riset berkembang mencakup aspek hilirisasi produk, teknologi produksi, sistem pemasaran digital, dan strategi keberlanjutan. Kenaikan jumlah tema riset dari 2 tema pada 2020 menjadi 10 tema pada 2024 mencerminkan pergeseran paradigma dari riset berbasis proyek menjadi riset berbasis kebutuhan daerah. Hal ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor, dukungan pembiayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya peneliti lokal. Dengan arah riset yang selaras dengan kebutuhan produktivitas daerah, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan komitmen dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya mendorong terbentuknya kluster inovasi yang terintegrasi dengan produk unggulan lokal. Kluster inovasi ini menjadi sarana kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor-sektor potensial seperti perikanan tangkap, kelautan, hasil olahan kelapa, dan pariwisata bahari.

Sejak tahun 2020, penyelenggaraan kluster inovasi mulai dirintis melalui pendekatan berbasis komunitas, inkubasi usaha, dan dukungan kelembagaan dari dinas teknis. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan produksi, namun juga pada nilai tambah, pemasaran, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Perkembangan jumlah kluster inovasi menunjukkan tren positif. Dari hanya satu kluster embrionik di tahun 2020, jumlahnya bertambah signifikan menjadi lima kluster pada 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya sinergi antar-stakeholder dan respons positif terhadap kebutuhan peningkatan produktivitas lokal secara terintegrasi. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan berbasis kluster dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mengakselerasi produktivitas daerah, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal.



Gambar 2.28 Jumlah Kluster Inovasi Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dalam kerangka mewujudkan transformasi ekonomi berbasis peningkatan produktivitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya menyelaraskan

arah kebijakan riset dan inovasi daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya yang tertuang dalam dokumen strategis nasional seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), serta program prioritas Kementerian/Lembaga teknis.

Selama periode 2020–2024, tingkat kesesuaian dan integrasi kegiatan riset daerah dengan dokumen pusat mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam mekanisme perencanaan terpadu antara pusat dan daerah, termasuk dalam perumusan *policy brief*, program pilot riset, serta inisiasi kolaborasi lintas sektor.

Kolaborasi ini tidak hanya memastikan relevansi riset daerah terhadap isu nasional seperti penguatan ekonomi maritim, ketahanan pangan laut, dan pengembangan kawasan pesisir terpadu, tetapi juga membuka peluang dukungan sumber daya dan pendanaan dari kementerian teknis. Berikut gambarannya:



Gambar 2.29 Ketersediaan Kegiatan/Program Riset Produktivitas Daerah yang Sesuai RPJMN/RPJPJN/Kementerian Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 – 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya sinkronisasi kebijakan yang dilakukan melalui forum Musrenbang, penyusunan dokumen Renstra, dan inisiasi proposal riset oleh OPD teknis yang menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional. Hal ini menjadi indikator penting bagi peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan riset yang strategis dan berdampak langsung pada produktivitas ekonomi daerah.

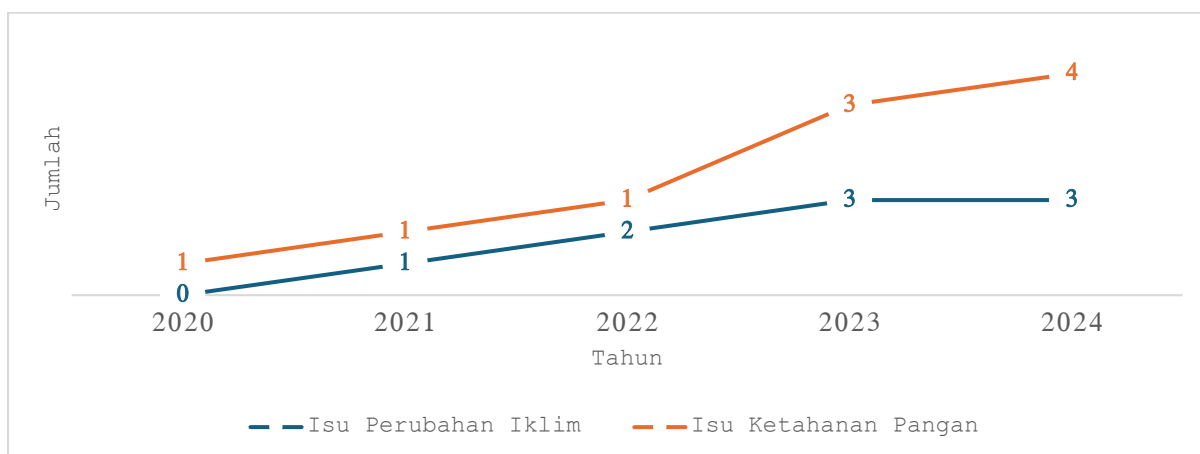
6) Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menunjukkan komitmen kuat untuk menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan isu-isu global, khususnya terkait perubahan iklim dan ketahanan pangan. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa produktivitas daerah tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga berkelanjutan secara ekologi dan sosial.

Sejak tahun 2020, program-program daerah yang mengintegrasikan isu perubahan iklim dan pangan mulai dirintis. Pada tahun tersebut, program yang tersedia masih terbatas, dengan fokus pada revitalisasi lahan kritis untuk ketahanan pangan lokal. Namun, seiring meningkatnya kesadaran dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional, jumlah dan kualitas program meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2021 ditandai dengan hadirnya dua program baru yang lebih adaptif, seperti adaptasi pertanian pesisir berbasis cuaca, hasil kolaborasi dengan BMKG. Pada 2022, Pemerintah Daerah memperkuat sinergi sektor kelautan dan pangan melalui program penguatan produksi berbasis ekosistem laut, misalnya pada komoditas rumput laut dan ikan pelagis. Tren ini terus meningkat, dengan empat program integratif pada tahun 2023, termasuk riset karbon biru dan edukasi iklim untuk nelayan.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana lima program unggulan telah berjalan, di antaranya pengembangan sistem informasi ketahanan pangan berbasis iklim dan hilirisasi produk pangan ramah iklim. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak hanya menjalankan adaptasi pasif terhadap perubahan iklim, tetapi juga mulai membangun sistem yang mendukung inovasi dan pengambilan kebijakan berbasis data serta teknologi.

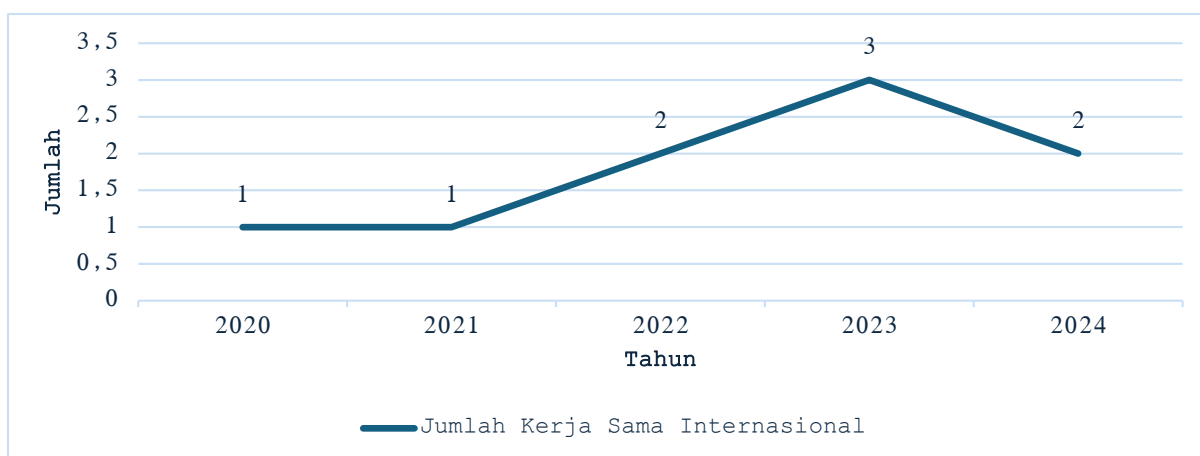


Gambar 2.30 Program Daerah yang Mengintegrasikan Produktivitas Daerah dengan Isu Global Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Melalui program-program tersebut, Kabupaten Kepulauan Selayar semakin menunjukkan kemampuannya dalam menjawab tantangan global dengan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan kearifan lokal. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendorong transformasi ekonomi yang adaptif terhadap dinamika global, Kabupaten Kepulauan Selayar mulai membuka diri terhadap peluang kerja sama internasional, khususnya yang mendukung peningkatan produktivitas berbasis riset dan inovasi. Meskipun sebagai daerah kepulauan yang relatif terpencil, keterlibatan dalam kemitraan internasional mulai meningkat secara bertahap sejak tahun 2020.



Gambar 2.31 Jumlah Kerja Sama Internasional Terkait Produktivitas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pada awal periode (2020–2021), kerja sama berskala internasional masih terbatas, terutama difasilitasi oleh kementerian atau lembaga pusat, seperti kerja sama melalui program *Marine Protected Area (MPA)* yang didukung organisasi lingkungan dunia. Namun, mulai tahun 2022, Pemerintah Daerah mengambil inisiatif lebih besar dalam menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan mitra asing, terutama untuk mendukung sektor produktif daerah seperti perikanan berkelanjutan, ekowisata, serta pengembangan teknologi budidaya.

Kerja sama dengan lembaga dari Jerman dan Jepang pada tahun 2023 mencakup pelatihan teknologi pasca-panen serta pendampingan sertifikasi ekspor hasil laut. Hingga 2024, kolaborasi riset kelautan dengan institusi di Australia turut memperluas portofolio kemitraan internasional Kabupaten Kepulauan Selayar, sekaligus memperkuat daya saing daerah di kawasan timur Indonesia.

Dengan terus memperluas jejaring internasional, Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan dirinya dalam lintasan yang strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui dukungan keilmuan, teknologi, dan kolaborasi global yang berkelanjutan.

2.2.1.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Sosial

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menjadikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pondasi utama dalam mendorong transformasi sosial berbasis potensi lokal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan kapasitas ini diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan, tetapi juga untuk memperkuat keterampilan masyarakat dalam mengelola, mengembangkan, dan memajukan komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan.

Berbagai program dan kegiatan pelatihan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok, dan pariwisata. Masyarakat petani kelapa diberikan pembekalan mengenai teknik pasca-panen, pengolahan produk turunan bernilai tambah, hingga pengemasan dan pemasaran digital. Di sektor perikanan, nelayan dan pelaku usaha kecil mendapatkan pelatihan tentang alat tangkap ramah lingkungan,

pemanfaatan teknologi informasi, serta tata kelola koperasi dan BUMDes kelautan. Untuk jeruk keprok, yang merupakan komoditas khas Kabupaten Kepulauan Selayar, peningkatan SDM dilakukan melalui pelatihan pemuliaan varietas unggul, pengendalian hama terpadu, dan pengolahan produk olahan buah. Sementara di sektor pariwisata, masyarakat dilatih dalam pelayanan wisata, pengelolaan homestay, pemanduan lokal, serta pemanfaatan media sosial dan digitalisasi promosi destinasi.

Transformasi sosial yang dicapai melalui peningkatan kualitas SDM ini tidak hanya mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat partisipasi publik, kohesi sosial, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, pengembangan SDM tidak sekadar meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat identitas dan ketahanan sosial masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar di tengah perubahan zaman dan tantangan global. Tema prioritas ini dituangkan ke dalam Enam elemen dengan kondisi sebagai berikut:

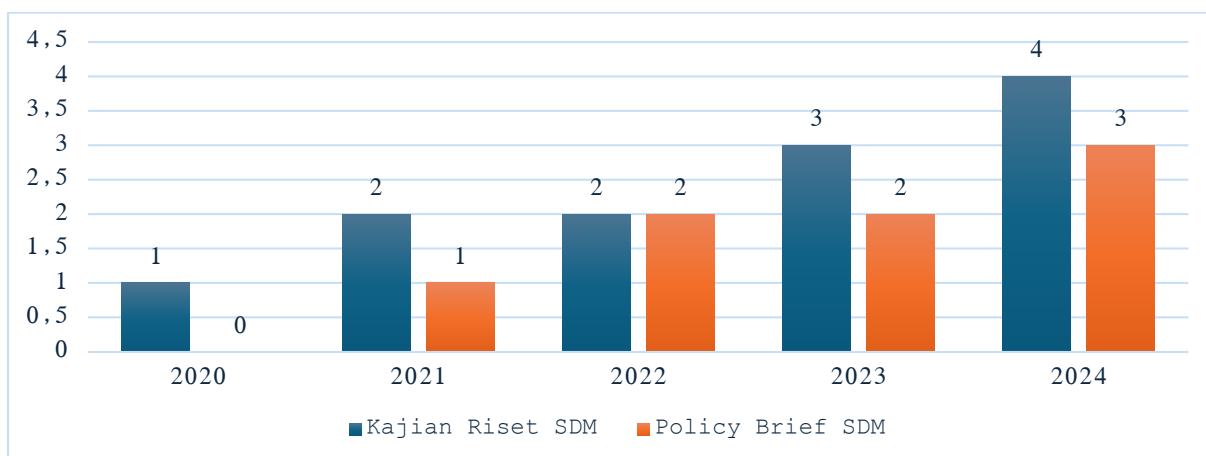
1) Kebijakan dan Infrastruktur Riset serta Inovasi Daerah

Pada periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memantapkan arah kebijakan riset dan inovasi daerah dengan menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai titik tumpu dalam mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya riset dan inovasi tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat, mendorong lahirnya kebijakan dan penguatan infrastruktur yang mendukung pembelajaran dan pengembangan kapasitas lokal berbasis data dan ilmu pengetahuan. Kebijakan riset diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan sosial-ekonomi lokal dan merumuskan solusi inovatif melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Hal ini tercermin dalam perumusan dokumen rencana induk riset dan inovasi daerah (RIPJ-RID), yang mulai diselaraskan dengan RPJMD serta prioritas pembangunan nasional, terutama dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi kreatif, dan penguatan sektor informal berbasis potensi lokal.

Di sisi infrastruktur, pemerintah daerah mulai membangun dan memperkuat sarana dasar riset seperti laboratorium pendidikan dan pelatihan berbasis vokasi, ruang belajar komunitas, serta fasilitas digital yang mendukung diseminasi pengetahuan kepada

kelompok masyarakat, pelaku UMKM, dan lembaga desa. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian dari infrastruktur pendukung riset, seperti pengembangan platform sistem informasi tematik untuk komoditas unggulan (kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok, dan pariwisata) yang terintegrasi dengan data pelatihan dan pengembangan SDM. Penguatan kebijakan dan infrastruktur riset ini menjadi dasar penting bagi penciptaan ekosistem pembelajaran yang adaptif dan inklusif. Melalui pendekatan ini, transformasi sosial yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga didorong oleh peningkatan kualitas manusia dan kesadaran kolektif akan pentingnya inovasi sebagai jalan menuju kemajuan yang berakar pada kearifan lokal dan keterbukaan global.

Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap melaksanakan reformasi kebijakan riset dan inovasi yang berfokus pada pembangunan manusia sebagai fondasi transformasi sosial daerah. Reformasi ini ditandai dengan meningkatnya penyusunan kajian tematik dan dokumen kebijakan (policy brief) yang mengangkat isu-isu strategis terkait peningkatan kapasitas SDM di sektor unggulan seperti kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok, dan pariwisata. Sejak 2020, kebijakan riset tidak lagi bersifat sektoral dan teknokratik semata, tetapi mulai diarahkan untuk menjawab tantangan pengembangan kompetensi lokal, akses literasi teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam inovasi. Dokumen-dokumen yang dihasilkan digunakan sebagai dasar untuk menyusun regulasi daerah, memperkuat program pelatihan, serta menjadi rujukan bagi kerja sama lintas sektor, termasuk dengan akademisi dan lembaga riset nasional.



Gambar 2.32 Jumlah Kajian dan Policy Brief Terkait Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Jumlah kajian riset dan policy brief terkait SDM meningkat dari 1 kajian pada tahun 2020 menjadi 7 dokumen kebijakan pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa reformasi tidak hanya berlangsung pada tataran niat, tetapi telah diterjemahkan ke dalam bukti-bukti nyata yang memperkuat ekosistem pengambilan keputusan berbasis pengetahuan.

Reformasi kebijakan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berjalan secara bertahap dan belum merata sepanjang lima tahun terakhir. Berdasarkan data, tidak terdapat produk hukum berupa peraturan daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah (Perkada) yang dikeluarkan selama tahun 2020 hingga 2022, yang secara khusus mengatur atau mendorong pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Kemajuan baru mulai tampak pada tahun 2023, ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 396/VII/2023 tentang Penetapan Inovasi Daerah. Meskipun bersifat umum, keputusan ini menjadi pijakan awal bagi pemerintah daerah dalam memperkuat budaya inovasi, termasuk dalam sektor SDM. Langkah ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2024, melalui Keputusan Bupati Nomor

353/VIII/2024, yang menunjukkan adanya kesinambungan arah kebijakan dalam mendukung ekosistem inovasi daerah.

Tabel 2. 17 Jumlah Perda/Perkada Terkait Riset & Inovasi SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

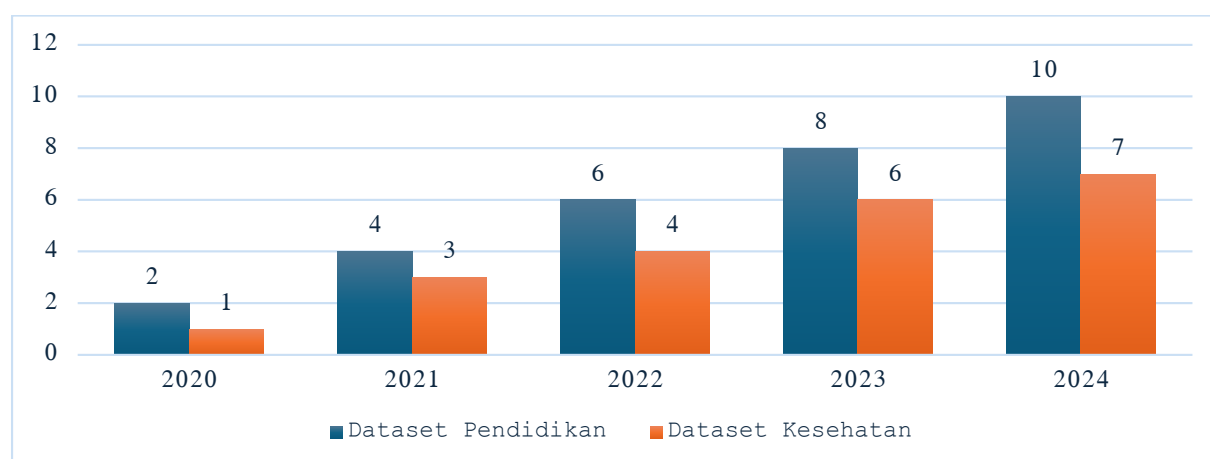
Tahun	Jumlah Regulasi	Keterangan
2020	0	Belum tersedia kebijakan riset/inovasi SDM
2021	0	Belum tersedia
2022	0	Belum tersedia
2023	1	Keputusan Bupati No. 396/VII/2023 tentang Penetapan Inovasi Daerah
2024	1	Keputusan Bupati No. 353/VIII/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kendati begitu, bentuk regulasi yang tersedia masih sebatas keputusan kepala daerah dan belum sampai pada tingkat pengaturan normatif yang kuat seperti Perda atau Perbup yang mengikat lintas sektor. Padahal, untuk memperkuat kapasitas riset dan inovasi SDM secara menyeluruh, dibutuhkan kebijakan yang lebih struktural dan operasional, yang memayungi kolaborasi antarsektor, penganggaran riset, hingga pengelolaan hasil inovasi yang berorientasi pada perbaikan layanan publik pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, meskipun langkah awal telah dilakukan, Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mendorong reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan mengarah pada pembentukan regulasi daerah yang mampu menata kelembagaan, mekanisme pendanaan, serta peta jalan inovasi SDM secara berkelanjutan.

Dalam upaya memperkuat fondasi kebijakan berbasis pengetahuan, Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginisiasi penataan basis data riset dan inovasi, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan, selama periode 2020–2024. Penataan ini tidak hanya menjadi bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana integratif untuk menyusun kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah daerah melalui

Bapperida dan dinas teknis mulai secara bertahap mengunggah dan mengelola dataset riset maupun inovasi lokal ke dalam satu **platform digital resmi** yang dapat diakses secara internal dan lintas sektor. Dataset tersebut mencakup data hasil studi, dokumen evaluasi program, data monitoring layanan pendidikan dan kesehatan, serta inovasi layanan berbasis masyarakat dan teknologi digital.



Gambar 2.33 Jumlah Dataset Riset/Inovasi Pendidikan dan Kesehatan Terunggah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Jumlah dataset yang terunggah mengalami peningkatan signifikan dari 3 dataset pada 2020 menjadi 17 dataset pada 2024. Lonjakan ini dipicu oleh penguatan kelembagaan riset daerah, peningkatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta digitalisasi sistem informasi sektoral. Penataan data ini mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti dan memperkuat kualitas tata kelola SDM di tingkat daerah.

Tabel 2. 18 Keberadaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Sistem Informasi Pendidikan	Sistem Informasi Kesehatan	Keterangan
2020	Belum tersedia	Belum tersedia	Pengolahan data masih manual (Excel/laporan offline)
2021	SIPANDU dirintis (internal OPD)	SIMKESDA dikembangkan awal	Sistem masih terpisah dan belum terhubung

Tahun	Sistem Informasi Pendidikan	Sistem Informasi Kesehatan	Keterangan
2022	SIPANDU aktif	SIMKESDA versi beta diluncurkan	Mulai ada dasbor internal lintas OPD
2023	SIPANDU terintegrasi dengan Dapodik	SIMKESDA aktif & mobile-based	Platform berbasis web mulai digunakan dalam perencanaan
2024	Portal Data Pendidikan Daerah aktif	SIMKESDA terhubung dengan data nasional	Sisfo aktif, lintas OPD, mendukung riset & inovasi

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

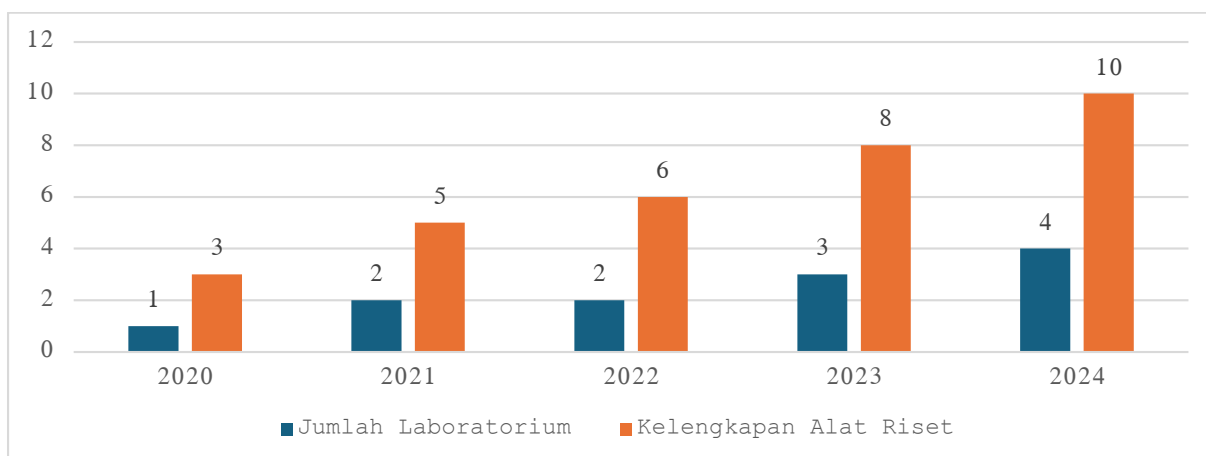
Selama periode 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemajuan signifikan dalam menata sistem informasi (Sisfo) yang mendukung pengelolaan riset dan inovasi, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Penataan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kebijakan berbasis data, mengintegrasikan hasil riset, dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Pada awal periode 2020, sistem informasi yang tersedia masih terbatas dan bersifat manual, dengan pencatatan data pendidikan dan kesehatan dilakukan secara terpisah dan belum terintegrasi ke dalam platform berbasis web. Namun, seiring berkembangnya komitmen daerah terhadap digitalisasi tata kelola SDM, pemerintah daerah mulai mengembangkan dashboard sektoral, sistem informasi berbasis aplikasi, serta platform integratif yang memuat hasil riset, evaluasi program, dan data inovasi. Berikut tabel yang menunjukkan keberadaan sistem informasi SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024.

Hingga tahun 2024, tercatat setidaknya empat sistem informasi utama yang aktif dan terhubung dengan pengembangan SDM: SIPANDU (pendidikan), SIMKESDA (kesehatan), Dapodik Daerah untuk data pendidikan dasar, serta dashboard internal inovasi SDM yang terkelola oleh Bapperida. Sistem ini tidak hanya memuat data statistik, tetapi juga mencatat praktik-praktik inovatif yang muncul dari masyarakat, OPD, dan lembaga pendidikan lokal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya mengandalkan narasi kebijakan, tetapi mulai membangun arsitektur

informasi yang kokoh, terukur, dan terbuka sebagai dasar transformasi sosial berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif dan berbasis bukti, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap memperkuat infrastruktur dasar riset dan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fasilitas seperti laboratorium pendidikan, ruang praktik kejuruan, dan perangkat alat riset dasar mulai dikembangkan tidak hanya di pusat kabupaten, tetapi juga menjangkau satuan pendidikan dan lembaga pelatihan di tingkat kecamatan. Berikut gambaran jumlah laboratorium dan kelengkapan alat riset SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024.

Pada awal 2020, fasilitas riset masih sangat terbatas, hanya terdapat satu laboratorium terpadu yang digunakan lintas sektor. Namun, berkat integrasi program pembangunan daerah dengan dukungan lintas OPD dan kolaborasi lembaga pendidikan, jumlah laboratorium meningkat menjadi empat unit pada tahun 2024, disertai dengan bertambahnya kelengkapan alat bantu riset dan praktik mulai dari alat uji sederhana, kit STEM (*Science, Technology, Engineering, dan Math*), hingga perangkat digital pembelajaran. Peningkatan infrastruktur ini tidak hanya mendukung pelaksanaan riset terapan oleh pelajar, guru, dan komunitas, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya inovasi lokal. Infrastruktur yang dibangun digunakan untuk kegiatan eksplorasi produk kelapa, praktik teknologi pasca panen, pengembangan alat tangkap perikanan, serta pelatihan promosi digital di sektor pariwisata. Dengan pendekatan ini, laboratorium dan alat riset bukan lagi simbol formalitas, tetapi menjadi katalis pembelajaran dan transformasi sosial berbasis teknologi.

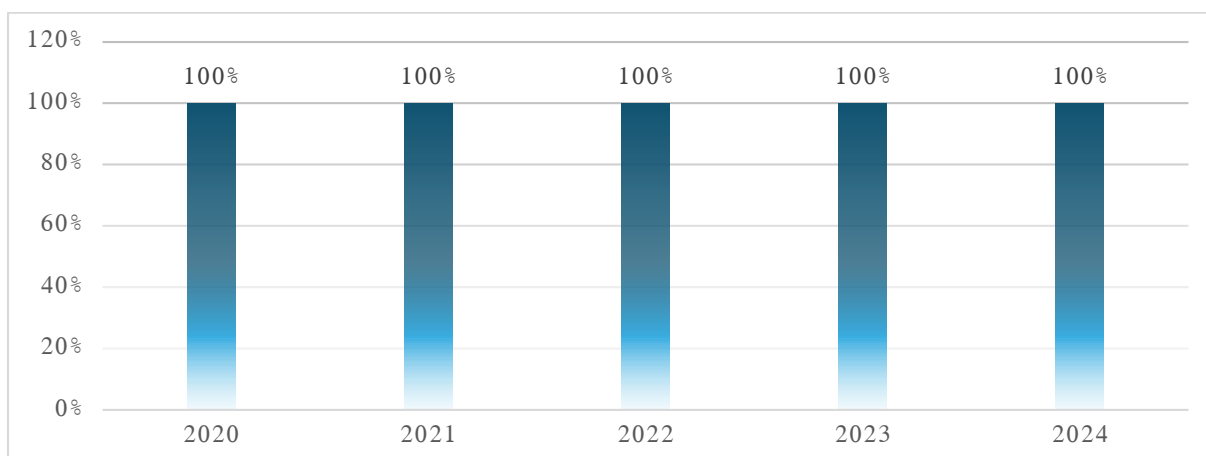


Gambar 2.34 Jumlah Laboratorium dan Kelengkapan Alat Riset SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dalam era transformasi digital, akses terhadap jaringan internet menjadi prasyarat utama bagi lembaga riset untuk berkembang, berinovasi, dan terhubung dengan sumber-sumber pengetahuan global. Ketersediaan dan keterjangkauan akses internet merupakan salah satu infrastruktur dasar yang sangat vital dalam mendukung aktivitas riset dan inovasi, terutama di sektor pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, komitmen terhadap penguatan infrastruktur digital pada lembaga-lembaga riset dan unit kerja pendukungnya tergolong sangat baik.

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), cakupan internet di lembaga riset yang terlibat dalam pengembangan SDM tercatat mencapai 100% secara konsisten. Artinya, seluruh lembaga yang relevan telah memiliki akses jaringan internet sebagai sarana utama untuk menunjang kegiatan literasi data, pengolahan informasi, komunikasi daring, kolaborasi penelitian, hingga publikasi hasil riset. Berikut gambarannya:

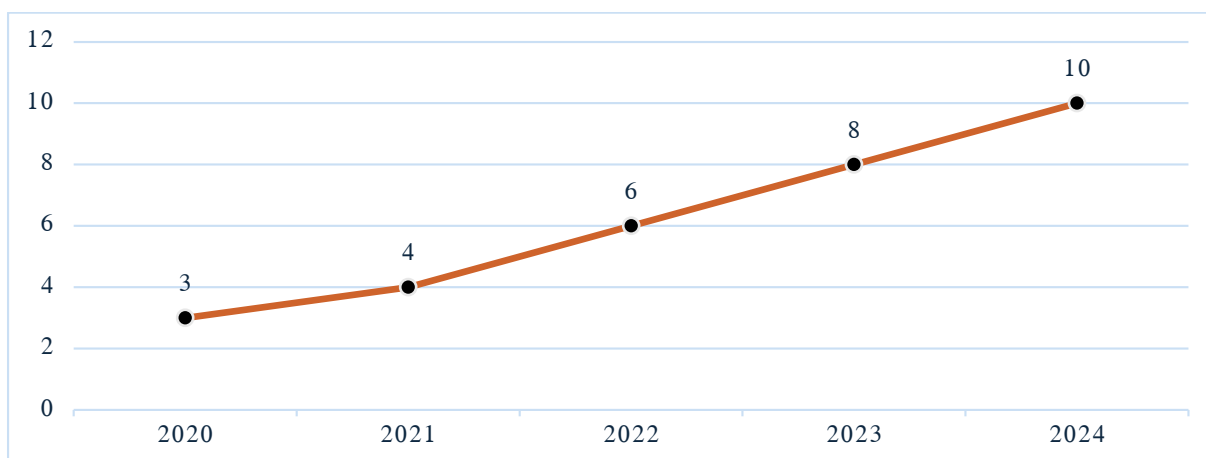


Gambar 2.35 Cakupan Internet pada Lembaga Riset Pendukung SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung percepatan transformasi digital di sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk dalam memfasilitasi inovasi pembelajaran jarak jauh, digitalisasi pelayanan kesehatan, serta integrasi data riset lintas instansi. Selain itu, cakupan internet yang merata juga memperkuat kapasitas SDM peneliti dan aparatur dalam mengakses pengetahuan global serta memperluas jejaring kolaborasi dengan mitra eksternal. Namun demikian, meskipun aspek konektivitas sudah terpenuhi, tantangan ke depan terletak pada pemanfaatan dan penguatan kapasitas digital di lingkungan riset itu sendiri. Perlu didorong pelatihan teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi berbasis data terbuka, serta peningkatan literasi digital untuk mendukung pemanfaatan internet secara produktif dalam riset-riset SDM yang adaptif dan solutif terhadap kebutuhan daerah.

Kemudian terkait dengan pengelolaan kebun raya daerah, Kebun Raya Daerah Gojang di Kabupaten Kepulauan Selayar bukan hanya ruang konservasi tanaman, tetapi telah berkembang menjadi laboratorium hidup bagi pembelajaran, penelitian, dan pelestarian hayati yang mendukung pembangunan sumber daya manusia berbasis kearifan lokal dan ekologi. Salah satu aspek penting dalam pengembangannya adalah keberadaan dan kapasitas tenaga pengelola yang menjadi garda depan dalam mengelola fungsi edukatif dan riset kebun raya. Sejak tahun 2020, jumlah tenaga pengelola terus bertambah seiring perluasan fungsi dan aktivitas kebun raya. Berikut gambaran datanya:



Gambar 2.36 Jumlah Pengelola Kebun Raya Gojang Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Awalnya hanya terdiri dari 3 orang pengelola, namun pada tahun 2024 telah berkembang menjadi 10 orang, yang terdiri dari tenaga teknis botani, edukator lingkungan, pemandu wisata edukatif, serta petugas kebun yang mendukung operasionalisasi kegiatan riset dan inovasi. Peningkatan jumlah pengelola ini merupakan cerminan dari perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi kebun raya sebagai bagian dari ekosistem riset dan pendidikan publik. Dengan tenaga yang lebih lengkap, Kebun Raya Gojang kini mampu melayani kegiatan riset sekolah, pelatihan komunitas, hingga diseminasi pengetahuan kepada masyarakat umum, terutama dalam hal konservasi tumbuhan lokal, pemanfaatan tanaman obat, dan agroedukasi.

Dalam upaya memperkuat transformasi sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran riset dan inovasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Penyediaan anggaran ini diarahkan untuk mendukung kegiatan riset terapan, pelatihan vokasi, digitalisasi pembelajaran, inovasi pelayanan publik, dan kolaborasi riset kelembagaan yang berdampak pada masyarakat. Berikut tabel persentase dan nominal anggaran riset SDM dari APBD periode 2020-2024.

Tabel 2. 19 Persentase dan Nominal Anggaran Riset SDM dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp Miliar)	Total Anggaran Riset Bidang Rida (Rp Miliar)	Persentase (%)
2020	1,010	0.348	0.034
2021	1,024	0.717	0.070
2022	999	0.555	0.056
2023	990	0.522	0.053
2024	969	0.350	0.036

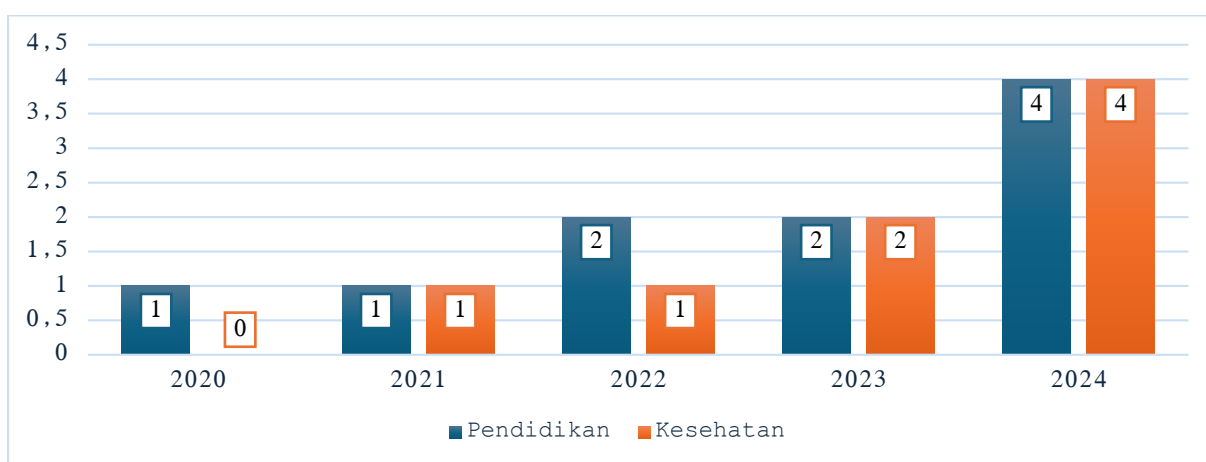
Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dari tabel tersebut menunjukkan Selama periode 2020–2024, penyediaan anggaran riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan mengalami fluktuasi. Alokasi anggaran riset tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp717 juta, atau 0,070% dari total belanja daerah sebesar Rp1,02 triliun. Sementara itu, alokasi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp348 juta atau hanya 0,034% dari total APBD. Setelah mengalami peningkatan pada 2021, tren anggaran cenderung menurun di tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, anggaran riset kembali melemah menjadi Rp350 juta atau sekitar 0,036% dari total belanja daerah sebesar Rp968 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perhatian terhadap riset dan inovasi, terutama pada fase awal pandemi, komitmen fiskal untuk sektor riset SDM masih tergolong rendah dan belum konsisten dari tahun ke tahun.

Rendahnya persentase anggaran ini menjadi catatan penting dalam upaya mendorong transformasi sosial berbasis peningkatan kualitas SDM. Untuk mewujudkan inovasi kebijakan dan praktik pembangunan yang berbasis riset, diperlukan peningkatan alokasi anggaran riset secara lebih proporsional dan berkelanjutan, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi fondasi utama transformasi sosial daerah.

Dorongan terhadap kreativitas dan inovasi lokal dalam sektor pendidikan dan kesehatan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan solusi lokal, tetapi juga untuk

memastikan bahwa inovasi tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan bisa dimanfaatkan secara luas. Langkah awal yang dilakukan adalah melalui pendampingan pencatatan dan pendaftaran ide inovatif yang muncul dari guru, tenaga kesehatan, pelaku komunitas, serta lembaga riset daerah. Inovasi yang dimaksud mencakup model pembelajaran berbasis lokal, sistem manajemen data layanan kesehatan, hingga aplikasi sederhana berbasis digital untuk penguatan literasi dan promosi kesehatan.



Gambar 2.37 Jumlah Ide/Paten/Inovasi SDM yang Didaftarkan atau Dimanfaatkan Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah ide atau inovasi yang terdata dan mulai didorong ke proses perlindungan meningkat dari hanya 1 inovasi pada tahun 2020 menjadi 8 inovasi terkelola pada tahun 2024. Walau sebagian besar masih dalam tahap pendaftaran hak cipta atau paten sederhana, tren ini menunjukkan bahwa budaya perlindungan hasil cipta di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tumbuh dan berpotensi untuk mendorong ekonomi berbasis inovasi di masa depan.

2) Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset serta Inovasi Daerah

Transformasi sosial yang berkelanjutan membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat, adaptif, dan didukung oleh sumber daya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, kesadaran ini mendorong reformasi struktural dan penguatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi daerah yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan

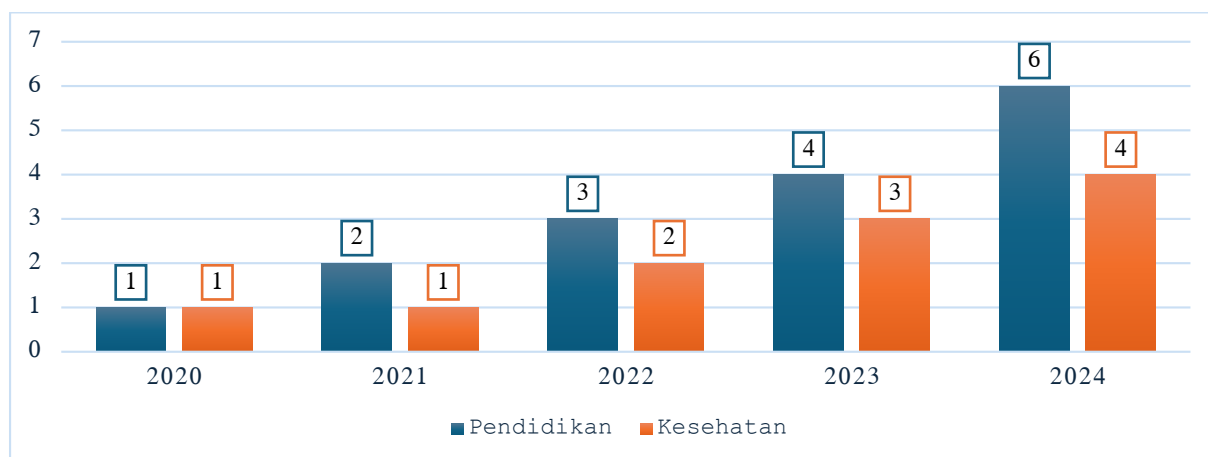
dan kesehatan. Sejak 2020, pemerintah daerah melalui Bapperida dan perangkat daerah teknis melakukan penguatan peran kelembagaan riset tidak hanya sebagai pusat dokumentasi dan pelaporan, tetapi juga sebagai katalisator perubahan. Unit-unit pelaksana riset mulai diperkuat secara fungsional, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi riset dan inovasi daerah. Koordinasi lintas OPD juga ditingkatkan melalui forum riset tematik, serta kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga profesi, dan mitra non-pemerintah yang aktif mendampingi komunitas pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan daya dukung kelembagaan juga ditopang oleh upaya penguatan sumber daya manusia internal, pelatihan metodologi riset kebijakan, serta dukungan teknis untuk mengelola data dan menyusun policy brief berbasis bukti. Beberapa OPD mulai memiliki unit riset mandiri atau tim ad-hoc untuk mendorong inovasi program secara lebih partisipatif dan kontekstual.

Hingga 2024, kelembagaan riset daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya mampu menghasilkan rekomendasi teknokratik, tetapi juga berperan sebagai mitra transformasi sosial. Lembaga-lembaga ini menjadi ruang diskusi, refleksi, sekaligus wadah penggerak perubahan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan lokal. Dengan kapasitas yang terus dibangun, kelembagaan riset dan inovasi daerah kini siap menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif, solutif, dan berakar pada potensi manusia yang dimiliki daerah.

Kolaborasi menjadi kata kunci dalam membangun ekosistem riset dan inovasi daerah yang berdampak. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyadari bahwa peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam pendidikan dan kesehatan, tidak bisa hanya dilakukan secara sektoral atau administratif. Oleh karena itu, selama periode 2020–2024, pemerintah daerah secara aktif membangun dan memperkuat kerja sama riset dengan berbagai pemangku kepentingan: perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, mitra donor, serta komunitas profesi lokal. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan riset bersama, program penguatan kapasitas, pengembangan metode pembelajaran dan pelayanan berbasis data, hingga uji coba inovasi teknologi sederhana untuk layanan pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi tersebut turut mendorong

penyusunan *policy brief*, pemanfaatan sistem informasi bersama, serta replikasi model layanan berbasis inovasi yang telah terbukti efektif.



Gambar 2.38 Jumlah Kerjasama Riset Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pada tahun 2020, tercatat hanya dua kerja sama riset aktif yang mendukung penguatan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun hingga tahun 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 10 kolaborasi aktif, dengan dominasi kolaborasi di sektor pendidikan, khususnya dalam bidang pengembangan literasi numerasi, digitalisasi sekolah, dan perbaikan metode ajar kontekstual. Di bidang kesehatan, kerja sama banyak difokuskan pada peningkatan akses layanan dasar, promosi kesehatan komunitas, serta riset terkait gizi dan kesehatan ibu-anak. Penguatan kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan keluaran teknis riset, tetapi juga memperkuat jaringan antar-lembaga dan mempercepat adopsi inovasi dalam tata kelola pelayanan dasar masyarakat.

Sebagai bagian dari transformasi digital dan penguatan kapasitas riset daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap menyediakan sarana pendukung yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan teknologi lokal. Salah satu bentuk nyata dari dukungan ini adalah pengembangan dan pemanfaatan website jaringan informasi dan inovasi, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi pilar pembangunan sumber daya manusia (SDM). Website-website ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai repositori data, platform pelaporan

program, dan sarana diseminasi inovasi lokal. Dengan pendekatan ini, riset dan inovasi yang sebelumnya tersimpan dalam laporan internal kini dapat diakses oleh masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan melalui saluran digital yang lebih terbuka dan terstruktur. Berikut tabel ketersediaan website tematik pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 20 Ketersediaan Website Tematik Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Website Pendidikan Aktif	Website Kesehatan Aktif	Jumlah Website SDM Aktif
2020	Tidak tersedia	Tidak tersedia	0
2021	Portal Disdik dikembangkan	SIMKESDA diluncurkan	2
2022	Website Disdik aktif	SIMKESDA versi 2 aktif	2
2023	Terintegrasi Dapodik Daerah	SIMKESDA + Data Promkes	3
2024	Portal Inovasi SDM aktif	SIMKESDA dan Laporan Gizi	4

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pada tahun 2020, Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki website tematik SDM yang aktif. Namun pada tahun 2021 mulai dikembangkan portal Dinas Pendidikan dan Dashboard SIMKESDA untuk layanan kesehatan. Seiring peningkatan kebutuhan koordinasi dan akuntabilitas, pada 2022 dan 2023 dikembangkan portal Inovasi SDM Daerah, serta sistem informasi pendidikan yang terintegrasi dengan data nasional (Dapodik). Hingga tahun 2024, sedikitnya 4 situs tematik aktif dikelola oleh pemerintah daerah, OPD teknis, dan Bapperida, dengan dukungan data dan konten yang terus diperbarui. Penyediaan website jaringan ini menjadi jembatan penting dalam mewujudkan tata kelola riset yang transparan, kolaboratif, dan berbasis bukti serta memperkuat partisipasi publik dalam pengembangan kualitas SDM daerah.

3) Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

Transformasi sosial tidak pernah berjalan sendirian. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, kolaborasi menjadi jalan utama untuk membangun masa depan yang berbasis

ilmu pengetahuan dan keunggulan lokal. Sejak tahun 2020, Pemerintah Daerah mulai membuka diri terhadap bentuk-bentuk kemitraan baru lebih dinamis, lebih setara, dan lebih berdampak khususnya dalam bidang riset dan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas, Kabupaten Kepulauan Selayar aktif menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas profesi, LSM, serta mitra pembangunan. Kolaborasi tidak hanya dalam bentuk formal kerja sama, tetapi juga melalui pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan riset kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor. Guru, tenaga medis, birokrat muda, bahkan relawan desa dilibatkan dalam forum riset lokal yang inklusif dan solutif. Melalui kerja sama ini, lahirlah berbagai inisiatif nyata: pengembangan kurikulum adaptif berbasis potensi wilayah, pelatihan numerasi kontekstual bagi guru, studi pemetaan gizi berbasis komunitas, hingga riset digitalisasi promosi kesehatan di pelosok desa. Pemerintah daerah juga memfasilitasi platform kolaborasi seperti Forum Inovasi Daerah dan Klinik Riset Terapan, yang menjadi jembatan antara kebutuhan lokal dan kapasitas mitra eksternal.

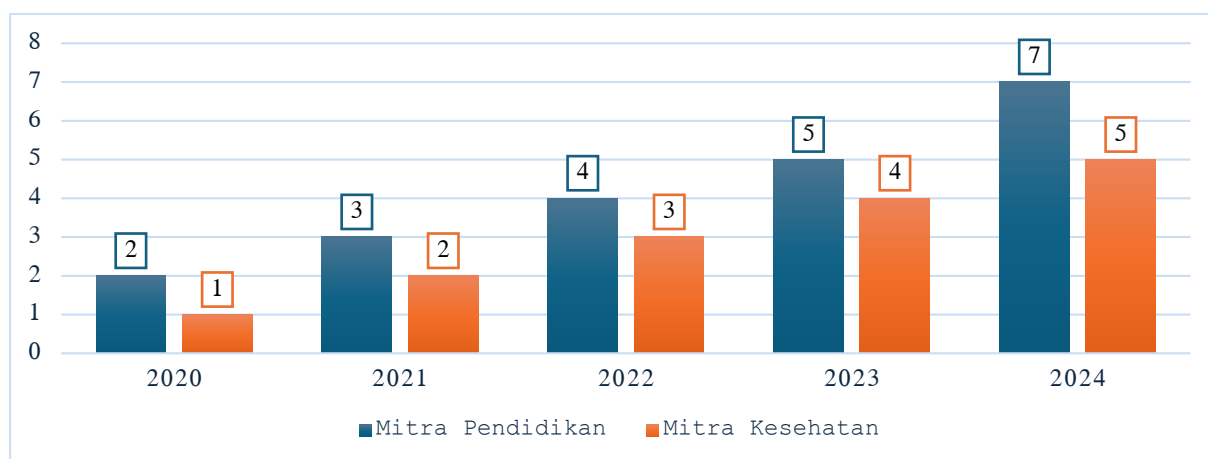
Yang membedakan kemitraan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah semangat kolektifnya. Bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi membangun rasa memiliki bersama atas perubahan. Semua pihak diposisikan sebagai mitra setara bukan sebagai pelaksana atau pengamat, tetapi sebagai pencipta solusi. Hingga tahun 2024, kemitraan riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjangkau lintas OPD, lintas sektor, dan lintas generasi. Kolaborasi ini telah mengubah wajah birokrasi dari sekadar pelaksana program menjadi pengelola pengetahuan. Dan yang terpenting, ia telah menjadi kekuatan sosial baru yang mempertemukan gagasan, harapan, dan aksi nyata untuk membangun Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih inklusif dan berdaya.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan komitmen nyata untuk tidak berjalan sendiri dalam mewujudkan transformasi sosial. Pemerintah daerah membangun jembatan kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan, kesehatan, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dalam kerangka penguatan sumber daya manusia. Upaya ini

mencerminkan arah pembangunan yang semakin terbuka, partisipatif, dan berbasis pada potensi kolektif.

Kemitraan antarkelembagaan menjadi strategi utama yang dipilih untuk mendorong inovasi program, peningkatan kapasitas SDM lokal, serta penciptaan solusi berbasis kebutuhan daerah. Pemerintah daerah secara aktif menggandeng lembaga perguruan tinggi untuk pelatihan guru dan tenaga kesehatan, menjalin kerja sama dengan NGO dalam edukasi kesehatan masyarakat, serta bermitra dengan instansi vertikal dan kementerian dalam program pendampingan pendidikan dasar dan layanan gizi anak.

Jumlah mitra yang terlibat dalam pengembangan SDM meningkat dari hanya 3 lembaga pada tahun 2020, menjadi 12 mitra aktif pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya menjadi pelaku inovasi, tetapi juga menjadi simpul jejaring kelembagaan yang mampu menyinergikan berbagai sumber daya demi tujuan bersama: peningkatan mutu manusia dan kesejahteraan masyarakat.



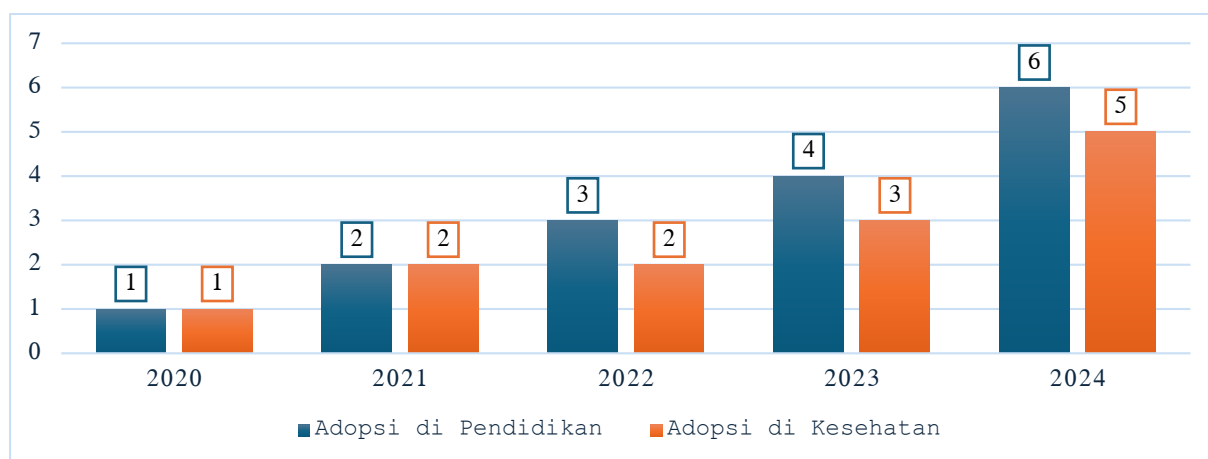
Gambar 2.39 Jumlah Mitra Antar Kelembagaan Untuk Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kemitraan ini tidak berhenti di ruang rapat dan MoU. Ia hadir dalam bentuk pelatihan guru di desa terpencil, program kesehatan berbasis komunitas, pendampingan anak berkebutuhan khusus, hingga riset partisipatif di kebun raya lokal. Inilah wujud dari

kekuatan kelembagaan kolaboratif yang menjadikan SDM sebagai pusat perubahan dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu ukuran keberhasilan riset dan inovasi di daerah bukan hanya pada jumlah dokumen atau kajiannya, tetapi pada sejauh mana hasil tersebut diadopsi dan memberi dampak nyata di lapangan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, selama periode 2020–2024, proses difusi atau penyebarluasan inovasi hasil riset SDM mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dalam sektor pendidikan maupun kesehatan. Difusi inovasi ini mencakup berbagai bentuk: dari implementasi model pembelajaran berbasis kearifan lokal di sekolah-sekolah, hingga pemanfaatan aplikasi sederhana untuk pemantauan gizi balita oleh kader posyandu. Inovasi yang sebelumnya hanya bersifat eksperimen terbatas, mulai diadopsi oleh OPD teknis, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Beberapa sekolah mulai menyesuaikan modul ajar dengan hasil riset lokal tentang karakter belajar siswa, sementara puskesmas mengintegrasikan pendekatan edukatif berbasis komunitas yang dikembangkan oleh LSM atau universitas mitra.



Gambar 2.40 Jumlah Adopsi/Implementasi Hasil Riset SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

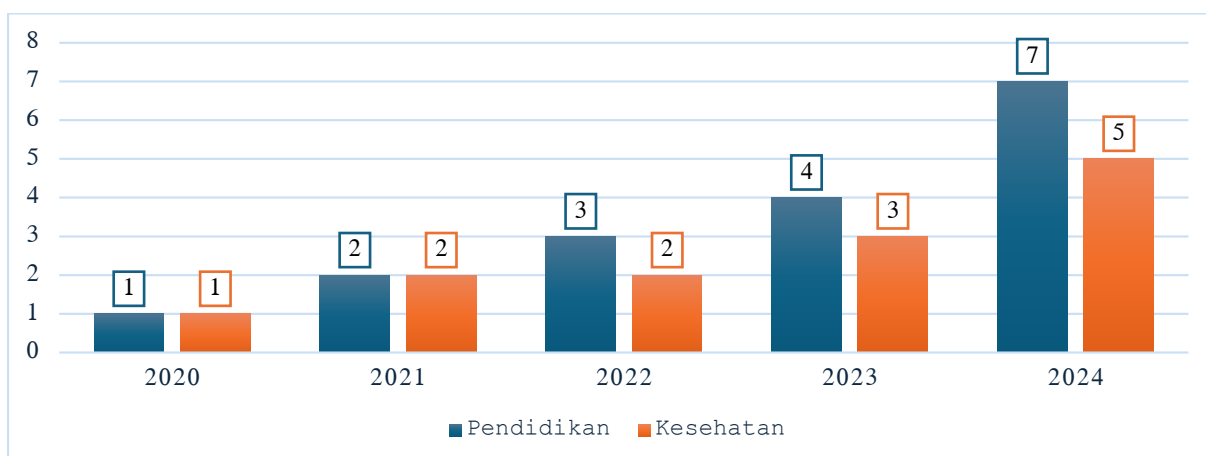
Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Jumlah adopsi inovasi meningkat dari 2 implementasi pada tahun 2020 menjadi 11 adopsi aktif pada 2024, yang mencerminkan kesadaran dan kesiapan sistem di tingkat daerah untuk menerapkan solusi berbasis riset. Peningkatan ini juga didorong oleh

tumbuhnya budaya dokumentasi dan evaluasi, sehingga inovasi tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat direplikasi di lokasi lain secara berkelanjutan. Difusi inovasi menjadi jembatan penting antara pengetahuan dan kebijakan. Dan di Kabupaten Kepulauan Selayar, jembatan ini mulai terbangun dengan kokoh: menghubungkan hasil-hasil riset dengan ruang kelas, pusat layanan kesehatan, serta komunitas akar rumput yang selama ini menjadi subjek sekaligus agen perubahan.

Transformasi sosial tidak akan berlangsung optimal bila pengetahuan hanya berhenti di meja birokrasi atau ruang seminar. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, pemerintah daerah mulai mengambil langkah konkret untuk menjembatani hasil riset dengan dunia praktik, dengan cara memperkuat mekanisme diseminasi dan pemanfaatan hasil riset oleh pelaku inovasi lokal baik dari unsur sekolah, puskesmas, komunitas, maupun UMKM yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sejak 2020, kegiatan diseminasi tidak lagi bersifat seremonial, tetapi dikemas dalam berbagai bentuk interaktif: forum berbagi praktik baik, pelatihan berbasis hasil riset, workshop inovasi SDM, hingga publikasi digital melalui website OPD. Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan hasil kajian oleh guru dan tenaga kesehatan dalam menyusun modul ajar, panduan layanan, hingga strategi pemberdayaan masyarakat. Berikut gambarannya:



Gambar 2.41 Jumlah Hasil Riset yang Didiseminasikan kepada Pelaku Inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Jumlah hasil riset SDM yang didiseminasikan meningkat dari hanya 2 pada tahun 2020 menjadi 12 diseminasi aktif pada tahun 2024. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan produktivitas riset, tetapi juga kesadaran kolektif bahwa pengetahuan harus dibagikan agar dapat berdampak luas. Yang menarik, sebagian besar diseminasi dilakukan lintas sektor dan bersifat terbuka, menjangkau pelaku inovasi akar rumput yang sebelumnya jarang terlibat langsung dalam proses berbasis riset. Dengan strategi ini, Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil memperluas jangkauan hasil riset kepada mereka yang paling dekat dengan realitas dan kebutuhan masyarakat. Diseminasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian, tetapi menjadi proses transformatif—menghidupkan riset dalam praktik, dan menjadikan pelaku inovasi sebagai bagian dari perubahan yang berkelanjutan.

4) Budaya Riset dan Inovasi Daerah

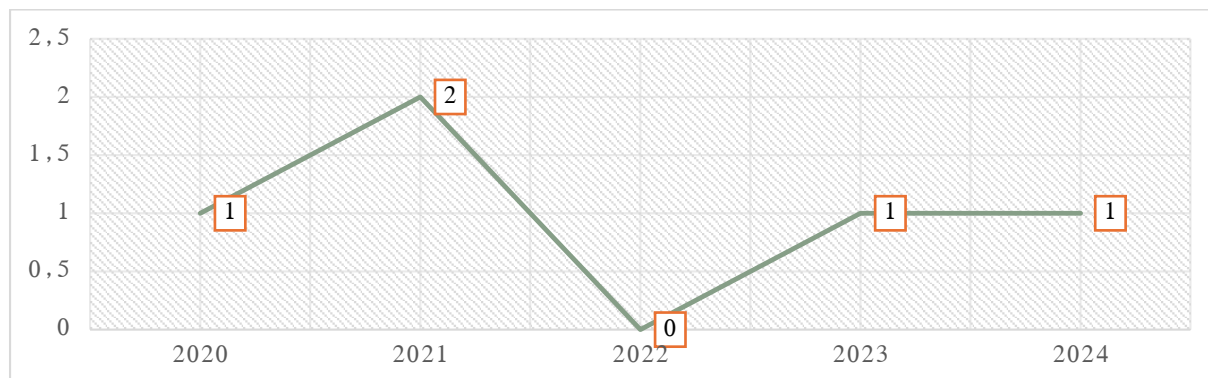
Riset dan inovasi bukan hanya persoalan teknologi atau laboratorium. Ia adalah budaya cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah dengan pendekatan berbasis pengetahuan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, sejak 2020, langkah kecil menuju transformasi sosial dimulai dari upaya membangun kesadaran kolektif bahwa setiap warga, guru, tenaga kesehatan, dan pemuda desa adalah bagian dari ekosistem inovasi. Budaya riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hadir secara instan. Ia tumbuh melalui forum diskusi komunitas, praktik belajar dari bawah, eksperimen lokal, serta dorongan keberanian mencoba sesuatu yang baru. Pemerintah daerah membangun panggungnya dari lomba inovasi desa, pelatihan pembuatan *policy brief*, hingga ajang diseminasi hasil riset SDM secara terbuka. Ruang-ruang belajar diperluas, tidak hanya di sekolah atau puskesmas, tetapi juga di posyandu, taman literasi, dan ruang publik.

Selama lima tahun terakhir, muncul gelombang baru generasi lokal yang mulai memandang riset bukan sebagai urusan akademik semata, tetapi sebagai alat perubahan sosial. Anak muda mengembangkan aplikasi sederhana untuk layanan kesehatan. Guru mengadaptasi kurikulum berdasarkan hasil riset karakter belajar siswa. Tenaga kesehatan menciptakan metode edukasi gizi yang kontekstual dan berbasis budaya lokal. Semua itu menjadi bukti bahwa budaya riset telah mulai berakar. Budaya inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar tumbuh dalam semangat gotong royong, kesederhanaan, dan

keinginan untuk maju bersama. Pemerintah daerah menjadi katalisator, tetapi masyarakatlah yang menjadi pelaku utama. Melalui pendekatan ini, transformasi sosial tidak lagi hanya menjadi cita-cita birokrasi, tetapi menjadi gerakan kolektif yang hidup dalam praktik sehari-hari.

Hingga tahun 2024, budaya riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjadi fondasi baru dalam memperkuat kualitas SDM: membentuk warga yang kritis, kreatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Ini bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara pandang bahwa setiap orang punya potensi menjadi inovator di ruang hidupnya sendiri.

Selama lima tahun terakhir, promosi dan kampanye inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan dinamika yang positif, meskipun masih bersifat sporadis dan belum sepenuhnya terlembagakan melalui forum inovasi daerah yang berkelanjutan. Berikut gambarannya dalam periode 2020-2024:



Gambar 2.42 Jumlah Inovasi Terkait SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

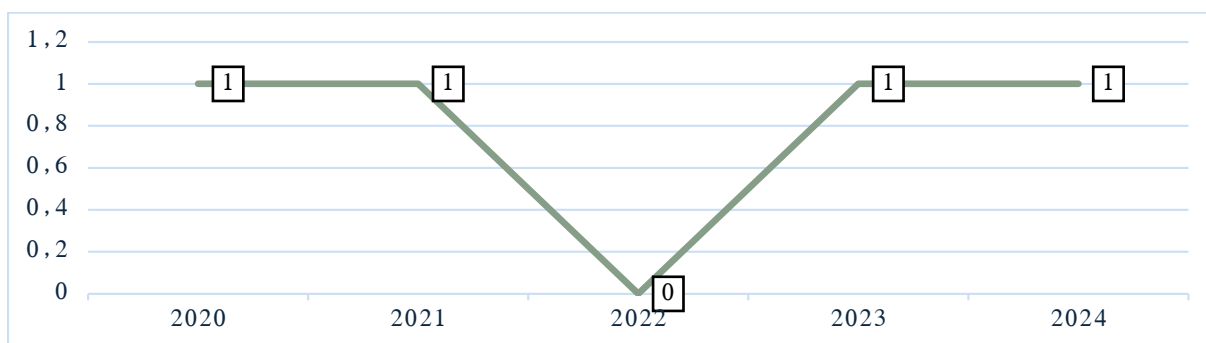
Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pada tahun 2020, inovasi yang tercatat adalah inisiatif Pelayanan Kesehatan Bergerak, yang menunjukkan perhatian terhadap pemerataan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Inovasi ini menjadi cerminan adaptasi sistem kesehatan lokal dalam menjawab tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas. Tahun 2021 mencatat dua inovasi berbasis pendidikan, yaitu GESIT (Gerakan Motivasi Pendidik Taman Kanak-Kanak) dan SMUTLINKS (Sepuluh Menit Untuk Lingkungan Sekolah). Keduanya menonjolkan upaya partisipatif guru dan siswa dalam

meningkatkan kualitas pembelajaran serta kesadaran terhadap lingkungan pendidikan yang sehat dan aman. Namun pada tahun 2022, tidak ada inovasi yang terdokumentasi secara resmi, menandakan belum terbangunnya mekanisme sistematis dalam mendata, menilai, dan mempromosikan inisiatif-inisiatif lokal yang berkembang. Hal ini menjadi catatan penting bahwa meskipun inovasi bisa muncul secara organik, peran pemerintah daerah dalam mengelola dan mengampanyekan inovasi sangat menentukan keberlanjutan dan replikasi. Momentum kembali muncul pada tahun 2023 melalui inovasi GERAKAN SEHATI (Selesaikan Pendidikan, Hasilkan Pendapatan dan Tiba Saatnya untuk Menikah) yang menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai pilar kemandirian sosial-ekonomi. Kemudian, pada tahun 2024, hadir GESEKTAMAN (Gerakan Sekolah Tertib dan Aman) sebagai bentuk intervensi budaya disiplin dan keselamatan di lingkungan pendidikan.

Secara umum, meskipun jumlah inovasi per tahun belum banyak, isinya mencerminkan kreativitas dan kepedulian lokal terhadap isu-isu pendidikan dan kesehatan. Namun, agar promosi dan kampanye inovasi menjadi pilar dalam pembangunan SDM, dibutuhkan forum inovasi daerah yang aktif, dukungan kebijakan afirmatif, serta dokumentasi dan publikasi yang sistematis.

Dalam upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM), partisipasi aktif dalam ajang kompetisi dan penghargaan inovasi menjadi salah satu indikator penting. Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan komitmen yang cukup konsisten dalam mengikuti kompetisi nasional melalui keikutsertaan pada Innovative Government Award (IGA) selama empat dari lima tahun terakhir.



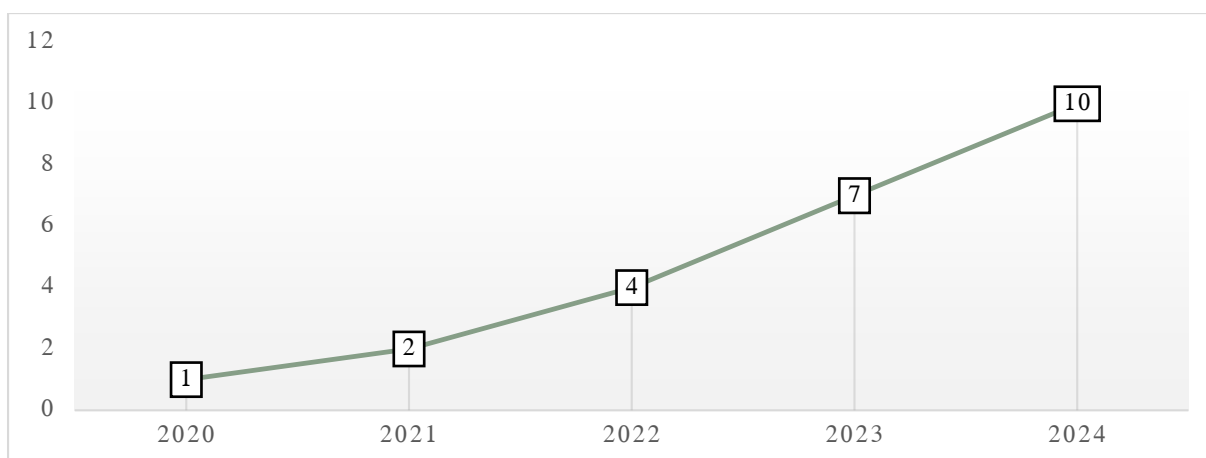
Gambar 2.43 Jumlah Penghargaan/Kegiatan Kompetisi Inovasi SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil berpartisipasi dalam IGA, yang merupakan ajang nasional bergengsi dari Kemendagri untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan menerapkan inovasi, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Kabupaten Kepulauan Selayar telah memandang penting peran inovasi sebagai instrumen perbaikan layanan publik, khususnya dalam pembangunan manusia. Namun, pada tahun 2022, tidak tercatat partisipasi atau raihan penghargaan, yang mengindikasikan adanya potensi stagnasi dalam mendorong investasi di bidang SDM. Absennya partisipasi pada tahun ini bisa menjadi refleksi atas lemahnya dokumentasi atau minimnya kegiatan inovatif yang layak diangkat ke tingkat kompetisi. Kondisi membaik kembali pada 2023 dan 2024, dengan partisipasi aktif yang kembali tercatat dalam IGA. Keterlibatan ini menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya mampu menghasilkan inovasi, tetapi juga mulai membangun konsistensi dalam mempromosikannya ke level nasional.

Meski begitu, ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas keikutsertaan dalam berbagai ajang penghargaan lainnya di bidang SDM tidak hanya IGA agar semakin banyak inovasi yang terekspos, mendapatkan dukungan, serta menjadi inspirasi bagi wilayah lain. Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan terencana, perlu dibentuk sistem internal penghargaan daerah, pendampingan proposal inovasi, serta penguatan forum inovasi yang dapat membantu mengidentifikasi, mengelola, dan mengusulkan inovasi lokal ke kompetisi nasional secara berkala.

Jenis usaha yang dibina mencakup beragam sektor SDM, mulai dari usaha *edutech* (teknologi pembelajaran sederhana), produk herbal berbasis kesehatan lokal, digitalisasi layanan pendidikan desa, hingga jasa pelatihan berbasis potensi daerah. Pemerintah daerah menyediakan pendampingan teknis, pelatihan manajemen, serta fasilitasi akses ke pasar melalui kolaborasi dengan BUMDes dan koperasi. Jumlah *start-up* atau UMKM yang dibina melalui inkubasi daerah meningkat dari hanya 1 usaha binaan pada tahun 2020 menjadi 10 unit usaha aktif pada tahun 2024, menunjukkan bahwa ekosistem inovasi berbasis komunitas telah mulai terbentuk. Program ini tidak hanya mencetak pelaku usaha, tetapi juga menumbuhkan SDM yang adaptif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Berikut Gambar yang menggambarkan jumlah start-up/UMKM yang dibina melalui inkubasi daerah periode 2020-2024.



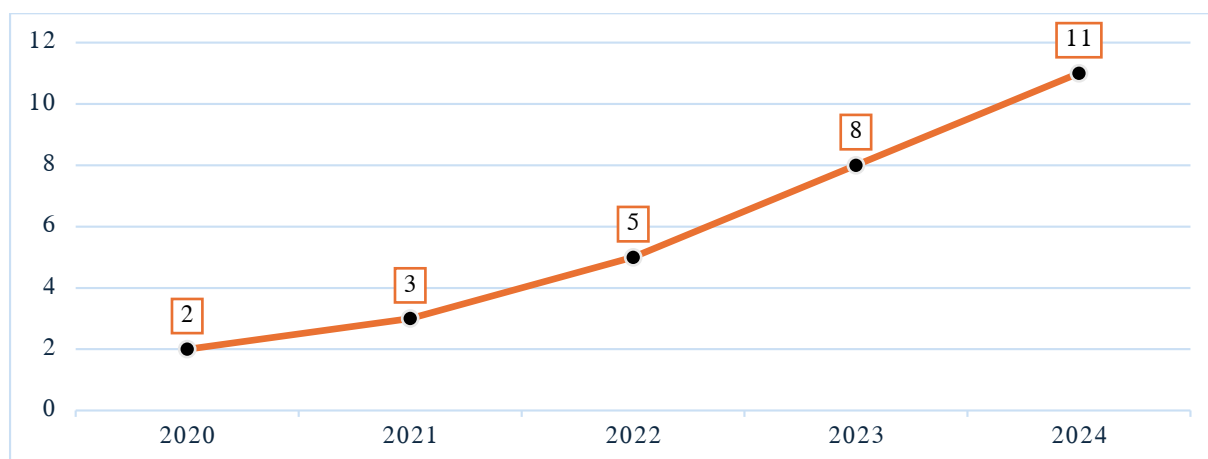
Gambar 2.44 Jumlah Start-up/UMKM SDM yang Dibina melalui Inkubasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Sejak 2020, pemerintah daerah mulai melakukan langkah sistematis untuk menginventarisasi, mengembangkan, dan melindungi pengetahuan serta teknologi masyarakat lokal, sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia. Langkah awal dilakukan melalui pendataan praktik-praktik lokal yang terbukti memiliki nilai fungsi, baik dalam pendidikan nonformal maupun pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Misalnya, metode pengenalan huruf aksara lokal yang digunakan di wilayah

pesisir, teknik pemijatan bayi oleh dukun berlisensi lokal, atau pengobatan herbal berbasis tanaman endemik yang telah digunakan oleh masyarakat selama puluhan tahun.

Pemerintah daerah mendorong agar pengetahuan ini tidak hilang oleh arus modernisasi, tetapi dikembangkan dengan pendekatan ilmiah dan disinergikan dengan program formal. Pendampingan dilakukan dalam bentuk pelatihan pencatatan pengetahuan lokal, workshop adaptasi ke kurikulum muatan lokal, hingga pengusulan hak cipta atau perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).



Gambar 2.45 Jumlah Pengetahuan atau Teknologi Masyarakat Lokal yang Dimanfaatkan Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Gambar tersebut menunjukkan jumlah pengetahuan lokal yang teridentifikasi dan mulai dimanfaatkan meningkat dari hanya 2 item pada tahun 2020 menjadi 11 pengetahuan/teknologi lokal yang terdokumentasi dan digunakan aktif pada tahun 2024. Inisiatif ini membuka ruang dialog antara ilmu modern dan kearifan lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya sebagai bagian dari strategi pengembangan SDM yang kontekstual dan berkelanjutan.

5) Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi Daerah

Transformasi sosial yang berkelanjutan menuntut lebih dari sekadar inisiatif riset yang tersebar, dibutuhkan sinergitas bersama. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, kesadaran ini mulai menjadi fondasi dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang terpadu, terarah, dan selaras dengan agenda pembangunan manusia. Selama periode

2020–2024, pemerintah daerah mengambil langkah strategis untuk menghadirkan koherensi antarsektor, antarprogram, dan antarlevel pemerintahan dalam pengelolaan riset dan inovasi. Berbagai perangkat daerah mulai menyesuaikan arah programnya agar saling mendukung satu sama lain.

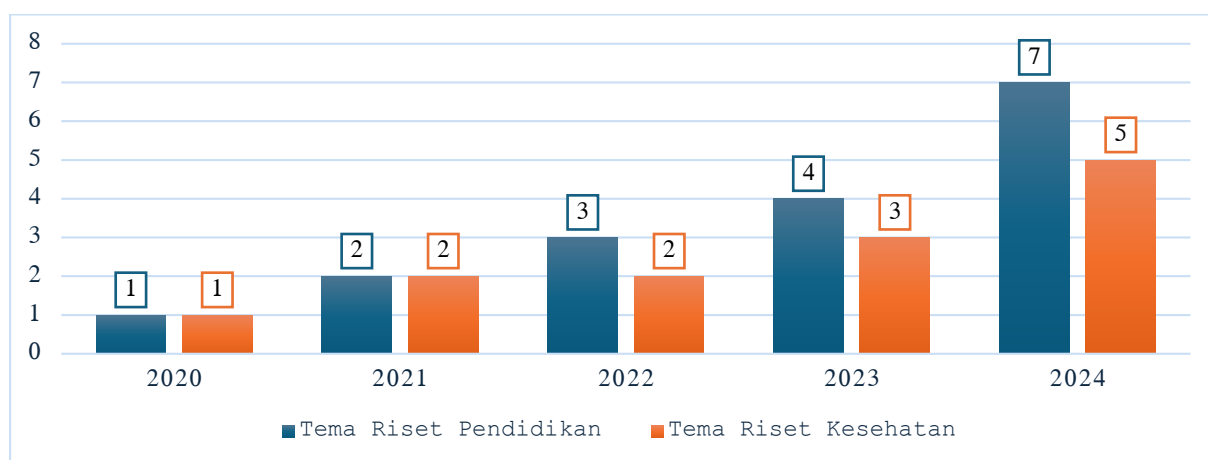
Data hasil riset digunakan lintas sektor yaitu hasil studi gizi dipakai dalam perencanaan pangan desa, temuan tentang model belajar adaptif dijadikan dasar kurikulum muatan lokal, dan inovasi pelayanan kesehatan dimanfaatkan dalam penyusunan regulasi desa sehat. Koherensi ini juga mendorong munculnya forum lintas sektor yang mempertemukan peneliti, OPD, guru, tenaga kesehatan, dan mitra eksternal dalam perencanaan bersama. Tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri semua dikaitkan pada satu benang merah yaitu peningkatan kualitas SDM sebagai dasar perubahan sosial.

Melalui pendekatan ini, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya membangun sistem riset yang responsif, tetapi juga membentuk budaya kerja pemerintahan yang berbasis data dan kolaboratif. Keterpaduan ini menjadi bukti bahwa inovasi daerah bukan hasil proyek jangka pendek, melainkan proses jangka panjang yang ditopang oleh arah kebijakan yang selaras dan koordinasi yang erat. Hingga tahun 2024, model koherensi ini telah memperkuat kepercayaan antar instansi, mempercepat pemanfaatan hasil riset, dan membangun SDM yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kontributif terhadap pembangunan berkelanjutan daerah.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, pemerintah daerah tidak lagi menunggu kebijakan dari atas, melainkan mulai mengambil prakarsa untuk mendorong riset dan inovasi berbasis kebutuhan lokal, khususnya dalam mendukung promosi produk unggulan daerah dan menyelesaikan permasalahan strategis pembangunan sumber daya manusia. Sejak 2020, pemerintah daerah bersama Bapperida dan OPD teknis mulai menyusun agenda riset tematik yang merespons langsung tantangan dan peluang daerah. Misalnya, studi mengenai strategi pendidikan untuk anak pesisir dan pulau terpencil, riset gizi balita di wilayah rentan, pemetaan keterampilan pemuda untuk pelatihan vokasi, hingga inovasi digitalisasi pembelajaran dan pelayanan kesehatan primer. Tema-tema ini tidak hanya

berasal dari inisiatif birokrasi, tetapi juga hasil usulan masyarakat, sekolah, puskesmas, dan forum komunitas riset.

Gambar tersebut menunjukkan peningkatan jumlah tema riset menunjukkan bahwa kebijakan riset di Kabupaten Kepulauan Selayar makin mendekati ke realitas. Dari hanya 2 tema riset pada tahun 2020, prakarsa lokal telah berkembang menjadi 12 tema strategis yang aktif dijalankan dan dimanfaatkan untuk kebijakan maupun program daerah pada tahun 2024. Tema-tema ini tidak hanya menjadi dasar perumusan program, tetapi juga menjadi alat advokasi berbasis data, serta menjadi rujukan dalam promosi kekuatan lokal, termasuk sektor pendidikan berbasis budaya, dan kesehatan berbasis pendekatan keluarga. Prakarsa ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan riset yang tidak sekadar akademik, tetapi terarah, aplikatif, dan memperkuat ekosistem inovasi sosial berbasis potensi dan tantangan lokal di Kabupaten Kepulauan Selayar.

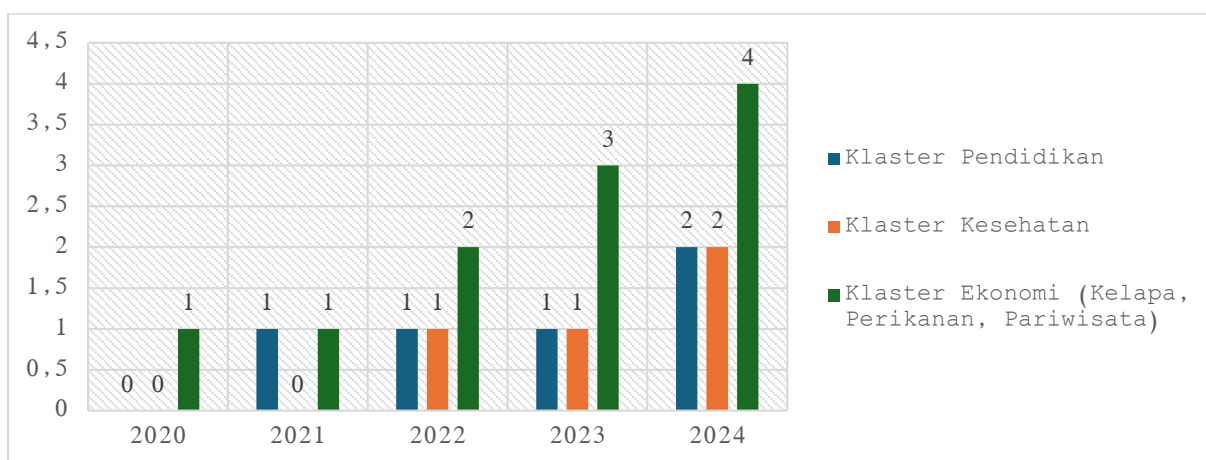


Gambar 2.46 Jumlah Tema Riset yang Mendukung Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pengembangan inovasi daerah tidak dapat berjalan sendiri, namun membutuhkan ekosistem yang saling terhubung, saling belajar, dan saling memperkuat. Salah satu pendekatan yang semakin dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penyelenggaraan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah, yang mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Sejak 2020, strategi pengembangan SDM tidak hanya difokuskan melalui

pelatihan atau program pendidikan formal, tetapi juga melalui penguatan klaster-klaster inovasi yang dibangun dari potensi unggulan seperti kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok, dan pariwisata. Di dalam klaster ini, riset, pelatihan, teknologi, kewirausahaan, dan pembinaan komunitas difokuskan secara tematik, terhubung dengan pelaku utama (petani, nelayan, pelaku wisata), dan didampingi oleh OPD serta mitra strategis. Hal tersebut tergambar sebagai berikut:



Gambar 2.47 Jumlah Klaster Inovasi yang Memberdayakan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

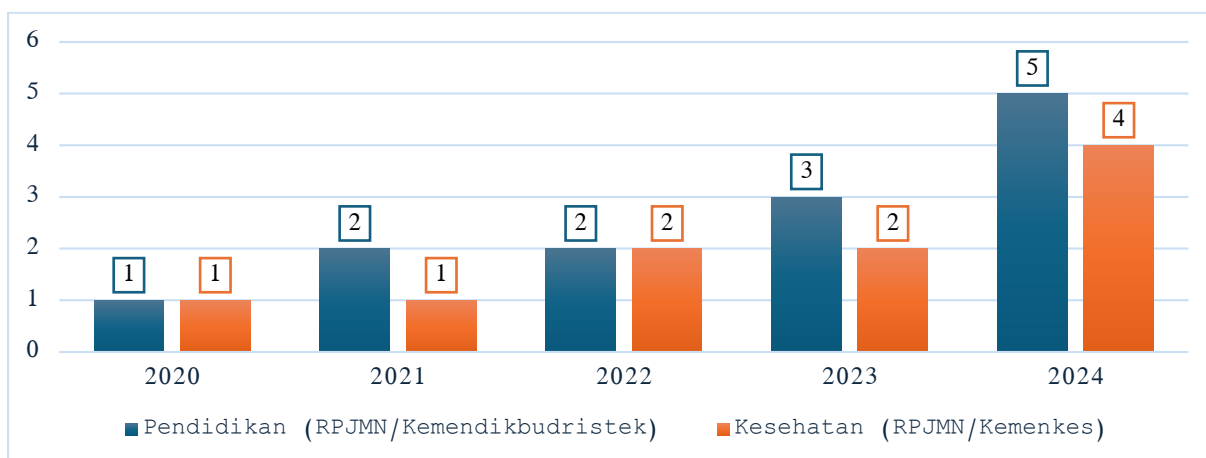
Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Klaster-klaster ini menjadi wadah konkret pemberdayaan SDM lokal. Contohnya, klaster inovasi kelapa melibatkan pemuda desa dalam pengolahan VCO dan pupuk organik berbasis limbah tempurung, klaster pariwisata mengembangkan pelatihan pemandu wisata lokal yang berbasis kearifan budaya, sementara klaster perikanan menyediakan pelatihan teknologi pengolahan hasil tangkapan berbasis riset lokal. Jumlah klaster inovasi yang secara langsung memberdayakan SDM meningkat dari hanya 1 klaster aktif pada tahun 2020, menjadi 8 klaster yang beroperasi dan terus berkembang pada tahun 2024. Klaster ini tidak hanya menjadi simpul ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pertukaran pengetahuan, dan lokus inovasi berbasis masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi sosial dapat dibangun melalui simpul-simpul inovasi lokal yang berakar pada produk unggulan daerah dan tumbuh bersama kekuatan manusianya.

Sinkronisasi arah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan transformasi sosial yang berkelanjutan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, kesesuaian ini semakin diperkuat melalui keterpaduan program riset dan inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan, yang tidak hanya merespon isu lokal, tetapi juga mengacu pada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, RPJPN, serta rencana strategis kementerian terkait. Sejak tahun 2020, pemerintah daerah secara aktif menyelaraskan program riset pengembangan SDM dengan kebijakan pusat seperti: penguatan pendidikan vokasi, revitalisasi layanan kesehatan primer, percepatan penurunan stunting, transformasi digital sekolah, serta inovasi tata kelola kesehatan. Program-program tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan daerah, baik melalui dokumen RPJMD, Renstra OPD, maupun program Bapperida yang difokuskan pada riset berbasis kebutuhan daerah dan prioritas nasional.

Jumlah kegiatan atau program riset SDM yang memiliki kesesuaian dengan dokumen pusat mengalami peningkatan dari 2 kegiatan yang selaras pada tahun 2020, menjadi 9 kegiatan pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antartingkat pemerintahan semakin kuat, tidak hanya pada tataran formal, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Kesesuaian ini menjamin bahwa program riset daerah tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari arus besar pembangunan nasional. Dengan demikian, hasil riset lokal dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka kebijakan makro, sekaligus membuka peluang dukungan dari pusat, baik dalam bentuk pembiayaan, pelatihan, maupun integrasi data dan sistem. Berikut gambarannya:



Gambar 2.48 Kegiatan/Program Riset SDM yang Sesuai dengan Dokumen Pusat (RPJMN/RPJPN/Kementerian) Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

6) Penyeragaman dengan Perkembangan Global

Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini terus mengupayakan penyeragaman arah kebijakan, riset, dan inovasi dengan dinamika global yang memengaruhi pembangunan sumber daya manusia. Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan komitmen kuat untuk mengaitkan pengembangan SDM dengan agenda-agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, isu ketahanan pangan, serta kesehatan dan pendidikan inklusif. Penyeragaman ini diwujudkan melalui berbagai bentuk. Pemerintah daerah mulai menyisipkan prinsip-prinsip global ke dalam perencanaan lokal misalnya, pendekatan gender dalam pendidikan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk pelayanan kesehatan, serta penguatan literasi digital dalam pembelajaran berbasis komunitas. Dalam sektor pendidikan, kurikulum lokal dikembangkan dengan memperhatikan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan adaptasi terhadap teknologi. Sementara di bidang kesehatan, program penurunan stunting, sanitasi berbasis masyarakat, dan promosi gaya hidup sehat diselaraskan dengan standar WHO dan praktik baik global lainnya.

Lebih dari itu, Kabupaten Kepulauan Selayar juga mulai membuka ruang untuk kolaborasi internasional baik dalam bentuk pelatihan daring, pertukaran pengetahuan dengan NGO asing, hingga pemanfaatan platform global untuk riset berbasis data terbuka.

Hal ini menandai langkah awal daerah dalam menjadikan SDM-nya sebagai bagian dari warga dunia, tanpa kehilangan akar kultural lokal.

Penyelarasan dengan perkembangan global bukan hanya soal adopsi, tetapi juga soal adaptasi. Dan Kabupaten Kepulauan Selayar membuktikan bahwa meskipun berada di wilayah kepulauan yang geografisnya menantang, arah pembangunan manusianya tetap terhubung dengan denyut dunia. Dalam lima tahun terakhir, riset dan inovasi di daerah ini semakin relevan, responsif, dan kontributif terhadap tantangan global baik dari sisi pendidikan yang berkeadilan, hingga kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah dunia yang saling terhubung, kemampuan suatu daerah untuk memahami dan merespons isu global menjadi bagian penting dari kemajuan lokal. Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan langkah progresif dalam lima tahun terakhir dengan mulai mengintegrasikan isu-isu internasional ke dalam pengembangan sumber daya manusia dan ekosistem riset inovasi lokal. Isu seperti perubahan iklim, kesehatan global, pendidikan inklusif, ketahanan pangan, dan revolusi industri 4.0 tidak lagi dianggap sebagai urusan internasional semata, melainkan sudah masuk dalam kesadaran dan perencanaan daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap menghadirkan program-program tematik yang memadukan tantangan lokal dengan pendekatan global. Misalnya, edukasi mitigasi perubahan iklim berbasis sekolah, kampanye sanitasi dan gizi yang selaras dengan standar WHO, hingga pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa dalam semangat transformasi digital global.

Ketersediaan program yang mengintegrasikan isu global dengan penguatan SDM pun mengalami peningkatan signifikan. Dari hanya 1 program yang berbasis isu global pada tahun 2020, kini telah berkembang menjadi 8 program lintas sektor pada tahun 2024, dengan dukungan dari OPD teknis, Bapperida, serta mitra kerja sama luar negeri dan nasional. Program-program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran SDM lokal terhadap tantangan global, tetapi juga memperkuat daya adaptasi dan resiliensi daerah terhadap disrupsi yang mungkin muncul di masa depan.

Dengan pendekatan ini, Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan bahwa riset dan inovasi lokal bisa bersuara dalam wacana global bahkan dalam konteks kepulauan yang jauh dari pusat. Komitmen terhadap isu internasional telah memperkaya

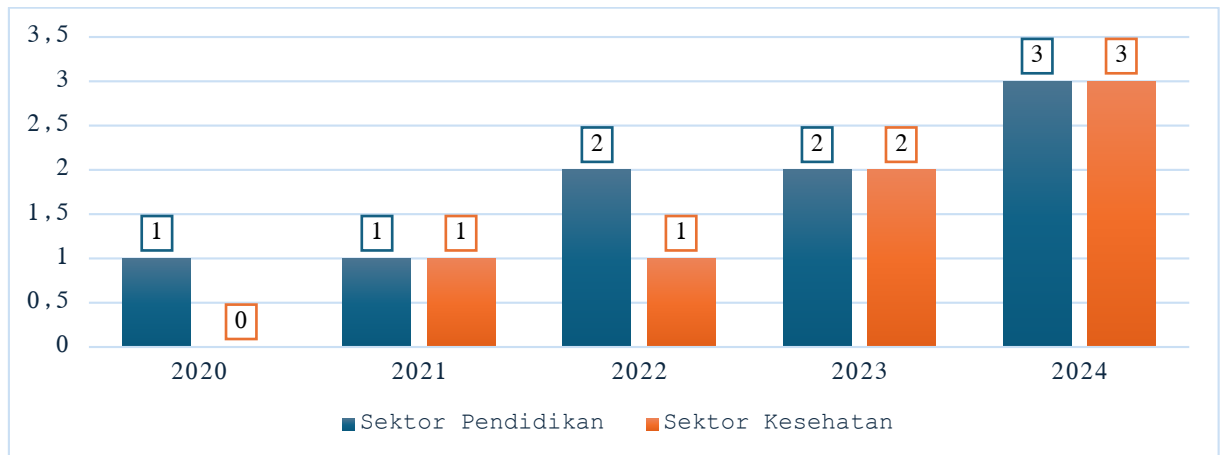
praktik lokal, menjadikan SDM daerah lebih siap, tangguh, dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Berikut data tabel terkait hal tersebut:

Tabel 2. 21 Ketersediaan Program Daerah yang Mengintegrasikan SDM dengan Isu Global Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Tahun	Isu Global yang Diangkat	Jumlah Program Integratif
2020	Gizi anak dan kesehatan ibu (SDGs)	1
2021	Pendidikan inklusif berbasis gender	2
2022	Perubahan iklim dalam pendidikan lingkungan	3
2023	Literasi digital & ketahanan pangan lokal	5
2024	Pendidikan hijau, sanitasi global, dan digital health	8

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Di era keterhubungan global, kerja sama internasional menjadi pintu penting bagi daerah untuk mempercepat pembelajaran, memperluas akses sumber daya, dan membangun kapasitas SDM yang mampu bersaing di tingkat dunia. Kabupaten Kepulauan Selayar, meskipun berada di wilayah kepulauan terpencil, tidak tertinggal dalam membangun jejaring lintas negara demi memperkuat pembangunan manusia. Sejak 2020, pemerintah daerah mulai merintis kemitraan internasional strategis untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Kerja sama ini tidak semata-mata dalam bentuk hibah atau bantuan teknis, tetapi berkembang menjadi kolaborasi pengetahuan, pertukaran praktik baik, hingga pendampingan program berbasis teknologi dan inovasi sosial. Misalnya, program pelatihan guru dengan pendekatan pendidikan inklusif dari lembaga pendidikan di Australia, pendampingan layanan kesehatan ibu-anak dari mitra kesehatan Jerman, serta webinar dan workshop daring yang mempertemukan tenaga pendidik Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mitra dari Asia Tenggara.



Gambar 2.49 Jumlah Kerjasama Internasional Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

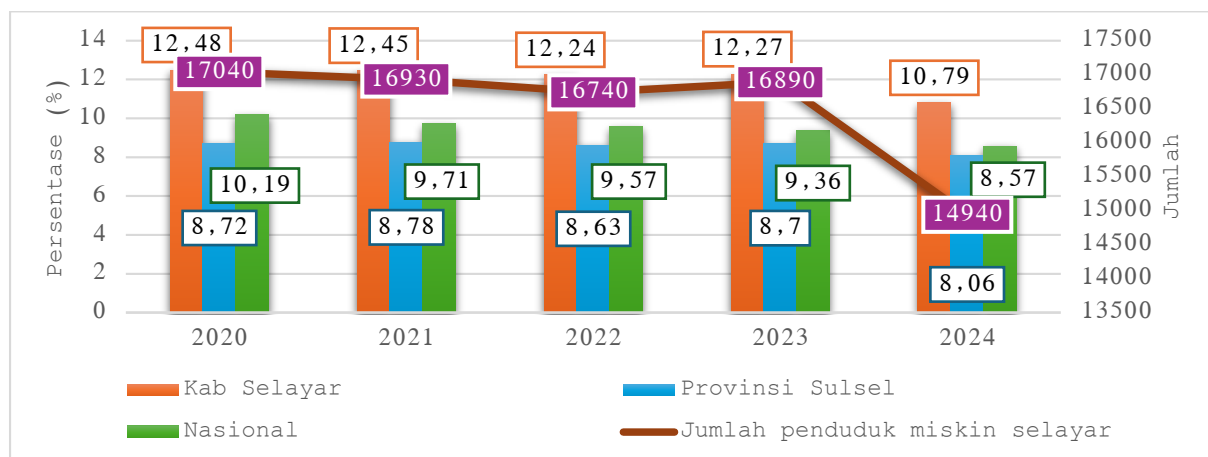
Gambar tersebut di atas menunjukkan jumlah kerja sama internasional yang aktif terus meningkat seiring dengan kesiapan daerah dan kepercayaan mitra luar negeri. Dari hanya 1 kerja sama aktif pada tahun 2020, Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencatat 6 bentuk kolaborasi internasional aktif hingga tahun 2024. Ini mencakup sektor digitalisasi pembelajaran, edukasi lingkungan, penurunan stunting, hingga kerja sama penelitian lintas negara.

Penguatan kerja sama internasional ini bukan sekadar memperluas jaringan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri lokal bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi laboratorium kecil dari praktik global. SDM lokal bukan lagi sekadar penerima manfaat, tetapi turut menjadi pelaku inovasi yang kontribusinya diakui secara luas.

2.2.1.3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi yang melimpah, baik dari sisi sumber daya alam maupun kekayaan budaya dan kelautan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar masih menghadapi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pengendalian pengangguran. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan kesejahteraan

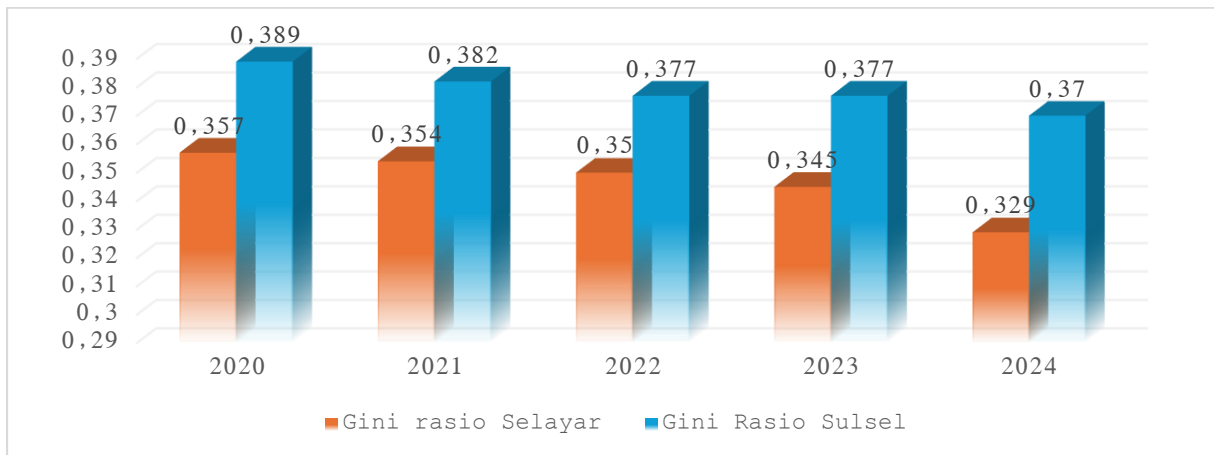
masyarakat perlu ditetapkan sebagai salah satu tema prioritas dalam penyusunan dokumen ini. Tema prioritas ini menjadi sangat relevan karena menyentuh langsung aspek fundamental dalam pembangunan manusia dan daya saing daerah, serta menjadi pilar utama dalam kebijakan riset dan inovasi di lima tahun mendatang.



Gambar 2.50 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan, dan Nasional 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

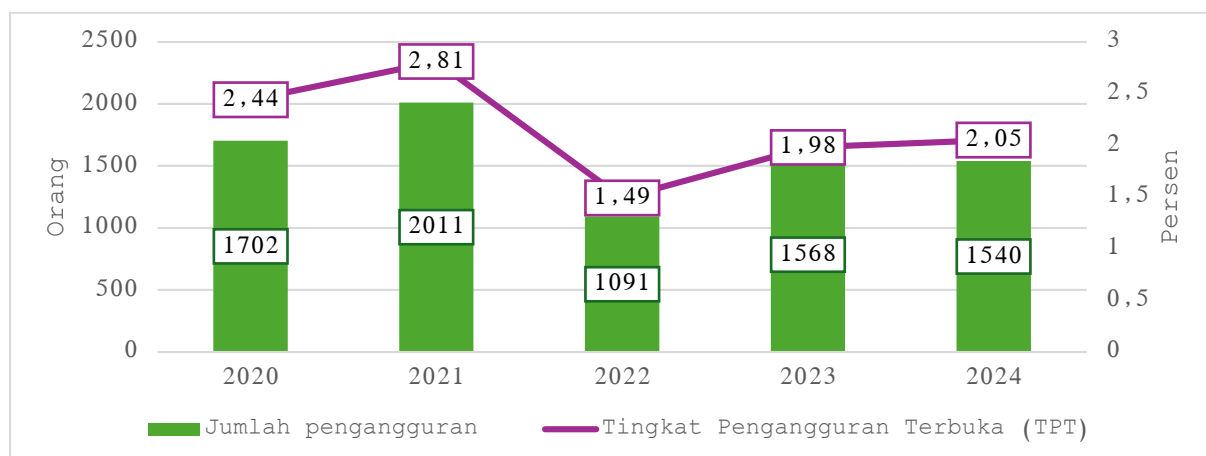
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2020–2024, dari 12,48% pada tahun 2020 menjadi 10,79% di tahun 2024. Secara absolut, jumlah penduduk miskin turun dari 17.040 jiwa menjadi 14.940 jiwa. Meskipun terdapat trend penurunan dalam sisi persentase dan absolut, angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar secara konsisten masih lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (8,06%) dan nasional (8,57%) pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan struktural yang signifikan dalam mengakselerasi pengurangan kemiskinan di wilayah ini. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan pendekatan riset dan inovasi yang tidak hanya menysar aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan spasial yang melekat pada karakter daerah kepulauan.



Gambar 2.51 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dan Prov. Sulawesi Selatan 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Selain kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan juga menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren penurunan dari 0,357 pada tahun 2020 menjadi 0,329 pada tahun 2024. Meskipun lebih rendah dari capaian di Provinsi Sulawesi Selatan (0,37), angka ini masih mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Penurunan Gini rasio ini memang sudah baik, namun tetap harus menjadi perhatian utama, terutama karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar masih bergantung pada sektor informal dengan akses terbatas terhadap modal, pasar, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, dalam lima tahun mendatang, riset dan inovasi daerah perlu diarahkan untuk menjangkau kelompok marginal dan rentan melalui pelatihan penggunaan teknologi, model bisnis inklusif, serta penguatan kapasitas SDM.



Gambar 2.52 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Dari aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung berfluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 2,44% dan sempat menurun drastis menjadi 1,49% di tahun 2022. Namun, tren ini kembali naik menjadi 2,05% di tahun 2024. Secara umum, tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Namun kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kesempatan kerja yang tersedia. Berdasarkan publikasi BPS (2025), struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor informal, yang umumnya tidak memerlukan kualifikasi tertentu. Di tahun 2024, penduduk yang bekerja di sektor informal tercatat sebesar 53,2%, sedangkan hanya 46,8% yang bekerja di sektor formal. Ini menandakan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada dalam kondisi kerja yang tidak memiliki perlindungan sosial, jaminan ketenagakerjaan, atau kepastian penghasilan. Pekerja informal umumnya terlibat dalam aktivitas pekerjaan yang rentan terhadap guncangan ekonomi, perubahan musim, serta tidak menjamin keberlangsungan hidup dalam jangka panjang. Selain itu, masih terdapat kesenjangan gender dalam akses terhadap pekerjaan. Dalam lima tahun terakhir, TPT Perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Di tahun 2024, tingkat pengangguran perempuan tercatat sebesar 2,25% sementara laki-laki berada di kisaran 1,91%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Kepulauan

Selayar masih menghadapi berbagai hambatan struktural untuk memasuki pasar kerja, utamanya karena masih terbatasnya akses mereka terhadap pelatihan kerja, serta minimnya jenis pekerjaan yang fleksibel dan ramah gender. Oleh karena itu, dalam lima tahun mendatang, penting untuk melakukan pendekatan riset yang lebih responsive terhadap isu gender, serta perlu inovasi sosial yang mendorong partisipasi perempuan melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, terutama di sektor-sektor potensial seperti pengolahan hasil laut, ekonomi kreatif, pariwisata, dan wirausaha berbasis rumah tangga.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar harus didasari oleh kondisi potensi dan permasalahan daerah, serta disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat kepulauan. Riset-riset terapan yang mendorong peningkatan produktivitas sektor kelautan dan pertanian, seperti teknologi pascapanen, digitalisasi rantai pasok, atau pengolahan produk berbasis komunitas, dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong inklusi ekonomi. Selain itu, model-model ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, agrowisata, dan ekowisata bahari perlu dieksplorasi melalui pendekatan kolaboratif antara akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

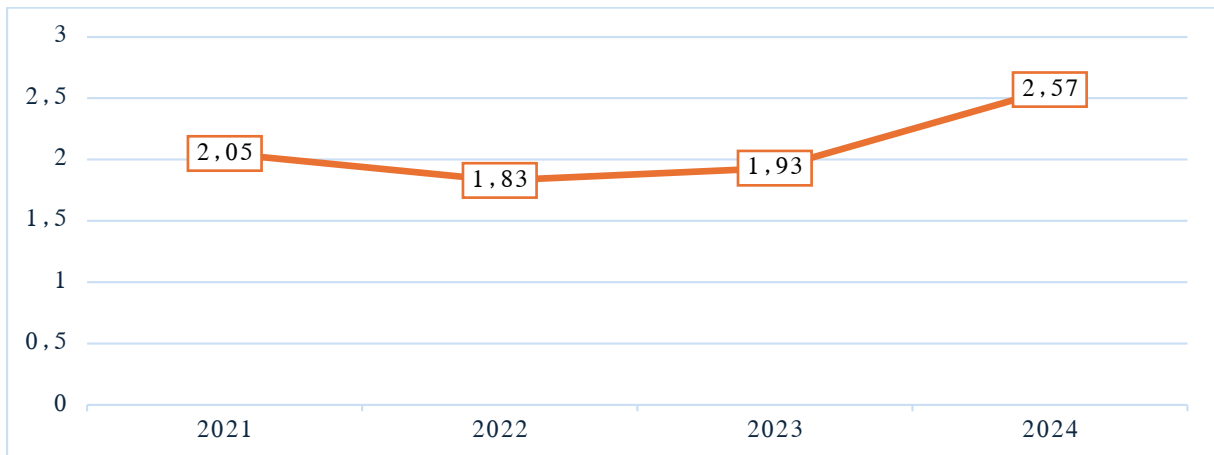
Pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan ekosistem inovasi yang memungkinkan terjadinya sinergi antarpemangku kepentingan. Lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan vokasi lokal perlu terlibat aktif dalam menghasilkan kajian kebijakan, prototipe teknologi, serta intervensi berbasis data yang dapat diimplementasikan langsung oleh masyarakat. Indikator keberhasilan dari tema prioritas ini tidak semata-mata diukur dari penurunan angka kemiskinan atau pengangguran secara statistik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, akses terhadap layanan dasar, serta kemampuan ekonomi lokal untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Dengan arah riset dan inovasi yang terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peluang besar untuk mempercepat transformasi sosial-ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Pemerintah daerah juga perlu bersinergi dengan sektor swasta dan dunia pendidikan untuk membangun ekosistem kerja yang sehat dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan kampus, LSM, dan pelaku usaha

bisa mendorong terciptanya inkubasi bisnis lokal, yang membuka jalan bagi tumbuhnya startup atau UMKM baru di daerah. Program magang lokal, penyediaan ruang kerja bersama, serta dukungan terhadap inovasi pemuda desa adalah contoh intervensi yang dapat mendorong generasi muda tidak hanya mencari kerja, tapi juga menciptakan pekerjaan.

2.2.1.4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

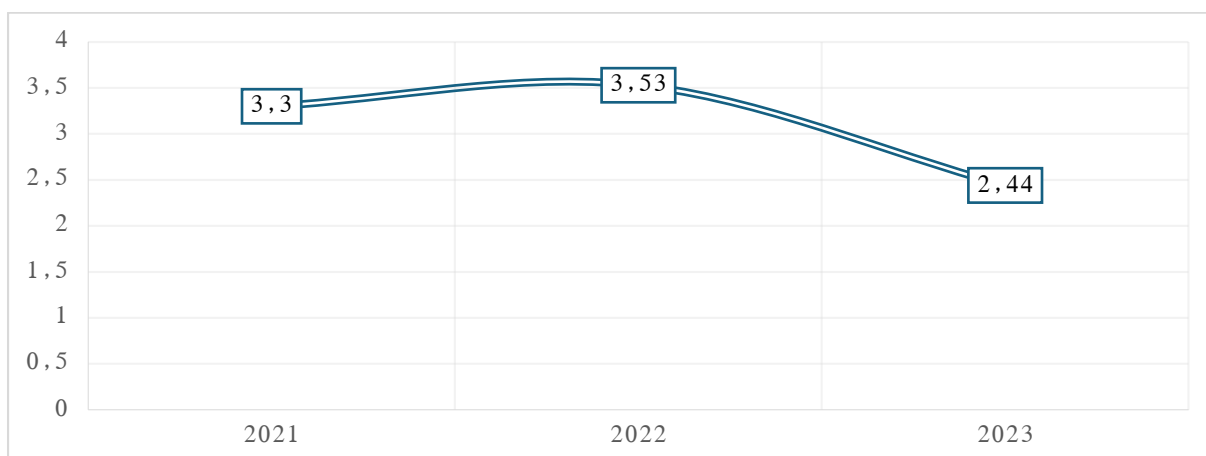
Kualitas layanan publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus diupayakan, namun masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang mengalami penurunan cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, IPP Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori “B”, menandakan kualitas layanan yang cukup baik dan mendekati standar pelayanan nasional. Namun pada tahun 2023, IPP turun menjadi 2,44 dan masuk ke dalam kategori “C”, yang menunjukkan adanya penurunan kualitas pada sejumlah aspek pelayanan seperti kebijakan layanan, profesionalisme SDM, ketersediaan sarana prasarana, serta sistem pelayanan yang diterapkan. Penurunan ini mengindikasikan belum optimalnya penguatan kebijakan internal serta belum meratanya peningkatan kapasitas aparatur di berbagai unit pelayanan publik.



Gambar 2.53 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2025

Selain IPP, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas layanan publik, khususnya dalam konteks digitalisasi pemerintahan. Dalam empat tahun terakhir, capaian SPBE di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2021, indeks SPBE berada pada angka 2,05, kemudian menurun menjadi 1,83 pada 2022. Penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan regulasi internal serta belum terintegrasinya sistem layanan elektronik secara menyeluruh. Meski demikian, terjadi peningkatan bertahap pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing dengan capaian 1,93 dan 2,57, yang menandakan adanya komitmen pemerintah daerah untuk membenahi sistem digital dan meningkatkan tata kelola berbasis teknologi. Capaian tahun 2024 tersebut menunjukkan kemajuan yang menjanjikan meskipun masih dalam kategori “cukup”, mengingat Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam proses menyusun arsitektur SPBE serta strategi pengembangan sistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.



Gambar 2.54 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar 2020 - 2024

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada tahap transisi dari sistem manual-konvensional ke sistem berbasis digital yang terstruktur. Tantangan geografis wilayah kepulauan turut mempengaruhi kecepatan implementasi pelayanan digital, termasuk dalam hal infrastruktur jaringan, pemerataan SDM yang menguasai teknologi, serta ketersediaan perangkat layanan yang memadai di seluruh kecamatan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan riset di bidang inovasi pelayanan publik perlu difokuskan pada penguatan kapasitas SDM aparatur, percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta penyusunan kebijakan internal yang mendukung integrasi sistem layanan. Penguatan budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat juga menjadi kunci penting dalam reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks perencanaan riset dan inovasi daerah, upaya perbaikan IPP dan SPBE di Kabupaten Kepulauan Selayar harus berbasis pada pemetaan akar masalah dan kebutuhan nyata pengguna layanan. Riset yang mendalam terhadap proses bisnis pelayanan, kepuasan masyarakat, serta tingkat literasi digital ASN dan masyarakat perlu dikedepankan. Selain itu, inovasi pelayanan yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik kepulauan harus dikembangkan—seperti layanan berbasis mobile unit, aplikasi pelayanan berbasis offline-online hybrid, dan sistem layanan terintegrasi antar-instansi. Dengan demikian, perbaikan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan

Selayar tidak hanya bertumpu pada digitalisasi semata, tetapi juga menjawab tantangan struktural, geografis, dan kapasitas institusional secara menyeluruh.

2.2.2. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Gambaran ekosistem riset dan inovasi daerah diuraikan berdasarkan enam elemen utama sebagai berikut:

1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah

Elemen ini merupakan fondasi dalam membangun sistem riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan. Elemen ini mencakup kebijakan formal dan sarana prasarana dasar yang mendukung sistem riset dan inovasi daerah. Reformasi kebijakan bertujuan menciptakan peraturan dan perencanaan yang mendukung tata kelola riset secara lebih efisien dan inklusif. Penataan basis data riset dibutuhkan untuk mendorong keterbukaan informasi dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pengembangan infrastruktur seperti laboratorium, pusat riset, atau fasilitas teknologi sangat penting untuk mendukung riset yang aplikatif. Selain itu, pengelolaan kebun raya gojang menjadi bagian penting dari konservasi sumber daya hayati dan dapat mendukung riset biodiversitas. Lebih lanjut, ketersediaan anggaran riset dari APBD menjadi faktor krusial dalam menopang kegiatan riset berkelanjutan. Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual memastikan bahwa hasil inovasi dapat terlindungi dan dimanfaatkan secara ekonomi.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi

Elemen ini menekankan pada penguatan lembaga dan peningkatan kemampuan teknis untuk menjalankan riset dan inovasi. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar riset tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat saling menguatkan. Penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang kerja, alat penelitian, dan akses teknologi informasi perlu disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan karakter daerah masing-masing. Dengan kelembagaan yang kuat dan daya dukung yang memadai, daerah dapat membangun sistem inovasi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Saat ini

terdapat dua Lembaga riset di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan LPPM di institute teknologi sains dan bisnis Muhammadiyah (ITSBM) Selayar.

3. Kemitraan riset dan inovasi

Kemitraan menjadi salah satu faktor penting dalam menghubungkan hasil riset dengan implementasi di lapangan. Penguatan kemitraan antar-lembaga, baik lintas daerah, nasional, maupun sektor, memperluas akses terhadap sumber daya dan pengetahuan. Difusi inovasi, yaitu penyebaran hasil riset dan inovasi ke masyarakat dan pelaku usaha, menjadi penting agar temuan riset tidak hanya berhenti di laporan, tapi bisa diadopsi dan diimplementasikan secara luas. Diseminasi hasil riset juga mencakup kegiatan seperti seminar, publikasi, pameran inovasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM lokal agar tercipta ekosistem belajar yang berkelanjutan.

4. Budaya riset dan inovasi

Budaya riset dan inovasi perlu ditumbuhkan melalui promosi, edukasi, dan penguatan nilai pentingnya ilmu pengetahuan dalam pembangunan. Kampanye inovasi dapat dilakukan lewat media, kegiatan komunitas, atau pelibatan sekolah dan perguruan tinggi. Apresiasi terhadap inovator lokal seperti pemberian penghargaan atau insentif mampu mendorong partisipasi yang lebih besar. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (*start-up*) menjadi strategi jangka panjang untuk mengkomersialisasikan hasil riset dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Selain itu, pengetahuan lokal dan teknologi tradisional yang ada di masyarakat perlu diinventarisasi, dikembangkan, dan dilindungi agar tidak punah dan bisa menjadi dasar inovasi yang khas daerah.

5. Keterpaduan riset dan inovasi

Elemen ini memastikan agar kegiatan riset dan inovasi di daerah relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata serta potensi unggulan lokal. Riset seharusnya menjadi solusi terhadap permasalahan daerah atau alat untuk mendorong nilai tambah dari produk unggulan. Pengembangan klaster inovasi berbasis potensi lokal (misalnya klaster perikanan, pertanian, atau pariwisata) penting agar inovasi

terarah dan berdampak nyata. Koherensi atau sinergi kebijakan antara pusat dan daerah juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi, khususnya dalam regulasi, pendanaan, dan prioritas riset nasional.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global

Elemen ini menekankan bahwa riset dan inovasi daerah tidak boleh terisolasi dari dinamika global. Isu internasional seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, energi bersih, dan transformasi digital harus menjadi perhatian dalam agenda riset lokal. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu tersebut penting untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan tanggap perubahan zaman. Selain itu, penguatan kerja sama internasional, baik dalam bentuk pertukaran peneliti, kolaborasi proyek, maupun akses pendanaan luar negeri, akan memperluas cakupan, kualitas, dan daya saing riset daerah.

Adapun rincian gambaran ekosistem riset berdasarkan produk unggulan daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 22 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Produk Unggulan Daerah

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
Produk Unggulan ke-1: Pengembangan Kelapa		
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief berbasis riset pertanian kelapa 2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah	Dalam lima tahun terakhir, terdapat empat kajian utama atau policy brief yang berbasis riset dan berkaitan langsung dengan sektor pertanian kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kajian-kajian ini berasal dari lembaga akademik, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan dan pembangunan, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi yaitu Diseminasi Riset Hilirisasi Kelapa tahun 2020,

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>Strategi Pengembangan Kelapa di Desa Bontobangun tahun 2024, Program Gerbangdari tahun 2022, dan Refleksi Pembangunan Industri Kelapa Terpadu tahun 2021.</p> <p>1) Terdapat 1 Perda dan 3 Perbup (total 4 regulasi) yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan riset dan inovasi daerah, baik secara umum maupun spesifik mendukung pengembangan kelapa sebagai komoditas strategis.</p>
Penataan basis data Riset dan Inovasi	<p>1) Jumlah dataset riset/inovasi kelapa yang terunggah dalam satu platform digital resmi</p> <p>2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah (ada/tidak), tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN (%)</p>	<p>1) Basis data riset terkait pengembangan jeruk keprok belum dapat diakses secara digital karena portal khusus belum tersedia. Meski demikian, sistem informasi pemerintahan daerah secara umum telah tersedia melalui situs resmi www.kepulauanselayarkab.go.id, namun belum terintegrasi dengan data riset dan inovasi.</p> <p>2) Di sisi lain, kesiapan SDM cukup mendukung, dengan tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN telah mencapai 100%.</p>
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1) Jumlah lab, kelengkapan alat (menunjang aspek analisis tanah, air, lingkungan mikro tanaman,	1) Selama periode 2020–2024, fasilitas laboratorium pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
	serta uji kimia-fisiologis sederhana) 2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung pengembangan komoditas kelapa	<p>masih dalam tahap pengembangan awal. Satu laboratorium utama di bawah Dinas Pertanian menyediakan layanan uji dasar tanah seperti kadar pH dan konduktivitas listrik, namun belum mampu melaksanakan analisis mendalam terkait hara mikro, kualitas air, atau lingkungan mikro agroekosistem yang relevan bagi pengembangan kelapa. Laboratorium pendidikan seperti yang dimiliki SMK Negeri dengan jurusan pertanian hanya difungsikan untuk keperluan pembelajaran, bukan riset. Hal ini menandakan bahwa belum tersedia laboratorium riset terapan atau analitik yang dapat digunakan oleh pemerintah, petani, atau peneliti untuk mengembangkan teknologi kelapa berbasis data ilmiah lokal. Selain itu, tidak tersedia alat untuk pengujian kandungan fisiologis buah kelapa, kadar air, atau proses fermentasi dan pengeringan yang menjadi kunci dalam diversifikasi produk (seperti virgin coconut oil, arang aktif, atau gula semut kelapa). Ketiadaan laboratorium yang mendukung uji mutu pascapanen, pengujian</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>varietas adaptif, maupun kajian mikrobiologi lahan menjadi hambatan serius dalam membangun <i>ekosistem riset dan inovasi pertanian kelapa</i> yang berbasis sains.</p> <p>2) Hingga tahun 2024, cakupan akses internet pada lembaga riset dan institusi pendidikan serta kelembagaan teknis yang berpotensi mendukung riset kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat baru mencapai sekitar 62%. Persentase ini mencakup lembaga seperti UPT Dinas Pertanian, SMK Pertanian, beberapa kampus vokasi, dan kantor penyuluhan pertanian kecamatan. Namun, akses internet tersebut sebagian besar masih terbatas pada layanan dasar (<i>bandwidth rendah</i>) dan belum optimal untuk kegiatan yang memerlukan pengolahan dan berbagi data riset, seperti publikasi hasil analisis tanah, data agroklimat, atau pengolahan hasil uji laboratorium. Di beberapa lokasi, seperti wilayah kecamatan kepulauan, cakupan internet bahkan masih tidak stabil atau belum tersedia secara permanen, sehingga menyulitkan untuk pengembangan sistem informasi</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		digital yang terintegrasi dalam ekosistem riset kelapa.
Pengelolaan kebun raya daerah	Ketersediaan program riset di kebun raya daerah (Gojang)	Hingga tahun 2024, Kebun Raya Gojang mulai berperan aktif dalam mendukung riset berbasis potensi lokal, termasuk pengembangan kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Program riset yang dilakukan mencakup integrasi tanaman kelapa dengan herbal lokal, teknik budidaya ramah lingkungan, hingga pengembangan sistem agroforestri berbasis kelapa. Inovasi ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi riset Kebun Raya yang tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga pada pemanfaatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Tahun 2024 menjadi puncak aktivitas, ditandai dengan riset terpadu yang menghubungkan kelapa dengan ekowisata edukatif dan bank benih lokal.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (berserta nilai nominalnya)	Alokasi anggaran riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong sangat kecil hingga tahun 2024 jika dibandingkan dengan total belanja daerah. Dari total APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebesar ± Rp1,08 triliun, alokasi khusus untuk kegiatan riset dan inovasi secara

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>umum hanya sekitar 0,12%, atau \pm Rp1,3 miliar.</p> <p>Dari total tersebut, alokasi anggaran riset yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pengembangan produk unggulan kelapa diperkirakan hanya sekitar 10–15% dari total belanja riset dan inovasi, atau sekitar Rp130 juta hingga Rp195 juta.</p>
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait dengan kelapa	<p>Hingga saat ini jumlah ide, paten, dan inovasi yang secara langsung berkaitan dengan komoditas kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas. Namun, beberapa ide dan inovasi skala lokal telah mulai muncul, walau belum terdokumentasi dalam sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual), di antaranya Inovasi pembuatan arang aktif dari tempurung kelapa oleh kelompok tani di Kecamatan Bontosikuyu dan Pasimasunggu Timur (2022–2024), Inisiatif pengolahan minyak kelapa murni (VCO) secara tradisional dan semi-mekanis oleh kelompok perempuan tani, Inovasi pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai media tanam (coir) di beberapa desa binaan Dinas Pertanian dan UMKM, dan Ide integrasi agroforestri kelapa-lontar</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		dengan tanaman sela sebagai model pertanian berkelanjutan.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait kelapa	Hingga tahun 2024, kerja sama riset yang secara khusus menitikberatkan pada komoditas unggulan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas , baik dalam lingkup formal (MoU/MoA) maupun kegiatan teknis antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa bentuk kerja sama riset tidak langsung atau tematik pertanian diantaranya yaitu Kolaborasi Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Universitas Hasanuddin tahun 2022 (pendampingan penyusunan model demplot), Pelatihan dan riset partisipatif oleh BPTP Sulsel tahun 2023 (Studi adaptasi varietas kelapa unggul dan teknik perbanyakan secara vegetatif), dan Program Matching Fund (Kampus Merdeka) Unismuh Makassar tahun 2024 (Riset pemanfaatan limbah kelapa dan pengembangan UMKM berbasis turunan kelapa masih dalam tahap <i>on progress</i>).

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Jumlah SDM peneliti (termasuk dosen) berdasarkan latar belakang pendidikan	Hingga tahun 2024, jumlah SDM riset yang relevan dengan komoditas kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas. Dari total yang teridentifikasi, hanya sekitar 7 orang yang memiliki latar belakang atau pengalaman langsung dalam bidang kelapa. Mereka terdiri atas dosen di kampus vokasi (5 orang), peneliti di dinas teknis (2 orang), serta penyuluh pertanian berpengalaman (6 orang), dengan hanya satu orang yang memiliki pendidikan S2/S3 khusus bidang kelapa. Keterbatasan ini menjadi tantangan serius dalam penguatan riset dan inovasi kelapa, sehingga perlu strategi peningkatan kapasitas SDM secara terstruktur dan kolaboratif.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Jumlah perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta terkait riset dan inovasi kelapa	Berdasarkan data terkini, Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat memiliki tiga perjanjian kerja sama yang berkaitan langsung dengan riset dan inovasi kelapa. Kerja sama ini melibatkan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, mencakup aspek budidaya, hilirisasi produk turunan kelapa, serta pengembangan teknologi pasca panen. Meski jumlahnya masih terbatas, kerja sama ini menjadi

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		langkah awal penting dalam membangun kolaborasi riset berkelanjutan untuk mendukung kelapa sebagai produk unggulan daerah.
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset kelapa	Terdapat dua bentuk adopsi nyata hasil riset kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertama, penerapan sistem tanam tumpangsari kelapa-kacang tanah di Kecamatan Bontosikuyu dan Buki sebagai hasil riset adaptasi pola tanam terhadap iklim kering tahun 2022–2023. Kedua, pemanfaatan sabut dan tempurung kelapa menjadi briket dan cocopeat yang telah diadopsi oleh sedikitnya tiga kelompok tani/UMKM di Benteng dan Pasimarannu melalui dukungan riset berbasis masyarakat, CSR, dan dinas teknis.
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait kelapa yang didiseminasikan	Diseminasi hasil riset kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terbatas, dengan setidaknya tiga riset utama yang telah dibagikan kepada pemangku kepentingan. Ketiga riset tersebut mencakup: pola tanam adaptif kelapa tumpangsari (dipresentasikan dalam forum penyuluh tahun 2022), kajian agroklimat dan produktivitas kelapa lokal (dipaparkan dalam seminar kerja sama tahun 2023), serta

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		pemanfaatan limbah kelapa untuk produk hilir seperti cocopeat dan briket (disosialisasikan kepada kelompok tani dan UMKM pada awal 2024).
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah		
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait pengembangan kelapa	Hingga tahun 2024, inovasi terkait pengembangan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terbatas, dengan rata-rata 1–2 inovasi per tahun. Inovasi yang muncul bersifat teknis praktis, seperti alat pengupas kelapa (2021), kemasan produk turunan (2022), dan model tumpangsari kelapa (2023). Meski telah beberapa kali digelar forum atau ekspo inovasi daerah, belum tersedia forum tetap yang khusus mendorong inovasi kelapa secara sistematis dan berkelanjutan.
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengikuti dua ajang kompetisi inovasi, yaitu Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulsel (2022) dan Innovative Government Award (IGA) Kemendagri (2023), dengan fokus pada pengembangan produk turunan kelapa. Meski belum meraih juara, partisipasi ini menunjukkan upaya awal daerah dalam mendorong inovasi berbasis potensi lokal kelapa.

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM kelapa yang dibina melalui inkubasi daerah	Pengembangan inovasi di sektor kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih bersifat terbatas. Tercatat hanya terdapat 1 startup lokal yang mulai bergerak di bidang teknologi pertanian kelapa, serta 2 UMKM binaan yang fokus pada produk turunan kelapa seperti minyak kelapa murni (VCO) dan gula semut. Meski menunjukkan inisiatif awal yang positif, jumlah ini masih tergolong rendah dan memerlukan dukungan ekosistem riset, inkubasi bisnis, serta kemitraan yang lebih luas untuk mendorong skala dan keberlanjutan inovasi lokal.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan dalam pengembangan kelapa	Terdapat setidaknya tiga bentuk pengetahuan lokal yang masih dimanfaatkan dalam pengembangan kelapa, yakni teknik tradisional pengolahan minyak kelapa, pemanfaatan limbah kelapa untuk kerajinan dan arang, serta penggunaan pupuk organik lokal. Ketiganya menjadi bagian penting dari praktik masyarakat, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi atau dimanfaatkan dalam riset dan inovasi daerah secara optimal.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan	Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah (kelapa)	Saat ini terdapat lima tema riset utama yang mendukung pengembangan kelapa di Kabupaten

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;		Kepulauan Selayar. Tema-tema tersebut mencakup budidaya kelapa adaptif agroklimat lokal, inovasi pascapanen dan hilirisasi produk, pemanfaatan limbah untuk energi dan kerajinan, penguatan kelembagaan petani berbasis koperasi, serta pemetaan potensi dan tata ruang lahan kelapa. Kelima tema ini menjadi dasar penting dalam membangun ekosistem riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan.
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah klaster inovasi pertanian kelapa yang terbentuk dan aktif dalam 1 tahun	Di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini telah terbentuk 1 klaster inovasi pertanian kelapa yang aktif dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Klaster ini melibatkan unsur petani, koperasi, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi dalam kegiatan riset terapan, pelatihan teknologi pascapanen, dan pengembangan produk turunan kelapa. Keberadaan klaster ini menjadi langkah awal untuk memperkuat ekosistem inovasi yang berbasis kebutuhan lokal dan kolaboratif.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan/program riset kelapa di kabupaten yang selaras dengan dokumen RPJMN dan RPJPN	Saat ini, terdapat dua kegiatan riset kelapa yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Kegiatan tersebut

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		meliputi penguatan riset terhadap komoditas unggulan daerah dan penelitian varietas kelapa lokal, yang bertujuan untuk mendorong produktivitas, inovasi, dan hilirisasi produk kelapa secara berkelanjutan.
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan pengembangan kelapa dengan isu global (perubahan iklim dan pangan)	Kabupaten Kepulauan Selayar mulai mengarahkan pengembangan kelapa sebagai bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Melalui program pertanian adaptif iklim dan diversifikasi produk kelapa lokal, Kabupaten Kepulauan Selayar mendorong pemanfaatan kelapa tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai solusi berkelanjutan terhadap tantangan lingkungan dan pangan.
Penguatan kerjasama internasional.	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan kelapa	Hingga saat ini, Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencatat adanya kerja sama internasional secara formal yang secara khusus diarahkan untuk pengembangan komoditas kelapa. Meskipun terdapat ketertarikan dari beberapa lembaga internasional dalam bidang pertanian tropis dan ketahanan pangan, belum ada perjanjian kerja sama resmi yang ditandatangani. Pengembangan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh kolaborasi

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		lokal dan nasional, seperti dengan perguruan tinggi negeri, BUMD, koperasi, serta lembaga riset berbasis teknologi dalam negeri.
Produk Unggulan ke-2: Perikanan Tangkap		
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief berbasis riset perikanan tangkap 2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah	1) Tercatat hanya terdapat 2 dokumen kajian utama yang dihasilkan dalam rentang 2020–2024, yakni: a) Kajian Potensi Perikanan Tangkap Berbasis Wilayah Pesisir yang disusun oleh tim akademisi dari perguruan tinggi mitra dan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan zonasi wilayah tangkap ramah lingkungan. b) Policy Brief Peningkatan Rantai Nilai Ikan Hasil Tangkap , yang fokus pada strategi penguatan sarana pasca-tangkap dan pengembangan sentra nelayan berbasis koperasi. Keterbatasan ini menunjukkan pentingnya penguatan ekosistem riset dan pengembangan kebijakan berbasis data untuk sektor perikanan tangkap, mengingat kontribusinya yang besar terhadap ekonomi daerah dan mata pencaharian masyarakat pesisir Selayar.

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>2) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki satu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara khusus memuat kebijakan riset dan inovasi daerah terkait sektor perikanan tangkap. Perkada tersebut merupakan turunan dari Perda tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan mencakup penguatan kapasitas riset untuk pengelolaan sumber daya laut, pengembangan teknologi penangkapan ramah lingkungan, serta peningkatan nilai tambah produk hasil tangkapan. Namun, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur inovasi di sektor ini, sehingga integrasi kebijakan masih bersifat sektoral dan terbatas pada program-program teknis.</p>
<p>Penataan basis data Riset dan Inovasi</p>	<p>1) Jumlah dataset riset/inovasi perikanan tangkap yang terunggah dalam satu platform digital resmi</p> <p>2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah (ada/tidak), tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN (%)</p>	<p>1) Saat ini, jumlah dataset riset dan inovasi terkait perikanan tangkap yang tersedia di platform digital resmi Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas, yakni hanya dua dataset utama. Kedua dataset tersebut mencakup data potensi wilayah tangkap nelayan kecil dan data produktivitas hasil tangkap komoditas utama. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan sistem dokumentasi</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>dan digitalisasi data riset sektor perikanan tangkap.. Meski demikian, sistem informasi pemerintahan daerah secara umum telah tersedia melalui situs resmi www.kepulauanselayarkab.go.id</p> <p>2) Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki sistem informasi pemerintahan (Sisfo), namun pemanfaatannya untuk mendukung riset dan inovasi perikanan tangkap masih terbatas. Sekitar 65% ASN menggunakan alat komunikasi dan internet untuk aktivitas terkait, menunjukkan adanya potensi yang perlu ditingkatkan melalui integrasi data dan pelatihan digital.</p>
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	<p>1) Jumlah lab, kelengkapan alat (menunjang aspek analisis tanah, air, lingkungan mikro tanaman, serta uji kimia-fisiologis sederhana)</p> <p>2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung pengembangan komoditas perikanan tangkap</p>	<p>1) Hingga saat ini, Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki laboratorium khusus yang sepenuhnya mendukung riset perikanan tangkap dengan kelengkapan alat untuk analisis lingkungan perairan laut secara komprehensif, seperti analisis kualitas air, parameter oseanografi, dan uji kimia-fisiologis ikan. Laboratorium yang tersedia masih bersifat umum dan terbatas pada pengujian dasar, serta belum memiliki instrumen analisis seperti spektrofotometer atau alat ukur</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>salinitas dan kandungan logam berat. Kegiatan uji lanjutan masih harus dilakukan dengan menjalin kerja sama eksternal dengan perguruan tinggi atau lembaga riset di luar daerah. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam membangun ekosistem riset dan inovasi berbasis sumber daya laut di Kabupaten Kepulauan Selayar.</p> <p>2)Cakupan internet pada lembaga-lembaga riset yang mendukung pengembangan komoditas perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar diperkirakan baru mencapai sekitar 55%. Akses internet ini umumnya hanya tersedia di kantor pusat atau ruang administrasi, sementara area laboratorium, pelabuhan perikanan, atau unit kerja lapangan masih memiliki keterbatasan konektivitas. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya proses pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman data riset secara real-time, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring sumber daya perikanan.</p>
Pengelolaan kebun raya daerah	Ketersediaan program riset di kebun raya daerah (Gojang)	Hingga saat ini, ketersediaan program riset di kebun raya daerah Kabupaten Kepulauan Selayar khusus untuk produk unggulan perikanan tangkap masih belum

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>tersedia. Kebun raya daerah lebih berfokus pada konservasi tumbuhan lokal dan pelestarian ekosistem daratan, sehingga belum menjadi pusat kegiatan riset kelautan atau perikanan. Belum adanya integrasi antara kebun raya dengan lembaga riset kelautan dan sektor perikanan mengindikasikan perlunya perluasan mandat kelembagaan dan dukungan program untuk mengakomodasi penelitian lintas ekosistem, termasuk pesisir dan laut.</p>
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (berserta nilai nominalnya)	<p>Pada kondisi saat ini, persentase anggaran riset yang dialokasikan untuk mendukung pengembangan produk unggulan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong sangat kecil, yakni diperkirakan hanya sekitar 0,18% dari total anggaran belanja APBD tahun berjalan. Jika mengacu pada total APBD Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar ±Rp1,1 triliun pada tahun 2024, maka nilai nominal anggaran riset yang tersedia untuk sektor ini hanya berkisar ±Rp1,98 miliar.</p>
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait dengan perikanan tangkap	<p>Saat ini, jumlah ide, paten, atau inovasi yang terkait langsung dengan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas. Tercatat</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		hanya terdapat dua inovasi lokal yang terdokumentasi yaitu Pengembangan alat tangkap modifikasi ramah lingkungan dan Sistem monitoring hasil tangkap berbasis aplikasi sederhana, namun belum ada paten resmi yang terdaftar.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait perikanan tangkap	<p>Terdapat tiga kerja sama riset yang terkait dengan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kerja sama tersebut melibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Universitas Hasanuddin (P2KP) terkait Pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) untuk Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, b) Kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2022-2024 yang merupakan bagian dari program nasional pemetaan potensi laut dan sumber daya hayati pesisir untuk wilayah Indonesia Timur, dan c) Kerja sama Startup Teknologi Kelautan (Swasta) tahun 2023-2024, yang dilakukan dalam skema <i>pilot project</i> kerja sama Pemkab dengan mitra swasta

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		berbasis teknologi untuk efisiensi logistik perikanan.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Jumlah SDM peneliti (termasuk dosen) berdasarkan latar belakang pendidikan	Jumlah SDM peneliti yang relevan dengan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 9 orang . Terdiri atas 3 dosen tetap dari program studi kelautan dan perikanan, 2 peneliti teknis di Dinas Perikanan, 3 penyuluh perikanan yang telah bersertifikasi dan memiliki pengalaman dalam riset kolaboratif, serta 1 orang lulusan S2/S3 dengan spesialisasi perikanan tangkap tropis. Meskipun jumlahnya masih terbatas, SDM ini menjadi fondasi awal bagi penguatan ekosistem riset dan inovasi sektor kelautan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Jumlah perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta terkait riset dan inovasi perikanan tangkap	Hingga tahun 2024, terdapat tiga perjanjian kerja sama yang telah dijalin terkait riset dan inovasi di sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar. a) Kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Universitas Hasanuddin , yang berlangsung sejak tahun 2021 hingga kini, mencakup penelitian potensi dan sebaran sumber daya ikan pelagis serta

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>pendampingan pengembangan sistem logistik ikan segar.</p> <p>b) Perjanjian kolaborasi antara PemKabupaten Kepulauan Selayar dengan Loka Riset Perikanan Tangkap KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sejak 2022, difokuskan pada riset alat tangkap ramah lingkungan dan efisiensi hasil tangkapan nelayan skala kecil.</p> <p>c) Kerja sama strategis dengan sektor swasta, khususnya perusahaan pengolahan hasil laut di Makassar, dalam bentuk pemanfaatan hasil riset untuk diversifikasi produk perikanan berbasis hasil tangkapan lokal, dimulai sejak tahun 2023.</p>
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset perikanan tangkap	<p>Hingga tahun 2024, terdapat dua bentuk implementasi hasil riset perikanan tangkap yang telah diadopsi secara nyata di Kabupaten Kepulauan Selayar:</p> <p>a) Adopsi teknologi alat tangkap ramah lingkungan (purse seine mini dan bubu lipat) oleh kelompok nelayan tradisional di lima desa pesisir, hasil kerja sama riset dengan Loka Riset Perikanan Tangkap sejak 2022.</p> <p>b) Penerapan sistem rantai dingin berbasis solar freezer portabel,</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>hasil riset terapan bersama perguruan tinggi, telah mulai digunakan oleh koperasi nelayan sebagai upaya mengurangi kehilangan hasil tangkapan pasca panen.</p> <p>Meskipun jumlahnya masih terbatas, kedua inisiatif ini menunjukkan bahwa riset telah mulai menjangkau praktik operasional nelayan dan menjadi bagian dari transformasi sektor perikanan tangkap yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.</p>
<p>Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.</p>	<p>Jumlah hasil riset terkait perikanan tangkap yang didiseminasikan</p>	<p>Sebanyak empat hasil riset perikanan tangkap telah didiseminasikan di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui seminar daerah sejak tahun 2021, pameran teknologi kelautan, publikasi ilmiah, dan policy brief yang dipublikasikan melalui lama resmi Bapperida yang mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.</p>
<p>Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah</p>		
<p>Promosi dan kampanye Inovasi;</p>	<p>Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait pengembangan perikanan tangkap</p>	<p>Pada kondisi saat ini, Kabupaten Kepulauan Selayar mencatat rata-rata 2 inovasi per tahun yang terkait dengan pengembangan sektor perikanan tangkap selama periode 2020–2024. Inovasi tersebut mencakup teknologi alat tangkap</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		ramah lingkungan, sistem rantai dingin berbasis energi surya, dan sistem pelaporan hasil tangkapan digital. Meskipun begitu, forum inovasi daerah yang secara khusus mewadahi kolaborasi lintas sektor dalam inovasi perikanan belum terbentuk secara formal, meski beberapa diskusi teknokratik telah dilakukan di bawah koordinasi Bapperida.
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengikuti 3 kompetisi inovasi tingkat regional dan nasional yang berkaitan dengan produk unggulan perikanan tangkap selama periode 2020–2024. Beberapa penghargaan yang diraih antara lain adalah penghargaan inovasi teknologi tangkap ramah lingkungan pada ajang inovasi daerah Sulawesi Selatan (2022), serta partisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB melalui inovasi sistem logistik ikan terintegrasi. Partisipasi ini menunjukkan adanya komitmen awal dalam mendorong penguatan daya saing sektor perikanan melalui pendekatan inovatif.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM perikanan tangkap yang dibina melalui inkubasi daerah	terdapat total 7 entitas yang berasal dari sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar yang

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		telah dibina melalui program inkubasi daerah. Dari jumlah tersebut, 2 merupakan start-up berbasis teknologi perikanan (misalnya pemantauan hasil tangkapan dan sistem distribusi berbasis aplikasi), sementara 5 lainnya adalah UMKM yang bergerak dalam pengolahan hasil tangkap seperti abon ikan, ikan asap, dan pemanfaatan limbah ikan menjadi pakan ternak. Program inkubasi ini difasilitasi oleh Bapperida bekerja sama dengan dinas teknis dan mitra universitas vokasi.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan dalam pengembangan perikanan tangkap	Pada tahun 2024, terdapat setidaknya 4 bentuk pengetahuan dan teknologi lokal yang masih aktif dimanfaatkan dalam pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa di antaranya meliputi: a) Teknik penangkapan ikan tradisional menggunakan bubu dan sero yang ramah lingkungan. b) Pengetahuan membaca pola arus dan musim ikan oleh nelayan lokal , yang berfungsi sebagai panduan waktu melaut. c) Pemanfaatan bahan alami sebagai pengawet tradisional ikan , seperti asap kelapa dan

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>daun tertentu untuk memperpanjang umur simpan hasil tangkapan.</p> <p>d) Teknik pembuatan perahu tradisional berbasis kearifan lokal, yang tetap dipakai di beberapa desa pesisir.</p> <p>Pengetahuan ini menjadi bagian penting dalam ekosistem inovasi daerah karena tetap relevan dan selaras dengan praktik berkelanjutan di wilayah kepulauan.</p>
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah		
<p>Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;</p>	<p>Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah (perikanan tangkap)</p>	<p>Hingga tahun 2024, terdapat 6 tema riset utama yang secara langsung mendukung pengembangan produk unggulan daerah berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tema-tema tersebut mencakup diantaranya yaitu Pemetaan potensi wilayah tangkap berbasis spasial, pengembangan teknologi sederhana pengawetan hasil tangkap, diversifikasi produk olahan perikanan skala rumah tangga, dan kajian rantai pasok hasil perikanan dan efisiensi logistik.</p>
<p>Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan</p>	<p>Jumlah klaster inovasi perikanan tangkap yang terbentuk dan aktif dalam 1 tahun</p>	<p>Pada tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki satu klaster inovasi aktif di sektor perikanan tangkap. Klaster ini melibatkan kolaborasi antara kelompok nelayan, UMKM pengolahan hasil laut, dan lembaga</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah penguatan teknologi pasca-tangkap, efisiensi rantai distribusi, serta peningkatan nilai tambah produk laut melalui inovasi berbasis lokal.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan/program riset perikanan tangkap kabupaten yang selaras dengan dokumen RPJMN dan RPJPN	Hingga tahun 2024, terdapat dua kegiatan/program riset perikanan tangkap yang tercantum secara eksplisit dalam dokumen perencanaan strategis daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Pertama, program penguatan data potensi dan sebaran sumber daya ikan untuk mendukung pengelolaan perikanan berbasis wilayah tangkap berkelanjutan. Kedua, kegiatan riset inovasi pasca-tangkap yang diarahkan pada peningkatan mutu dan daya saing produk laut lokal. Kedua program ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan sektor perikanan tangkap sebagai bagian dari ekosistem riset dan inovasi daerah.
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan pengembangan perikanan tangkap dengan isu global (perubahan iklim dan pangan)	Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki satu program daerah yang mengintegrasikan pengembangan perikanan tangkap dengan isu global, khususnya perubahan iklim dan ketahanan pangan. Program

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		tersebut adalah “Penguatan Perikanan Berkelanjutan dan Adaptif Iklim”, yang dijalankan melalui kolaborasi antara Dinas Perikanan, kelompok nelayan lokal, dan lembaga swadaya masyarakat. Program ini mencakup pelatihan adaptasi perubahan iklim bagi nelayan, pengembangan sistem informasi cuaca untuk aktivitas melaut, serta penerapan praktik tangkap ramah lingkungan dan diversifikasi hasil tangkap untuk menjaga ketahanan pangan lokal.
Penguatan kerjasama internasional.	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan perikanan tangkap	Hingga tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat menjalin satu kerja sama internasional dalam rangka pengembangan sektor perikanan tangkap. Kerja sama ini dilakukan melalui proyek kolaboratif dengan lembaga internasional bidang konservasi laut asal Jepang, yang fokus pada penguatan kapasitas nelayan tradisional dalam pemanfaatan alat tangkap ramah lingkungan serta pelatihan monitoring sumber daya laut berbasis komunitas. Proyek ini juga mendukung pengumpulan data perikanan dan konservasi kawasan penting seperti kawasan penangkapan ikan karang secara berkelanjutan.

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
Produk Unggulan ke-3: Pengembangan Jeruk Keprok		
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief berbasis riset pertanian jeruk keprok 2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah	Hingga tahun 2024, telah tersusun 3 kajian yang mencakup pengembangan pertanian jeruk keprok, yaitu Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020, Studi Kelayakan Investasi Pengembangan Budidaya Komoditas Jeruk Keprok Tahun 2023, dan Kajian Strategi Pengembangan Produk Unggulan Tahun 2024. Selain itu, telah ditetapkan satu Perbup No. 353/VIII/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	1) Jumlah dataset riset/inovasi jeruk keprok yang terunggah dalam satu platform digital resmi 2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah (ada/tidak), tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN (%)	Basis data riset terkait pengembangan jeruk keprok belum dapat diakses secara digital karena portal khusus belum tersedia. Meski demikian, sistem informasi pemerintahan daerah secara umum telah tersedia melalui situs resmi www.kepulauanselayarkab.go.id , namun belum terintegrasi dengan data riset dan inovasi. Di sisi lain, kesiapan SDM cukup mendukung, dengan tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN telah mencapai 100%.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1) Jumlah lab, kelengkapan alat (menunjang aspek analisis tanah, air, lingkungan mikro tanaman, serta uji kimia-fisiologis sederhana)	Di tahun 2024, terdapat satu laboratorium yaitu laboratorium dinas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memiliki

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
	2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung pengembangan komoditas jeruk keprok	<p>≤ 23 peralatan yang berpotensi mendukung riset pengembangan jeruk keprok. Peralatan yang relevan antara lain Soil Sampler Rings Tube (2 unit), TDS & EC Meter (2 unit), Oven (2 unit), pH Tanah (2 unit), Refractometer (2 unit), Spectrophotometer (3 unit), Neraca Analitik (2 unit), pH Meter (2 unit), alat ukur EC (1 unit), GPS (3 unit), Autoclaf (1 unit), dan Refrigerator (1 unit). Meskipun laboratorium ini bukan laboratorium pertanian secara khusus, keberadaan alat-alat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan riset dasar hortikultura.</p> <p>Cakupan internet untuk mendukung kegiatan riset telah mencapai 100%. Dari sisi perangkat lunak, Bapperida memanfaatkan aplikasi pengolah data seperti SPSS dan Excel, sementara UPTD Laboratorium Lingkungan menggunakan Google Earth untuk digitasi lahan.</p>
Pengelolaan kebun raya daerah	Ketersediaan program riset di kebun raya daerah (Gojang)	Saat ini belum tersedia program riset yang secara khusus dilaksanakan di kawasan Kebun Raya Gojang, mengingat statusnya masih dalam tahap perencanaan dan belum beroperasi sebagai

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		kebun raya formal. Pengembangan Kebun Raya Gojang seluas 50 hektar di Dusun Gojang, Desa Bontomarannu tercantum dalam Renstra dinas lingkungan hidup 2021–2026. Meskipun belum berstatus kebun raya formal, arah pengembangannya telah sejalan dengan fungsi perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sosial ekonomi lingkungan.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (berserta nilai nominalnya)	Dana yang dialokasikan untuk kegiatan riset pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp350 juta atau sekitar 0,032% dari total anggaran belanja APBD. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi pendanaan riset masih sangat rendah di dalam struktur anggaran daerah.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait dengan jeruk keprok	Saat ini belum terdapat inovasi/paten daerah yang secara khusus menargetkan pengembangan komoditas jeruk keprok. Namun, pada tahun 2021, telah dilaksanakan inovasi umum di sektor pertanian melalui program Desa Gambus (Desa Gemar Menanam Buah dan Sayuran) yang mendorong gerakan tanam komoditas hortikultura di tingkat desa. Selain itu, di tahun 2024, pemerintah daerah meluncurkan Sentra Informasi Produk Lokal

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		sebagai inovasi yang mendukung promosi dan penyebaran informasi produk unggulan daerah, termasuk jeruk keprok.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait jeruk keprok	Dalam lima tahun terakhir, terdapat dua kerja sama riset yang relevan dengan pengembangan jeruk keprok, yaitu Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020 dan Studi Kelayakan Investasi Pengembangan Budidaya Komoditas Jeruk Keprok Tahun 2023
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Jumlah SDM peneliti (termasuk dosen) berdasarkan latar belakang pendidikan	Saat ini belum terdapat data spesifik mengenai jumlah dosen atau peneliti yang secara langsung memiliki latar belakang keahlian di bidang hortikultura. Namun, secara umum terdapat 139 tenaga dosen dan peneliti dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya, dengan komposisi 8 profesor, 41 doktor, 74 magister, dan 16 sarjana. Komposisi ini menunjukkan ketersediaan SDM berpendidikan tinggi yang dapat dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi terkait pengembangan jeruk keprok sebagai produk unggulan.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Jumlah perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, perguruan	Dalam lima tahun terakhir, terdapat dua perjanjian kerja sama

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
	tinggi, dan sektor swasta terkait riset dan inovasi jeruk keprok	riset lintas instansi yang relevan dengan pengembangan jeruk keprok. Pertama, Kajian Komoditas Unggulan tahun 2020 yang melibatkan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar, BI Sulsel, dan ISEI Makassar. Kedua, Studi Kelayakan Investasi Budidaya Jeruk Keprok tahun 2023, yang merupakan hasil kerja sama Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar dengan PPKP-LPPM Universitas Hasanuddin. Sementara itu, kajian strategi pengembangan produk unggulan di tahun 2024 dilakukan oleh Litbang Bapperida secara internal.
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset jeruk keprok	Saat ini belum terdapat data atau bukti dokumentasi yang menunjukkan adopsi langsung hasil riset jeruk keprok ke dalam praktik budidaya, kebijakan teknis, atau kegiatan pengembangan di lapangan. Beberapa kajian yang tersedia masih bersifat konseptual dan belum ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi operasional.
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait jeruk keprok yang didiseminasikan	tiga hasil riset (baik yang merupakan hasil kerjasama dengan instansi atau perguruan tinggi maupun yang dikerjakan secara internal) telah diseminasikan melalui forum perangkat daerah dan rapat koordinasi lintas

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		perangkat daerah. Namun, aksesibilitas publik terhadap dokumen-dokumen tersebut masih terbatas karena belum tersedia secara online di website resmi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun website Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah		
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait pengembangan jeruk keprok	Terdapat dua inovasi daerah yang secara langsung mendukung pengembangan jeruk keprok, yaitu Desa Gambus dan Sentra Informasi Produk Lokal Daerah (SIPOK DEH). Desa Gambus mendorong masyarakat menanam komoditas hortikultura seperti jeruk keprok di tingkat desa. Sementara SIPOK DEH menyediakan ruang informasi dan promosi produk unggulan daerah, termasuk potensi jeruk keprok.
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengikuti setidaknya tiga ajang penghargaan atau kompetisi yang relevan dengan inovasi daerah di tahun 2024. Kompetisi tersebut meliputi Innovative Government Award (IGA), Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan dan

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		mempromosikan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta perencanaan pembangunan.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM jeruk keprok yang dibina melalui inkubasi daerah	Saat ini belum tersedia data terkait jumlah start-up atau UMKM jeruk keprok yang dibina melalui program inkubasi inovasi.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan dalam pengembangan jeruk keprok	Belum terdapat data spesifik mengenai jumlah pemanfaatan pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal dalam pengembangan jeruk keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, dalam laporan riset disebutkan bahwa sebagian besar petani masih mengandalkan pengetahuan tradisional dan alat sederhana dalam proses budidaya, meskipun mulai diperkenalkan teknologi modern melalui pendampingan, kelompok tani, serta inisiatif pemerintah dan investor
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah (jeruk keprok)	Hingga saat ini, terdapat setidaknya tiga tema riset yang mendukung pengembangan jeruk keprok sebagai produk unggulan daerah. Ketiga tema tersebut mencakup kajian komoditas unggulan tahun 2020, studi kelayakan budidaya jeruk keprok tahun 2023, serta

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		kajian penentuan produk unggulan daerah tahun 2024.
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah klaster inovasi pertanian jeruk keprok yang terbentuk dan aktif dalam 1 tahun	Terdapat lima kecamatan (Bontomatene, Bontomanai, Bontoharu, Bontososikuyu, dan Buki) yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan jeruk keprok melalui Surat Keputusan Bupati No. 234/IV/2021. Penetapan ini mengarah pada pembangunan kawasan khusus dengan dukungan infrastruktur, teknologi, kelompok tani, dan potensi keterlibatan investor. Meskipun belum secara formal disebut sebagai "klaster inovasi", pendekatan yang digunakan telah mengarah ke pembentukan klaster berbasis komoditas unggulan.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset jeruk keprok yang tercantum dalam dokumen RPJMD dan Renstra	Dalam dokumen RPJMD dan Renstra, tercantum Program Riset dan Inovasi Daerah sebagai program umum, namun tidak dijelaskan secara spesifik bahwa program tersebut mencakup kegiatan riset terkait jeruk keprok
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan pengembangan jeruk keprok dengan isu global (perubahan iklim dan pangan)	Pemerintah telah mengintegrasikan aspek ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim dalam pengembangan jeruk keprok. Hal ini tercermin dari pembangunan "Green House" yaitu pembibitan di Kecamatan Bontomatene, sebagai

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		bagian dari upaya menghasilkan bibit jeruk keprok varietas S-S yang berkualitas, tahan penyakit, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Penguatan kerjasama internasional.	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan jeruk keprok	Di tahun 2021, telah terjalin satu kerja sama internasional antara Pemprov Sulsel dengan Prefektur Ehime, Jepang, dalam upaya meningkatkan mutu jeruk keprok melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Belum ada kerjasama internasional yang secara khusus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Produk Unggulan ke-4: Pengembangan Pariwisata		
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah kajian/policy brief berbasis riset pertanian pariwisata	Hingga tahun 2024, telah tersusun 5 kajian yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, yaitu 1) Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020; 2) Studi Kelayakan Proyek Investasi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, 3) Dokumen Inovasi Pengembangan Puncak Tanadoang Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Tahun 2024, dan 4) Kajian Strategi Pengembangan Produk Unggulan Tahun 2024, dan 5) Rencana Induk Pembangunan

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Kepariwisata Kabupaten Kep Selayar Tahun 2023-2025.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	<p>1) Jumlah dataset riset/inovasi pariwisata yang terunggah dalam satu platform digital resmi</p> <p>2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah (ada/tidak), tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN (%)</p>	Basis data riset terkait pengembangan pariwisata belum dapat diakses secara digital karena portal khusus belum tersedia. Meski demikian, sistem informasi pemerintahan daerah secara umum telah tersedia melalui situs resmi www.kepulauanselayarkab.go.id , namun belum terintegrasi dengan data riset dan inovasi. Di sisi lain, kesiapan SDM cukup mendukung, dengan tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN telah mencapai 100%.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	<p>1) Jumlah lab, kelengkapan alat (menunjang aspek analisis tanah, air, lingkungan mikro tanaman, serta uji kimia-fisiologis sederhana)</p> <p>2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung pengembangan komoditas pariwisata</p>	Di tahun 2024, terdapat satu laboratorium yaitu laboratorium dinas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memiliki ≤ 16 peralatan dengan total 25 unit yang berpotensi mendukung riset pengembangan pariwisata. Peralatan yang relevan antara lain IPAL (1 unit), Incubator BOD (1 unit), TDS & EC Meter (2 unit), Alat Ukur CO ₂ (2 unit), Water Sampler Vertikal (3 unit), BOD Track (2 unit), Alat Ukur Kebisingan (2 unit), Turbidity Meter (1 unit), Spectrophotometer (1 unit), GPS (3 unit), pH Meter dan Printer (2 unit), DO Meter (2 unit), Spectrofotometer (2 unit),

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>Dissolved Oxygen Meter (1 unit), dan Alat Ukur pH, mV, suhu (1 unit).</p> <p>Cakupan internet untuk mendukung kegiatan riset telah mencapai 100%. Dari sisi perangkat lunak, Bapperida memanfaatkan aplikasi pengolah data seperti SPSS dan Excel, sementara UPTD Laboratorium Lingkungan menggunakan Google Earth untuk digitasi lahan.</p>
Pengelolaan kebun raya daerah	Ketersediaan program riset di kebun raya daerah (Gojang)	Saat ini belum tersedia program riset yang secara khusus dilaksanakan di kawasan Kebun Raya Gojang, mengingat statusnya masih dalam tahap perencanaan dan belum beroperasi sebagai kebun raya formal. Pengembangan Kebun Raya Gojang seluas 50 hektar di Dusun Gojang, Desa Bontomarannu tercantum dalam Renstra dinas lingkungan hidup 2021–2026.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (beserta nilai nominalnya)	Saat ini, belum tersedia data terperinci mengenai alokasi anggaran riset untuk masing-masing komoditas unggulan daerah, termasuk sektor pariwisata. Namun, secara umum dana yang dialokasikan untuk kegiatan riset pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp350 juta atau sekitar 0,032% dari

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		total anggaran belanja APBD. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi pendanaan riset masih sangat rendah di dalam struktur anggaran daerah.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait dengan pariwisata	Terdapat total 11 inovasi daerah yang relevan dengan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebanyak 7 inovasi memiliki keterkaitan langsung, seperti Sistem Penataan Aset Pariwisata, Selayar is Going Digital, SOMASI, SIPOK DEH, Selayar Investment Day, Eco Pertashop, dan Kampung Ekonomi Hijau. Sementara itu, 4 inovasi lainnya mendukung secara tidak langsung, antara lain EMBUN PAGI DI PULAU SELAYAR, ISTANAKU, Program Kampung Iklim, dan JARI MENARI. Inovasi-inovasi tersebut berkontribusi pada tata kelola, promosi, infrastruktur, serta keberlanjutan destinasi wisata daerah.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait pariwisata	Dalam lima tahun terakhir, terdapat 2 kerja sama riset yang relevan dengan pengembangan pariwisata, yaitu 1) Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020; dan 2) Studi Kelayakan Proyek Investasi Pengembangan Destinasi

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Wisata Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Jumlah SDM peneliti (termasuk dosen) berdasarkan latar belakang pendidikan	Saat ini belum terdapat data spesifik mengenai jumlah dosen atau peneliti yang secara langsung memiliki latar belakang keahlian di bidang pariwisata/tourism. Namun, secara umum terdapat 139 tenaga dosen dan peneliti dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya, dengan komposisi 8 profesor, 41 doktor, 74 magister, dan 16 sarjana. Komposisi ini menunjukkan ketersediaan SDM berpendidikan tinggi yang dapat dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi terkait pengembangan pariwisata sebagai produk unggulan.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Jumlah perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta terkait riset dan inovasi pariwisata	Dalam lima tahun terakhir, terdapat dua perjanjian kerja sama riset lintas instansi yang relevan dengan pengembangan pariwisata. Pertama, Kajian Komoditas Unggulan tahun 2020 yang melibatkan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar, BI Sulsel, dan ISEI Makassar. Kedua, Studi Kelayakan Proyek Investasi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Pasi Gusung Kabupaten

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>Kepulauan Selayar Tahun 2023, yang merupakan hasil kerja sama Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar dengan PPKP-LPPM Universitas Hasanuddin.</p> <p>Di sisi lain, Dokumen Inovasi Pengembangan Puncak Tanadoang Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Tahun 2024, kajian strategi pengembangan produk unggulan di tahun 2024, dan RIPPARKabupaten Kepulauan Selayar dilakukan secara internal oleh Litbang Bapperida dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.</p>
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset pariwisata	<p>Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, setiap tahun terdapat minimal dua hasil riset yang dimasukkan ke dalam penyusunan RKPD. Namun, hasil kelitbangan yang dimanfaatkan selama periode 2020–2024 lebih difokuskan pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kesalehan Sosial, serta penerapan inovasi daerah yang belum secara eksplisit merujuk pada sektor pariwisata. Dengan demikian, belum terdapat bukti kuat mengenai implementasi hasil riset yang secara khusus</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		terkait dengan pengembangan sektor pariwisata.
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait pariwisata yang didiseminasikan	Empat hasil riset (baik yang merupakan hasil kerjasama dengan instansi atau perguruan tinggi maupun yang dikerjakan secara internal) telah diseminasikan melalui forum resmi dan laporan terbuka. Namun, dari 4 dokumen tersebut, hanya Dokumen Inovasi Pengembangan Puncak Tanadoang Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Tahun 2024 yang laporannya tersedia secara online di website resmi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah		
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait pengembangan pariwisata	Terdapat tujuh inovasi daerah yang secara langsung mendukung pengembangan pariwisata, yaitu 1) Sistem Penataan Aset Pariwisata, 2) Selayar is Going Digital, 3) SOMASI, 4) SIPOK DEH, 5) Selayar Investment Day, 6) Eco Pertashop, dan 7) Kampung Ekonomi Hijau.
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengikuti setidaknya tiga ajang penghargaan atau kompetisi yang relevan dengan inovasi daerah dalam lima tahun terakhir. Kompetisi tersebut meliputi Wonderful Indonesia (Anugrah Pesona Indonesia), Innovative

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Government Award (IGA), Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Dari keempat ajang tersebut, Puncak Tanadoang Kabupaten Kepulauan Selayar masuk kedalam top 10 dataran tinggi pariwisata Indonesia terbaik.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM pariwisata yang dibina melalui inkubasi daerah	Saat ini belum tersedia data terkait jumlah start-up atau UMKM pariwisata yang dibina melalui program inkubasi inovasi.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata	Belum terdapat data spesifik mengenai jumlah pemanfaatan pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah (pariwisata)	Hingga saat ini, terdapat setidaknya empat tema riset yang mendukung pengembangan pariwisata sebagai produk unggulan daerah. Keempat tema tersebut mencakup 1) Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020; 2) Studi Kelayakan Proyek Investasi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, 3) Dokumen Inovasi Pengembangan Puncak Tanadoang Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Tahun 2024, dan 4)

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Kajian Strategi Pengembangan Produk Unggulan Tahun 2024
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah klaster inovasi pariwisata yang terbentuk dan aktif dalam 1 tahun	Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki konsep klaster destinasi pariwisata yang tertuang dalam dokumen RIPPARKAB 2023-2025. Klaster tersebut mencakup 3 komponen utama, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, yang dilengkapi dengan unsur institusi SDM dan kelembagaan pendukung. Masing-masing klaster telah dirinci komponen dan pelaku yang terlibat, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk awal dari klaster inovasi pariwisata
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset pariwisata yang selaras dengan dokumen RPJMN dan RPJPN	Dalam dokumen RPJMD, telah dicantumkan satu program yakni Program Riset dan Inovasi Daerah dengan indikator persentase pemanfaatan riset dalam perencanaan dan penerapan inovasi daerah. Selain itu, dalam dokumen Renstra, tercantum kegiatan penelitian terkait kapasitas debit air tanah Dongkalang di Pasi Gusung, Selayar. Penelitian ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar pengembangan kawasan wisata, khususnya ketersediaan air bersih sebagai bagian dari amenitas destinasi pariwisata.
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global		

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program yang mengintegrasikan pengembangan pariwisata dengan isu global (perubahan iklim dan pangan)	Dalam dokumen RIPPARKAB, telah termuat strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan ekosistem. Salah satu contohnya adalah program pengelolaan destinasi taman mangrove yang dirancang dengan jalur kayu dan pengaturan rotasi kunjungan untuk meminimalkan dampak lingkungan.
Penguatan kerjasama internasional.	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan pariwisata	Saat ini, belum ada bukti kerja sama dengan mitra internasional yang telah terealisasi dalam bentuk program, proyek, atau perjanjian formal.

Tabel 2. 23 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Tema Prioritas Daerah

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
Tema Prioritas 1: Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi		
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief terkait produktivitas daerah 2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah terkait produktivitas daerah	<p>Hingga tahun 2024, upaya ini tercermin melalui dua indikator kunci, yaitu jumlah kajian atau policy brief serta jumlah perda/perkada yang relevan dengan riset dan inovasi produktivitas daerah.</p> <p>1) Terkait jumlah kajian atau policy brief, hingga saat ini telah disusun sebanyak 3 dokumen yang fokus pada sektor-sektor unggulan seperti perikanan tangkap, kelapa, dan pariwisata bahari. Namun, pemanfaatan hasil kajian ini dalam perumusan kebijakan daerah masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan.</p> <p>2) Dari sisi regulasi, telah diterbitkan 2 produk hukum, yaitu 1 Peraturan Kepala Daerah tentang strategi riset daerah dan 1 Peraturan Daerah mengenai Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang memuat arah kebijakan inovasi daerah berbasis produktivitas. Meski demikian, regulasi yang tersedia belum mencakup kerangka implementatif yang kuat untuk mendorong riset terapan maupun kolaborasi antar pemangku kepentingan.</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki landasan awal dalam reformasi kebijakan riset dan inovasi. Namun, masih diperlukan penguatan baik dalam jumlah dan kualitas kajian, penyusunan regulasi yang adaptif, serta mekanisme penerapan kebijakan berbasis riset yang konsisten dan terukur.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dataset riset/inovasi produktivitas daerah yang terunggah dalam satu platform digital resmi 2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah terkait produktivitas daerah 	<p>Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemajuan awal dalam penataan basis data riset dan inovasi. Hingga tahun 2024, telah terdapat 6 dataset riset/inovasi terkait produktivitas daerah yang berhasil dihimpun dan diunggah ke dalam platform digital resmi milik pemerintah daerah, meskipun masih terbatas pada sektor perikanan dan pertanian produktif.</p> <p>Selain itu, sejak tahun 2023, pemerintah daerah telah mulai mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi riset dan inovasi daerah (Sisfo-RIDA) yang mendukung integrasi data lintas sektor terkait produktivitas daerah. Sistem ini telah berfungsi secara internal dan sedang dalam proses peningkatan fitur untuk mendukung keterbukaan informasi serta kolaborasi antarlembaga.</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Meskipun infrastruktur digital telah mulai tersedia, tantangan ke depan mencakup peningkatan kualitas, konsistensi, serta keterbaruan data agar mampu menjadi basis yang solid bagi pengambilan kebijakan berbasis riset.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	<p>1) Jumlah lab dan kelengkapan alat yang dapat menunjang produktivitas daerah</p> <p>2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung pengembangan produktivitas daerah</p>	<p>Hingga tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 3 laboratorium yang mendukung kegiatan riset, dengan kelengkapan peralatan yang masih terbatas pada uji mutu produk perikanan dan pertanian. Sebagian besar alat laboratorium merupakan hibah atau hasil kolaborasi dengan instansi eksternal, yang penggunaannya belum sepenuhnya optimal untuk mendukung riset berbasis produktivitas lokal.</p> <p>Dari sisi infrastruktur digital, cakupan internet pada lembaga riset daerah mencapai 80%. Konektivitas ini telah mendukung komunikasi dan akses data riset dasar, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan riset kolaboratif berbasis cloud dan transfer data berskala besar.</p> <p>Secara umum, infrastruktur dasar riset di Selayar masih memerlukan penguatan baik dalam aspek fisik laboratorium maupun dukungan konektivitas internet untuk</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		menunjang riset yang lebih produktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pengelolaan kebun raya daerah	Ketersediaan program riset di kebun raya daerah (Gojang)	Hingga tahun 2024, Kebun Raya Gojang di Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki program riset yang berjalan secara rutin atau terstruktur. Pemanfaatan kebun raya masih terbatas pada fungsi konservasi dan wisata edukasi, dengan minim keterlibatan dari institusi penelitian atau perguruan tinggi dalam pengembangan riset berbasis potensi lokal, seperti tanaman endemik atau tanaman produktivitas tinggi.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (beserta nilai nominalnya) untuk pengembangan produktivitas daerah	Pada periode 2020–2024, alokasi anggaran untuk riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong sangat rendah, yaitu kurang dari 1% dari total belanja APBD setiap tahunnya. Nilai nominalnya juga fluktuatif dan cenderung belum diarahkan secara spesifik untuk mendukung pengembangan produktivitas daerah. Minimnya anggaran ini menunjukkan bahwa riset dan inovasi belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga membatasi ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mendorong

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		transformasi ekonomi lokal. Diperlukan penguatan komitmen dan kebijakan afirmatif dalam penganggaran agar riset dan inovasi dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan produktivitas daerah.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait produktivitas daerah	Hingga tahun 2024, jumlah ide, paten, atau inovasi yang secara resmi tercatat dan berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kapasitas masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga riset dalam melakukan pencatatan dan perlindungan kekayaan intelektual masih rendah.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait produktivitas daerah	Saat ini, jumlah kerja sama riset di Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara khusus mendukung peningkatan produktivitas daerah masih relatif terbatas . Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta sektor swasta belum terbangun secara optimal dan berkelanjutan.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang	Ketersediaan website jaringan dalam rangka pengembangan produktivitas daerah	Saat ini, Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki website jaringan khusus yang terintegrasi dan dikhususkan untuk mendukung

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
disesuaikan dengan kemampuan daerah.		<p>aktivitas riset dan inovasi daerah, terutama yang berfokus pada pengembangan produktivitas lokal. Informasi riset masih tersebar di berbagai platform, dan belum tersedia satu sistem digital terpadu yang mampu menjadi pusat data dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Ketiadaan website jaringan ini menjadi tantangan dalam upaya diseminasi informasi hasil riset, kolaborasi antarlembaga, serta peningkatan akses masyarakat terhadap inovasi yang relevan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan sarana digital yang mampu menjembatani komunikasi dan integrasi program riset dengan arah pembangunan daerah.</p>
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Jumlah mitra untuk pengembangan produktivitas daerah	<p>Kemitraan antarlembagaan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung produktivitas daerah masih bersifat terbatas dan belum terlembagakan secara sistematis. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, maupun dunia usaha, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong riset dan inovasi berbasis potensi unggulan daerah.</p>
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset produktivitas daerah	<p>Saat ini, tingkat adopsi atau implementasi hasil riset yang</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		mendukung peningkatan produktivitas daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong rendah. Hasil-hasil riset yang dihasilkan baik oleh pemerintah daerah, akademisi, maupun mitra lainnya belum secara optimal diterapkan di sektor-sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Rendahnya difusi inovasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya forum diseminasi hasil riset, keterbatasan kapasitas pelaku usaha dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi, serta belum adanya mekanisme pendampingan yang berkelanjutan.
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait produktivitas daerah	Selama periode 2020–2024, jumlah hasil riset yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terbatas. Meskipun terdapat inisiatif dari beberapa instansi dan akademisi untuk menghasilkan riset yang relevan dengan potensi lokal, seperti perikanan, kelautan, dan pertanian, praktik diseminasi dan pemanfaatannya oleh pelaku inovasi belum berjalan optimal. Minimnya platform penyebarluasan hasil riset, rendahnya literasi inovasi di kalangan pelaku usaha lokal, serta keterbatasan kolaborasi lintas

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>sektor menjadi tantangan utama. Ke depan, penguatan mekanisme diseminasi, penghubung antara peneliti dan pelaku inovasi, serta dukungan kebijakan sangat dibutuhkan agar hasil riset dapat diterapkan secara luas dan mendorong produktivitas daerah secara berkelanjutan.</p>
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah		
<p>Promosi dan kampanye Inovasi;</p>	<p>Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait produktivitas daerah</p>	<p>Hingga saat ini, promosi dan kampanye inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan perkembangan yang masih terbatas. Jumlah inovasi daerah yang tercatat setiap tahun belum konsisten meningkat, dan forum inovasi daerah belum berjalan secara rutin sebagai wadah temu antara inovator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan. Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang mendorong munculnya ide-ide baru dari masyarakat, terutama dari sektor pendidikan dan UMKM, belum ada sistem yang kuat untuk mendokumentasikan, menilai, dan menindaklanjuti inovasi tersebut. Untuk mendorong budaya inovasi yang lebih masif, dibutuhkan penguatan kapasitas promosi, penyelenggaraan forum inovasi secara reguler, serta insentif bagi</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		inovator lokal yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas daerah.
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah terkait pengembangan produktivitas daerah	Pada periode 2020–2024, apresiasi terhadap prestasi inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong rendah, ditunjukkan dengan minimnya partisipasi daerah dalam penghargaan atau kompetisi inovasi yang terkait langsung dengan pengembangan produktivitas daerah. Meskipun terdapat potensi inovatif di masyarakat, belum tersedia mekanisme yang konsisten dan terstruktur untuk mendorong dan memberi penghargaan atas inovasi tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun budaya inovasi yang berkelanjutan dan mendorong transformasi ekonomi berbasis produktivitas lokal.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM yang mengembangkan produktivitas daerah	Pada periode 2020–2024, perkembangan perusahaan pemula berbasis riset di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam tahap awal, dengan jumlah start-up atau UMKM yang secara langsung berkontribusi terhadap pengembangan produktivitas daerah relatif terbatas. Kurangnya akses terhadap pendampingan teknis, keterbatasan jejaring pasar,

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		serta belum optimalnya dukungan kebijakan dan ekosistem inovasi menjadi faktor penghambat utama. Meskipun demikian, potensi wirausaha lokal terus tumbuh, dan dengan penguatan inkubasi bisnis serta integrasi riset dengan kebutuhan pasar, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peluang besar untuk mendorong kemunculan perusahaan pemula yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal secara berkelanjutan.
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan dalam pengembangan produktivitas daerah	Saat ini, upaya inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan serta teknologi masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berjalan secara terbatas dan sporadis. Meskipun daerah ini memiliki kekayaan kearifan lokal yang potensial, seperti praktik budidaya, pengolahan hasil laut, dan teknologi sederhana berbasis alam, pemanfaatannya dalam mendukung produktivitas daerah belum optimal. Ketiadaan sistem dokumentasi yang terintegrasi serta minimnya pelibatan komunitas lokal dan lembaga riset menjadi tantangan utama. Diperlukan strategi yang lebih terarah dan kolaboratif untuk mendorong pemanfaatan teknologi

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis potensi daerah.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan produktivitas daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menunjukkan inisiatif dalam mendorong riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam mendukung promosi produk unggulan lokal seperti perikanan tangkap dan kelapa. Meskipun jumlah tema riset yang diangkat masih terbatas setiap tahunnya, terdapat kecenderungan peningkatan kualitas dan relevansi riset yang dilakukan. Namun, keterlibatan multi pihak—baik dari akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat—masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa tema-tema riset benar-benar menjawab tantangan dan peluang strategis daerah. Optimalisasi prakarsa riset yang berbasis kebutuhan lokal menjadi langkah krusial untuk mendorong peningkatan produktivitas daerah secara berkelanjutan.
Penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah kluster inovasi produktivitas daerah yang terbentuk	Pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada tahap awal. Meskipun terdapat inisiatif dalam membentuk kelompok atau komunitas berbasis potensi lokal

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>seperti perikanan tangkap dan kelapa, jumlah kluster inovasi yang terbentuk dan berjalan secara aktif masih terbatas. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga riset, dan masyarakat menyebabkan pengembangan kluster belum sepenuhnya efektif dalam mendorong produktivitas daerah. Diperlukan penguatan kelembagaan, dukungan regulasi, serta fasilitasi berkelanjutan untuk mengakselerasi terbentuknya kluster inovasi yang mampu mengintegrasikan riset, teknologi, dan pasar.</p>
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset produktivitas daerah yang selaras dengan RPJMN, RPJPN, atau Kementerian	Kesesuaian antara kebijakan riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan arah kebijakan nasional masih perlu diperkuat. Meskipun terdapat beberapa program daerah yang berkaitan dengan pengembangan produktivitas, seperti penguatan sektor kelautan dan perikanan, namun belum seluruhnya tercantum atau terintegrasi secara eksplisit dalam dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, RPJPN, maupun dokumen kementerian terkait. Keterbatasan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan belum optimalnya pemanfaatan

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		hasil riset daerah menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi kebijakan yang lebih strategis agar perencanaan dan implementasi program riset daerah selaras dengan agenda nasional dalam rangka memperkuat ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan pengembangan produktivitas daerah dengan isu global (perubahan iklim dan pangan)	Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu global yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi, khususnya terkait perubahan iklim dan ketahanan pangan. Beberapa program daerah telah dirancang untuk mendukung produktivitas lokal dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim, seperti pengembangan pertanian adaptif dan perlindungan wilayah pesisir. Di sisi lain, program yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan juga mulai diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi lokal dan diversifikasi komoditas unggulan. Meskipun demikian, integrasi kedua isu global ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terstruktur dalam kerangka riset dan inovasi daerah. Penguatan regulasi dan sinergi

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		antarsektor diperlukan untuk memastikan bahwa strategi pembangunan daerah Selayar selaras dengan dinamika dan tantangan global secara berkelanjutan.
Penguatan kerjasama internasional	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan produktivitas daerah	kerjasama internasional dalam pengembangan produktivitas daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih bersifat terbatas. Upaya untuk membangun kolaborasi dengan pihak luar negeri, baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pelatihan, maupun akses terhadap teknologi dan pasar global, masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Meskipun terdapat beberapa inisiasi kerjasama di sektor kelautan dan pariwisata, belum banyak yang difokuskan secara langsung pada peningkatan produktivitas daerah melalui riset dan inovasi. Ke depan, penting bagi daerah untuk secara aktif menjajaki peluang kemitraan strategis dengan lembaga internasional guna memperkuat kapasitas lokal, memperluas jejaring inovasi global, serta meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar internasional.
Tema Prioritas 2. Peningkatan kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Sosial		
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah		

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief terkait pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar 2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah terkait pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren positif dalam reformasi kebijakan riset dan inovasi terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM). Jumlah kajian dan policy brief meningkat secara konsisten, dari hanya satu dokumen kajian pada 2020 menjadi tujuh dokumen pada 2024. Hal ini mencerminkan komitmen yang makin kuat dalam mendorong kebijakan SDM berbasis bukti. Namun, dari sisi regulasi, meskipun belum ada perda khusus, dua Keputusan Bupati yang terbit pada 2023 dan 2024 menandai awal penting penguatan kebijakan inovasi daerah yang lebih terstruktur, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	1) Jumlah dataset riset/inovasi pendidikan dan kesehatan yang terunggah dalam satu platform digital resmi 2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah terkait pengembangan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)	Penataan basis data riset dan inovasi untuk pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemajuan signifikan. Jumlah dataset meningkat dari 3 pada 2020 menjadi 17 pada 2024, dengan pemanfaatan yang makin aktif dalam perencanaan kebijakan berbasis data. Seiring dengan itu, pengembangan sistem informasi juga mengalami lompatan penting: dari kondisi manual pada 2020 menjadi dua sistem digital aktif dan

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		terintegrasi SIPANDU untuk pendidikan dan SIMKESDA untuk kesehatan yang kini telah mendukung pelaporan lintas OPD dan terhubung dengan platform nasional. Hal ini menandai kesiapan infrastruktur data daerah dalam mendukung transformasi sosial berbasis riset dan inovasi.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	<p>1) Jumlah lab dan kelengkapan alat yang dapat menunjang produktivitas sumber daya manusia</p> <p>2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar</p>	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 2020–2024. Jumlah laboratorium meningkat dari 1 menjadi 4 unit, dan kelengkapan alat riset bertambah dari 3 menjadi 10 unit, menjangkau bidang pendidikan, kesehatan, hingga teknologi digital. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas fisik yang signifikan untuk mendukung produktivitas SDM. Selain itu, cakupan internet di seluruh lembaga riset telah stabil di angka 100% sejak 2020, memastikan konektivitas dan akses informasi berjalan optimal. Dengan demikian, Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki fondasi infrastruktur riset yang layak dalam mendukung transformasi sosial berbasis penguatan kualitas SDM.
Pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah pengelola atau tenaga kerja di kebun raya daerah (Gojang)	Selama periode 2020–2024, pengelolaan Kebun Raya Gojang di

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang konsisten. Jumlah pengelola bertambah dari 3 orang pada 2020 menjadi 10 orang pada 2024. Perluasan jumlah tenaga kerja ini sejalan dengan pengembangan fungsi kebun raya, yang kini tidak hanya berfokus pada konservasi flora lokal, tetapi juga mencakup riset tanaman herbal, pelatihan masyarakat, edukasi ekologis, dan penguatan peran kebun raya sebagai pusat agroeduwisata daerah. Kondisi ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjadikan kebun raya sebagai simpul strategis pembangunan SDM berbasis lingkungan.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (berserta nilai nominalnya) untuk bidang pendidikan dan kesehatan (SDM)	Selama periode 2020–2024, alokasi anggaran riset dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan fluktuasi, namun tetap berada di bawah 0,1% dari total belanja daerah. Persentase tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,070%, seiring meningkatnya anggaran riset hingga Rp717 juta. Meski terdapat penurunan bertahap pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Rp350 juta (0,036%) pada 2024, hal ini menandakan bahwa komitmen fiskal terhadap riset SDM masih tergolong rendah. Penguatan alokasi anggaran secara berkelanjutan dibutuhkan agar transformasi sosial berbasis riset dan inovasi dapat berjalan optimal.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan)	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) terkait pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang positif selama periode 2020–2024. Dari hanya 1 inovasi pendidikan yang tercatat pada 2020, jumlahnya meningkat tajam menjadi 8 inovasi pada 2024, terbagi seimbang antara sektor pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hasil riset dan ide lokal serta adanya dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah. Lonjakan inovasi tersebut menunjukkan bahwa ekosistem riset SDM mulai terbangun secara inklusif dan produktif.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait pengembangan SDM (perbaikan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar)	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan perkembangan signifikan dalam penguatan kolaborasi riset SDM dengan

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		<p>berbagai pemangku kepentingan. Dari hanya 2 kerja sama lokal di awal periode, jumlahnya meningkat menjadi 10 pada 2024, melibatkan mitra nasional hingga internasional. Kolaborasi ini mencakup isu-isu strategis seperti akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, hingga transformasi sistem melalui pendekatan berbasis data dan digitalisasi. Tren ini mencerminkan komitmen daerah dalam membangun ekosistem riset yang inklusif dan responsif terhadap tantangan pengembangan SDM.</p>
<p>Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.</p>	<p>Ketersediaan website jaringan dalam rangka pengembangan SDM</p>	<p>Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemajuan nyata dalam penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi SDM melalui pengembangan website jaringan sektor pendidikan dan kesehatan. Dari kondisi tanpa sistem daring pada 2020, daerah ini kini telah memiliki empat website aktif pada 2024, termasuk Portal Inovasi SDM dan penguatan platform SIMKESDA. Transformasi ini menandai pergeseran penting dari pengelolaan manual menuju sistem digital yang lebih terintegrasi, mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis</p>

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		data di bidang pendidikan dan kesehatan.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Jumlah mitra untuk pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar	Selama periode 2020–2024, kemitraan antarkelembagaan dalam pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah mitra aktif meningkat dari 3 pada tahun 2020 menjadi 12 pada tahun 2024, mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Awalnya bersifat lokal dan sektoral, kolaborasi ini berkembang dengan melibatkan lembaga pendidikan tinggi, LSM, NGO, serta sektor swasta. Penguatan jejaring ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekosistem inovasi sosial daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengadopsi hasil riset untuk pengembangan SDM. Jumlah implementasi meningkat dari 2 inovasi awal pada 2020 menjadi 11 pada 2024. Adopsi ini mencakup sektor pendidikan dan kesehatan, mulai dari penggunaan media ajar digital hingga sistem monitoring kesehatan. Peningkatan ini menandakan tumbuhnya budaya

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		pemanfaatan riset sebagai dasar kebijakan dan operasional, serta komitmen daerah dalam mendorong transformasi sosial berbasis inovasi.
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait pengembangan SDM yang didiseminasikan/disebarluaskan	Diseminasi hasil riset pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024. Jumlah riset yang didiseminasi meningkat dari 2 pada tahun 2020 menjadi 12 pada tahun 2024. Diseminasi dilakukan melalui berbagai media, mulai dari forum lokal, pelatihan internal, seminar daerah, hingga platform digital. Perkembangan ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pemanfaatan hasil riset oleh pelaku inovasi untuk mendukung transformasi sosial dan peningkatan kualitas SDM secara inklusif dan berkelanjutan.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah		
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait pengembangan pendidikan dan kesehatan (SDM)	Selama periode 2020–2024, promosi dan kampanye inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang pendidikan dan kesehatan mengalami perkembangan bertahap. Setiap tahun muncul inisiatif inovatif yang merespons isu lokal, mulai dari layanan kesehatan bergerak di

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		wilayah terpencil, program motivasi pendidik, hingga gerakan sekolah aman dan literasi keluarga. Meski tahun 2022 tidak mencatat inovasi baru, tren umum menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap transformasi sosial melalui pendekatan inovatif yang disampaikan dalam berbagai forum lokal. Ini mencerminkan tumbuhnya budaya inovasi yang semakin kontekstual dan relevan dengan kebutuhan daerah.
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah terkait pengembangan SDM	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan konsistensi dalam upaya mengapresiasi dan menampilkan inovasi daerah melalui partisipasi dalam ajang nasional seperti <i>Innovative Government Award (IGA)</i> . Meskipun sempat tidak tercatat mengikuti kompetisi pada 2022, daerah ini secara umum memperlihatkan komitmen berkelanjutan dalam menumbuhkan budaya apresiasi inovasi, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Partisipasi yang berulang mencerminkan upaya Selayar dalam memperkuat posisi sebagai daerah yang adaptif dan progresif dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis inovasi.

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM yang dibina melalui inkubasi daerah	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar mencatat kemajuan signifikan dalam pengembangan perusahaan pemula berbasis riset di bidang sumber daya manusia. Dimulai dari satu UMKM binaan pada 2020, jumlahnya meningkat stabil hingga mencapai 10 UMKM/start-up pada 2024. Fokus pengembangan meluas dari sektor pendidikan informal dan kesehatan dasar ke solusi digital, inovasi sosial, dan layanan komunitas. Pertumbuhan ini mencerminkan peran inkubasi daerah yang semakin strategis dalam mendukung kewirausahaan inovatif berbasis riset untuk mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan	Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan selama 2020–2024. Dimulai dari dua bentuk pengetahuan pada 2020, jumlahnya tumbuh hingga mencapai 11 pada 2024. Inovasi lokal yang dimanfaatkan mencakup pengobatan tradisional, pendidikan berbasis budaya, pertanian organik, hingga pengolahan pangan untuk gizi. Tidak hanya dimanfaatkan dalam program pendidikan dan

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		kesehatan, sebagian juga mulai diarahkan untuk perlindungan hukum melalui sertifikasi dan kekayaan intelektual, menandai langkah konkret dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem inovasi daerah.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan SDM daerah	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung peningkatan kualitas SDM menunjukkan perkembangan positif selama periode 2020–2024. Jumlah tema riset SDM meningkat signifikan dari 2 tema pada 2020 menjadi 12 tema pada 2024, yang mencakup isu-isu strategis di bidang pendidikan dan kesehatan. Lonjakan tema riset ini mencerminkan semakin kuatnya orientasi kebijakan daerah terhadap pengembangan SDM berbasis bukti, sekaligus menandakan meningkatnya kesadaran akan pentingnya riset sebagai fondasi perumusan solusi atas tantangan sosial dan ekonomi lokal.
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah klaster inovasi yang memberdayakan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah yang mendukung pemberdayaan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan selama periode

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		2020–2024. Dari hanya 1 klaster ekonomi pada tahun 2020, jumlah klaster tumbuh menjadi 8 pada tahun 2024, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (kelapa, perikanan, pariwisata). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam mendorong integrasi lintas sektor melalui klaster inovasi yang tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia sebagai pilar utama transformasi sosial.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset pengembangan SDM yang selaras dengan RPJMN, RPJPN, atau Kementerian	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan keselarasan program riset pengembangan SDM dengan arah kebijakan nasional, baik yang tercantum dalam RPJMN maupun dokumen kementerian terkait. Dari hanya 2 kegiatan yang selaras pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 9 pada tahun 2024, terdiri dari 5 di sektor pendidikan dan 4 di sektor kesehatan. Hal ini mencerminkan komitmen daerah untuk mensinergikan perencanaan lokal dengan prioritas nasional dalam penguatan kualitas SDM secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global		

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan pengembangan SDM dengan isu global	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar secara progresif meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu global dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi SDM. Dari hanya 1 program integratif pada 2020 yang berfokus pada gizi anak dan kesehatan ibu sesuai SDGs, jumlahnya meningkat menjadi 8 program pada 2024. Program-program tersebut mencakup berbagai isu strategis seperti pendidikan hijau, sanitasi global, hingga digital health. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai global ke dalam kebijakan dan praktik lokal untuk mendukung transformasi sosial yang berkelanjutan.
Penguatan kerjasama internasional	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan dalam penguatan kerja sama internasional untuk pengembangan SDM. Dari hanya 1 kerja sama di sektor pendidikan pada 2020, jumlah total kerja sama internasional meningkat menjadi 6 pada 2024, dengan kontribusi yang seimbang antara sektor pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi ini mencerminkan keterbukaan daerah

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		terhadap jejaring global dan pemanfaatan peluang internasional untuk mendukung peningkatan kualitas SDM secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
Tema Prioritas 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung transformasi sosial (Penurunan Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran)		
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar 2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar	Hingga tahun 2024, telah ditetapkan dua Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Penetapan Inovasi Daerah, yaitu Keputusan Bupati Nomor 396/VII/2023 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 353/VIII/2024 Tahun 2024, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar
Penataan basis data Riset dan Inovasi	1) Jumlah dataset riset/inovasi terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran yang terunggah dalam satu platform digital resmi 2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran	Hingga tahun 2024, belum terdapat dataset riset atau inovasi terkait kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang terunggah dalam satu platform digital resmi. Selain itu, sistem informasi yang secara khusus memuat dan mengelola data mengenai isu-isu tersebut juga belum tersedia.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1) Jumlah lab dan kelengkapan alat yang dapat menunjang riset kemiskinan, ketimpangan, pengangguran	Seluruh lembaga riset di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendukung riset terkait kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran telah memiliki akses

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
	2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung riset terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar	internet (cakupan 100%), sehingga memungkinkan pelaksanaan riset yang lebih berbasis data digital
Pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah pengelola atau tenaga kerja di kebun raya daerah (Gojang)	Belum terdapat data terkait jumlah pengelola atau tenaga kerja yang ditugaskan di Kebun Raya Daerah (Gojang). Ini mengindikasikan perlunya penguatan pencatatan dan pemetaan sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan kebun raya secara berkelanjutan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (berserta nilai nominalnya) untuk penanganan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran	Persentase alokasi anggaran riset dari total belanja APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk isu kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Persentase alokasi anggaran riset sempat mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 0,070%, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 0,036% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya penurunan prioritas anggaran riset terhadap isu-isu strategis tersebut dalam beberapa tahun terakhir
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait penanganan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Belum tersedia data yang akurat mengenai jumlah ide, paten, atau inovasi yang secara spesifik terkait dengan penanganan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pendataan dan dokumentasi yang lebih terstruktur kedepannya
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Saat ini belum tersedia data mengenai jumlah kerja sama riset yang secara khusus terkait dengan penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Ketersediaan website jaringan untuk riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Belum tersedia website jaringan yang secara khusus memfasilitasi dan mengintegrasikan data atau hasil riset mengenai penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Jumlah mitra untuk riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Saat ini belum tersedia data terkait jumlah mitra yang terlibat dalam pelaksanaan riset yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini mengindikasikan perlunya pemetaan kolaborasi yang lebih terstruktur dengan pihak akademisi, lembaga riset, maupun sektor swasta
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar	Belum tersedia data mengenai jumlah adopsi atau implementasi hasil riset yang secara langsung digunakan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan,

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		ketimpangan, dan pengangguran. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pemanfaatan hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang didiseminasikan/ disebarluaskan	Belum terdapat data yang mendokumentasikan jumlah hasil riset terkait isu kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang telah didiseminasikan atau disebarluaskan oleh Pemerintah. Ketiadaan informasi ini menandakan perlunya penguatan mekanisme publikasi dan diseminasi hasil riset secara lebih terbuka kedepannya
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah		
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Selama periode 2020–2024, tercatat 5 inovasi daerah yang mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Inovasi yang muncul antara lain Optimalisasi Penyaluran Bansos Kesra Berbasis Dusun Menuju 6T (2020), Program SIKAMASEANG (2021), dan Kampung Ekonomi Hijau (2023). Tahun 2022 tidak terdapat inovasi baru yang tercatat. Sementara pada tahun 2024, jumlah inovasi meningkat dengan dua inisiatif, yaitu SIRUMAHKU SEHAT dan Program Kampung

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Iklim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Kabupaten Kepulauan Selayar secara konsisten mengikuti kompetisi inovasi terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran selama lima tahun terakhir, khususnya melalui partisipasi dalam Innovative Government Award (IGA)
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau usaha mikro yang dibina melalui inkubasi daerah	Hingga saat ini, belum tersedia data terkait jumlah start-up atau usaha mikro yang dibina melalui skema inkubasi daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Saat ini belum terdapat data yang mendokumentasikan pemanfaatan pengetahuan atau teknologi lokal masyarakat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Ini menandakan peluang untuk menggali potensi lokal dalam perumusan solusi berbasis komunitas
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau	Jumlah tema riset yang mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Belum tersedia data mengenai jumlah tema riset yang secara khusus mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
mengatasi permasalahan daerah;		
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah klaster inovasi untuk pengadaan riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Saat ini belum terdapat data terkait jumlah klaster inovasi yang difokuskan pada pengadaan riset untuk penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di daerah ini, yang mengindikasikan kebutuhan untuk membangun ekosistem inovasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang selaras dengan RPJMN, RPJPN, atau Kementerian	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengakomodir 3 program prioritas nasional kedalam dokumen perencanaan daerah, yang meliputi pemberantasan kemiskinan, penguatan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, serta digitalisasi. Prioritas tersebut dijabarkan dalam program pengelolaan pendidikan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan program pengembangan UMKM
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dengan isu global	Kabupaten ini telah memiliki program-program prioritas daerah yang mengintegrasikan isu-isu global ke dalam upaya penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Program tersebut mencakup pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif, penguatan pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi, pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan serta penguatan UMKM, hingga pembangunan desa dan penataan kota. Seluruh program ini selaras dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs)
Penguatan kerjasama internasional	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar	Saat ini belum ada data yang mencatat jumlah kerja sama internasional yang dilakukan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran
Tema Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik		
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief terkait kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar 2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah terkait pengembangan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Hingga tahun 2024, telah ditetapkan dua Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Penetapan Inovasi Daerah, yaitu Keputusan Bupati Nomor 396/VII/2023 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 353/VIII/2024 Tahun 2024, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Selayar. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dataset riset/inovasi terkait layanan publik yang terunggah dalam satu platform digital resmi 2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah terkait layanan publik 	Belum terdapat data mengenai jumlah dataset riset atau inovasi terkait layanan publik yang terunggah dalam satu platform digital resmi. Selain itu, sistem informasi di pemerintahan daerah yang secara khusus menangani data dan pengelolaan informasi terkait layanan publik juga belum tersedia.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah lab dan kelengkapan alat yang dapat menunjang kualitas layanan publik 2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar 	Seluruh lembaga riset yang berperan dalam pengembangan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki akses internet penuh (cakupan 100%), yang menjadi modal penting untuk mendukung efektivitas dan kelancaran proses riset
Pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah pengelola atau tenaga kerja di kebun raya daerah (Gojang)	Belum terdapat data terkait jumlah pengelola atau tenaga kerja yang ditugaskan di Kebun Raya Daerah (Gojang)
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (berserta nilai nominalnya) untuk pengembangan kualitas layanan publik	Persentase anggaran riset dari total belanja APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pengembangan kualitas layanan publik mengalami fluktuasi selama

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		periode 2020 hingga 2024, dengan nilai tertinggi sebesar 0,070% pada tahun 2021 dan menurun menjadi 0,036% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dalam alokasi anggaran riset yang mendukung peningkatan layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Belum tersedia data mengenai jumlah ide, paten, atau inovasi yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menandakan perlunya sistem pendataan yang lebih terstruktur
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Data mengenai jumlah kerja sama riset yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar belum tersedia
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Ketersediaan website jaringan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik	Saat ini belum terdapat website jaringan resmi yang difungsikan untuk mendukung koordinasi dan diseminasi riset maupun inovasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah		
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Jumlah mitra untuk pengembangan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Belum tersedia data mengenai jumlah mitra yang terlibat dalam pengembangan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Selayar. Hal ini menunjukkan perlunya pendataan mitra untuk mendukung kolaborasi dalam peningkatan layanan publik
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset mengenai layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Data terkait jumlah adopsi atau implementasi hasil riset yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik belum tersedia. Ini mengindikasikan perlunya mekanisme pemantauan untuk memastikan hasil riset dapat diimplementasikan
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait kualitas layanan publik yang didiseminasikan/disebarluaskan	Saat ini belum terdapat data yang mendokumentasikan jumlah hasil riset terkait kualitas layanan publik yang telah didiseminasikan atau disebarluaskan di Kabupaten Kepulauan Selayar
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah		
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait kualitas layanan publik	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 6 inovasi terkait pengembangan kualitas layanan publik. Pada tahun 2020, terdapat dua inovasi, yaitu Layanan Perizinan Mobile dan Penerapan Tatanan New Normal di Sektor Transportasi. Namun, tidak ada inovasi baru pada tahun 2021 dan 2022. Tahun 2023 kembali muncul dua inovasi, yaitu program ALAMAK dan Layanan Khusus Pengaduan Masyarakat berbasis IT. Pada tahun 2024, terdapat satu

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		inovasi, yakni Sentra Informasi Produk Lokal Daerah (SIP OK DEH).
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah terkait peningkatan kualitas layanan publik	Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar rutin mengikuti 1 kompetisi inovasi terkait peningkatan kualitas layanan publik melalui partisipasi dalam Innovative Government Award (IGA)
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM binaan yang berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas layanan publik	Belum tersedia data mengenai jumlah start-up atau UMKM binaan yang secara langsung berkontribusi dalam peningkatan akses dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan program pembinaan kewirausahaan yang terukur kedepannya
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang diintegrasikan ke dalam sistem layanan publik	Saat ini belum terdapat data yang mendokumentasikan pemanfaatan pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang diintegrasikan ke dalam sistem layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau	Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan kualitas layanan publik	Saat ini, belum tersedia data pendukung mengenai jumlah tema riset yang secara khusus mendukung pengembangan kualitas layanan publik

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
mengatasi permasalahan daerah;		
Penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah kluster inovasi yang meningkatkan kualitas layanan publik Kabupaten Kepulauan Selayar	Saat ini belum terdapat data terkait jumlah kluster inovasi yang berperan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketiadaan data ini menandakan kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan ekosistem inovasi yang lebih terstruktur kedepannya
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset peningkatan kualitas layanan publik yang selaras dengan dokumen RPJMN, RPJPN, atau Kementerian	Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki program penunjang urusan pemerintahan daerah yang mencakup peningkatan kualitas layanan publik. Di dalamnya, terdapat fokus pada pengembangan layanan administrasi berbasis digital sebagai upaya mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan peningkatan kualitas layanan publik dengan isu global	Kabupaten ini telah memiliki sejumlah program daerah yang mengintegrasikan peningkatan kualitas layanan publik dengan isu-isu global. Beberapa di antaranya diwujudkan melalui kegiatan seperti pengembangan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan promosi produk lokal berbasis elektronik, penerapan prinsip Sustainable

Elemen Dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini
		Development Goals (SDGs), serta upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan
Penguatan kerjasama internasional	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan kualitas layanan publik Kabupaten Kepulauan Selayar	Saat ini belum tersedia data konkrit mengenai jumlah kerjasama internasional yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pengembangan kualitas layanan publiknya

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Riset dan inovasi memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah berbasis pengetahuan, teknologi, dan bukti ilmiah. Namun demikian, pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dihadapkan pada sejumlah. Di sisi lain, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1 Tantangan

1) Produk Unggulan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki empat produk unggulan daerah (PUD) yang strategis, yaitu kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok, dan pariwisata. Keempat sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Namun demikian, optimalisasi pengembangannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, kelembagaan, dan teknis yang saling terkait. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi secara cermat guna membangun fondasi riset dan inovasi yang lebih kuat dan terarah.

Pada PUD kelapa, tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur riset dan hilirisasi produk. Hingga tahun 2024, fasilitas laboratorium yang tersedia belum mampu menunjang analisis lanjutan seperti uji mutu pascapanen, kualitas air, serta karakteristik fisiologis buah kelapa. Ketiadaan laboratorium riset terapan menyebabkan proses pengembangan produk turunannya masih mengandalkan pengetahuan tradisional tanpa dukungan validasi ilmiah, sehingga inovasi yang dihasilkan masih kurang kompetitif. Selain itu, sistem informasi digital khusus riset kelapa belum terbangun, sehingga tidak ada media berbasis data yang bisa diakses oleh stakeholder untuk pengambilan keputusan, penguatan jejaring kemitraan, atau diseminasi pengetahuan ke petani dan pelaku usaha lokal. Hal ini diperparah oleh rendahnya alokasi anggaran riset dan inovasi yang hanya mencapai 0,12% dari total APBD, dengan porsi yang diarahkan langsung pada PUD kelapa yang bahkan jauh lebih kecil. Tanpa dukungan riset yang

memadai, pengembangan nilai tambah kelapa hanya akan bertumpu pada aktivitas primer, sehingga peluang peningkatan kesejahteraan petani dan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi sangat terbatas.

Selanjutnya, pada PUD perikanan tangkap, tantangan utama berkaitan dengan minimnya infrastruktur pendukung riset kelautan serta rendahnya intensitas kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Hingga saat ini belum tersedia laboratorium kelautan yang mampu mendukung pengujian kualitas perairan, parameter oseanografi, serta studi biologis hasil tangkapan secara menyeluruh. Akibatnya, banyak kebijakan di sektor ini yang masih disusun berdasarkan pendekatan normatif dan kurang berbasis data. Hanya terdapat dua kajian utama dalam lima tahun terakhir, dan dokumen tersebut belum cukup merepresentasikan kompleksitas dinamika perikanan tangkap di wilayah kepulauan. Selain itu, tantangan lain muncul dari belum adanya sistem informasi perikanan berbasis digital yang terintegrasi, sehingga akses terhadap data produktivitas hasil tangkap, lokasi zona tangkap, dan informasi pasar menjadi terbatas. Koneksi internet yang belum merata—terutama di wilayah pesisir yang menjadi pusat aktivitas nelayan—membuat transfer teknologi dan diseminasi informasi semakin sulit dilakukan. Selain itu, kerja sama riset dengan pihak eksternal masih sporadis dan tidak tersusun dalam skema jangka panjang, sehingga inovasi-inovasi seperti teknologi tangkap ramah lingkungan atau pemrosesan hasil laut modern belum berkembang secara luas.

Pada komoditas jeruk keprok, tantangan utama berkaitan dengan penguatan sistem riset dan pengembangan varietas unggul yang sesuai dengan karakteristik agroklimat lokal. Meskipun telah terdapat tiga dokumen kajian yang membahas mengenai varietas unggul, tata niaga, dan strategi branding produk hortikultura lokal, pemanfaatan hasil kajian ini dalam pengambilan kebijakan dan praktik budidaya di lapangan masih terbatas. Riset yang ada belum disertai uji adaptasi multi-lokasi secara sistematis, sehingga pengembangan varietas unggul yang benar-benar sesuai dengan kondisi agroekologi Selayar masih menghadapi kendala. Selain itu, belum tersedia sistem pemantauan berkelanjutan terkait produktivitas, kualitas buah, serta preferensi pasar terhadap produk jeruk lokal.

Pada PUD pariwisata, meskipun memiliki daya tarik alam yang luar biasa seperti Taman Nasional Takabonerate dan gugusan pulau eksotis lainnya, juga tidak lepas dari tantangan dalam konteks riset dan inovasi. Hingga saat ini, riset tentang pengembangan destinasi pariwisata, daya dukung lingkungan, serta perilaku dan preferensi wisatawan masih sangat terbatas. Belum terdapat pusat riset atau unit observasi kebijakan pariwisata di tingkat daerah yang dapat menjadi referensi bagi perumusan program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Inovasi dalam pengelolaan destinasi, promosi digital, dan manajemen pengalaman wisatawan masih bersifat ad-hoc dan belum terstruktur dalam platform riset yang berkelanjutan. Selain itu, kapasitas SDM pengelola destinasi dan pelaku usaha pariwisata lokal masih belum memadai, khususnya dalam aspek pemasaran digital, pengelolaan wisata berbasis komunitas, dan penguasaan bahasa asing. Belum adanya integrasi antara sektor pariwisata dengan bidang riset, pendidikan, dan UMKM lokal juga menjadi hambatan untuk menciptakan ekosistem wisata yang inovatif dan inklusif.

Secara umum, keempat produk unggulan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih menghadapi tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, mulai dari keterbatasan infrastruktur riset, rendahnya kapasitas SDM, belum optimalnya sistem informasi digital, hingga lemahnya kolaborasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan produk unggulan tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga pada seberapa kuat ekosistem riset dan inovasi dibangun dan dimanfaatkan. Tanpa penguatan menyeluruh terhadap sistem pendukung riset—baik dari sisi kelembagaan, regulasi, pendanaan, maupun jejaring kemitraan—upaya untuk menjadikan kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok, dan pariwisata sebagai penggerak utama transformasi ekonomi daerah akan terus menghadapi hambatan struktural yang signifikan.

2) Tema Prioritas Daerah

Dalam mendukung arah transformasi ekonomi dan sosial yang inklusif serta berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan empat tema

prioritas pembangunan daerah. Masing-masing tema memiliki kontribusi strategis terhadap penguatan daya saing wilayah, namun dalam implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi kelembagaan, kapasitas sumber daya, maupun keterpaduan sistem riset dan inovasi.

Pada tema prioritas pertama, Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara potensi sumber daya yang melimpah dengan rendahnya kapasitas inovasi dan efisiensi produksi. Meskipun Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki basis sektor unggulan seperti kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok, dan pariwisata, modernisasi sistem produksi di sektor-sektor tersebut masih terbatas. Sebagian besar aktivitas produksi masih dijalankan secara tradisional dengan teknologi sederhana, sehingga nilai tambah yang dihasilkan rendah dan sulit bersaing dengan produk dari daerah lain yang telah mengadopsi teknologi lebih maju.

Tantangan ini diperparah oleh terbatasnya transfer teknologi dari lembaga riset kepada pelaku usaha lokal. Ketiadaan pola kemitraan riset yang terstruktur menghambat proses alih teknologi, baik dalam hal budidaya, pengolahan pascapanen, maupun inovasi pemasaran. Akibatnya, sektor produktif daerah belum mampu mencapai skala produksi yang efisien atau menghasilkan produk turunan bernilai tambah tinggi. Minimnya insentif berbasis riset untuk UMKM, koperasi, dan komunitas lokal juga menurunkan motivasi adopsi teknologi baru, sehingga peningkatan produktivitas berjalan lambat dan cenderung stagnan.

Di sisi lain, pemanfaatan data dan digitalisasi di sektor produktif masih belum optimal. Perencanaan produksi dan distribusi belum berbasis pemetaan spasial yang akurat atau sistem informasi rantai pasok yang terintegrasi. Tanpa dukungan data yang memadai, peluang untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperluas akses pasar, serta merespons dinamika permintaan pasar menjadi terbatas. Tantangan kelembagaan juga tampak pada regulasi sektoral yang belum sepenuhnya adaptif dan perlindungan kekayaan intelektual atas inovasi lokal yang masih lemah, sehingga inovasi yang lahir dari masyarakat atau pelaku usaha sulit berkembang dalam jangka panjang.

Keterbatasan-keterbatasan ini berpotensi memperlambat akselerasi transformasi ekonomi daerah. Jika tidak diatasi melalui kebijakan yang terarah, kolaborasi riset yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi secara masif, sektor produktif di Kabupaten Kepulauan Selayar akan kesulitan berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis inovasi.

Selanjutnya, pada tema Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Mendukung Transformasi Sosial, Kabupaten Kepulauan Selayar masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan lemahnya dukungan riset dan inovasi. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya kegiatan riset terapan yang berfokus pada isu-isu pendidikan dan kesehatan daerah. Riset-riset yang tersedia umumnya masih bersifat deskriptif dan belum cukup menjawab kebutuhan perencanaan berbasis bukti di sektor SDM. Hal ini menjadi tantangan dalam menghadirkan kebijakan yang kontekstual, tepat sasaran, dan berbasis data lokal. Ketidaktercukupannya basis ilmiah juga menghambat pengembangan program yang responsif terhadap keragaman geografis, sosial, dan budaya masyarakat di wilayah kepulauan.

Tantangan lainnya adalah belum terbentuknya ekosistem riset yang terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, lembaga litbang, serta komunitas masyarakat. Kolaborasi lintas aktor masih terbatas dan bersifat insidental, tanpa dukungan kelembagaan yang mendorong kesinambungan riset SDM. Selain itu, belum tersedia sistem informasi riset daerah yang dapat menghimpun, mengelola, dan membagikan hasil kajian strategis secara terbuka. Kondisi ini menjadi hambatan dalam memanfaatkan pengetahuan yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan sosial. Tantangan ini diperkuat oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung perencanaan dan evaluasi program SDM secara adaptif dan berbasis bukti.

Kapasitas pelaku riset lokal juga menjadi bagian dari tantangan struktural. Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam metodologi riset sosial, pendidikan, dan kesehatan menyebabkan inisiatif-inisiatif riset strategis sulit dikembangkan secara mandiri di tingkat daerah. Tantangan ini mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan inovatif yang mampu menjawab dinamika

kebutuhan masyarakat. Apabila tantangan-tantangan tersebut tidak segera ditangani, upaya transformasi sosial melalui penguatan kualitas SDM akan berjalan lambat, terfragmentasi, dan kurang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi global.

Selanjutnya, pada tema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mendukung Transformasi Sosial (Penurunan Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan), tantangannya bersumber dari lemahnya fondasi riset dan inovasi sebagai basis intervensi kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya ketersediaan data dan kajian berbasis bukti yang dapat menjadi dasar dalam merancang program pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta pemberdayaan kelompok rentan. Selama ini, sebagian besar intervensi kesejahteraan masih mengandalkan pendekatan sektoral dan administratif, tanpa dukungan riset multidimensi yang memadai, terutama dalam memetakan faktor-faktor struktural penyebab kerentanan ekonomi di wilayah kepulauan. Hal ini berdampak pada tidak tepatnya sasaran program, duplikasi bantuan, serta lemahnya efisiensi dalam pengalokasian sumber daya publik.

Tantangan lain muncul dari belum berkembangnya kapasitas kelembagaan daerah dalam menyelenggarakan riset sosial terapan. Belum tersedia unit atau forum riset daerah yang secara khusus menangani isu-isu kesejahteraan lintas sektor, seperti ketahanan pangan, akses ke pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan pemberdayaan komunitas. Akibatnya, agenda riset terkait kesejahteraan cenderung terpecah dan tidak terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan pelaku lokal masih sporadis dan belum terbentuk dalam skema jangka panjang. Ini menjadi tantangan dalam membangun ekosistem inovasi sosial yang mampu merespons dinamika kesejahteraan berbasis kondisi lokal.

Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi kesejahteraan juga memperkuat tantangan yang ada. Belum optimalnya digitalisasi data rumah tangga miskin, basis data sosial terpadu, serta minimnya dashboard analitik untuk evaluasi kebijakan menyebabkan respons terhadap perubahan kondisi sosial berjalan lambat. Selain itu, rendahnya literasi data dan kapasitas analisis di tingkat perangkat

daerah juga menjadi hambatan dalam penggunaan hasil riset sebagai acuan intervensi. Jika tantangan-tantangan ini tidak ditangani secara sistematis, maka kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan cenderung bersifat reaktif, tidak berbasis bukti, dan berisiko gagal dalam menjangkau kelompok-kelompok yang paling membutuhkan.

Untuk tema keempat yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Publik, yang merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif, masih menghadapi tantangan yang signifikan, khususnya dalam pemanfaatan riset dan inovasi sebagai landasan transformasi birokrasi. Salah satu tantangan utama adalah belum terbangunnya budaya riset dalam pengelolaan layanan publik. Inovasi pelayanan masih bersifat teknis dan berbasis pada inisiatif sektoral, tanpa didukung kajian ilmiah yang memetakan kebutuhan masyarakat, efektivitas sistem pelayanan, serta persepsi kualitas layanan dari sisi pengguna. Akibatnya, banyak inovasi bersifat administratif dan tidak menjawab akar persoalan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas layanan secara menyeluruh.

Tantangan lainnya terletak pada belum optimalnya pemanfaatan data dan sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan maupun evaluasi kinerja layanan publik secara menyeluruh. Inisiatif digitalisasi memang telah dijalankan di sejumlah sektor, namun integrasi data antar-perangkat daerah masih lemah, sehingga belum terbentuk sistem informasi yang mampu menyediakan basis data terpadu untuk pelayanan yang berbasis kebutuhan. Meskipun survei kepuasan masyarakat telah dilakukan secara berkala, pemanfaatan hasilnya sebagai dasar pengambilan kebijakan belum maksimal, dan belum dilengkapi dengan kajian yang menggali secara mendalam dinamika kebutuhan serta perilaku pengguna layanan. Tantangan ini memperlemah kapasitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan publik yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap ekspektasi masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, tantangan tetap muncul meskipun Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki BAPPERIDA sebagai institusi yang mengemban fungsi perencanaan, riset, dan inovasi. Tantangan tersebut antara lain mencakup belum optimalnya pemanfaatan fungsi riset dalam siklus kebijakan pembangunan daerah serta

belum terlembaganya mekanisme penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan komunitas riset lokal secara berkelanjutan. Selain itu, kapasitas aparatur dalam merancang dan memanfaatkan hasil riset sebagai dasar pengambilan keputusan masih terbatas, baik dari aspek literasi data, metodologi evaluasi kebijakan, maupun teknologi digital. Tanpa penguatan riset dan inovasi, tantangan-tantangan tersebut berpotensi menghambat akselerasi reformasi birokrasi dan pembaruan layanan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

3.2 Peluang

1) Produk Unggulan Daerah

Sebagai salah satu komoditas unggulan utama, komoditas kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sektor yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Kepulauan Selayar. Luasnya areal tanaman kelapa yang tersebar di hampir seluruh kecamatan, ditambah dengan tradisi masyarakat dalam membudidayakan kelapa secara turun-temurun, menjadi fondasi penting dalam penguatan sektor ini. Potensi besar ini dapat dioptimalkan lebih lanjut melalui integrasi riset dan inovasi, terutama dalam hal peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya, dan pengembangan diversifikasi produk turunan kelapa.

Peluang pengembangan riset agronomi terbuka lebar, terutama dalam hal pemilihan varietas unggul lokal, teknik pemupukan berimbang, serta manajemen pascapanen yang mampu mempertahankan kualitas buah dan kopra. Kolaborasi dengan lembaga riset pertanian dan perguruan tinggi dapat mendorong penerapan teknologi tepat guna, termasuk sistem irigasi hemat air, pengolahan limbah kelapa menjadi produk bernilai tambah (seperti cocopeat, arang aktif, dan serat kelapa), hingga pengembangan produk hilir seperti Virgin Coconut Oil (VCO), makanan olahan, kosmetik herbal berbasis kelapa, dan minyak goreng lokal hasil olahan kelapa. Pengembangan minyak goreng berbasis kelapa tidak hanya menjawab kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha rumah tangga dan UMKM dalam skala kecil hingga menengah, yang dapat diperkuat melalui dukungan alat produksi sederhana dan standar keamanan pangan. Selain itu, meningkatnya permintaan pasar terhadap produk-produk alami dan

organik memberikan momentum untuk mendorong sertifikasi dan branding produk kelapa asal Selayar, yang dapat diposisikan sebagai komoditas unggulan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di sisi lain, untuk PUD perikanan tangkap, potensi pengembangannya didukung oleh kondisi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah kepulauan dengan luas wilayah laut dan keberagaman sumber daya ikan yang tinggi. Keunggulan geografis sebagai daerah kepulauan yang berada di jalur migrasi ikan menjadikan perikanan tangkap sebagai salah satu komoditas strategis yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi. Komunitas nelayan yang telah lama berkembang, serta ketersediaan wilayah tangkap tradisional yang telah teridentifikasi, menjadi fondasi awal untuk memperkuat sistem perikanan tangkap berkelanjutan.

Peluang utama terletak pada semakin terbukanya akses kemitraan riset dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional, dalam pengembangan riset oseanografi, pemetaan zona tangkap, serta inovasi alat tangkap ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem informasi geografis (SIG), aplikasi pemantauan tangkapan ikan, dan penggunaan citra satelit untuk estimasi stok ikan merupakan pendekatan riset yang dapat memperkuat efektivitas pengelolaan sumber daya laut. Dengan penerapan teknologi tersebut, pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih presisi, termasuk dalam menetapkan zona tangkap lestari, menghindari overfishing, serta memantau dinamika pergerakan ikan dan kondisi lingkungan laut secara real time. Hal ini sangat penting untuk mendukung kebijakan pengelolaan perikanan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan efisiensi aktivitas penangkapan oleh nelayan. Selain itu, dukungan kelembagaan seperti BRIN dan program matching fund juga memberi peluang pendanaan dan kolaborasi untuk riset terapan yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Di sisi hilir, potensi pengembangan produk olahan berbasis hasil tangkap laut seperti ikan kering dan abon ikan menjadi peluang ekonomi lokal yang sangat menjanjikan. Tradisi pengolahan ikan kering yang sudah berlangsung secara turun-temurun di berbagai desa pesisir dapat diperkuat melalui inovasi teknologi pengeringan dan pengemasan, guna meningkatkan standar mutu, daya tahan, serta nilai jual produk.

Sementara itu, pengembangan abon ikan sebagai produk olahan modern yang bernilai tinggi juga dapat menjadi alternatif strategis untuk diversifikasi usaha perikanan rumah tangga. Keduanya berpeluang besar untuk menembus pasar domestik maupun ekspor, terutama jika didukung oleh sistem jaminan mutu, sertifikasi pangan, dan promosi berbasis identitas lokal. Penguatan sistem laboratorium kelautan dan pasca-panen, pengembangan unit pengolahan hasil laut skala UMKM, serta pembentukan klaster inovasi sektor kelautan akan mendukung industrialisasi perikanan berbasis komunitas. Dengan strategi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi biru berbasis riset dan inovasi. Dengan memanfaatkan peluang ini secara terintegrasi—mulai dari aspek tangkap, teknologi, hingga pengolahan—sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi biru berbasis riset dan inovasi.

Selanjutnya, pengembangan komoditas jeruk keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar menyimpan potensi besar untuk mendukung diversifikasi ekonomi berbasis pertanian hortikultura. Sentra produksi jeruk keprok yang telah tumbuh di beberapa kecamatan, seperti Bontomatene dan Bontoharu, memperlihatkan bahwa agroklimat wilayah ini cocok untuk budidaya varietas lokal yang adaptif. Keberhasilan pengembangan pada skala terbatas menunjukkan peluang untuk perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas melalui intervensi riset dan inovasi agrikultur.

Peluang riset terbuka luas dalam pengembangan teknologi budidaya jeruk keprok yang adaptif terhadap perubahan iklim dan pengendalian hama terpadu, termasuk melalui penggunaan varietas unggul hasil persilangan lokal dan pemanfaatan pupuk organik berbasis sumber daya daerah. Penguatan kapasitas petani melalui pelatihan berbasis hasil riset dan pengembangan model demplot terpadu juga berpeluang besar meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mengurangi ketergantungan pada input eksternal. Selain itu, potensi kolaborasi dengan lembaga riset hortikultura dan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis ilmiah dalam pengembangan jeruk sebagai komoditas unggulan tropis.

Di sektor hilir, produk olahan jeruk keprok seperti sari buah, selai, manisan, atau produk herbal berbasis kulit jeruk membuka peluang nilai tambah yang signifikan. Inovasi dalam teknologi pengolahan dan pengemasan ramah lingkungan dapat dikembangkan melalui skema inkubasi bisnis atau kerja sama dengan UMKM. Tren gaya hidup sehat dan meningkatnya permintaan terhadap produk buah tropis lokal juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar, terutama jika disertai dengan strategi pemasaran yang menekankan aspek keunikan geografis dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut secara strategis, pengembangan jeruk keprok tidak hanya dapat memperkuat ekonomi desa, tetapi juga menjadi bagian penting dari transformasi sektor hortikultura berbasis riset di daerah.

Di samping itu, PUD pariwisata juga menghadirkan peluang penting bagi pengembangan ekonomi daerah yang berorientasi pada keberlanjutan dan keunggulan lokal. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi strategis untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Keunggulan geografis sebagai pintu gerbang Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, keindahan alam bawah laut, budaya maritim, serta potensi wisata bahari dan sejarah yang tersebar di berbagai pulau, merupakan kekayaan khas daerah yang dapat dikembangkan lebih jauh dengan dukungan riset, teknologi, dan inovasi layanan.

Peluang besar terbuka pada pengembangan riset destinasi pariwisata yang berbasis data spasial, segmentasi pasar wisatawan, serta kajian potensi ekonomi kreatif lokal. Pendekatan riset ini dapat memperkuat perencanaan kawasan wisata, manajemen pengunjung, dan strategi promosi berbasis digital. Selain itu, tren digitalisasi pariwisata memberikan peluang untuk pengembangan sistem informasi destinasi, aplikasi layanan wisata, dan integrasi media sosial sebagai saluran komunikasi dengan wisatawan domestik maupun internasional. Kawasan seperti Pulau Pasi Gusung menawarkan lanskap bahari yang unik dan berpotensi besar dikembangkan sebagai destinasi ekowisata dan eduwisata berbasis konservasi. Kedekatannya dengan Taman Nasional Taka Bonerate menjadikannya titik strategis untuk pengembangan wisata terpadu yang berbasis komunitas lokal dan kelestarian lingkungan.

Potensi penguatan kelembagaan pariwisata daerah juga dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata melalui pelatihan terpadu, pengembangan paket wisata berbasis komunitas, serta diversifikasi atraksi wisata yang mengedepankan budaya dan lingkungan. Produk-produk ekonomi kreatif seperti kerajinan khas, kuliner lokal, serta narasi sejarah dan tradisi masyarakat maritim dapat dikembangkan menjadi bagian dari daya tarik wisata. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor pariwisata berpotensi meningkatkan PAD, membuka lapangan kerja, dan memperluas kemitraan daerah secara nasional maupun internasional.

2)Tema Prioritas Daerah

Pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peluang besar untuk diperkuat seiring dengan meningkatnya perhatian nasional terhadap pembangunan daerah berbasis keunggulan lokal dan evidence-based policy. Keberadaan sejumlah institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset, baik di dalam maupun di sekitar wilayah Sulawesi Selatan, menjadi modal penting dalam membangun sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas daya manusia, serta transfer pengetahuan dan teknologi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Selain sumber itu, komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mendorong ekosistem riset dan inovasi, yang tercermin dalam penetapan produk unggulan dan tema prioritas daerah, menjadi pijakan strategis untuk mengintegrasikan kebijakan berbasis bukti dalam agenda pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pada tema prioritas pertama, Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi, peluang pengembangan terbuka luas melalui integrasi riset dan inovasi di seluruh rantai nilai sektor produktif. Sinergi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha memungkinkan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi produksi, mulai dari hulu (budidaya) hingga hilir (pascapanen dan distribusi). Kebijakan nasional seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) riset, skema matching fund, dan program penguatan inovasi desa memberikan peluang pembiayaan serta transfer teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat

kapasitas pelaku lokal, mempercepat replikasi praktik baik, serta memperluas inovasi berbasis potensi daerah.

Peluang lain juga muncul melalui pembentukan klaster inovasi daerah yang menghubungkan pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah dalam satu ekosistem riset yang terkoordinasi. Forum multi-stakeholder riset dapat dijadikan sarana identifikasi kebutuhan teknologi, penyusunan agenda riset daerah, dan percepatan diseminasi hasil inovasi. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital serta sistem informasi terpadu akan meningkatkan transparansi rantai pasok, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong efisiensi produksi di berbagai sektor.

Transformasi ekonomi juga memiliki potensi besar untuk diperkuat melalui hilirisasi berbasis keunggulan lokal. Inovasi pada pengolahan produk turunan kelapa, diversifikasi hasil perikanan seperti ikan kering dan abon, serta pengembangan komoditas jeruk keprok dan industri wisata berbasis budaya menjadi peluang strategis dalam menciptakan nilai tambah. Apabila upaya ini dikelola secara kolaboratif dan berlandaskan riset, maka peningkatan produktivitas daerah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada tema Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Sosial, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi dalam pengembangan SDM melalui pemanfaatan riset dan inovasi, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelibatan generasi muda. Keberadaan institusi pendidikan vokasi dan program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dapat dioptimalkan sebagai pusat pengembangan kapasitas generasi produktif, terutama di sektor unggulan daerah.

Peluang riset dalam tema ini mencakup pemetaan kebutuhan keterampilan masa depan (*future skills*), penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta integrasi teknologi pembelajaran digital di daerah kepulauan. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan nasional memungkinkan transfer pengetahuan dan inovasi kurikulum adaptif yang sesuai dengan dinamika lokal. Selain itu, potensi kemitraan

internasional dapat dimanfaatkan untuk program pertukaran pelajar, pelatihan daring lintas negara, serta pengembangan riset aksi partisipatif di bidang sosial.

Di bidang kesehatan, pengembangan inovasi pelayanan berbasis telemedisin, sistem informasi kesehatan, dan riset intervensi berbasis komunitas menjadi peluang besar untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan tenaga medis. Pendekatan riset ini juga dapat memperkuat program pengentasan stunting, perlindungan ibu dan anak, serta literasi kesehatan masyarakat. Dengan memanfaatkan peluang ini secara sistematis, Kabupaten Kepulauan Selayar dapat membangun fondasi sosial yang kuat untuk mempercepat transformasi sosial yang adil, tangguh, dan berbasis pengetahuan.

Pada tema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Transformasi Sosial (Penurunan Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan), Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendekatan berbasis bukti untuk mempercepat penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Tersedianya data sosial ekonomi rumah tangga, dukungan lembaga pemberdayaan masyarakat, serta pengalaman pelaksanaan program perlindungan sosial menjadi fondasi awal yang dapat diperluas melalui kolaborasi lintas sektor.

Peluang riset dalam tema ini meliputi pemetaan spasial kelompok miskin dan rentan, pengembangan model intervensi berbasis komunitas, serta integrasi sistem monitoring kesejahteraan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data real-time. Inovasi teknologi, seperti dashboard kemiskinan atau sistem informasi perlindungan sosial, juga membuka ruang bagi penguatan sistem penyaluran bantuan dan peningkatan akurasi targeting. Peluang lain dapat dimaksimalkan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, seperti penguatan BUMDes, pengembangan usaha mikro, dan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, kelautan, dan ekonomi kreatif. Dengan mendorong sinergi antara riset, kebijakan, dan penguatan kelembagaan desa, transformasi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok paling rentan.

Sementara itu, pada tema Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peluang besar untuk diperkuat melalui penerapan riset dan

inovasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Transformasi layanan publik berbasis digital yang telah dimulai di beberapa sektor membuka ruang bagi pengembangan sistem pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Potensi pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen pelayanan, aplikasi pengaduan daring, serta platform integrasi data lintas perangkat daerah, dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan.

Peluang juga terlihat pada peningkatan kapasitas aparatur dalam merancang dan menerapkan kebijakan berbasis bukti melalui pelatihan, pendampingan, dan kemitraan riset dengan lembaga akademik. Penerapan metode evaluasi kebijakan, studi kepuasan pengguna layanan, serta riset-riset intervensi di sektor publik dapat menjadi dasar untuk merumuskan inovasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penguatan sistem feedback masyarakat melalui survei digital, forum layanan, atau aplikasi umpan balik juga dapat mempercepat perbaikan layanan publik secara berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan berbagai peluang tersebut, peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya akan memperkuat kinerja pemerintahan daerah, tetapi juga menciptakan sistem pelayanan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara luas.

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sangat bergantung pada ekosistem riset dan inovasi yang mendukung. Di era pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis, pendekatan kebijakan yang berbasis data dan analisis ilmiah menjadi krusial untuk menjawab tantangan lokal secara tepat sasaran. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana kapasitas pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam menyelenggarakan kajian strategis yang mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang relevan, adaptif, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

Bab ini menyajikan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan dari ekosistem riset dan inovasi daerah, terutama dalam mendukung pengembangan produk unggulan seperti kelapa, perikanan tangkap, jeruk keprok, dan pariwisata. Analisis ini mencakup aspek kelembagaan, infrastruktur, SDM, pendanaan, kemitraan, hingga integrasi dengan isu global. Dengan memahami titik lemah dan potensi yang dimiliki, dokumen ini bertujuan menyediakan dasar perencanaan yang lebih terarah dalam memperkuat tata kelola kebijakan berbasis bukti dan menciptakan ekosistem inovasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di daerah.

Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Produk Unggulan Daerah

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Produk Unggulan ke-1: Pengembangan Kelapa			
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	<p>1) Dalam lima tahun terakhir, terdapat empat kajian utama atau policy brief yang berbasis riset dan berkaitan langsung dengan sektor pertanian kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kajian-kajian ini berasal dari lembaga akademik, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan dan pembangunan, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi yaitu Diseminasi Riset Hilirisasi Kelapa tahun 2020, Strategi Pengembangan Kelapa di Desa Bontobangun tahun 2024, Program Gerbangdari tahun 2022, dan Refleksi Pembangunan Industri Kelapa Terpadu tahun 2021.</p> <p>2) Terdapat 1 Perda dan 3 Perbup (total 4 regulasi) yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan riset dan inovasi daerah, baik secara umum maupun spesifik mendukung pengembangan kelapa sebagai komoditas strategis.</p>	Adanya kebijakan (dalam bentuk perda/perkada) yang mendukung pengembangan kelapa dengan fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing, serta tersedia policy brief hasil kajian berbasis kelapa	Sudah terpenuhi
Penataan basis data Riset dan Inovasi	<p>1) Basis data riset terkait pengembangan kelapa belum dapat diakses secara digital karena portal khusus belum tersedia. Meski demikian, sistem informasi pemerintahan daerah secara umum telah tersedia melalui situs resmi www.kepulauanselayarkab.go.id,</p>	Dataset tersedia dalam platform digital resmi, serta didukung akses terhadap perangkat dan jaringan digital yang memadai.	Belum terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>namun belum terintegrasi dengan data riset dan inovasi.</p> <p>2) Di sisi lain, kesiapan SDM cukup mendukung, dengan tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN telah mencapai 100%.</p>		
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	<p>1) Selama periode 2020–2024, fasilitas laboratorium pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam tahap pengembangan awal. Satu laboratorium utama di bawah Dinas Pertanian menyediakan layanan uji dasar tanah seperti kadar pH dan konduktivitas listrik, namun belum mampu melaksanakan analisis mendalam terkait hara mikro, kualitas air, atau lingkungan mikro agroekosistem yang relevan bagi pengembangan kelapa.</p> <p>Laboratorium pendidikan seperti yang dimiliki SMK Negeri dengan jurusan pertanian hanya difungsikan untuk keperluan pembelajaran, bukan riset. Hal ini menandakan bahwa belum tersedia laboratorium riset terapan atau analitik yang dapat digunakan oleh pemerintah, petani, atau peneliti untuk mengembangkan teknologi kelapa berbasis data ilmiah lokal. Selain itu, tidak tersedia alat untuk pengujian kandungan fisiologis buah kelapa, kadar air, atau proses fermentasi dan pengeringan yang menjadi kunci dalam diversifikasi produk (seperti</p>	Terdapat laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, serta didukung dengan cakupan akses internet yang handal pada lembaga riset dan inovasi yang mendukung pengembangan kelapa.	Belum terpenuhi, khususnya terkait laboratorium riset terapan atau analitik yang dapat digunakan oleh pemerintah, petani, atau peneliti untuk mengembangkan teknologi kelapa berbasis data ilmiah lokal

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>virgin coconut oil, arang aktif, atau gula semut kelapa). Ketiadaan laboratorium yang mendukung uji mutu pascapanen, pengujian varietas adaptif, maupun kajian mikrobiologi lahan menjadi hambatan serius dalam membangun <i>ekosistem riset dan inovasi pertanian kelapa</i> yang berbasis sains.</p> <p>2) Hingga tahun 2024, cakupan akses internet pada lembaga riset dan institusi pendidikan serta kelembagaan teknis yang berpotensi mendukung riset kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat baru mencapai sekitar 62%. Persentase ini mencakup lembaga seperti UPT Dinas Pertanian, SMK Pertanian, beberapa kampus vokasi, dan kantor penyuluhan pertanian kecamatan. Namun, akses internet tersebut sebagian besar masih terbatas pada layanan dasar (<i>bandwidth</i> rendah) dan belum optimal untuk kegiatan yang memerlukan pengolahan dan berbagi data riset, seperti publikasi hasil analisis tanah, data agroklimat, atau pengolahan hasil uji laboratorium. Di beberapa lokasi, seperti wilayah kecamatan kepulauan, cakupan internet bahkan masih tidak stabil atau belum tersedia secara permanen, sehingga menyulitkan untuk pengembangan sistem informasi digital yang terintegrasi dalam ekosistem riset kelapa.</p>		

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Pengelolaan kebun raya daerah	Hingga tahun 2024, Kebun Raya Gojang yang merupakan kebun raya daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, belum sepenuhnya memiliki program riset yang terstruktur dan berkelanjutan terkait produk unggulan kelapa. Meskipun kawasan kebun raya ini memiliki potensi untuk menjadi <i>living laboratory</i> atau kebun percobaan berbasis biodiversitas lokal, namun pengembangan program riset masih tergolong minim, terbatas pada kegiatan konservasi tanaman endemik dan edukasi lingkungan.	Terdapat program riset dan inovasi di kebun raya daerah yang mendukung pengembangan kelapa.	Belum terpenuhi. Kebun raya Gojang belum sepenuhnya memiliki program riset yang terstruktur dan berkelanjutan terkait produk unggulan kelapa.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Alokasi anggaran riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong sangat kecil hingga tahun 2024 jika dibandingkan dengan total belanja daerah. Dari total APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebesar ± Rp1,08 triliun, alokasi khusus untuk kegiatan riset dan inovasi secara umum hanya sekitar 0,12%, atau ± Rp1,3 miliar. Dari total tersebut, alokasi anggaran riset yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pengembangan produk unggulan kelapa diperkirakan hanya sekitar 10–15% dari total belanja riset dan inovasi, atau sekitar Rp130 juta hingga Rp195 juta.	Alokasi anggaran riset dan inovasi yang memadai yang khusus digunakan untuk pengembangan komoditas kelapa.	Belum terpenuhi.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Hingga saat ini jumlah ide, paten, dan inovasi yang secara langsung berkaitan dengan komoditas kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas. Namun, beberapa ide dan inovasi skala lokal telah mulai muncul, walau belum terdokumentasi dalam sistem HKI (Hak	Inventarisasi seluruh ide/paten/inovasi yang terkait dengan pengembangan kelapa	Belum terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>Kekayaan Intelektual), di antaranya Inovasi pembuatan arang aktif dari tempurung kelapa oleh kelompok tani di Kecamatan Bontosikuyu dan Pasimasunggu Timur (2022–2024), Inisiatif pengolahan minyak kelapa murni (VCO) secara tradisional dan semi-mekanis oleh kelompok perempuan tani, Inovasi pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai media tanam (coir) di beberapa desa binaan Dinas Pertanian dan UMKM, dan Ide integrasi agroforestri kelapa-lontar dengan tanaman sela sebagai model pertanian berkelanjutan.</p>		
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah			
<p>Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan</p>	<p>Hingga tahun 2024, kerja sama riset yang secara khusus menitikberatkan pada komoditas unggulan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas, baik dalam lingkup formal (MoU/MoA) maupun kegiatan teknis antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa bentuk kerja sama riset tidak langsung atau tematik pertanian diantaranya yaitu Kolaborasi Dinas pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Universitas Hasanuddin tahun 2022 (pendampingan penyusunan model demplot), Pelatihan dan riset partisipatif oleh BPTP Sulsel tahun 2023 (Studi adaptasi varietas kelapa unggul dan teknik perbanyakan secara vegetatif), dan Program Matching Fund (Kampus Merdeka) Unismuh Makassar tahun 2024 (Riset pemanfaatan limbah kelapa dan</p>	<p>Terdapat kerjasama riset dan inovasi pengembangan kelapa dengan pihak eksternal, seperti kampus, lembaga riset, dunia industri, dan lainnya.</p>	<p>Sudah terpenuhi, tapi kuantitas riset dan inovasi masih terbatas.</p>

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	pengembangan UMKM berbasis turunan kelapa masih dalam tahap <i>on progress</i>).		
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Hingga tahun 2024, jumlah SDM riset yang relevan dengan komoditas kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas. Dari total yang teridentifikasi, hanya sekitar 7 orang yang memiliki latar belakang atau pengalaman langsung dalam bidang kelapa. Mereka terdiri atas dosen di kampus vokasi (5 orang), peneliti di dinas teknis (2 orang), serta penyuluh pertanian berpengalaman (6 orang), dengan hanya satu orang yang memiliki pendidikan S2/S3 khusus bidang kelapa. Keterbatasan ini menjadi tantangan serius dalam penguatan riset dan inovasi kelapa, sehingga perlu strategi peningkatan kapasitas SDM secara terstruktur dan kolaboratif.	Tersedia SDM peneliti yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang memiliki pengalaman dalam penelitian tentang kelapa.	Sudah terpenuhi, tetapi jumlahnya masih relatif sedikit.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Berdasarkan data terkini, Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat memiliki tiga perjanjian kerja sama yang berkaitan langsung dengan riset dan inovasi kelapa. Kerja sama ini melibatkan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, mencakup aspek budidaya, hilirisasi produk turunan kelapa, serta pengembangan teknologi pasca panen. Meski jumlahnya masih terbatas, kerja sama ini menjadi langkah awal penting dalam membangun kolaborasi riset berkelanjutan untuk mendukung kelapa sebagai produk unggulan daerah.	Terdapat kemitraan riset dan inovasi yang terjalin dan diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi/lembaga riset, dan swasta untuk pengembangan kelapa.	Sudah terpenuhi, tetapi jumlahnya masih relatif sedikit.
Peningkatan difusi Inovasi	Terdapat dua bentuk adopsi nyata hasil riset kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertama, penerapan sistem	Terdapat adopsi/implementasi hasil riset dan inovasi	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>tanam tumpangsari kelapa-kacang tanah di Kecamatan Bontosikuyu dan Buki sebagai hasil riset adaptasi pola tanam terhadap iklim kering tahun 2022–2023. Kedua, pemanfaatan sabut dan tempurung kelapa menjadi briket dan cocopeat yang telah diadopsi oleh sedikitnya tiga kelompok tani/UMKM di Benteng dan Pasimarannu melalui dukungan riset berbasis masyarakat, CSR, dan dinas teknis.</p>	<p>pengembangan kelapa yang menghasilkan peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk</p>	
<p>Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.</p>	<p>Diseminasi hasil riset kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terbatas, dengan setidaknya tiga riset utama yang telah dibagikan kepada pemangku kepentingan. Ketiga riset tersebut mencakup: pola tanam adaptif kelapa tumpangsari (dipresentasikan dalam forum penyuluh tahun 2022), kajian agroklimat dan produktivitas kelapa lokal (dipaparkan dalam seminar kerja sama tahun 2023), serta pemanfaatan limbah kelapa untuk produk hilir seperti cocopeat dan briket (disosialisasikan kepada kelompok tani dan UMKM pada awal 2024).</p>	<p>Hasil riset dan inovasi kelapa secara rutin disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan masyarakat, untuk meningkatkan adopsi teknologi.</p>	<p>Sudah terpenuhi tetapi masih terbatas dari sisi kuantitas</p>
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah			
<p>Promosi dan kampanye Inovasi;</p>	<p>Hingga tahun 2024, inovasi terkait pengembangan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terbatas, dengan rata-rata 1–2 inovasi per tahun. Inovasi yang muncul bersifat teknis praktis, seperti alat pengupas kelapa (2021), kemasan produk turunan (2022), dan model tumpangsari kelapa (2023). Meski telah beberapa kali digelar forum atau ekspo inovasi daerah, belum tersedia</p>	<p>Terdapat promosi dan kampanye hasil inovasi terkait pengembangan kelapa yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.</p>	<p>Belum terpenuhi, khususnya terkait forum inovasi daerah yang berkelanjutan.</p>

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	forum tetap yang khusus mendorong inovasi kelapa secara sistematis dan berkelanjutan.		
Apresiasi prestasi Inovasi;	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengikuti dua ajang kompetisi inovasi, yaitu Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulsel (2022) dan Innovative Government Award (IGA) Kemendagri (2023), dengan fokus pada pengembangan produk turunan kelapa. Meski belum meraih juara, partisipasi ini menunjukkan upaya awal daerah dalam mendorong inovasi berbasis potensi lokal kelapa.	Terselenggaranya lomba inovasi daerah yang berfokus pada pengembangan produk berbasis kelapa.	Belum terpenuhi. Sejauh ini, baru sebatas menjadi peserta dalam lomba inovasi daerah.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Pengembangan inovasi di sektor kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih bersifat terbatas. Tercatat hanya terdapat 1 startup lokal yang mulai bergerak di bidang teknologi pertanian kelapa, serta 2 UMKM binaan yang fokus pada produk turunan kelapa seperti minyak kelapa murni (VCO) dan gula semut. Meski menunjukkan inisiatif awal yang positif, jumlah ini masih tergolong rendah dan memerlukan dukungan ekosistem riset, inkubasi bisnis, serta kemitraan yang lebih luas untuk mendorong skala dan keberlanjutan inovasi lokal.	Implementasi skema pengembangan perusahaan pemula (start-up) berbasis riset produk kelapa.	Sudah terpenuhi.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Terdapat setidaknya tiga bentuk pengetahuan lokal yang masih dimanfaatkan dalam pengembangan kelapa, yakni teknik tradisional pengolahan minyak kelapa, pemanfaatan limbah kelapa untuk kerajinan dan arang, serta penggunaan pupuk organik lokal. Ketiganya menjadi bagian penting dari praktik masyarakat, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi atau	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang ada terkait dengan pengembangan kelapa telah tersedia dan terkodefisikasi, sehingga bisa menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut.	Belum terpenuhi karena masih terdapat teknologi dan kearifan lokal yang belum terdokumentasi dengan baik.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	dimanfaatkan dalam riset dan inovasi daerah secara optimal.		
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Saat ini terdapat lima tema riset utama yang mendukung pengembangan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tema-tema tersebut mencakup budidaya kelapa adaptif agroklimat lokal, inovasi pascapanen dan hilirisasi produk, pemanfaatan limbah untuk energi dan kerajinan, penguatan kelembagaan petani berbasis koperasi, serta pemetaan potensi dan tata ruang lahan kelapa. Kelima tema ini menjadi dasar penting dalam membangun ekosistem riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan.	Terdapat tema riset yang mendukung pengembangan produk kelapa, yang berpotensi didukung oleh pemangku kepentingan, seperti universitas/Lembaga riset dan industri.	Sudah terpenuhi.
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini telah terbentuk 1 klaster inovasi pertanian kelapa yang aktif dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Klaster ini melibatkan unsur petani, koperasi, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi dalam kegiatan riset terapan, pelatihan teknologi pascapanen, dan pengembangan produk turunan kelapa. Keberadaan klaster ini menjadi langkah awal untuk memperkuat ekosistem inovasi yang berbasis kebutuhan lokal dan kolaboratif.	Terdapat klaster inovasi berbasis kelapa yang dibentuk dan diperkuat dengan ekosistemnya.	Sudah terpenuhi.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Saat ini, terdapat dua kegiatan riset kelapa yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Kegiatan tersebut meliputi penguatan riset terhadap komoditas unggulan daerah dan penelitian varietas kelapa lokal, yang	Kebijakan daerah yang terkait dengan pengembangan kelapa telah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, guna memastikan keselarasan dan efektivitas implementasi.	

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	bertujuan untuk mendorong produktivitas, inovasi, dan hilirisasi produk kelapa secara berkelanjutan.		
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar mulai mengarahkan pengembangan kelapa sebagai bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Melalui program pertanian adaptif iklim dan diversifikasi produk kelapa lokal, Kabupaten Kepulauan Selayar mendorong pemanfaatan kelapa tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai solusi berkelanjutan terhadap tantangan lingkungan dan pangan.	Program pengembangan kelapa telah sinkron dan terintegrasi dengan isu global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.	Sudah terpenuhi.
Penguatan kerjasama internasional.	Hingga saat ini, Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencatat adanya kerja sama internasional secara formal yang secara khusus diarahkan untuk pengembangan komoditas kelapa. Meskipun terdapat ketertarikan dari beberapa lembaga internasional dalam bidang pertanian tropis dan ketahanan pangan, belum ada perjanjian kerja sama resmi yang ditandatangani. Pengembangan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh kolaborasi lokal dan nasional, seperti dengan perguruan tinggi negeri, BUMD, koperasi, serta lembaga riset berbasis teknologi dalam negeri.	Terdapat Kerjasama internasional dalam pengembangan kelapa yang telah terjalin, dan diharapkan terjadinya transfer teknologi dan kemudahan akses ke pasar internasional.	Belum terpenuhi.
Produk Unggulan ke-2: Perikanan Tangkap			
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Tercatat hanya terdapat 2 dokumen kajian utama yang dihasilkan dalam rentang 2020–2024, yakni:	Adanya kebijakan (dalam bentuk perda/perkada) yang mendukung	Belum terpenuhi. Belum ada perda yang secara eksplisit

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>c) Kajian Potensi Perikanan Tangkap Berbasis Wilayah Pesisir yang disusun oleh tim akademisi dari perguruan tinggi mitra dan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan zonasi wilayah tangkap ramah lingkungan.</p> <p>d) Policy Brief Peningkatan Rantai Nilai Ikan Hasil Tangkap, yang fokus pada strategi penguatan sarana pasca-tangkap dan pengembangan sentra nelayan berbasis koperasi.</p> <p>Keterbatasan ini menunjukkan pentingnya penguatan ekosistem riset dan pengembangan kebijakan berbasis data untuk sektor perikanan tangkap, mengingat kontribusinya yang besar terhadap ekonomi daerah dan mata pencaharian masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar.</p> <p>2) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki satu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara khusus memuat kebijakan riset dan inovasi daerah terkait sektor perikanan tangkap. Perkada tersebut merupakan turunan dari Perda tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan mencakup penguatan kapasitas riset untuk pengelolaan sumber daya laut, pengembangan teknologi penangkapan ramah lingkungan, serta peningkatan nilai tambah produk hasil tangkapan. Namun, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur inovasi di sektor ini, sehingga integrasi kebijakan masih bersifat</p>	<p>pengembangan produk perikanan tangkap dengan fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing, serta tersedia policy brief hasil kajian berbasis produk perikanan tangkap.</p>	<p>mengatur tentang inovasi pada produk perikanan tangkap.</p>

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	sektoral dan terbatas pada program-program teknis.		
Penataan basis data Riset dan Inovasi	<p>1) Saat ini, jumlah dataset riset dan inovasi terkait perikanan tangkap yang tersedia di platform digital resmi Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas, yakni hanya dua dataset utama. Kedua dataset tersebut mencakup data potensi wilayah tangkap nelayan kecil dan data produktivitas hasil tangkap komoditas utama. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan sistem dokumentasi dan digitalisasi data riset sektor perikanan tangkap.. Meski demikian, sistem informasi pemerintahan daerah secara umum telah tersedia melalui situs resmi www.kepulauanselayarkab.go.id</p> <p>3) Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki sistem informasi pemerintahan (Sisfo), namun pemanfaatannya untuk mendukung riset dan inovasi perikanan tangkap masih terbatas. Sekitar 65% ASN menggunakan alat komunikasi dan internet untuk aktivitas terkait, menunjukkan adanya potensi yang perlu ditingkatkan melalui integrasi data dan pelatihan digital.</p>	Dataset tersedia dalam platform digital resmi, serta didukung akses terhadap perangkat dan jaringan digital yang memadai.	Belum terpenuhi.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1) Hingga saat ini, Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki laboratorium khusus yang sepenuhnya mendukung riset perikanan tangkap dengan kelengkapan alat untuk analisis lingkungan perairan laut secara komprehensif, seperti analisis kualitas air, parameter oseanografi, dan uji kimia-fisiologis ikan. Laboratorium	Terdapat laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, serta didukung dengan cakupan akses internet yang handal pada lembaga riset dan inovasi yang mendukung pengembangan perikanan tangkap.	Belum terpenuhi, baik dari sisi ketersediaan laboratorium maupun jaringan internet yang handal.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>yang tersedia masih bersifat umum dan terbatas pada pengujian dasar, serta belum memiliki instrumen analisis seperti spektrofotometer atau alat ukur salinitas dan kandungan logam berat. Kegiatan uji lanjutan masih harus dilakukan dengan menjalin kerja sama eksternal dengan perguruan tinggi atau lembaga riset di luar daerah. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam membangun ekosistem riset dan inovasi berbasis sumber daya laut di Kabupaten Kepulauan Selayar.</p> <p>2) Cakupan internet pada lembaga-lembaga riset yang mendukung pengembangan komoditas perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar diperkirakan baru mencapai sekitar 55%. Akses internet ini umumnya hanya tersedia di kantor pusat atau ruang administrasi, sementara area laboratorium, pelabuhan perikanan, atau unit kerja lapangan masih memiliki keterbatasan konektivitas. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya proses pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman data riset secara real-time, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring sumber daya perikanan.</p>		
Pengelolaan kebun raya daerah	Hingga saat ini, ketersediaan program riset di kebun raya daerah Kabupaten Kepulauan Selayar khusus untuk produk unggulan perikanan tangkap masih belum tersedia. Kebun raya daerah lebih	Terdapat program riset dan inovasi di kebun raya daerah yang mendukung pengembangan produk perikanan tangkap.	Belum terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	berfokus pada konservasi tumbuhan lokal dan pelestarian ekosistem daratan, sehingga belum menjadi pusat kegiatan riset kelautan atau perikanan. Belum adanya integrasi antara kebun raya dengan lembaga riset kelautan dan sektor perikanan mengindikasikan perlunya perluasan mandat kelembagaan dan dukungan program untuk mengakomodasi penelitian lintas ekosistem, termasuk pesisir dan laut.		
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Pada kondisi saat ini, persentase anggaran riset yang dialokasikan untuk mendukung pengembangan produk unggulan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong sangat kecil, yakni diperkirakan hanya sekitar 0,18% dari total anggaran belanja APBD tahun berjalan. Jika mengacu pada total APBD Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar ±Rp1,1 triliun pada tahun 2024, maka nilai nominal anggaran riset yang tersedia untuk sektor ini hanya berkisar ±Rp1,98 miliar.	Alokasi anggaran riset dan inovasi yang memadai yang khusus digunakan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap.	Belum terpenuhi.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Saat ini, jumlah ide, paten, atau inovasi yang terkait langsung dengan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas. Tercatat hanya terdapat dua inovasi lokal yang terdokumentasi yaitu Pengembangan alat tangkap modifikasi ramah lingkungan dan Sistem monitoring hasil tangkap berbasis aplikasi sederhana, namun belum ada paten resmi yang terdaftar.	Inventarisasi seluruh ide/paten/inovasi yang terkait dengan pengembangan perikanan tangkap.	Belum terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	<p>Terdapat tiga kerja sama riset yang terkait dengan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kerja sama tersebut melibatkan:</p> <p>d) Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Universitas Hasanuddin (P2KP) terkait Pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) untuk Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023,</p> <p>e) Kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2022-2024 yang merupakan bagian dari program nasional pemetaan potensi laut dan sumber daya hayati pesisir untuk wilayah Indonesia Timur, dan</p> <p>f) Kerja sama Startup Teknologi Kelautan (Swasta) tahun 2023-2024, yang dilakukan dalam skema <i>pilot project</i> kerja sama Pemkab dengan mitra swasta berbasis teknologi untuk efisiensi logistik perikanan.</p>	Terdapat kerjasama riset dan inovasi pengembangan produk perikanan tangkap dengan pihak eksternal, seperti kampus, lembaga riset, dunia industri, dan lainnya.	Sudah terpenuhi, tapi kuantitas riset dan inovasi masih terbatas.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Jumlah SDM peneliti yang relevan dengan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 9 orang. Terdiri atas 3 dosen tetap dari program studi kelautan dan perikanan, 2 peneliti teknis di Dinas Perikanan, 3 penyuluh perikanan yang telah bersertifikasi dan memiliki pengalaman dalam riset kolaboratif, serta 1 orang lulusan S2/S3 dengan spesialisasi perikanan tangkap tropis. Meskipun jumlahnya masih terbatas, SDM ini menjadi fondasi awal	Tersedia SDM peneliti yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang memiliki pengalaman dalam penelitian tentang produk perikanan tangkap.	Sudah terpenuhi, tetapi jumlahnya masih relatif sedikit.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	bagi penguatan ekosistem riset dan inovasi sektor kelautan di Kabupaten Kepulauan Selayar.		
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	<p>Hingga tahun 2024, terdapat tiga perjanjian kerja sama yang telah dijalin terkait riset dan inovasi di sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar.</p> <p>d) Kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Universitas Hasanuddin, yang berlangsung sejak tahun 2021 hingga kini, mencakup penelitian potensi dan sebaran sumber daya ikan pelagis serta pendampingan pengembangan sistem logistik ikan segar.</p> <p>e) Perjanjian kolaborasi antara PemKabupaten Kepulauan Selayar dengan Loka Riset Perikanan Tangkap KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sejak 2022, difokuskan pada riset alat tangkap ramah lingkungan dan efisiensi hasil tangkapan nelayan skala kecil.</p> <p>f) Kerja sama strategis dengan sektor swasta, khususnya perusahaan pengolahan hasil laut di Makassar, dalam bentuk pemanfaatan hasil riset untuk diversifikasi produk perikanan berbasis hasil tangkapan lokal, dimulai sejak tahun 2023.</p>	Terdapat kemitraan riset dan inovasi yang terjalin dan diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi/ lembaga riset, dan swasta untuk pengembangan produk perikanan tangkap.	Sudah terpenuhi, tetapi jumlahnya masih relatif sedikit.
Peningkatan difusi Inovasi	Hingga tahun 2024, terdapat dua bentuk implementasi hasil riset perikanan tangkap yang telah diadopsi secara nyata di Kabupaten Kepulauan Selayar:	Terdapat adopsi/implementasi hasil riset dan inovasi pengembangan produk	Sudah terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>c) Adopsi teknologi alat tangkap ramah lingkungan (purse seine mini dan bubu lipat) oleh kelompok nelayan tradisional di lima desa pesisir, hasil kerja sama riset dengan Loka Riset Perikanan Tangkap sejak 2022.</p> <p>d) Penerapan sistem rantai dingin berbasis solar freezer portabel, hasil riset terapan bersama perguruan tinggi, telah mulai digunakan oleh koperasi nelayan sebagai upaya mengurangi kehilangan hasil tangkapan pasca panen.</p> <p>Meskipun jumlahnya masih terbatas, kedua inisiatif ini menunjukkan bahwa riset telah mulai menjangkau praktik operasional nelayan dan menjadi bagian dari transformasi sektor perikanan tangkap yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.</p>	<p>perikanan tangkap yang menghasilkan peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk</p>	
<p>Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.</p>	<p>Sebanyak empat hasil riset perikanan tangkap telah didiseminasikan di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui seminar daerah sejak tahun 2021, pameran teknologi kelautan, publikasi ilmiah, dan policy brief yang dipublikasikan melalui lama resmi Bapperida yang mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.</p>	<p>Hasil riset dan inovasi produk perikanan tangkap secara rutin disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan masyarakat, untuk meningkatkan adopsi teknologi.</p>	<p>Sudah terpenuhi.</p>
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah			
<p>Promosi dan kampanye Inovasi;</p>	<p>Pada kondisi saat ini, Kabupaten Kepulauan Selayar mencatat rata-rata 2 inovasi per tahun yang terkait dengan pengembangan sektor perikanan tangkap selama periode 2020–2024. Inovasi tersebut mencakup teknologi alat tangkap</p>	<p>Terdapat promosi dan kampanye hasil inovasi terkait pengembangan produk perikanan tangkap yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.</p>	<p>Belum terpenuhi, khususnya terkait forum inovasi daerah yang berkelanjutan.</p>

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	ramah lingkungan, sistem rantai dingin berbasis energi surya, dan sistem pelaporan hasil tangkapan digital. Meskipun begitu, forum inovasi daerah yang secara khusus mewadahi kolaborasi lintas sektor dalam inovasi perikanan belum terbentuk secara formal, meski beberapa diskusi teknokratik telah dilakukan di bawah koordinasi Bapperida.		
Apresiasi prestasi Inovasi;	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengikuti 3 kompetisi inovasi tingkat regional dan nasional yang berkaitan dengan produk unggulan perikanan tangkap selama periode 2020–2024. Beberapa penghargaan yang diraih antara lain adalah penghargaan inovasi teknologi tangkap ramah lingkungan pada ajang inovasi daerah Sulawesi Selatan (2022), serta partisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB melalui inovasi sistem logistik ikan terintegrasi. Partisipasi ini menunjukkan adanya komitmen awal dalam mendorong penguatan daya saing sektor perikanan melalui pendekatan inovatif.	Terselenggaranya lomba inovasi daerah yang berfokus pada pengembangan produk berbasis perikanan tangkap.	Belum terpenuhi. Sejauh ini, baru sebatas menjadi peserta dalam lomba inovasi daerah.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Terdapat total 7 entitas yang berasal dari sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah dibina melalui program inkubasi daerah. Dari jumlah tersebut, 2 merupakan start-up berbasis teknologi perikanan (misalnya pemantauan hasil tangkapan dan sistem distribusi berbasis aplikasi), sementara 5 lainnya adalah UMKM yang bergerak dalam pengolahan hasil tangkap seperti abon ikan, ikan asap, dan pemanfaatan	Implementasi skema pengembangan perusahaan pemula (start-up) berbasis riset produk perikanan tangkap.	Sudah terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	limbah ikan menjadi pakan ternak. Program inkubasi ini difasilitasi oleh Bapperida bekerja sama dengan dinas teknis dan mitra universitas vokasi.		
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	<p>Pada tahun 2024, terdapat setidaknya 4 bentuk pengetahuan dan teknologi lokal yang masih aktif dimanfaatkan dalam pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa di antaranya meliputi:</p> <p>a) Teknik penangkapan ikan tradisional menggunakan bubu dan sero yang ramah lingkungan.</p> <p>b) Pengetahuan membaca pola arus dan musim ikan oleh nelayan lokal, yang berfungsi sebagai panduan waktu melaut.</p> <p>c) Pemanfaatan bahan alami sebagai pengawet tradisional ikan, seperti asap kelapa dan daun tertentu untuk memperpanjang umur simpan hasil tangkapan.</p> <p>d) Teknik pembuatan perahu tradisional berbasis kearifan lokal, yang tetap dipakai di beberapa desa pesisir.</p> <p>Pengetahuan ini menjadi bagian penting dalam ekosistem inovasi daerah karena tetap relevan dan selaras dengan praktik berkelanjutan di wilayah kepulauan.</p>	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang ada terkait dengan pengembangan produk perikanan tangkap telah tersedia dan terkodefisikasi, sehingga bisa menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut.	Sudah terpenuhi.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan	Hingga tahun 2024, terdapat 6 tema riset utama yang secara langsung mendukung pengembangan produk unggulan daerah berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tema-tema tersebut mencakup diantaranya yaitu Pemetaan potensi wilayah tangkap berbasis spasial,	Terdapat tema riset yang mendukung pengembangan produk perikanan tangkap, yang berpotensi didukung oleh pemangku kepentingan, seperti universitas/Lembaga riset dan industri.	Sudah terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	pengembangan teknologi sederhana pengawetan hasil tangkap, diversifikasi produk olahan perikanan skala rumah tangga, dan kajian rantai pasok hasil perikanan dan efisiensi logistik.		
Penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Pada tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki satu kluster inovasi aktif di sektor perikanan tangkap. Kluster ini melibatkan kolaborasi antara kelompok nelayan, UMKM pengolahan hasil laut, dan lembaga pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah penguatan teknologi pasca-tangkap, efisiensi rantai distribusi, serta peningkatan nilai tambah produk laut melalui inovasi berbasis lokal.	Terdapat kluster inovasi berbasis produk perikanan tangkap yang dibentuk dan diperkuat dengan ekosistemnya.	Sudah terpenuhi.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Hingga tahun 2024, terdapat dua kegiatan/program riset perikanan tangkap yang tercantum secara eksplisit dalam dokumen perencanaan strategis daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Pertama, program penguatan data potensi dan sebaran sumber daya ikan untuk mendukung pengelolaan perikanan berbasis wilayah tangkap berkelanjutan. Kedua, kegiatan riset inovasi pasca-tangkap yang diarahkan pada peningkatan mutu dan daya saing produk laut lokal. Kedua program ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan sektor perikanan tangkap sebagai bagian dari ekosistem riset dan inovasi daerah.	Kebijakan daerah yang terkait dengan pengembangan produk perikanan tangkap telah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, guna memastikan keselarasan dan efektivitas implementasi.	
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang	Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki satu program daerah yang mengintegrasikan pengembangan	Program pengembangan produk perikanan tangkap telah sinkron dan terintegrasi	Sudah terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	perikanan tangkap dengan isu global, khususnya perubahan iklim dan ketahanan pangan. Program tersebut adalah “Penguatan Perikanan Berkelanjutan dan Adaptif Iklim”, yang dijalankan melalui kolaborasi antara Dinas Perikanan, kelompok nelayan lokal, dan lembaga swadaya masyarakat. Program ini mencakup pelatihan adaptasi perubahan iklim bagi nelayan, pengembangan sistem informasi cuaca untuk aktivitas melaut, serta penerapan praktik tangkap ramah lingkungan dan diversifikasi hasil tangkap untuk menjaga ketahanan pangan lokal.	dengan isu global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.	
Penguatan kerjasama internasional.	Hingga tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat menjalin satu kerja sama internasional dalam rangka pengembangan sektor perikanan tangkap. Kerja sama ini dilakukan melalui proyek kolaboratif dengan lembaga internasional bidang konservasi laut asal Jepang, yang fokus pada penguatan kapasitas nelayan tradisional dalam pemanfaatan alat tangkap ramah lingkungan serta pelatihan monitoring sumber daya laut berbasis komunitas. Proyek ini juga mendukung pengumpulan data perikanan dan konservasi kawasan penting seperti kawasan penangkapan ikan karang secara berkelanjutan.	Terdapat kerjasama internasional dalam pengembangan produk perikanan tangkap yang telah terjalin, dan diharapkan terjadinya transfer teknologi dan kemudahan akses ke pasar internasional.	Sudah terpenuhi, tetapi masih perlu ditingkatkan kuantitasnya.
Produk Unggulan ke-3: Pengembangan Jeruk Keprok			
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Hingga tahun 2024, telah tersusun 3 kajian yang mencakup pengembangan pertanian jeruk keprok, yaitu Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020, Studi	Adanya kebijakan (dalam bentuk perda/perkada) yang mendukung pengembangan jeruk keprok	Belum terpenuhi. Belum ada policy brief tentang

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	Kelayakan Investasi Pengembangan Budidaya Komoditas Jeruk Keprok Tahun 2023, dan Kajian Strategi Pengembangan Produk Unggulan Tahun 2024. Selain itu, telah ditetapkan satu Perbup No. 353/VIII/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah.	dengan fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing, serta tersedia policy brief hasil kajian berbasis produk jeruk keprok	pengembangan jeruk keprok.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data riset terkait pengembangan jeruk keprok belum dapat diakses secara digital karena portal khusus belum tersedia. Meski demikian, sistem informasi pemerintahan daerah secara umum telah tersedia melalui situs resmi www.kepulauanselayarkab.go.id , namun belum terintegrasi dengan data riset dan inovasi. Di sisi lain, kesiapan SDM cukup mendukung, dengan tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN telah mencapai 100%.	Dataset tersedia dalam platform digital resmi, serta didukung akses terhadap perangkat dan jaringan digital yang memadai.	Belum terpenuhi, khususnya terkait dengan akses pada dataset secara digital.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Di tahun 2024, terdapat satu laboratorium yaitu laboratorium dinas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memiliki ≤ 23 peralatan yang berpotensi mendukung riset pengembangan jeruk keprok. Peralatan yang relevan antara lain Soil Sampler Rings Tube (2 unit), TDS & EC Meter (2 unit), Oven (2 unit), pH Tanah (2 unit), Refractometer (2 unit), Spectrophotometer (3 unit), Neraca Analitik (2 unit), pH Meter (2 unit), alat ukur EC (1 unit), GPS (3 unit), Autoclaf (1 unit), dan Refrigerator (1 unit). Meskipun laboratorium ini bukan laboratorium pertanian secara khusus, keberadaan alat-alat tersebut dapat	Terdapat laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, serta didukung dengan cakupan akses internet yang handal pada lembaga riset dan inovasi yang mendukung pengembangan jeruk keprok.	Sudah terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan riset dasar hortikultura.</p> <p>Cakupan internet untuk mendukung kegiatan riset telah mencapai 100%. Dari sisi perangkat lunak, Bapperida memanfaatkan aplikasi pengolah data seperti SPSS dan Excel, sementara UPTD Laboratorium Lingkungan menggunakan Google Earth untuk digitasi lahan.</p>		
Pengelolaan kebun raya daerah	<p>Saat ini belum tersedia program riset yang secara khusus dilaksanakan di kawasan Kebun Raya Gojang, mengingat statusnya masih dalam tahap perencanaan dan belum beroperasi sebagai kebun raya formal.</p> <p>Pengembangan Kebun Raya Gojang seluas 50 hektar di Dusun Gojang, Desa Bontomarannu tercantum dalam Renstra dinas lingkungan hidup 2021–2026.</p> <p>Meskipun belum berstatus kebun raya formal, arah pengembangannya telah sejalan dengan fungsi perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sosial ekonomi lingkungan.</p>	Terdapat program riset dan inovasi di kebun raya daerah yang mendukung pengembangan produk jeruk keprok.	Belum terpenuhi.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Dana yang dialokasikan untuk kegiatan riset pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp350 juta atau sekitar 0,032% dari total anggaran belanja APBD. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi pendanaan riset masih sangat rendah di dalam struktur anggaran daerah.	Alokasi anggaran riset dan inovasi yang memadai yang khusus digunakan untuk pengembangan komoditas jeruk keprok.	Belum terpenuhi.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Saat ini belum terdapat inovasi/paten daerah yang secara khusus menargetkan pengembangan komoditas jeruk keprok. Namun, pada tahun 2021, telah	Inventarisasi seluruh ide/paten/inovasi yang terkait dengan pengembangan jeruk keprok.	Belum terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>dilaksanakan inovasi umum di sektor pertanian melalui program Desa Gambus (Desa Gemar Menanam Buah dan Sayuran) yang mendorong gerakan tanam komoditas hortikultura di tingkat desa. Selain itu, di tahun 2024, pemerintah daerah meluncurkan Sentra Informasi Produk Lokal sebagai inovasi yang mendukung promosi dan penyebaran informasi produk unggulan daerah, termasuk jeruk keprok.</p>		
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah			
<p>Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan</p>	<p>Dalam lima tahun terakhir, terdapat dua kerja sama riset yang relevan dengan pengembangan jeruk keprok, yaitu Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020 dan Studi Kelayakan Investasi Pengembangan Budidaya Komoditas Jeruk Keprok Tahun 2023</p>	<p>Terdapat kerjasama riset dan inovasi pengembangan produk jeruk keprok dengan pihak eksternal, seperti kampus, lembaga riset, dunia industri, dan lainnya.</p>	<p>Sudah terpenuhi, tapi kuantitas riset dan inovasi masih terbatas.</p>
<p>Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.</p>	<p>Saat ini belum terdapat data spesifik mengenai jumlah dosen atau peneliti yang secara langsung memiliki latar belakang keahlian di bidang hortikultura. Namun, secara umum terdapat 139 tenaga dosen dan peneliti dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya, dengan komposisi 8 profesor, 41 doktor, 74 magister, dan 16 sarjana. Komposisi ini menunjukkan ketersediaan SDM berpendidikan tinggi yang dapat dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi terkait pengembangan jeruk keprok sebagai produk unggulan.</p>	<p>Tersedia SDM peneliti yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang memiliki pengalaman dalam penelitian tentang pengembangan jeruk keprok.</p>	<p>Sudah terpenuhi, tetapi jumlahnya masih relatif sedikit.</p>
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah			

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Dalam lima tahun terakhir, terdapat dua perjanjian kerja sama riset lintas instansi yang relevan dengan pengembangan jeruk keprok. Pertama, Kajian Komoditas Unggulan tahun 2020 yang melibatkan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar, BI Sulsel, dan ISEI Makassar. Kedua, Studi Kelayakan Investasi Budidaya Jeruk Keprok tahun 2023, yang merupakan hasil kerja sama Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar dengan PPKP-LPPM Universitas Hasanuddin. Sementara itu, kajian strategi pengembangan produk unggulan di tahun 2024 dilakukan oleh Litbang Bapperida secara internal.	Terdapat kemitraan riset dan inovasi yang terjalin dan diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi/lembaga riset, dan swasta untuk pengembangan jeruk keprok.	Sudah terpenuhi, tetapi jumlahnya masih relatif sedikit.
Peningkatan difusi Inovasi	Saat ini belum terdapat data atau bukti dokumentasi yang menunjukkan adopsi langsung hasil riset jeruk keprok ke dalam praktik budidaya, kebijakan teknis, atau kegiatan pengembangan di lapangan. Beberapa kajian yang tersedia masih bersifat konseptual dan belum ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi operasional.	Terdapat adopsi/implementasi hasil riset dan inovasi pengembangan jeruk keprok yang menghasilkan peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk.	Sudah terpenuhi.
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	tiga hasil riset (baik yang merupakan hasil kerjasama dengan instansi atau perguruan tinggi maupun yang dikerjakan secara internal) telah diseminasikan melalui forum perangkat daerah dan rapat koordinasi lintas perangkat daerah. Namun, aksesibilitas publik terhadap dokumen-dokumen tersebut masih terbatas karena belum tersedia secara online di website resmi pemerintah Kabupaten Kepulauan	Hasil riset dan inovasi pengembangan jeruk keprok secara rutin disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan masyarakat, untuk meningkatkan adopsi teknologi.	Sudah terpenuhi, tetapi belum tersedia informasinya di website pemerintah.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	Selayar maupun website Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar.		
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah			
Promosi dan kampanye Inovasi;	Terdapat dua inovasi daerah yang secara langsung mendukung pengembangan jeruk keprok, yaitu Desa Gambus dan Sentra Informasi Produk Lokal Daerah (SIPOK DEH). Desa Gambus mendorong masyarakat menanam komoditas hortikultura seperti jeruk keprok di tingkat desa. Sementara SIPOK DEH menyediakan ruang informasi dan promosi produk unggulan daerah, termasuk potensi jeruk keprok.	Terdapat promosi dan kampanye hasil inovasi terkait pengembangan jeruk keprok yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Belum terpenuhi, khususnya terkait forum inovasi daerah yang berkelanjutan.
Apresiasi prestasi Inovasi;	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengikuti setidaknya tiga ajang penghargaan atau kompetisi yang relevan dengan inovasi daerah di tahun 2024. Kompetisi tersebut meliputi Innovative Government Award (IGA), Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mempromosikan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta perencanaan pembangunan.	Terselenggaranya lomba inovasi daerah yang berfokus pada pengembangan produk berbasis jeruk keprok.	Belum terpenuhi. Sejauh ini, baru sebatas menjadi peserta dalam lomba inovasi daerah.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Saat ini belum tersedia data terkait jumlah start-up atau UMKM jeruk keprok yang dibina melalui program inkubasi inovasi.	Implementasi skema pengembangan perusahaan pemula (start-up) berbasis riset produk jeruk keprok.	Belum terpenuhi.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan	Belum terdapat data spesifik mengenai jumlah pemanfaatan pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal dalam pengembangan jeruk keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun,	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang ada terkait dengan pengembangan jeruk keprok telah tersedia dan	Belum terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
dan/atau teknologi masyarakat.	dalam laporan riset disebutkan bahwa sebagian besar petani masih mengandalkan pengetahuan tradisional dan alat sederhana dalam proses budidaya, meskipun mulai diperkenalkan teknologi modern melalui pendampingan, kelompok tani, serta inisiatif pemerintah dan investor	terkodefisikasi, sehingga bisa menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut.	
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Hingga saat ini, terdapat setidaknya tiga tema riset yang mendukung pengembangan jeruk keprok sebagai produk unggulan daerah. Ketiga tema tersebut mencakup kajian komoditas unggulan tahun 2020, studi kelayakan budidaya jeruk keprok tahun 2023, serta kajian penentuan produk unggulan daerah tahun 2024.	Terdapat tema riset yang mendukung pengembangan produk jeruk keprok, yang berpotensi didukung oleh pemangku kepentingan, seperti universitas/Lembaga riset dan industri.	Belum terpenuhi.
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Terdapat lima kecamatan (Bontomatene, Bontomanai, Bontoharu, Bontososikuyu, dan Buki) yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan jeruk keprok melalui Surat Keputusan Bupati No. 234/IV/2021. Penetapan ini mengarah pada pembangunan kawasan khusus dengan dukungan infrastruktur, teknologi, kelompok tani, dan potensi keterlibatan investor. Meskipun belum secara formal disebut sebagai "klaster inovasi", pendekatan yang digunakan telah mengarah ke pembentukan klaster berbasis komoditas unggulan.	Terdapat klaster inovasi berbasis produk jeruk keprok yang dibentuk dan diperkuat dengan ekosistemnya.	Sudah terpenuhi.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat	Dalam dokumen RPJMD dan Renstra, tercantum Program Riset dan Inovasi Daerah sebagai program umum, namun	Kebijakan daerah yang terkait dengan pengembangan jeruk keprok telah disinkronkan	

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
dan Pemerintah Daerah	tidak dijelaskan secara spesifik bahwa program tersebut mencakup kegiatan riset terkait jeruk keprok	dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, guna memastikan keselarasan dan efektivitas implementasi.	
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Pemerintah telah mengintegrasikan aspek ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim dalam pengembangan jeruk keprok. Hal ini tercermin dari pembangunan “Green House” yaitu pembibitan di Kecamatan Bontomatene, sebagai bagian dari upaya menghasilkan bibit jeruk keprok varietas S-S yang berkualitas, tahan penyakit, dan adaptif terhadap perubahan iklim.	Program pengembangan produk jeruk keprok telah sinkron dan terintegrasi dengan isu global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.	Sudah terpenuhi.
Penguatan kerjasama internasional.	Di tahun 2021, telah terjalin satu kerja sama internasional antara Pemprov Sulsel dengan Prefektur Ehime, Jepang, dalam upaya meningkatkan mutu jeruk keprok melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Belum ada kerjasama internasional yang secara khusus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Terdapat kerjasama internasional dalam pengembangan produk jeruk keprok yang telah terjalin, dan diharapkan terjadinya transfer teknologi dan kemudahan akses ke pasar internasional.	Sudah terpenuhi, tetapi masih perlu ditingkatkan kuantitasnya. Kerjasama juga masih dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Produk Unggulan ke-4: Pengembangan Pariwisata			
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Hingga tahun 2024, telah tersusun 5 kajian yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, yaitu 1) Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020; 2) Studi Kelayakan Proyek Investasi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, 3) Dokumen Inovasi Pengembangan Puncak Tanadoang Sebagai Kawasan Wisata Berbasis	Adanya kebijakan (dalam bentuk perda/perkada) yang mendukung pengembangan pariwisata dengan fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing, serta tersedia policy brief hasil kajian berbasis pengembangan produk pariwisata.	Belum terpenuhi. Belum ada Perka/Perkada terkait pengembangan pariwisata.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	Masyarakat Tahun 2024, dan 4) Kajian Strategi Pengembangan Produk Unggulan Tahun 2024, dan 5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kep Selayar Tahun 2023-2025.		
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data riset terkait pengembangan pariwisata belum dapat diakses secara digital karena portal khusus belum tersedia. Meski demikian, sistem informasi pemerintahan daerah secara umum telah tersedia melalui situs resmi www.kepulauanselayarkab.go.id , namun belum terintegrasi dengan data riset dan inovasi. Di sisi lain, kesiapan SDM cukup mendukung, dengan tingkat penggunaan alat komunikasi dan internet oleh ASN telah mencapai 100%.	Dataset tersedia dalam platform digital resmi, serta didukung akses terhadap perangkat dan jaringan digital yang memadai.	Belum terpenuhi, khususnya terkait dengan akses pada dataset secara digital.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Di tahun 2024, terdapat satu laboratorium yaitu laboratorium dinas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memiliki ≤ 16 peralatan dengan total 25 unit yang berpotensi mendukung riset pengembangan pariwisata. Peralatan yang relevan antara lain IPAL (1 unit), Incubator BOD (1 unit), TDS & EC Meter (2 unit), Alat Ukur CO ₂ (2 unit), Water Sampler Vertikal (3 unit), BOD Track (2 unit), Alat Ukur Kebisingan (2 unit), Turbidity Meter (1 unit), Spectrophotometer (1 unit), GPS (3 unit), pH Meter dan Printer (2 unit), DO Meter (2 unit), Spectrofotometer (2 unit), Dissolved Oxygen Meter (1 unit), dan Alat Ukur pH, mV, suhu (1 unit).	Terdapat laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, serta didukung dengan cakupan akses internet yang handal pada lembaga riset dan inovasi yang mendukung pengembangan produk pariwisata.	Sudah terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	Cakupan internet untuk mendukung kegiatan riset telah mencapai 100%. Dari sisi perangkat lunak, Bapperida memanfaatkan aplikasi pengolah data seperti SPSS dan Excel, sementara UPTD Laboratorium Lingkungan menggunakan Google Earth untuk digitasi lahan.		
Pengelolaan kebun raya daerah	Saat ini belum tersedia program riset yang secara khusus dilaksanakan di kawasan Kebun Raya Gojang, mengingat statusnya masih dalam tahap perencanaan dan belum beroperasi sebagai kebun raya formal. Pengembangan Kebun Raya Gojang seluas 50 hektar di Dusun Gojang, Desa Bontomarannu tercantum dalam Renstra dinas lingkungan hidup 2021–2026.	Terdapat program riset dan inovasi di kebun raya daerah yang mendukung pengembangan produk pariwisata.	Belum terpenuhi.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Saat ini, belum tersedia data terperinci mengenai alokasi anggaran riset untuk masing-masing komoditas unggulan daerah, termasuk sektor pariwisata. Namun, secara umum dana yang dialokasikan untuk kegiatan riset pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp350 juta atau sekitar 0,032% dari total anggaran belanja APBD. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi pendanaan riset masih sangat rendah di dalam struktur anggaran daerah.	Alokasi anggaran riset dan inovasi yang memadai yang khusus digunakan untuk pengembangan produk pariwisata.	Belum terpenuhi.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Terdapat total 11 inovasi daerah yang relevan dengan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebanyak 7 inovasi memiliki keterkaitan langsung, seperti Sistem Penataan Aset Pariwisata, Selayar is Going Digital, SOMASI, SIPOK DEH,	Inventarisasi seluruh ide/paten/inovasi yang terkait dengan produk pariwisata.	Belum terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>Selayar Investment Day, Eco Pertashop, dan Kampung Ekonomi Hijau.</p> <p>Sementara itu, 4 inovasi lainnya mendukung secara tidak langsung, antara lain EMBUN PAGI DI PULAU SELAYAR, ISTANAKU, Program Kampung Iklim, dan JARI MENARI.</p> <p>Inovasi-inovasi tersebut berkontribusi pada tata kelola, promosi, infrastruktur, serta keberlanjutan destinasi wisata daerah.</p>		
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah			
<p>Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan</p>	<p>Dalam lima tahun terakhir, terdapat 2 kerja sama riset yang relevan dengan pengembangan pariwisata, yaitu 1) Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020; dan 2) Studi Kelayakan Proyek Investasi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.</p>	<p>Terdapat kerjasama riset dan inovasi pengembangan produk pariwisata dengan pihak eksternal, seperti kampus, lembaga riset, dunia industri, dan lainnya.</p>	<p>Sudah terpenuhi, tapi kuantitas riset dan inovasi masih terbatas.</p>
<p>Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.</p>	<p>Saat ini belum terdapat data spesifik mengenai jumlah dosen atau peneliti yang secara langsung memiliki latar belakang keahlian di bidang pariwisata/tourism. Namun, secara umum terdapat 139 tenaga dosen dan peneliti dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya, dengan komposisi 8 profesor, 41 doktor, 74 magister, dan 16 sarjana. Komposisi ini menunjukkan ketersediaan SDM berpendidikan tinggi yang dapat dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi terkait pengembangan pariwisata sebagai produk unggulan.</p>	<p>Tersedia SDM peneliti yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang memiliki pengalaman dalam penelitian tentang pengembangan produk pariwisata.</p>	<p>Sudah terpenuhi, tetapi jumlah peneliti yang memiliki keahlian dalam riset pariwisata masih belum diketahui.</p>
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah			

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Penguatan kemitraan antarlembagaan	<p>Dalam lima tahun terakhir, terdapat dua perjanjian kerja sama riset lintas instansi yang relevan dengan pengembangan pariwisata. Pertama, Kajian Komoditas Unggulan tahun 2020 yang melibatkan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar, BI Sulsel, dan ISEI Makassar. Kedua, Studi Kelayakan Proyek Investasi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, yang merupakan hasil kerja sama Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar dengan PPKP-LPPM Universitas Hasanuddin.</p> <p>Di sisi lain, Dokumen Inovasi Pengembangan Puncak Tanadoang Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Tahun 2024, kajian strategi pengembangan produk unggulan di tahun 2024, dan RIPPARKAB Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan secara internal oleh Litbang Bapperida dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Selayar.</p>	<p>Terdapat kemitraan riset dan inovasi yang terjalin dan diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi/lembaga riset, dan swasta untuk pengembangan produk pariwisata.</p>	<p>Sudah terpenuhi, tetapi jumlahnya masih relatif sedikit.</p>
Peningkatan difusi Inovasi	<p>Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, setiap tahun terdapat minimal dua hasil riset yang dimasukkan ke dalam penyusunan RKPD. Namun, hasil kelitbangan yang dimanfaatkan selama periode 2020–2024 lebih difokuskan pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kesalehan Sosial, serta penerapan inovasi daerah yang belum secara eksplisit merujuk pada sektor pariwisata. Dengan demikian, belum terdapat bukti kuat mengenai implementasi hasil riset yang</p>	<p>Terdapat adopsi/implementasi hasil riset dan inovasi pengembangan produk pariwisata yang menghasilkan peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk.</p>	<p>Belum terpenuhi.</p>

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	secara khusus terkait dengan pengembangan sektor pariwisata.		
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Empat hasil riset (baik yang merupakan hasil kerjasama dengan instansi atau perguruan tinggi maupun yang dikerjakan secara internal) telah diseminasikan melalui forum resmi dan laporan terbuka. Namun, dari 4 dokumen tersebut, hanya Dokumen Inovasi Pengembangan Puncak Tanadoang Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Tahun 2024 yang laporannya tersedia secara online di website resmi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar.	Hasil riset dan inovasi pengembangan produk pariwisata secara rutin disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan masyarakat, untuk meningkatkan adopsi teknologi/strategi.	Sudah terpenuhi, tetapi masih relatif sedikit.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah			
Promosi dan kampanye Inovasi;	Terdapat tujuh inovasi daerah yang secara langsung mendukung pengembangan pariwisata, yaitu 1) Sistem Penataan Aset Pariwisata, 2) Selayar is Going Digital, 3) SOMASI, 4) SIPOK DEH, 5) Selayar Investment Day, 6) Eco Pertashop, dan 7) Kampung Ekonomi Hijau.	Terdapat promosi dan kampanye hasil inovasi terkait pengembangan produk pariwisata yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Sudah terpenuhi.
Apresiasi prestasi Inovasi;	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengikuti setidaknya tiga ajang penghargaan atau kompetisi yang relevan dengan inovasi daerah dalam lima tahun terakhir. Kompetisi tersebut meliputi Wonderful Indonesia (Anugerah Pesona Indonesia), Innovative Government Award (IGA), Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Dari keempat ajang tersebut, Puncak Tanadoang Kabupaten Kepulauan Selayar masuk kedalam top	Terselenggaranya lomba inovasi daerah yang berfokus pada pengembangan produk berbasis produk pariwisata.	Belum terpenuhi. Sejauh ini, baru sebatas menjadi peserta dalam lomba inovasi daerah.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	10 dataran tinggi pariwisata Indonesia terbaik.		
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Saat ini belum tersedia data terkait jumlah start-up atau UMKM pariwisata yang dibina melalui program inkubasi inovasi.	Implementasi skema pengembangan perusahaan pemula (start-up) berbasis riset produk pariwisata.	Belum terpenuhi.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Belum terdapat data spesifik mengenai jumlah pemanfaatan pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang ada terkait dengan pengembangan produk pariwisata telah tersedia dan terkodefisikasi, sehingga bisa menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut.	Belum terpenuhi.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Hingga saat ini, terdapat setidaknya empat tema riset yang mendukung pengembangan pariwisata sebagai produk unggulan daerah. Keempat tema tersebut mencakup 1) Kajian Komoditas Unggulan Tahun 2020; 2) Studi Kelayakan Proyek Investasi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, 3) Dokumen Inovasi Pengembangan Puncak Tanadoang Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Tahun 2024, dan 4) Kajian Strategi Pengembangan Produk Unggulan Tahun 2024	Terdapat tema riset yang mendukung pengembangan produk pariwisata, yang berpotensi didukung oleh pemangku kepentingan, seperti universitas/Lembaga riset dan industri.	Belum terpenuhi.
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki konsep klaster destinasi pariwisata yang tertuang dalam dokumen RIPPARKAB 2023-2025. Klaster tersebut mencakup 3 komponen utama, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, yang dilengkapi dengan unsur institusi	Terdapat klaster inovasi berbasis produk pariwisata yang dibentuk dan diperkuat dengan ekosistemnya.	Sudah terpenuhi.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	SDM dan kelembagaan pendukung. Masing-masing klaster telah dirinci komponen dan pelaku yang terlibat, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk awal dari klaster inovasi pariwisata		
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Dalam dokumen RPJMD, telah dicantumkan satu program yakni Program Riset dan Inovasi Daerah dengan indikator persentase pemanfaatan riset dalam perencanaan dan penerapan inovasi daerah. Selain itu, dalam dokumen Renstra, tercantum kegiatan penelitian terkait kapasitas debit air tanah Dongkalang di Pasi Gusung, Selayar. Penelitian ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar pengembangan kawasan wisata, khususnya ketersediaan air bersih sebagai bagian dari amenities destinasi pariwisata.	Kebijakan daerah yang terkait dengan pengembangan produk pariwisata telah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, guna memastikan keselarasan dan efektivitas implementasi.	
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Dalam dokumen RIPPARKAB, telah termuat strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan ekosistem. Salah satu contohnya adalah program pengelolaan destinasi taman mangrove yang dirancang dengan jalur kayu dan pengaturan rotasi kunjungan untuk meminimalkan dampak lingkungan.	Program pengembangan produk pariwisata telah sinkron dan terintegrasi dengan isu global, seperti perubahan iklim dan dampak lingkungan.	Sudah terpenuhi.
Penguatan kerjasama internasional.	Saat ini, belum ada bukti kerja sama dengan mitra internasional yang telah terealisasi dalam bentuk program, proyek, atau perjanjian formal.	Terdapat kerjasama internasional dalam pengembangan produk pariwisata yang telah terjalin, dan diharapkan terjadinya	Belum terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		promosi dan investasi yang berkelanjutan	

Tabel 4. 2 Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Tema Prioritas Daerah

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Tema Prioritas 1: Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi			
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	<p>Hingga tahun 2024, upaya ini tercermin melalui dua indikator kunci, yaitu jumlah kajian atau policy brief serta jumlah perda/perkada yang relevan dengan riset dan inovasi produktivitas daerah.</p> <p>1) Terkait jumlah kajian atau policy brief, hingga saat ini telah disusun sebanyak 3 dokumen yang fokus pada sektor-sektor unggulan seperti perikanan tangkap, kelapa, dan pariwisata bahari. Namun, pemanfaatan hasil kajian ini dalam perumusan kebijakan daerah masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan.</p> <p>2) Dari sisi regulasi, telah diterbitkan 2 produk hukum, yaitu 1 Peraturan Kepala Daerah tentang strategi riset daerah dan 1 Peraturan Daerah mengenai Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang memuat arah kebijakan inovasi daerah berbasis produktivitas. Meski demikian, regulasi yang tersedia belum mencakup kerangka implementatif yang kuat untuk mendorong riset</p>	Adanya kebijakan (dalam bentuk perda/perkada) yang mendukung pengembangan produktivitas daerah	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>terapan maupun kolaborasi antar pemangku kepentingan.</p> <p>Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki landasan awal dalam reformasi kebijakan riset dan inovasi. Namun, masih diperlukan penguatan baik dalam jumlah dan kualitas kajian, penyusunan regulasi yang adaptif, serta mekanisme penerapan kebijakan berbasis riset yang konsisten dan terukur.</p>		
<p>Penataan basis data Riset dan Inovasi</p>	<p>Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemajuan awal dalam penataan basis data riset dan inovasi. Hingga tahun 2024, telah terdapat 6 dataset riset/inovasi terkait produktivitas daerah yang berhasil dihimpun dan diunggah ke dalam platform digital resmi milik pemerintah daerah, meskipun masih terbatas pada sektor perikanan dan pertanian produktif. Selain itu, sejak tahun 2023, pemerintah daerah telah mulai mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi riset dan inovasi daerah (Sisfo-RIDA) yang mendukung integrasi data lintas sektor terkait produktivitas daerah. Sistem ini telah berfungsi secara internal dan sedang dalam proses peningkatan fitur untuk mendukung keterbukaan informasi serta kolaborasi antarlembaga.</p> <p>Meskipun infrastruktur digital telah mulai tersedia, tantangan ke depan mencakup peningkatan kualitas, konsistensi, serta keterbaruan data agar mampu menjadi</p>	<p>Dataset tersedia dalam platform digital resmi, serta didukung akses terhadap perangkat dan jaringan digital yang memadai.</p>	<p>Belum tersedia dataset riset dan inovasi yang terkompilasi dalam suatu sistem digital</p>

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	basis yang solid bagi pengambilan kebijakan berbasis riset.		
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	<p>Hingga tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 3 laboratorium yang mendukung kegiatan riset, dengan kelengkapan peralatan yang masih terbatas pada uji mutu produk perikanan dan pertanian. Sebagian besar alat laboratorium merupakan hibah atau hasil kolaborasi dengan instansi eksternal, yang penggunaannya belum sepenuhnya optimal untuk mendukung riset berbasis produktivitas lokal.</p> <p>Dari sisi infrastruktur digital, cakupan internet pada lembaga riset daerah mencapai 80%. Konektivitas ini telah mendukung komunikasi dan akses data riset dasar, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan riset kolaboratif berbasis cloud dan transfer data berskala besar.</p> <p>Secara umum, infrastruktur dasar riset di Selayar masih memerlukan penguatan baik dalam aspek fisik laboratorium maupun dukungan konektivitas internet untuk menunjang riset yang lebih produktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.</p>	Terdapat laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, serta didukung dengan cakupan akses internet yang handal pada lembaga riset dan inovasi yang mendukung pengembangan produktivitas daerah.	Sudah terpenuhi
Pengelolaan kebun raya daerah	Hingga tahun 2024, Kebun Raya Gojang di Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki program riset yang berjalan secara rutin atau terstruktur. Pemanfaatan kebun raya masih terbatas pada fungsi konservasi dan wisata edukasi, dengan minim keterlibatan dari institusi penelitian atau perguruan tinggi dalam	Terdapat program riset dan inovasi di kebun raya daerah yang mendukung pengembangan produktivitas daerah.	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	pengembangan riset berbasis potensi lokal, seperti tanaman endemik atau tanaman produktivitas tinggi.		
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Pada periode 2020–2024, alokasi anggaran untuk riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong sangat rendah, yaitu kurang dari 1% dari total belanja APBD setiap tahunnya. Nilai nominalnya juga fluktuatif dan cenderung belum diarahkan secara spesifik untuk mendukung pengembangan produktivitas daerah. Minimnya anggaran ini menunjukkan bahwa riset dan inovasi belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga membatasi ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mendorong transformasi ekonomi lokal. Diperlukan penguatan komitmen dan kebijakan afirmatif dalam penganggaran agar riset dan inovasi dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan produktivitas daerah.	Alokasi anggaran riset dan inovasi yang memadai yang khusus digunakan untuk pengembangan produktivitas daerah.	Belum terpenuhi karena anggaran masih belum memadai
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Hingga tahun 2024, jumlah ide, paten, atau inovasi yang secara resmi tercatat dan berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kapasitas masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga riset dalam melakukan pencatatan dan perlindungan kekayaan intelektual masih rendah.	Inventarisasi seluruh ide/paten/inovasi yang terkait dengan pengembangan produktivitas daerah	Sudah terpenuhi
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah			

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Saat ini, jumlah kerja sama riset di Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara khusus mendukung peningkatan produktivitas daerah masih relatif terbatas. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta sektor swasta belum terbangun secara optimal dan berkelanjutan.	Terdapat kerjasama riset dan inovasi pengembangan produktivitas daerah dengan pihak eksternal, seperti kampus, lembaga riset, dunia industri, dan lainnya.	Belum terpenuhi karena jumlah Kerjasama riset masih terbatas
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Saat ini, Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki website jaringan khusus yang terintegrasi dan dikhususkan untuk mendukung aktivitas riset dan inovasi daerah, terutama yang berfokus pada pengembangan produktivitas lokal. Informasi riset masih tersebar di berbagai platform, dan belum tersedia satu sistem digital terpadu yang mampu menjadi pusat data dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Ketiadaan website jaringan ini menjadi tantangan dalam upaya diseminasi informasi hasil riset, kolaborasi antarlembaga, serta peningkatan akses masyarakat terhadap inovasi yang relevan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan sarana digital yang mampu menjembatani komunikasi dan integrasi program riset dengan arah pembangunan daerah.	Tersedia website yang memadai, yang berisi data tentang hasil riset dan inovasi daerah	Sudah terpenuhi
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah			
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Kemitraan antarkelembagaan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung produktivitas daerah masih bersifat terbatas dan belum terlembagakan secara sistematis. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, maupun dunia usaha,	Terdapat kemitraan riset dan inovasi yang terjalin dan diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi/lembaga riset, dan swasta untuk	Belum terpenuhi. Sudah ada mitra strategis, tetapi jumlahnya masih terbatas

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong riset dan inovasi berbasis potensi unggulan daerah.	pengembangan produktivitas daerah.	
Peningkatan difusi Inovasi	Saat ini, tingkat adopsi atau implementasi hasil riset yang mendukung peningkatan produktivitas daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong rendah. Hasil-hasil riset yang dihasilkan baik oleh pemerintah daerah, akademisi, maupun mitra lainnya belum secara optimal diterapkan di sektor-sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Rendahnya difusi inovasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya forum diseminasi hasil riset, keterbatasan kapasitas pelaku usaha dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi, serta belum adanya mekanisme pendampingan yang berkelanjutan.	Terdapat adopsi/implementasi hasil riset dan inovasi pengembangan produktivitas yang menghasilkan peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk	Sudah terpenuhi
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Selama periode 2020–2024, jumlah hasil riset yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terbatas. Meskipun terdapat inisiatif dari beberapa instansi dan akademisi untuk menghasilkan riset yang relevan dengan potensi lokal, seperti perikanan, kelautan, dan pertanian, praktik diseminasi dan pemanfaatannya oleh pelaku inovasi belum berjalan optimal. Minimnya platform penyebarluasan hasil riset, rendahnya literasi inovasi di kalangan pelaku usaha lokal, serta keterbatasan kolaborasi lintas sektor menjadi tantangan utama. Ke depan, penguatan	Hasil riset dan inovasi yang terkait peningkatan produktivitas secara rutin disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan masyarakat, untuk meningkatkan adopsi teknologi.	Belum terpenuhi. Jumlah hasil riset yang didiseminasikan masih relatif terbatas

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	mekanisme diseminasi, penghubung antara peneliti dan pelaku inovasi, serta dukungan kebijakan sangat dibutuhkan agar hasil riset dapat diterapkan secara luas dan mendorong produktivitas daerah secara berkelanjutan.		
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah			
Promosi dan kampanye Inovasi;	Hingga saat ini, promosi dan kampanye inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan perkembangan yang masih terbatas. Jumlah inovasi daerah yang tercatat setiap tahun belum konsisten meningkat, dan forum inovasi daerah belum berjalan secara rutin sebagai wadah temu antara inovator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan. Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang mendorong munculnya ide-ide baru dari masyarakat, terutama dari sektor pendidikan dan UMKM, belum ada sistem yang kuat untuk mendokumentasikan, menilai, dan menindaklanjuti inovasi tersebut. Untuk mendorong budaya inovasi yang lebih masif, dibutuhkan penguatan kapasitas promosi, penyelenggaraan forum inovasi secara reguler, serta insentif bagi inovator lokal yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas daerah.	Terdapat promosi dan kampanye hasil inovasi terkait pengembangan produktivitas daerah yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Belum terpenuhi. Promosi dan sosialisasi masih bersifat sporadis
Apresiasi prestasi Inovasi;	Pada periode 2020–2024, apresiasi terhadap prestasi inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong rendah, ditunjukkan dengan minimnya partisipasi daerah dalam penghargaan atau kompetisi inovasi yang terkait langsung dengan pengembangan produktivitas	Keikutsertaan dalam lomba inovasi daerah yang berfokus pada pengembangan produktivitas daerah	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	daerah. Meskipun terdapat potensi inovatif di masyarakat, belum tersedia mekanisme yang konsisten dan terstruktur untuk mendorong dan memberi penghargaan atas inovasi tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun budaya inovasi yang berkelanjutan dan mendorong transformasi ekonomi berbasis produktivitas lokal.		
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Pada periode 2020–2024, perkembangan perusahaan pemula berbasis riset di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam tahap awal, dengan jumlah start-up atau UMKM yang secara langsung berkontribusi terhadap pengembangan produktivitas daerah relatif terbatas. Kurangnya akses terhadap pendampingan teknis, keterbatasan jejaring pasar, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dan ekosistem inovasi menjadi faktor penghambat utama. Meskipun demikian, potensi wirausaha lokal terus tumbuh, dan dengan penguatan inkubasi bisnis serta integrasi riset dengan kebutuhan pasar, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peluang besar untuk mendorong kemunculan perusahaan pemula yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal secara berkelanjutan.	Implementasi skema pengembangan perusahaan pemula (start-up) berbasis riset produktivitas daerah.	Sudah terpenuhi
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Saat ini, upaya inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan serta teknologi masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berjalan secara terbatas dan sporadis.	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang ada terkait dengan pengembangan produktivitas daerah telah tersedia dan terkodefisikasi, sehingga	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	Meskipun daerah ini memiliki kekayaan kearifan lokal yang potensial, seperti praktik budidaya, pengolahan hasil laut, dan teknologi sederhana berbasis alam, pemanfaatannya dalam mendukung produktivitas daerah belum optimal. Ketiadaan sistem dokumentasi yang terintegrasi serta minimnya pelibatan komunitas lokal dan lembaga riset menjadi tantangan utama. Diperlukan strategi yang lebih terarah dan kolaboratif untuk mendorong pemanfaatan teknologi lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis potensi daerah.	bisa menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut.	
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menunjukkan inisiatif dalam mendorong riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam mendukung promosi produk unggulan lokal seperti perikanan tangkap dan kelapa. Meskipun jumlah tema riset yang diangkat masih terbatas setiap tahunnya, terdapat kecenderungan peningkatan kualitas dan relevansi riset yang dilakukan. Namun, keterlibatan multi pihak—baik dari akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat—masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa tema-tema riset benar-benar menjawab tantangan dan peluang strategis daerah. Optimalisasi prakarsa riset yang berbasis kebutuhan lokal menjadi langkah krusial untuk mendorong peningkatan produktivitas daerah secara berkelanjutan.	Terdapat tema riset yang mendukung pengembangan produktivitas daerah, yang berpotensi didukung oleh pemangku kepentingan, seperti universitas/Lembaga riset dan industri.	Belum terpenuhi. Jumlah kegiatan riset masih relatif sedikit
Penyelenggaraan pengembangan klaster	Pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan	Terdapat klaster inovasi berbasis produktivitas	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada tahap awal. Meskipun terdapat inisiatif dalam membentuk kelompok atau komunitas berbasis potensi lokal seperti perikanan tangkap dan kelapa, jumlah klaster inovasi yang terbentuk dan berjalan secara aktif masih terbatas. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga riset, dan masyarakat menyebabkan pengembangan klaster belum sepenuhnya efektif dalam mendorong produktivitas daerah. Diperlukan penguatan kelembagaan, dukungan regulasi, serta fasilitasi berkelanjutan untuk mengakselerasi terbentuknya klaster inovasi yang mampu mengintegrasikan riset, teknologi, dan pasar.	daerah yang dibentuk dan diperkuat dengan ekosistemnya.	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kesesuaian antara kebijakan riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan arah kebijakan nasional masih perlu diperkuat. Meskipun terdapat beberapa program daerah yang berkaitan dengan pengembangan produktivitas, seperti penguatan sektor kelautan dan perikanan, namun belum seluruhnya tercantum atau terintegrasi secara eksplisit dalam dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, RPJPN, maupun dokumen kementerian terkait. Keterbatasan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil riset daerah menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi kebijakan	Kebijakan daerah yang terkait dengan produktivitas daerah telah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, guna memastikan keselarasan dan efektivitas implementasi.	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	yang lebih strategis agar perencanaan dan implementasi program riset daerah selaras dengan agenda nasional dalam rangka memperkuat ekosistem inovasi yang berkelanjutan.		
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu global yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi, khususnya terkait perubahan iklim dan ketahanan pangan. Beberapa program daerah telah dirancang untuk mendukung produktivitas lokal dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim, seperti pengembangan pertanian adaptif dan perlindungan wilayah pesisir. Di sisi lain, program yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan juga mulai diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi lokal dan diversifikasi komoditas unggulan. Meskipun demikian, integrasi kedua isu global ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terstruktur dalam kerangka riset dan inovasi daerah. Penguatan regulasi dan sinergi antarsektor diperlukan untuk memastikan bahwa strategi pembangunan daerah Selayar selaras dengan dinamika dan tantangan global secara berkelanjutan.	Program pengembangan produktivitas daerah telah sinkron dan terintegrasi dengan isu global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.	Sudah terpenuhi
Penguatan kerjasama internasional	Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu global yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi, khususnya terkait perubahan iklim dan ketahanan pangan. Beberapa	Terdapat Kerjasama internasional dalam pengembangan produktivitas daerah yang telah terjalin, dan diharapkan terjadinya transfer teknologi dan	Belum terpenuhi. Jumlah Kerjasama internasional masih relatif sedikit

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>program daerah telah dirancang untuk mendukung produktivitas lokal dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim, seperti pengembangan pertanian adaptif dan perlindungan wilayah pesisir. Di sisi lain, program yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan juga mulai diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi lokal dan diversifikasi komoditas unggulan. Meskipun demikian, integrasi kedua isu global ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terstruktur dalam kerangka riset dan inovasi daerah. Penguatan regulasi dan sinergi antarsektor diperlukan untuk memastikan bahwa strategi pembangunan daerah Selayar selaras dengan dinamika dan tantangan global secara berkelanjutan.</p>	kemudahan akses ke pasar internasional.	
Tema Prioritas 2. Peningkatan kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Sosial			
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	<p>Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren positif dalam reformasi kebijakan riset dan inovasi terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM). Jumlah kajian dan policy brief meningkat secara konsisten, dari hanya satu dokumen kajian pada 2020 menjadi tujuh dokumen pada 2024. Hal ini mencerminkan komitmen yang makin kuat dalam mendorong kebijakan SDM berbasis bukti. Namun, dari sisi regulasi, meskipun belum ada perda khusus, dua Keputusan Bupati yang terbit pada 2023 dan 2024 menandai awal penting penguatan kebijakan inovasi</p>	Adanya kebijakan (dalam bentuk perda/perkada) yang mendukung peningkatan kualitas SDM	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	daerah yang lebih terstruktur, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.		
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Penataan basis data riset dan inovasi untuk pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemajuan signifikan. Jumlah dataset meningkat dari 3 pada 2020 menjadi 17 pada 2024, dengan pemanfaatan yang makin aktif dalam perencanaan kebijakan berbasis data. Seiring dengan itu, pengembangan sistem informasi juga mengalami lompatan penting: dari kondisi manual pada 2020 menjadi dua sistem digital aktif dan terintegrasi SIPANDU untuk pendidikan dan SIMKESDA untuk kesehatan yang kini telah mendukung pelaporan lintas OPD dan terhubung dengan platform nasional. Hal ini menandai kesiapan infrastruktur data daerah dalam mendukung transformasi sosial berbasis riset dan inovasi.	Dataset tersedia dalam platform digital resmi, serta didukung akses terhadap perangkat dan jaringan digital yang memadai.	Sudah terpenuhi
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 2020–2024. Jumlah laboratorium meningkat dari 1 menjadi 4 unit, dan kelengkapan alat riset bertambah dari 3 menjadi 10 unit, menjangkau bidang pendidikan, kesehatan, hingga teknologi digital. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas fisik yang signifikan untuk mendukung produktivitas SDM. Selain itu, cakupan internet di seluruh lembaga riset telah stabil di angka 100% sejak 2020,	Terdapat laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, serta didukung dengan cakupan akses internet yang handal pada lembaga riset dan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM.	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	memastikan konektivitas dan akses informasi berjalan optimal. Dengan demikian, Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki fondasi infrastruktur riset yang layak dalam mendukung transformasi sosial berbasis penguatan kualitas SDM.		
Pengelolaan kebun raya daerah	Selama periode 2020–2024, pengelolaan Kebun Raya Gojang di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang konsisten. Jumlah pengelola bertambah dari 3 orang pada 2020 menjadi 10 orang pada 2024. Perluasan jumlah tenaga kerja ini sejalan dengan pengembangan fungsi kebun raya, yang kini tidak hanya berfokus pada konservasi flora lokal, tetapi juga mencakup riset tanaman herbal, pelatihan masyarakat, edukasi ekologis, dan penguatan peran kebun raya sebagai pusat agroeduwisata daerah. Kondisi ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjadikan kebun raya sebagai simpul strategis pembangunan SDM berbasis lingkungan.	Terdapat program riset dan inovasi di kebun raya daerah yang mendukung peningkatan kualitas SDM.	Sudah terpenuhi
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Selama periode 2020–2024, alokasi anggaran riset dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan fluktuasi, namun tetap berada di bawah 0,1% dari total belanja daerah. Persentase tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,070%, seiring meningkatnya anggaran riset hingga Rp717 juta. Meski terdapat penurunan bertahap pada tahun-tahun	Alokasi anggaran riset dan inovasi yang memadai yang khusus digunakan untuk peningkatan kualitas SDM.	Belum terpenuhi. Persentase anggaran riset masih belum memadai.

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	berikutnya, hingga mencapai Rp350 juta (0,036%) pada 2024, hal ini menandakan bahwa komitmen fiskal terhadap riset SDM masih tergolong rendah. Penguatan alokasi anggaran secara berkelanjutan dibutuhkan agar transformasi sosial berbasis riset dan inovasi dapat berjalan optimal.		
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) terkait pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang positif selama periode 2020–2024. Dari hanya 1 inovasi pendidikan yang tercatat pada 2020, jumlahnya meningkat tajam menjadi 8 inovasi pada 2024, terbagi seimbang antara sektor pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hasil riset dan ide lokal serta adanya dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah. Lonjakan inovasi tersebut menunjukkan bahwa ekosistem riset SDM mulai terbangun secara inklusif dan produktif.	Inventarisasi seluruh ide/paten/inovasi yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM.	Sudah terpenuhi
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan perkembangan signifikan dalam penguatan kolaborasi riset SDM dengan berbagai pemangku kepentingan. Dari hanya 2 kerja sama lokal di awal periode, jumlahnya meningkat menjadi 10 pada 2024, melibatkan mitra nasional hingga internasional. Kolaborasi ini mencakup isu-isu strategis seperti akses	Terdapat kerjasama riset dan inovasi peningkatan kualitas SDM dengan pihak eksternal, seperti kampus, lembaga riset, dunia industri, dan lainnya.	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	<p>pendidikan, kualitas layanan kesehatan, hingga transformasi sistem melalui pendekatan berbasis data dan digitalisasi. Tren ini mencerminkan komitmen daerah dalam membangun ekosistem riset yang inklusif dan responsif terhadap tantangan pengembangan SDM.</p>		
<p>Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.</p>	<p>Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemajuan nyata dalam penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi SDM melalui pengembangan website jaringan sektor pendidikan dan kesehatan. Dari kondisi tanpa sistem daring pada 2020, daerah ini kini telah memiliki empat website aktif pada 2024, termasuk Portal Inovasi SDM dan penguatan platform SIMKESDA. Transformasi ini menandai pergeseran penting dari pengelolaan manual menuju sistem digital yang lebih terintegrasi, mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data di bidang pendidikan dan kesehatan.</p>	<p>Tersedia SDM peneliti yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang memiliki pengalaman dalam penelitian tentang peningkatan kualitas SDM.</p>	<p>Sudah terpenuhi</p>
<p>Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah</p>			
<p>Penguatan kemitraan antarkelembagaan</p>	<p>Selama periode 2020–2024, kemitraan antarkelembagaan dalam pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah mitra aktif meningkat dari 3 pada tahun 2020 menjadi 12 pada tahun 2024, mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Awalnya bersifat lokal dan sektoral, kolaborasi ini berkembang dengan melibatkan lembaga pendidikan tinggi, LSM, NGO,</p>	<p>Terdapat kemitraan riset dan inovasi yang terjalin dan diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi/lembaga riset, dan swasta untuk peningk.</p>	<p>Sudah terpenuhi</p>

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	serta sektor swasta. Penguatan jejaring ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekosistem inovasi sosial daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.		
Peningkatan difusi Inovasi	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengadopsi hasil riset untuk pengembangan SDM. Jumlah implementasi meningkat dari 2 inovasi awal pada 2020 menjadi 11 pada 2024. Adopsi ini mencakup sektor pendidikan dan kesehatan, mulai dari penggunaan media ajar digital hingga sistem monitoring kesehatan. Peningkatan ini menandakan tumbuhnya budaya pemanfaatan riset sebagai dasar kebijakan dan operasional, serta komitmen daerah dalam mendorong transformasi sosial berbasis inovasi.	Terdapat adopsi/implementasi hasil riset dan inovasi peningkatan kualitas SDM yang menghasilkan peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk	Sudah terpenuhi
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diseminasi hasil riset pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024. Jumlah riset yang didiseminasi meningkat dari 2 pada tahun 2020 menjadi 12 pada tahun 2024. Diseminasi dilakukan melalui berbagai media, mulai dari forum lokal, pelatihan internal, seminar daerah, hingga platform digital. Perkembangan ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pemanfaatan hasil riset oleh pelaku inovasi untuk mendukung transformasi sosial dan peningkatan kualitas SDM	Hasil riset dan inovasi yang terkait peningkatan kualitas SDM secara rutin disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan masyarakat, untuk meningkatkan adopsi teknologi.	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	secara inklusif dan berkelanjutan.		
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah			
Promosi dan kampanye Inovasi;	Selama periode 2020–2024, promosi dan kampanye inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang pendidikan dan kesehatan mengalami perkembangan bertahap. Setiap tahun muncul inisiatif inovatif yang merespons isu lokal, mulai dari layanan kesehatan bergerak di wilayah terpencil, program motivasi pendidik, hingga gerakan sekolah aman dan literasi keluarga. Meski tahun 2022 tidak mencatat inovasi baru, tren umum menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap transformasi sosial melalui pendekatan inovatif yang disampaikan dalam berbagai forum lokal. Ini mencerminkan tumbuhnya budaya inovasi yang semakin kontekstual dan relevan dengan kebutuhan daerah.	Terdapat promosi dan kampanye hasil inovasi terkait peningkatan kualitas SDM yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Sudah terpenuhi
Apresiasi prestasi Inovasi;	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan konsistensi dalam upaya mengapresiasi dan menampilkan inovasi daerah melalui partisipasi dalam ajang nasional seperti <i>Innovative Government Award (IGA)</i> . Meskipun sempat tidak tercatat mengikuti kompetisi pada 2022, daerah ini secara umum memperlihatkan komitmen berkelanjutan dalam menumbuhkan budaya apresiasi inovasi, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Partisipasi yang berulang mencerminkan upaya Selayar dalam memperkuat posisi sebagai daerah yang adaptif dan progresif dalam	Terselenggaranya lomba inovasi daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	pengembangan sumber daya manusia berbasis inovasi.		
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar mencatat kemajuan signifikan dalam pengembangan perusahaan pemula berbasis riset di bidang sumber daya manusia. Dimulai dari satu UMKM binaan pada 2020, jumlahnya meningkat stabil hingga mencapai 10 UMKM/start-up pada 2024. Fokus pengembangan meluas dari sektor pendidikan informal dan kesehatan dasar ke solusi digital, inovasi sosial, dan layanan komunitas. Pertumbuhan ini mencerminkan peran inkubasi daerah yang semakin strategis dalam mendukung kewirausahaan inovatif berbasis riset untuk mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.	Implementasi skema pengembangan perusahaan pemula (start-up) berbasis riset dan inovasi peningkatan kualitas SDM.	Sudah terpenuhi
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan selama 2020–2024. Dimulai dari dua bentuk pengetahuan pada 2020, jumlahnya tumbuh hingga mencapai 11 pada 2024. Inovasi lokal yang dimanfaatkan mencakup pengobatan tradisional, pendidikan berbasis budaya, pertanian organik, hingga pengolahan pangan untuk gizi. Tidak hanya dimanfaatkan dalam program pendidikan dan kesehatan, sebagian juga mulai diarahkan untuk perlindungan hukum melalui sertifikasi dan kekayaan intelektual, menandai langkah konkret dalam mengintegrasikan	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang ada terkait dengan peningkatan kualitas SDM telah tersedia dan terkodefisikasi, sehingga bisa menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut.	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	kearifan lokal ke dalam sistem inovasi daerah.		
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung peningkatan kualitas SDM menunjukkan perkembangan positif selama periode 2020–2024. Jumlah tema riset SDM meningkat signifikan dari 2 tema pada 2020 menjadi 12 tema pada 2024, yang mencakup isu-isu strategis di bidang pendidikan dan kesehatan. Lonjakan tema riset ini mencerminkan semakin kuatnya orientasi kebijakan daerah terhadap pengembangan SDM berbasis bukti, sekaligus menandakan meningkatnya kesadaran akan pentingnya riset sebagai fondasi perumusan solusi atas tantangan sosial dan ekonomi lokal.	Terdapat tema riset yang mendukung peningkatan kualitas SDM, yang berpotensi didukung oleh pemangku kepentingan, seperti universitas/Lembaga riset dan industri.	Sudah terpenuhi
Penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah yang mendukung pemberdayaan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Dari hanya 1 kluster ekonomi pada tahun 2020, jumlah kluster tumbuh menjadi 8 pada tahun 2024, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (kelapa, perikanan, pariwisata). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam mendorong integrasi lintas sektor melalui kluster inovasi yang tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia sebagai pilar utama transformasi sosial.	Terdapat kluster inovasi berbasis pengembangan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang dibentuk dan diperkuat dengan ekosistemnya.	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan keselarasan program riset pengembangan SDM dengan arah kebijakan nasional, baik yang tercantum dalam RPJMN maupun dokumen kementerian terkait. Dari hanya 2 kegiatan yang selaras pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 9 pada tahun 2024, terdiri dari 5 di sektor pendidikan dan 4 di sektor kesehatan. Hal ini mencerminkan komitmen daerah untuk mensinergikan perencanaan lokal dengan prioritas nasional dalam penguatan kualitas SDM secara berkelanjutan dan terintegrasi.	Kebijakan daerah yang terkait dengan pengembangan kualitas SDM telah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, guna memastikan keselarasan dan efektivitas implementasi.	Sudah terpenuhi
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar secara progresif meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu global dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi SDM. Dari hanya 1 program integratif pada 2020 yang berfokus pada gizi anak dan kesehatan ibu sesuai SDGs, jumlahnya meningkat menjadi 8 program pada 2024. Program-program tersebut mencakup berbagai isu strategis seperti pendidikan hijau, sanitasi global, hingga digital health. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai global ke dalam kebijakan dan praktik lokal untuk mendukung transformasi sosial yang berkelanjutan.	Program peningkatan kualitas SDM telah sinkron dan terintegrasi dengan isu global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.	Sudah terpenuhi
Penguatan kerjasama internasional	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan	Terdapat Kerjasama internasional dalam pengembangan SDM yang	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	dalam penguatan kerja sama internasional untuk pengembangan SDM. Dari hanya 1 kerja sama di sektor pendidikan pada 2020, jumlah total kerja sama internasional meningkat menjadi 6 pada 2024, dengan kontribusi yang seimbang antara sektor pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi ini mencerminkan keterbukaan daerah terhadap jejaring global dan pemanfaatan peluang internasional untuk mendukung peningkatan kualitas SDM secara lebih inklusif dan berkelanjutan.	telah terjalin, dan diharapkan terjadinya transfer teknologi dan kemudahan akses ke pasar internasional.	
Tema Prioritas 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung transformasi sosial (Penurunan Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran)			
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Hingga tahun 2024, telah ditetapkan dua Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Penetapan Inovasi Daerah, yaitu Keputusan Bupati Nomor 396/VII/2023 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 353/VIII/2024 Tahun 2024, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar	Adanya kebijakan (dalam bentuk perda/perkada) yang mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.	Sudah terpenuhi
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Hingga tahun 2024, belum terdapat dataset riset atau inovasi terkait kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang terunggah dalam satu platform digital resmi. Selain itu, sistem informasi yang secara khusus memuat dan mengelola data mengenai isu-isu tersebut juga belum tersedia.	Dataset tersedia dalam platform digital resmi, serta didukung akses terhadap perangkat dan jaringan digital yang memadai.	Belum terpenuhi dataset riset dan inovasi
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Seluruh lembaga riset di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendukung riset terkait kemiskinan, ketimpangan, dan	Terdapat akses internet yang handal pada lembaga riset dan inovasi yang mendukung	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	pengangguran telah memiliki akses internet (cakupan 100%), sehingga memungkinkan pelaksanaan riset yang lebih berbasis data digital	penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.	
Pengelolaan kebun raya daerah	Belum terdapat data terkait jumlah pengelola atau tenaga kerja yang ditugaskan di Kebun Raya Daerah (Gojang). Ini mengindikasikan perlunya penguatan pencatatan dan pemetaan sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan kebun raya secara berkelanjutan	Terdapat program riset dan inovasi di kebun raya daerah yang mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.	Belum terpenuhi
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase alokasi anggaran riset dari total belanja APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk isu kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Persentase alokasi anggaran riset sempat mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 0,070%, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 0,036% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya penurunan prioritas anggaran riset terhadap isu-isu strategis tersebut dalam beberapa tahun terakhir	Alokasi anggaran riset dan inovasi yang memadai yang khusus digunakan untuk tema penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.	Belum terpenuhi karena anggaran khusus belum memadai
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Belum tersedia data yang akurat mengenai jumlah ide, paten, atau inovasi yang secara spesifik terkait dengan penanganan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pendataan dan dokumentasi yang lebih terstruktur kedepannya	Inventarisasi seluruh ide/paten/inovasi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.	Belum terpenuhi karena belum ada inventarisasi data
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah			

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Saat ini belum tersedia data mengenai jumlah kerja sama riset yang secara khusus terkait dengan penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar	Terdapat kerjasama riset dan inovasi penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dengan pihak eksternal, seperti kampus, lembaga riset, dunia industri, dan lainnya.	Belum terpenuhi karena belum bisa teridentifikasi data kerjasama
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Belum tersedia website jaringan yang secara khusus memfasilitasi dan mengintegrasikan data atau hasil riset mengenai penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Tersedia website dan jaringan internet yang memadai di Lembaga riset dan inovasi	Belum terpenuhi website, namun jaringan internet sudah tersedia
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Saat ini belum tersedia data terkait jumlah mitra yang terlibat dalam pelaksanaan riset yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini mengindikasikan perlunya pemetaan kolaborasi yang lebih terstruktur dengan pihak akademisi, lembaga riset, maupun sektor swasta	Terdapat kemitraan riset dan inovasi yang terjalin dan diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi/lembaga riset, dan swasta untuk penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.	Belum terpenuhi karena belum bisa teridentifikasi datanya
Peningkatan difusi Inovasi	Belum tersedia data mengenai jumlah adopsi atau implementasi hasil riset yang secara langsung digunakan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pemanfaatan hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti	Terdapat adopsi/implementasi hasil riset dan inovasi penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang menghasilkan peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk	Belum terpenuhi karena belum bisa teridentifikasi data jumlah adopsi/implementasi teknologi
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Belum terdapat data yang mendokumentasikan jumlah hasil riset terkait isu kemiskinan, ketimpangan, dan	Hasil riset dan inovasi yang terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan,	Belum terpenuhi karena belum bisa teridentifikasi data jumlah hasil riset

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	pengangguran yang telah didiseminasikan atau disebarluaskan oleh Pemerintah. Ketiadaan informasi ini menandakan perlunya penguatan mekanisme publikasi dan diseminasi hasil riset secara lebih terbuka kedepannya	dan pengangguran, secara rutin disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan masyarakat, untuk meningkatkan adopsi teknologi.	
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah			
Promosi dan kampanye Inovasi;	Selama periode 2020–2024, tercatat 5 inovasi daerah yang mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Inovasi yang muncul antara lain Optimalisasi Penyaluran Bansos Kesra Berbasis Dusun Menuju 6T (2020), Program SIKAMASEANG (2021), dan Kampung Ekonomi Hijau (2023). Tahun 2022 tidak terdapat inovasi baru yang tercatat. Sementara pada tahun 2024, jumlah inovasi meningkat dengan dua inisiatif, yaitu SIRUMAHKU SEHAT dan Program Kampung Iklim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.	Terdapat promosi dan kampanye hasil inovasi terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Sudah terpenuhi
Apresiasi prestasi Inovasi;	Kabupaten Kepulauan Selayar secara konsisten mengikuti kompetisi inovasi terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran selama lima tahun terakhir, khususnya melalui partisipasi dalam Innovative Government Award (IGA)	Keikutsertaan dalam lomba inovasi daerah yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.	Sudah terpenuhi
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Hingga saat ini, belum tersedia data terkait jumlah start-up atau usaha mikro yang dibina melalui skema inkubasi daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar	Implementasi skema pengembangan perusahaan pemula (start-up) berbasis riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran..	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data jumlah start-up/usaha mikro yang dibina.
Inventarisasi pengembangan, dan	Saat ini belum terdapat data yang mendokumentasikan	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	pemanfaatan pengetahuan atau teknologi lokal masyarakat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Ini menandakan peluang untuk menggali potensi lokal dalam perumusan solusi berbasis komunitas	lokal yang ada terkait dengan penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. telah tersedia dan terkodefisikasi, sehingga bisa menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut.	jumlah pengetahuan masyarakat lokal.
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Belum tersedia data mengenai jumlah tema riset yang secara khusus mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.	Terdapat tema riset yang mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, yang berpotensi didukung oleh pemangku kepentingan, seperti universitas/Lembaga riset dan industri.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi jumlah tema riset yang mendukung.
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Saat ini belum terdapat data terkait jumlah klaster inovasi yang difokuskan pada pengadaan riset untuk penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di daerah ini, yang mengindikasikan kebutuhan untuk membangun ekosistem inovasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi	Terdapat klaster inovasi berbasis penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang dibentuk dan diperkuat dengan ekosistemnya.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi jumlah klaster inovasi
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengakomodir 3 program prioritas nasional kedalam dokumen perencanaan daerah, yang meliputi pemberantasan kemiskinan, penguatan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, serta digitalisasi. Prioritas tersebut dijabarkan dalam program pengelolaan pendidikan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial,	Kebijakan daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran telah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, guna memastikan keselarasan dan efektivitas implementasi.	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	perlindungan dan jaminan sosial, dan program pengembangan UMKM		
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Kabupaten ini telah memiliki program-program prioritas daerah yang mengintegrasikan isu-isu global ke dalam upaya penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Program tersebut mencakup pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif, penguatan pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi, pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan serta penguatan UMKM, hingga pembangunan desa dan penataan kota. Seluruh program ini selaras dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs)	Program penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran telah sinkron dan terintegrasi dengan isu global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.	Telah terpenuhi
Penguatan kerjasama internasional	Saat ini belum ada data yang mencatat jumlah kerja sama internasional yang dilakukan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terdapat Kerjasama internasional dalam penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang telah terjalin, dan diharapkan terjadinya transfer teknologi dan kemudahan akses ke pasar internasional.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi jumlah Kerjasama internasional.
Tema Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik			
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Hingga tahun 2024, telah ditetapkan dua Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Inovasi Daerah, yaitu Keputusan Bupati Nomor 396/VII/2023 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 353/VIII/2024 Tahun 2024, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem riset	Adanya kebijakan (dalam bentuk perda/perkada) yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar.		
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Belum terdapat data mengenai jumlah dataset riset atau inovasi terkait layanan publik yang terunggah dalam satu platform digital resmi. Selain itu, sistem informasi di pemerintahan daerah yang secara khusus menangani data dan pengelolaan informasi terkait layanan publik juga belum tersedia.	Dataset tersedia dalam platform digital resmi, serta didukung akses terhadap perangkat dan jaringan digital yang memadai.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi jumlah dataset riset atau inovasi
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Seluruh lembaga riset yang berperan dalam pengembangan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki akses internet penuh (cakupan 100%), yang menjadi modal penting untuk mendukung efektivitas dan kelancaran proses riset	Terdapat akses internet yang handal pada lembaga riset dan inovasi yang mendukung kualitas layanan publik.	Sudah terpenuhi
Pengelolaan kebun raya daerah	Belum terdapat data terkait jumlah pengelola atau tenaga kerja yang ditugaskan di Kebun Raya Daerah (Gojang)	Terdapat program riset dan inovasi di kebun raya daerah yang mendukung peningkatan kualitas publik	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi jumlah pengetahuan masyarakat lokal.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total belanja APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pengembangan kualitas layanan publik mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024, dengan nilai tertinggi sebesar 0,070% pada tahun 2021 dan menurun menjadi 0,036% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dalam alokasi anggaran riset yang mendukung peningkatan	Alokasi anggaran riset dan inovasi yang memadai yang khusus digunakan untuk peningkatan kualitas publik.	Belum terpenuhi karena anggaran masih belum memadai

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar		
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Belum tersedia data mengenai jumlah ide, paten, atau inovasi yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menandakan perlunya sistem pendataan yang lebih terstruktur	Inventarisasi seluruh ide/paten/inovasi yang terkait dengan peningkatan kualitas publik	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data jumlah ide/paten/inovasi
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Data mengenai jumlah kerja sama riset yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar belum tersedia	Terdapat kerjasama riset dan inovasi peningkatan kualitas publik dengan pihak eksternal, seperti kampus, lembaga riset, dunia industri, dan lainnya.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data Kerjasama riset
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Saat ini belum terdapat website jaringan resmi yang difungsikan untuk mendukung koordinasi dan diseminasi riset maupun inovasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik	Tersedia SDM peneliti yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang memiliki pengalaman dalam penelitian tentang peningkatan kualitas publik.	Belum terpenuhi karena belum tersedia website, tetapi jaringan internet sudah memadai
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah			
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Belum tersedia data mengenai jumlah mitra yang terlibat dalam pengembangan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan perlunya pendataan mitra untuk mendukung kolaborasi dalam peningkatan layanan publik	Terdapat kemitraan riset dan inovasi yang terjalin dan diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi/lembaga riset, dan swasta untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data jumlah mitra
Peningkatan difusi Inovasi	Data terkait jumlah adopsi atau implementasi hasil riset yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik belum tersedia. Ini mengindikasikan perlunya mekanisme pemantauan untuk memastikan hasil riset dapat diimplementasikan	Terdapat adopsi/implementasi hasil riset dan inovasi pengembangan produktivitas yang menghasilkan peningkatan kualitas layanan publik	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data jumlah adopsi/implementasi hasil riset

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Saat ini belum terdapat data yang mendokumentasikan jumlah hasil riset terkait kualitas layanan publik yang telah didiseminasikan atau disebarluaskan di Kabupaten Kepulauan Selayar	Hasil riset dan inovasi yang terkait peningkatan kualitas layanan publik secara rutin disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan masyarakat, untuk meningkatkan adopsi teknologi.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data jumlah hasil riset yang didiseminasikan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah			
Promosi dan kampanye Inovasi;	Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 6 inovasi terkait pengembangan kualitas layanan publik. Pada tahun 2020, terdapat dua inovasi, yaitu Layanan Perizinan Mobile dan Penerapan Tatanan New Normal di Sektor Transportasi. Namun, tidak ada inovasi baru pada tahun 2021 dan 2022. Tahun 2023 kembali muncul dua inovasi, yaitu program ALAMAK dan Layanan Khusus Pengaduan Masyarakat berbasis IT. Pada tahun 2024, terdapat satu inovasi, yakni Sentra Informasi Produk Lokal Daerah (SIP OK DEH).	Terdapat promosi dan kampanye hasil inovasi terkait peningkatan pelayanan publik daerah yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Belum terpenuhi. Sudah ada berbagai inovasi pelayanan publik, tetapi belum tercatat adanya kegiatan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat
Apresiasi prestasi Inovasi;	Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar rutin mengikuti 1 kompetisi inovasi terkait peningkatan kualitas layanan publik melalui partisipasi dalam Innovative Government Award (IGA)	Keikutsertaan dalam lomba inovasi daerah yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik daerah	Sudah terpenuhi
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Belum tersedia data mengenai jumlah start-up atau UMKM binaan yang secara langsung berkontribusi dalam peningkatan akses dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan program	Implementasi skema pengembangan perusahaan pemula (start-up) berbasis riset pelayanan publik daerah.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data terkait jumlah start-up/UMKM binaan

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	pembinaan kewirausahaan yang terukur kedepannya		
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Saat ini belum terdapat data yang mendokumentasikan pemanfaatan pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang diintegrasikan ke dalam sistem layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang ada terkait dengan peningkatan pelayanan publik daerah telah tersedia dan terkodefisikasi, sehingga bisa menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut.	
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Saat ini, belum tersedia data pendukung mengenai jumlah tema riset yang secara khusus mendukung pengembangan kualitas layanan publik	Terdapat tema riset yang mendukung peningkatan pelayanan publik daerah, yang berpotensi didukung oleh pemangku kepentingan, seperti universitas/Lembaga riset dan industri.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data jumlah tema riset yang mendukung
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Saat ini belum terdapat data terkait jumlah klaster inovasi yang berperan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketiadaan data ini menandakan kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan ekosistem inovasi yang lebih terstruktur kedepannya	Terdapat klaster inovasi berbasis peningkatan pelayanan publik daerah yang dibentuk dan diperkuat dengan ekosistemnya.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data jumlah klaster inovasi
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki program penunjang urusan pemerintahan daerah yang mencakup peningkatan kualitas layanan publik. Di dalamnya, terdapat fokus pada pengembangan layanan administrasi berbasis digital sebagai upaya mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan	Kebijakan daerah yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik daerah telah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, guna memastikan keselarasan dan efektivitas implementasi.	Sudah terpenuhi
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu	Kabupaten ini telah memiliki sejumlah program daerah yang	Program pengembangan peningkatan layanan	Sudah terpenuhi

Elemen dan Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	mengintegrasikan peningkatan kualitas layanan publik dengan isu-isu global. Beberapa di antaranya diwujudkan melalui kegiatan seperti pengembangan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan promosi produk lokal berbasis elektronik, penerapan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), serta upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan	publik daerah telah sinkron dan terintegrasi dengan isu global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.	
Penguatan kerjasama internasional	Saat ini belum tersedia data konkrit mengenai jumlah kerjasama internasional yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pengembangan kualitas layanan publiknya	Terdapat Kerjasama internasional dalam peningkatan layanan publik daerah yang telah terjalin, dan diharapkan terjadinya transfer teknologi dan kemudahan akses ke pasar internasional.	Belum terpenuhi karena belum teridentifikasi data jumlah Kerjasama internasional

BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Strategi pengembangan riset dan inovasi di tingkat daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang ada. Oleh karena itu, strategi ini selaras dengan hasil analisis mengenai kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah yang telah dibahas sebelumnya. Lebih jauh lagi, strategi ini mengaitkan kesenjangan yang ditemukan dengan berbagai tantangan serta peluang yang muncul. Intinya, strategi ini diarahkan untuk memperkuat, membangun, serta memperbaiki aspek-aspek ekosistem riset dan inovasi daerah yang masih lemah pada produk unggulan daerah dan tema prioritas daerah. Berikut diuraikan strategi pengembangan riset dan inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 5.1
Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi Terkait Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Elemen	Strategi
Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah	Menyediakan dan mengembangkan basis data riset dan inovasi terkait produk unggulan dalam bentuk platform resmi yang didukung dengan perangkat dan jaringan digital yang memadai
	Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur riset dan inovasi yang memadai untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah
	Merumuskan kebijakan riset dan inovasi yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
	Mendorong skema pembiayaan riset dan inovasi yang lebih kolaboratif, baik dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah (APBD dan Non APBD) untuk pengembangan riset dan inovasi produk unggulan daerah
	Menginventarisasi seluruh ide/paten/inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah terkait produk unggulan
Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti yang terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah

Elemen	Strategi
Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah	Memperkuat dan memperluas skema kerjasama riset dan inovasi terkait pengembangan produk unggulan daerah
Budaya Riset dan Inovasi Daerah	Memperluas upaya promosi dan kampanye invoasi terkait produk unggulan daerah secara berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan Mendesign model kegiatan apresiasi riset dan inovovasi yang berkontribusi pada pengembangan produk unggulan daerah Menginventarisasi teknologi yang dimiliki masyarakat dan kearifan lokal yang ada terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah Mengembangkan perusahaan pemula (start-up) berbasis riset produk unggulan daerah
Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah	Merumuskan kebijakan terkait pengembangan produk unggulan daerah dan menyelaraskannya dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Penyelarasan dengan perkembangan global	Mengembangkan kerjasama internasional dalam pengembangan produk unggulan daerah

Tabel 5. 2 Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah Terkait Tema Prioritas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Elemen Ekosistem Riset	Strategi
Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah	Menyediakan dan mengembangkan basis data riset dan inovasi untuk riset dan inovasi yang terintegrasi terkait tema prioritas daerah dalam bentuk platform resmi yang didukung dengan perangkat dan jaringan digital yang memadai Mendorong skema pembiayaan riset dan inovasi yang lebih kolaboratif, baik dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah (APBD dan Non APBD) untuk pengembangan riset dan inovasi terkait tema prioritas daerah
Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah	Memperluas kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak lain dalam pengembangan riset dan inovasi terkait tema prioritas daerah Meningkatkan kuantitas dan kualitas peneliti dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan tema prioritas daerah

Elemen Ekosistem Riset	Strategi
Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah	<p>Memperkuat dan memperluas skema kemitraan riset dan inovasi terkait isu yang berkaitan dengan tema prioritas daerah</p> <p>Meningkatkan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi terkait isu tentang tema prioritas daerah kepada pelaku inovasi</p> <p>Menginventarisasi teknologi yang dikembangkan oleh Masyarakat terkait dengan tema prioritas daerah</p>
Budaya Riset dan Inovasi Daerah	<p>Memperluas upaya promosi dan kampanye Inovasi secara berkelanjutan untuk riset dan inovasi terkait tema prioritas daerah</p> <p>Mengembangkan perusahaan rintisan (start-up) berbasis riset yang berkaitan dengan tema prioritas daerah</p> <p>Mengembangkan kluster Inovasi berbasis tema prioritas daerah</p>
Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah	<p>Merumuskan tema riset yang sejalan dengan tema prioritas daerah, yang berpotensi mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti universitas/Lembaga riset dan industri.</p>
Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	<p>Meningkatkan Kerjasama internasional dalam isu yang berkaitan dengan tema prioritas daerah</p>

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bab ini berisi tentang langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam pengembangan produk-produk unggulan dan permasalahan-permasalahan pokok daerah selama lima tahun.

6.1 Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah

Tabel 6.1 Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Produk Unggulan Daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Produk Unggulan Ke-1: Pengembangan Kelapa						
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah						
Reformasi Kebijakan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Jumlah Kajian / Policy Brief Berbasis Riset Pertanian Kelapa	Terbentuknya tim kerja riset kelapa lintas lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan kajian dan tersusunnya roadmap riset kelapa daerah	Ditetapkannya standar format kajian dan policy brief yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah	Terselenggaranya pelatihan untuk peneliti lokal, penyuluh, dan staf OPD dan terbentuknya pusat data dan informasi kelapa di tingkat kabupaten	Teridentifikasinya permasalahan aktual petani kelapa dan terbentuknya hasil riset untuk dikaji ulang melalui FGD lintas stakeholder	Terdiseminasinya hasil kajian dan policy brief secara rutin melalui rapat koordinasi, publikasi elektronik, media lokal, serta forum petani
	Jumlah Perda / Perkada Tentang Riset Dan Inovasi Daerah	Tersusunnya naskah akademik dan draft regulasi (perda/perkada)	Tersusunnya policy brief tematik	Terbitnya minimal 1 Perda inisiatif DPRD atau usulam ekesekutif yang mengatuh	Terbitnya Perkada teknis turunan dari Perda atau sebagai regulasi mandiri	Terimplementasinya a Perda/Perkada secara terukur melalui program – program OPD

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		berbasis data dan kajian empirik		pengembangan riset dan inovasi pertanian kelapa		
Penataan Basis Data Riset Dan Inovasi	Jumlah Dataset Riset / Inovasi Kelapa Yang Terunggah Dalam Satu Platform Digital Resmi	Terbentuknya sistem dan penataan dataset awal platform digital resmi daerah	Terintegrasinya data dan kolaborasi multi-sumber atau lembaga	Terbentuknya SOP manajemen data dan protokol privasi-publikasi untuk semua dataset yang terunggah	Terunggahnya dataset inovasi produk turunan kelapa dari setiap riset atau kegiatan OPD terkait kelapa	Terintegrasinya paltform dataset kelapa daerah dengan portal data nasional
	Keberadaan Sistem Informasi (Sisfo) Di Pemerintahan Daerah (Ada / Tidak), Tingkat Penggunaan Alat Komunikasi Dan Internet Oleh ASN (%)	Terbentuknya fondasi sistem dan digital awareness misalnya dalam bentuk penyusunan perencanaan pengembangan Sistem Informasi Riset Kelapa Daerah (SIRIKEDA)	Terbentuknya fitur komunikasi internal dan terselenggaranya pelatihan lanjutan pemanfaatan internet dan sistem berbasis cloud	Terintegrasinya SIRIKEDA dengan sistem lainnya dan ke seluruh kecamatan dan OPD terkait	Terbentuknya aplikasi mobile SIRIKEDA dan diterapkannya dashboard kinerja ASN terkait aktivitas riset kelapa	Terintegrasinya data dan penggunaan sistem informasi dengan pusat (BRIN,BPS, Kemendagri, dan Kominfo)
Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset Dan Dan Inovasi	Jumlah Lab, Kelengkapan Alat (Menunjang Aspek Analisis Tanah, Air, Lingkungan Mikro Tanaman, Serta Uji Kimia - Fisiologis Sederhana)	Tersusunnya masterplan pengembangan laboratorium riset kelapa	Tersedianya alt dasar laboratorium dan teknisi lab lokal, dan tersusunnya protokol uji lapang dan laboratorium berbasis kebutuhan riset kelapa	Dikembangkannya sistem layanan laboratorium berbasis pemesanan digital	Terbentuknya tim riset terpadu lintas OPD dan universitas dengan mengembangkan laboratorium tematik	Ditetapkannya laboratorium riset kelapa sebagai pusat inovasi daerah (PID) dan terjalannya kerja sama riset nasional - internasional

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Cakupan Internet Pada Lembaga Riset (%) Yang Mendukung Pengembangan Komoditas Kelapa	Tersusunnya masterplan perluasan dan peningkatan cakupan internet	Terbangunnya pusat data mini di lembaga riset utama sebagai pusat dokumentasi riset kelapa	Terintergrasinya jaringan internet lembaga riset ke sistem informasi riset daerah dan nasional	Terbangunnya mekanisme pelaporan berbasis internet untuk semua kegiatan riset kelapa	Tersedianya akses internet bagi seluruh lembaga riset komoditas kelapa untuk kegiatan riset dan diseminasi
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Ketersediaan Program Riset Di Kebun Raya Daerah (Gojang)	Terpetakannya potensi riset kelapa di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar	Tersedianya fasilitas dasar riset	Terimplementasinya program riset tematik tahunan	Terbentuknya pengembangan riset hilirisasi produk kelapa	Terintegrasinya riset dalam perencanaan daerah
Penyediaan Anggaran Riset Dan Inovasi	Persentase Anggaran Riset Dari Total Anggaran Belanja APBD (Beserta Nilai Nominalnya)	Tersusunnya peta kebutuhan pembiayaan riset kelapa dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah	Terlaksananya 2 – 3 kegiatan riset kelapa dengan pembiayaan APBD	Ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang data riset / inovasi daerah dan terjalinnnya kerjasama pembiayaan riset kelapa lintas sumber	Terbentuknya penggunaan anggaran riset kelapa yang efektif dengan evaluasi berbasis output dan outcome	Terbentuknya <i>Research Trust Fund</i> Daerah berbasis APBD, CSR, dan lembaga donor untuk keberlanjutan riset kelapa
Peningkatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Ide/Paten/Inovasi Yang Terkait Dengan Kelapa	Teridentifikasinya potensi ide dan teknologi lokal terkait kelapa dari petani, penyuluh, ASN, mahasiswa, dan UMKM	Tersedianya pendampingan teknis dan inkubasi bisnis bagi pengusul ide kelapa terbaik	Terfasilitasinya kerja sama antar inovator dan pelaku industr kelapa/UMKM untuk uji pasar dan komersialisasi awal produk atau alat	Terbangunnya Pojok Inovasi Kelapa di BRIDA atau UPTD yang aktif mendorong riset kelapa	Terbentuknya lembaga mitra daerah untuk pemanfaatan dan lisensi inovasi
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi						
Penguatan Kolaborasi Riset Dan Inovasi Di	Jumlah Kerja Sama Riset Terkait Kelapa	Tersusunnya dokumen strategi kemitraan riset	Terlaksananya riset kolaboratif awal dengan	Terjalinnnya kemitraan riset lintas sektor	Terjalinnnya kemitraan strategis dengan swasta (eksportis	Terbentuknya Consorsium Riset Kelapa Daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Daerah Dengan Pemangku Kepentingan		kelapa berisi format kerja sama, prioritas topik riset, dan kontribusi masing-masing pihak	mitra lokal seperti universitas daerah, SMK, atau UPTD Pertanian		kelapa, koperasi, UMKM olahan) untuk riset berbasis kebutuhan pasar	yang melibatkan mitra kampus, industri, komunitas, dan pemerintah
Penyediaan Sarana Pendukung Riset Dan Inovasi Di Daerah Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Daerah	Jumlah Sdm Peneliti (Termasuk Dosen) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Teridentifikasinya jumlah peneliti dan dosen berdasarkan jenjang pendidikan dan bidang keahlian	Tersedianya dukungan untuk pendidikan lanjut untuk SDM riset yang potensial	Terlaksananya rekrutmen terbuka peneliti dari luar daerah	Tersedianya percepatan kenaikan jabatan fungsional penelitian dan dosen sesuai kriteria publikasi dan kinerja riset	Tersedianya pengembangan SDM riset sebagai bagian dari RPJMD dan Renstra OPD, khususnya untuk BRIDA, Dinas Pertanian, dan perguruan tinggi
Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan Antar Lembaga	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dan Sektor Swasta Terkait Riset Dan Inovasi Kelapa	Terpetakannya potensi mitra kerja sama strategis seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta	Terfasilitasinya perjanjian kerja sama dengan UMKM dan koperasi untuk hilirisasi hasil riset	Terjalinnnya kerja sama dengan sektor swasta besar dalam kerja sama riset dan pengembangan seperti pabrik pengolahan kelapa ekspor	Terbentuknya cluster riset kelapa berbasis MoU/MoA agar terintegrasi	Terdaftarnya Pusat Kemitraan Kelapa ke dalam platform kolaborasi nasional (BRIN, Kemendagri, dan Kemendikbud)
Peningkatan Difusi Inovasi	Jumlah Adopsi/Implementasi Hasil Riset Kelapa	Terinventarisasinya seluruh hasil riset kelapa yang telah dihasilkan	Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan adopsi inovasi untuk kelompok tani, penyuluh, dan UMKM	Tersedianya skema inkubasi bisnis inovasi berbasis riset kelapa untuk UMKM dan koperasi	Terintegrasinya hasil riset kelapa ke dalam regulasi daerah atau juknis program OPD	Ditetapkannya Kawasan Adopsi Inovasi Kelapa sebagai percontohan riset terapan daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Peningkatan Praktik Baik Dan Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Kepada Pelaku Inovasi	Jumlah Hasil Riset Terkait Kelapa Yang Didiseminasikan	Tersusunnya Rencana Induk Diseminasi Riset Kelapa Daerah	Diterbitkannya Buletin Riset Kelapa Daerah dua kali setahun yang berisi ringkasan hasil riset, kisah sukses, dan teknologi terapan	Terdistribusinya media diseminasi ke kelompok tani, koperasi, dan sekolah pertanian	Terintegrasinya hasil riset yang telah didiseminasikan ke dalam pelatihan resmi OPD	Terselenggaranya diseminasi terbuka untuk setiap riset kelapa yang dibiaya APBD
Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi						
Promosi Dan Kampanye Inovasi	Jumlah Inovasi Per Tahun Atau Ketersediaan Forum Inovasi Daerah Terkait Pengembangan Kelapa	Terbentuknya tim penggerak inovasi kelapa daerah dibawah BRIDA atau OPD terkait	Terbentuknya inkubator inovasi kelapa berbasis UPTD, politeknik, atau mitra industri	Terintegrasinya hasil inovasi ke dalam katalog produk inovatif daerah	Terjalinnnya kolaborasi inovasi kelapa antar daerah	Terbentuknya Forum Inovasi Kelapa Daerah sebagai bagian tetap dari agenda BRIDA dan Pemda
Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Penghargaan / Kompetisi Inovasi Yang Diikuti Oleh Daerah	Terbentuknya tim fasilitator inovasi daerah	Tersedianya sistem dokumentasi lengkap atas inovasi kelapa daerah	Terselenggaranya kompetisi inovasi kelapa tingkat lokal sebagai seleksi untuk mengikuti kompetisi nasional / internasional	Terbentuknya Galeri Inovasi Kelapa Daerah dalam bentuk fisik dan digital untuk promosi	Terbentuknya Pusat Kompetensi dan Promosi Inovasi Daerah untuk memfasilitasi ajang inovasi jangka panjang dan keikutsertaan kompetisi inovasi sebagai indikator kinerja BRIDA dan OPD teknis

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	Jumlah Start-Up Atau Umkm Kelapa Yang Dibina Melalui Inkubasi Daerah	Terbentuknya Inkubator Inovasi Bisnis Kelapa Daerah	Terlaksananya program inkubasi terstruktur batch 1 selama 6 – 12 bulan	Terbentuknya skema inkubasi kelapa tematik	Terciptanya mitra hilirisasi hasil riset kelapa daerah dari UMKM / Start – up binaan	Terbentuknya akademi UMKM Kelapa Digital berbasis daring untuk pembinaan berkelanjutan
Inventarisasi, Pengembangan, Dan Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat	Jumlah Pengetahuan Atau Teknologi Masyarakat Lokal Yang Dimanfaatkan Dalam Pengembangan Kelapa	Tersusunnya database pengetahuan lokal kelapa	Terintegrasinya pengetahuan lokal ke dalam desain riset dan inovasi daerah	Terselenggaranya pelatihan berbasis teknologi lokal untuk petani atau pelaku usaha	Terselenggaranya promosi nilai budaya dan ekonomi dari teknologi lokal melalui festival kelapa, lomba inovasi lokal, dan promosi UMKM	Terciptanya strategiriset dan inovasi daerah melalui pemanfaatan pengetahuan lokal dalam Renstra BRIDA/OPD
Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah						
Prakarsa Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah Dan/Atau Mengatasi	Jumlah Tema Riset Yang Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Kelapa)	Tersusunnya Research Roadmap berbasis potensi, permasalahan, dan kebutuhan pasar	Terselenggaranya call for proposal riset kelapa dengan topik sesuai roadmap	Terintegrasinya tema riset kelapa dalam forum ilmiah daerah atau seminar tahunan riset daerah	Terjalinnnya kemitraan dengan UMKM/koperasi untuk ujia adopsi hasil riset	Terbentuknya kebijakan riset daerah dalam RPJMD atau regulasi BRIDA melalui tema riset kelapa

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Permasalahan Daerah						
Penyelenggaraan Pengembangan Kluster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah	Jumlah Kluster Inovasi Pertanian Kelapa Yang Terbentuk Dan Aktif Dalam 1 Tahun	Tersedianya pemetaan wilayah sentra kelapa di kabupaten	Tersedianya kelembagaan kluster	Terbentuknya replikasi kluster di wilayah baru yang memiliki potensi namun belum terorganisasi	Terciptanya kluster sebagai pusat hilirisasi berbasis inovasi (VCO, cocopeat, karbon aktif, dll)	Tersusunnya Business Plan berkelanjutan untuk tiap kluster
Kesesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan/Program Riset Kelapa Yang Tercantum Dalam Dokumen RPJMD Dan Renstra	Tersedianya minimal 2 program riset kelapa prioritas lintas sektor yang diusulkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra	Tersedianya database usulan kegiatan untuk dimasukkan ke SIPD atau sistem e-planning daerah	Tersusunnya usulan DAK Nonfisik atau Dana Inovasi Daerah berbasis riset kelapa	Terjalinnnya kerja sama dengan pemprov untuk mendorong integrasi dalam dokumen perencanaan provinsi	Terintegrasinya kegiatan riset kelapa dalam dokumen APBD tahunan secara reguler
Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global						
Peningkatan Kepedulian Isu Internasional Yang Mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset Dan Inovasi Di Daerah	Ketersediaan Program Daerah Yang Mengintegrasikan Pengembangan Kelapa Dengan Isu Global (Perubahan Iklim Dan Pangan)	Tersusunnya 1 – 2 policy brief program integratif	Terintegrasinya konsep program kelapa, iklim, dan pangan ke dalam dokumen daerah	Terselenggaranya penerapan program yang melibatkan masyarakat lokal dan UMKM	Terbentuknya model Best Practice Daerah dalam pengelolaan kelapa adaptif iklim dan berorientasi pangan	Terbentuknya monitoring system indikator perubahan iklim dan ketahanan pangan berbasis kelapa

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Penguatan Kerjasama Internasional	Jumlah Kerjasama Internasional Dalam Rangka Pengembangan Kelapa	Teridentifikasinya lembaga internasional dan negara mitra potensial beserta bidang kerja sama	Terbentuknya kerja sama dengan mitra terpilih yang dikembangkan melalui MoU draft atau LoI via BRIDA, Bappeda, Kemendagri, dan Kemenlu	Terlaksananya kerja sama riset atau pelatihan luar negeri terkait kelapa	Terjalin kerja sama dari riset ke aspek hilirisasi dan komersialisasi kelapa	Terjalannya kerja sama jangka panjang (>-5 tahun) berbasis roadmap bersama
Produk Unggulan Ke-2: Perikanan Tangkap						
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah						
Reformasi Kebijakan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Jumlah Kajian/Policy Brief Berbasis Riset Perikanan Tangkap	Terbentuknya tim kerja riset perikanan tangkap lintas lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan kajian dan tersusunnya roadmap riset perikanan tangkap	Ditetapkannya standar format kajian dan <i>policy brief</i> yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah	Terselenggaranya pelatihan untuk peneliti lokal, penyuluh, dan staf OPD dan terbentuknya pusat data dan informasi perikanan tangkap di tingkat kabupaten	Teridentifikasinya permasalahan aktual nelayan perikanan tangkap dan terbentuknya hasil riset untuk dikaji ulang melalui FGD lintas stakeholder	Terdiseminasinya hasil kajian dan <i>policy brief</i> secara rutin melalui rapat koordinasi, publikasi elektronik, media lokal, serta forum nelayan
	Jumlah Perda/Perkada	Tersusunnya naskah akademik dan draft regulasi	Tersusunnya <i>policy brief</i> tematik	Terbitnya minimal 1 Perda inisiatif DPRD atau usulan eksekutif	Terbitnya Perkada teknis turunan dari	Terimplementasinya Perda/Perkada secara terukur

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Tentang Riset Dan Inovasi Daerah	(perda/perkada) berbasis data dan kajian empirik		yang mengatur pengembangan riset dan inovasi perikanan tangkap	Perda atau sebagai regulasi mandiri	melalui program – program OPD
Penataan Basis Data Riset Dan Inovasi	Jumlah Dataset Riset/Inovasi Perikanan Tangkap Yang Terunggah Dalam Satu Platform Digital Resmi	Terbentuknya sistem dan penataan dataset awal platform digital resmi daerah	Terintegrasinya data dan kolaborasi multi-sumber atau lembaga	Terbentuknya SOP manajemen data dan protokol privasi-publikasi untuk semua dataset yang terunggah	Terunggahnya dataset inovasi produk turunan perikanan tangkap dari setiap riset atau kegiatan OPD terkait perikanan tangkap	Terintegrasinya platform dataset perikanan tangkap daerah dengan portal data nasional
	Keberadaan Sistem Informasi (Sisfo) Di Pemerintahan Daerah (Ada/Tidak), Tingkat Penggunaan Alat Komunikasi Dan Internet Oleh ASN (%)	Terbentuknya fondasi sistem dan <i>digital awareness</i> misalnya dalam bentuk penyusunan perencanaan pengembangan Sistem Informasi Riset Perikanan Tangkap Daerah (SIRIPETADA)	Terbentuknya fitur komunikasi internal dan terselenggaranya pelatihan lanjutan pemanfaatan internet dan sistem berbasis cloud	Terintegrasinya SIRIPETADA dengan sistem lainnya dan ke seluruh kecamatan dan OPD terkait	Terbentuknya aplikasi mobile SIRIPETADA dan diterapkannya dashboard kinerja ASN terkait aktivitas riset perikanan tangkap	Terintegrasinya data dan penggunaan sistem informasi dengan pusat (BRIN,BPS, Kemendagri, dan Kominfo)
Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset Dan Dan Inovasi	Jumlah Lab, Kelengkapan Alat (Menunjang Aspek Analisis Tanah, Air, Lingkungan Mikro Tanaman, Serta Uji Kimia-Fisiologis Sederhana)	Tersusunnya masterplan pengembangan laboratorium riset perikanan tangkap	Tersedianya alat dasar laboratorium dan teknisi lab lokal, dan tersusunnya protokol uji lapang dan laboratorium berbasis kebutuhan riset	Dikembangkannya sistem layanan laboratorium berbasis pemesanan digital	Terbentuknya tim riset terpadu lintas OPD dan universitas dengan mengembangkan laboratorium tematik	Ditetapkannya laboratorium riset perikanan tangkap sebagai pusat inovasi daerah (PID) dan terjalannya kerja sama riset nasional - internasional

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
			perikanan tangkap			
	Cakupan Internet Pada Lembaga Riset (%) Yang Mendukung Pengembangan Komoditas Perikanan Tangkap	Tersusunnya masterplan perluasan dan peningkatan cakupan internet	Terbangunnya pusat data mini di lembaga riset utama sebagai pusat dokumentasi riset perikanan tangkap	Terintergrasinya jaringan internet lembaga riset ke sistem informasi riset daerah dan nasional	Terbangunnya mekanisme pelaporan berbasis internet untuk semua kegiatan riset perikanan tangkap	Tersedianya akses internet bagi seluruh lembaga riset komoditas perikanan tangkap untuk kegiatan riset dan diseminasi
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Ketersediaan Program Riset Di Kebun Raya Daerah (Gojang)	Teridentifikasinya lahan yang dapat dikembangkan untuk perikanan tangkap	Tersedianya fasilitas pendukung riset sederhana seperti kapal riset, laboratorium alat tangkap, laboratorium biologi, dll	Terjalinnnya kerja sama riset dengan minimal tiga pihak: BRIN, Universitas, dan LSM konservasi	Tersedianya hasil riset dalam jurnal nasional, atau menjadi bahan <i>policy brief</i> untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap	Ditetapkannya program riset perikanan tangkap sebagai program unggulan kebun raya Gojang dan masuk ke dalam jaringan nasional (BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI)
Penyediaan Anggaran Riset Dan Inovasi	Persentase Anggaran Riset Dari Total Anggaran Belanja APBD (Beserta Nilai Nominalnya)	Tersusunnya peta kebutuhan pembiayaan riset perikanan tangkap dan terintegrasi ke dalam dokumen	Terlaksananya 2 – 3 kegiatan riset perikanan tangkap dengan pembiayaan APBD	Ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang data riset / inovasi daerah dan terjalinnnya kerjasama	Terbentuknya penggunaan anggaran riset perikanan tangkap yang efektif dengan evaluasi	Terbentuknya <i>Research Trust Fund</i> Daerah berbasis APBD, CSR, dan lembaga donor untuk

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		perencanaan daerah		pembiayaan riset perikanan tangkap lintas sumber	berbasis output dan outcome	keberlanjutan riset perikanan tangkap
Peningkatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Ide/Paten/Inovasi Yang Terkait Dengan Perikanan Tangkap	Teridentifikasinya potensi ide dan teknologi lokal terkait perikanan tangkap dari nelayan, ASN, mahasiswa, dan UMKM	Tersedianya pendampingan teknis dan inkubasi bisnis bagi pengusul ide perikanan tangkap terbaik	Terfasilitasinya kerja sama antar inovator dan pelaku industri perikanan tangkap/UMKM untuk uji pasar dan komersialisasi awal produk atau alat	Terbangunnya Pojok Inovasi Perikanan Tangkap di BRIDA atau UPTD yang aktif mendorong riset perikanan tangkap	Terbentuknya lembaga mitra daerah untuk pemanfaatan dan lisensi inovasi
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi						
Penguatan Kolaborasi Riset Dan Inovasi Di Daerah Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kerja Sama Riset Terkait Perikanan Tangkap	Tersusunnya dokumen strategi kemitraan riset perikanan tangkap berisi format kerja sama, prioritas topik riset, dan kontribusi masing-masing pihak	Terlaksananya riset kolaboratif awal dengan mitra lokal seperti universitas daerah, SMK, atau UPTD Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terjalinnnya kemitraan riset lintas sektor	Terjalinnnya kemitraan strategis dengan swasta (eksportis perikanan tangkap, koperasi, UMKM olahan) untuk riset berbasis kebutuhan pasar	Terbentuknya Consorsium Riset Perikanan Tangkap Daerah yang melibatkan mitra kampus, industri, komunitas, dan pemerintah
Penyediaan Sarana Pendukung Riset Dan Inovasi Di Daerah Yang Disesuaikan Dengan	Jumlah Sdm Peneliti (Termasuk Dosen) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Teridentifikasinya jumlah peneliti dan dosen berdasarkan jenjang pendidikan dan bidang keahlian	Tersedianya dukungan untuk pendidikan lanjut untuk SDM riset yang potensial	Terlaksananya rekrutmen terbuka peneliti dari luar daerah	Tersedianya percepatan kenaikan jabatan fungsional penelitian dan dosen sesuai kriteria publikasi dan kinerja riset	Tersedianya pengembangan SDM riset sebagai bagian dari RPJMD dan Renstra OPD, khususnya untuk BRIDA, Dinas

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Kemampuan Daerah						Kelautan dan Perikanan, dan perguruan tinggi
Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan Antar Lembaga	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dan Sektor Swasta Terkait Riset Dan Inovasi Perikanan Tangkap	Terpetakannya potensi mitra kerja sama strategis seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta	Terfasilitasinya perjanjian kerja sama dengan UMKM dan koperasi untuk hilirisasi hasil riset perikanan tangkap	Terjalinnya kerja sama dengan sektor swasta besar dalam kerja sama riset dan pengembangan seperti unit pengolahan perikanan tangkap	Terbentuknya cluster riset perikanan tangkap berbasis MoU/MoA agar terintegrasi	Terdaftarnya Pusat Kemitraan Perikanan Tangkap ke dalam platform kolaborasi nasional (BRIN, Kemendagri, dan Kemendikbud)
Peningkatan Difusi Inovasi	Jumlah Adopsi/Implementasi Hasil Riset Perikanan Tangkap	Terinventarisasinya seluruh hasil riset perikanan tangkap yang telah dihasilkan	Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan adopsi inovasi untuk kelompok nelayan dan UMKM	Tersedianya skema inkubasi bisnis inovasi berbasis riset perikanan tangkap untuk UMKM dan koperasi	Terintegrasinya hasil riset perikanan tangkap ke dalam regulasi daerah atau juknis program OPD	Ditetapkannya Kawasan Adopsi Inovasi Perikanan Tangkap sebagai percontohan riset terapan daerah
Peningkatan Praktik Baik Dan Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Kepada Pelaku Inovasi	Jumlah Hasil Riset Terkait Perikanan Tangkap Yang Didiseminasikan	Tersusunnya Rencana Induk Diseminasi Riset Perikanan Tangkap Daerah	Diterbitkannya Buletin Riset Perikanan Tangkap Daerah dua kali setahun yang berisi ringkasan hasil riset, kisah sukses, dan teknologi terapan	Terdistribusinya media diseminasi ke kelompok nelayan, koperasi, dan sekolah kelautan dan perikanan	Terintegrasinya hasil riset yang telah didiseminasikan ke dalam pelatihan resmi OPD	Terselenggaranya diseminasi terbuka untuk setiap riset perikanan tangkap yang dibiayai APBD

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi						
Promosi Dan Kampanye Inovasi	Jumlah Inovasi Per Tahun Atau Ketersediaan Forum Inovasi Daerah Terkait Pengembangan Perikanan Tangkap	Terbentuknya tim penggerak inovasi perikanan tangkap daerah dibawah BRIDA atau OPD terkait	Terbentuknya inkubator inovasi perikanan tangkap berbasis UPTD, politeknik, atau mitra industri	Terintegrasinya hasil inovasi ke dalam katalog produk inovatif daerah	Terjalinnnya kolaborasi inovasi perikanan tangkap antar daerah	Terbentuknya Forum Inovasi Perikanan Tangkap Daerah sebagai bagian tetap dari agenda BRIDA dan Pemda
Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Penghargaan/Kompetisi Inovasi Yang Diikuti Oleh Daerah	Terbentuknya tim fasilitator inovasi daerah	Tersedianya sistem dokumentasi lengkap atas inovasi perikanan tangkap daerah	Terselenggaranya kompetisi inovasi perikanan tangkap tingkat lokal sebagai seleksi untuk mengikuti kompetisi nasional/internasional	Terbentuknya Galeri Inovasi Perikanan Tangkap Daerah dalam bentuk fisik dan digital untuk promosi	Terbentuknya Pusat Kompetensi dan Promosi Inovasi Perikanan Tangkap Daerah untuk memfasilitasi ajang inovasi jangka panjang dan keikutsertaan kompetisi inovasi sebagai indikator kinerja BRIDA dan OPD teknis
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	Jumlah Start-Up Atau UMKM Perikanan Tangkap Yang Dibina Melalui Inkubasi Daerah	Terbentuknya Inkubator Inovasi Bisnis Perikanan Tangkap Daerah	Terlaksananya program inkubasi terstruktur batch 1 selama 6 – 12 bulan	Terbentuknya skema inkubasi perikanan tangkap tematik	Terciptanya mitra hilirisasi hasil riset perikanan tangkap daerah dari UMKM/Start-up binaan	Terbentuknya akademi UMKM Perikanan Tangkap Digital berbasis daring untuk pembinaan berkelanjutan

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Inventarisasi, Pengembangan, Dan Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat	Jumlah Pengetahuan Atau Teknologi Masyarakat Lokal Yang Dimanfaatkan Dalam Pengembangan Perikanan Tangkap	Tersusunnya database pengetahuan lokal perikanan tangkap	Terintegrasinya pengetahuan lokal ke dalam desain riset dan inovasi daerah	Terselenggaranya pelatihan berbasis teknologi lokal untuk nelayan atau pelaku usaha	Terselenggaranya promosi nilai budaya dan ekonomi dari teknologi lokal melalui festival perikanan tangkap, lomba inovasi lokal, dan promosi UMKM	Terciptanya strategi riset dan inovasi daerah melalui pemanfaatan pengetahuan lokal dalam Renstra BRIDA/OPD
Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah						
Prakarsa Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah Dan/Atau Mengatasi Permasalahan Daerah	Jumlah Tema Riset Yang Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Perikanan Tangkap)	Tersusunnya <i>Research Roadmap</i> berbasis potensi, permasalahan, dan kebutuhan pasar	Terselenggaranya <i>call for proposal</i> riset perikanan tangkap dengan topik sesuai roadmap	Terintegrasinya tema riset perikanan tangkap dalam forum ilmiah daerah atau seminar tahunan riset daerah	Terjalinnnya kemitraan dengan UMKM/koperasi untuk ujian adopsi hasil riset perikanan tangkap	Terbentuknya kebijakan riset daerah dalam RPJMD atau regulasi BRIDA melalui tema riset perikanan tangkap
Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah	Jumlah Klaster Inovasi Perikanan Tangkap Yang Terbentuk Dan Aktif Dalam 1 Tahun	Tersedianya pemetaan wilayah sentra perikanan tangkap di kabupaten	Tersedianya kelembagaan klaster	Terbentuknya replikasi klaster di wilayah baru yang memiliki potensi namun belum terorganisasi	Terciptanya klaster sebagai pusat hilirisasi berbasis inovasi	Tersusunnya Business Plan berkelanjutan untuk tiap klaster

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Kesesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan/Program Riset Perikanan Tangkap Yang Tercantum Dalam Dokumen RPJMD Dan Renstra	Tersedianya minimal 2 program riset perikanan tangkap prioritas lintas sektor yang diusulkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra	Tersedianya database usulan kegiatan untuk dimasukkan ke SIPD atau sistem e-planning daerah	Tersusunnya usulan DAK Nonfisik atau Dana Inovasi Daerah berbasis riset perikanan tangkap	Terjalannya kerja sama dengan pemprov untuk mendorong integrasi dalam dokumen perencanaan provinsi	Terintegrasinya kegiatan riset perikanan tangkap dalam dokumen APBD tahunan secara reguler
Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global						
Peningkatan Kepedulian Isu Internasional Yang Mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset Dan Inovasi Di Daerah	Ketersediaan Program Daerah Yang Mengintegrasikan Pengembangan Perikanan Tangkap Dengan Isu Global (Perubahan Iklim Dan Pangan)	Tersusunnya 1 – 2 <i>policy brief</i> program integratif	Terintegrasinya konsep program perikanan tangkap, iklim, dan pangan ke dalam dokumen daerah	Terselenggaranya penerapan program yang melibatkan masyarakat lokal dan UMKM	Terbentuknya model <i>Best Practice</i> Daerah dalam pengelolaan perikanan tangkap adaptif iklim dan berorientasi pangan	Terbentuknya monitoring system indikator perubahan iklim dan ketahanan pangan berbasis perikanan tangkap
Penguatan Kerjasama Internasional	Jumlah Kerjasama Internasional Dalam Rangka Pengembangan Perikanan Tangkap	Teridentifikasinya lembaga internasional dan negara mitra potensial beserta bidang kerja sama	Terbentuknya kerja sama dengan mitra terpilih yang dikembangkan melalui MoU draft atau LoI via BRIDA, Bappeda, Kemendagri, dan Kemenlu	Terlaksananya kerja sama riset atau pelatihan luar negeri terkait perikanan tangkap	Terjalin kerja sama dari riset ke aspek hilirisasi dan komersialisasi perikanan tangkap	Terjalannya kerja sama jangka panjang (>-5 tahun) berbasis <i>roadmap</i> bersama
Produk Unggulan Ke-3: Pengembangan Jeruk Keprok						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah						
Reformasi Kebijakan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Jumlah Kajian/Policy Brief Berbasis Riset Jeruk Keprok	Terbentuknya tim kerja riset jeruk keprok lintas lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan kajian dan tersusunnya roadmap riset jeruk keprok	Ditetapkannya standar format kajian dan <i>policy brief</i> yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah	Terselenggaranya pelatihan untuk peneliti lokal, penyuluh, dan staf OPD dan terbentuknya pusat data dan informasi jeruk keprok di tingkat kabupaten	Teridentifikasinya permasalahan aktual petani jeruk keprok dan terbentuknya hasil riset untuk dikaji ulang melalui FGD lintas stakeholder	Terdiseminasinya hasil kajian dan <i>policy brief</i> secara rutin melalui rapat koordinasi, publikasi elektronik, media lokal, serta forum petani
	Jumlah Perda/Perkada Tentang Riset Dan Inovasi Daerah	Tersusunnya naskah akademik dan draft regulasi (perda/perkada) berbasis data dan kajian empirik	Tersusunnya <i>policy brief</i> tematik	Terbitnya minimal 1 Perda inisiatif DPRD atau usulan eksekutif yang mengatur pengembangan riset dan inovasi jeruk keprok	Terbitnya Perkada teknis turunan dari Perda atau sebagai regulasi mandiri	Terimplementasinya a Perda/Perkada secara terukur melalui program – program OPD
Penataan Basis Data Riset Dan Inovasi	Jumlah Dataset Riset/Inovasi Jeruk Keprok Yang Terunggah Dalam Satu Platform Digital Resmi	Terbentuknya sistem dan penataan dataset awal platform digital resmi daerah	Terintegrasinya data dan kolaborasi multi-sumber atau lembaga	Terbentuknya SOP manajemen data dan protokol privasi-publikasi untuk semua dataset yang terunggah	Terunggahnya dataset inovasi produk turunan jeruk keprok dari setiap riset atau kegiatan OPD terkait jeruk keprok	Terintegrasinya paltform dataset jeruk keprok daerah dengan portal data nasional
	Keberadaan Sistem Informasi (Sisfo) Di Pemerintahan Daerah (Ada/Tidak), Tingkat Penggunaan Alat	Terbentuknya fondasi sistem dan <i>digital awareness</i> misalnya dalam bentuk penyusunan perencanaan	Terbentuknya fitur komunikasi internal dan terselenggaranya pelatihan lanjutan	Terintegrasinya SIRIJEKODA dengan sistem lainnya dan ke seluruh kecamatan dan OPD terkait	Terbentuknya aplikasi mobile SIRIJEKODA dan diterapkannya dashboard kinerja ASN terkait aktivitas riset jeruk keprok	Terintegrasinya data dan penggunaan sistem informasi dengan pusat (BRIN,BPS,

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Komunikasi Dan Internet Oleh Asn (%)	pengembangan Sistem Informasi Riset Jeruk Keprok Daerah (SIRJEKODA)	pemanfaatan internet dan sistem berbasis cloud			Kemendagri, dan Kominfo)
Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset Dan Dan Inovasi	Jumlah Lab, Kelengkapan Alat (Menunjang Aspek Analisis Tanah, Air, Lingkungan Mikro Tanaman, Serta Uji Kimia-Fisiologis Sederhana)	Tersusunnya masterplan pengembangan laboratorium riset jeruk keprok	Tersedianya alat dasar laboratorium dan teknisi lab lokal, dan tersusunnya protokol uji lapang dan laboratorium berbasis kebutuhan riset jeruk keprok	Dikembangkannya sistem layanan laboratorium berbasis pemesanan digital	Terbentuknya tim riset terpadu lintas OPD dan universitas dengan mengembangkan laboratorium tematik	Ditetapkannya laboratorium riset jeruk keprok sebagai pusat inovasi daerah (PID) dan terjalinnya kerja sama riset nasional - internasional
	Cakupan Internet Pada Lembaga Riset (%) Yang Mendukung Pengembangan Komoditas Jeruk Keprok	Tersusunnya masterplan perluasan dan peningkatan cakupan internet	Terbangunnya pusat data mini di lembaga riset utama sebagai pusat dokumentasi riset jeruk keprok	Terintergrasinya jaringan internet lembaga riset ke sistem informasi riset daerah dan nasional	Terbangunnya mekanisme pelaporan berbasis internet untuk semua kegiatan riset jeruk keprok	Tersedianya akses internet bagi seluruh lembaga riset komoditas jeruk keprok untuk kegiatan riset dan diseminasi
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Ketersediaan Program Riset Di Kebun Raya Daerah (Gojang)	Teridentifikasinya lahan yang dapat dikembangkan untuk jeruk keprok	Tersedianya fasilitas pendukung riset sederhana seperti kebun percobaan, laboratorium pemuliaan dan	Terjalannya kerja sama riset dengan minimal tiga pihak: BRIN, Universitas, dan LSM konservasi	Tersedianya hasil riset dalam jurnal nasional, atau menjadi bahan <i>policy brief</i> untuk pengembangan komoditas jeruk keprok	Ditetapkannya program riset jeruk keprok sebagai program unggulan kebun raya Gojang dan masuk ke dalam jaringan nasional (BRIN,

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
			bioteknologi tanaman, rumah kaca, dll			Kementerian Pertanian, LIPI)
Penyediaan Anggaran Riset Dan Inovasi	Persentase Anggaran Riset Dari Total Anggaran Belanja Apbd (Beserta Nilai Nominalnya)	Tersusunnya peta kebutuhan pembiayaan riset jeruk keprok dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah	Terlaksananya 2 – 3 kegiatan riset jeruk keprok dengan pembiayaan APBD	Ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang data riset/ inovasi daerah dan terjalannya kerjasama pembiayaan riset jeruk keprok lintas sumber	Terbentuknya penggunaan anggaran riset jeruk keprok yang efektif dengan evaluasi berbasis output dan outcome	Terbentuknya <i>Research Trust Fund</i> Daerah berbasis APBD, CSR, dan lembaga donor untuk keberlanjutan riset jeruk keprok
Peningkatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Ide/Paten/Inovasi Yang Terkait Dengan Jeruk Keprok	Teridentifikasinya potensi ide dan teknologi lokal terkait jeruk keprok dari nelayan, ASN, mahasiswa, dan UMKM	Tersedianya pendampingan teknis dan inkubasi bisnis bagi pengusul ide jeruk keprok terbaik	Terfasilitasinya kerja sama antar inovator dan pelaku industri jeruk keprok/UMKM untuk uji pasar dan komersialisasi awal produk atau alat	Terbangunnya Pojok Inovasi Jeruk Keprok di BRIDA atau UPTD yang aktif mendorong riset jeruk keprok	Terbentuknya lembaga mitra daerah untuk pemanfaatan dan lisensi inovasi
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi						
Penguatan Kolaborasi Riset Dan Inovasi Di Daerah Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kerja Sama Riset Terkait Jeruk Keprok	Tersusunnya dokumen strategi kemitraan riset jeruk keprok berisi format kerja sama, prioritas topik riset, dan kontribusi masing-masing pihak	Terlaksananya riset kolaboratif awal dengan mitra lokal seperti universitas daerah, SMK, atau UPTD Kementerian Pertanian	Terjalannya kemitraan riset lintas sektor	Terjalannya kemitraan strategis dengan swasta (eksportis jeruk keprok, koperasi, UMKM olahan) untuk riset berbasis kebutuhan pasar	Terbentuknya Consorsium Riset Jeruk Keprok Daerah yang melibatkan mitra kampus, industri, komunitas, dan pemerintah
Penyediaan Sarana	Jumlah Sdm Peneliti (Termasuk Dosen)	Teridentifikasinya jumlah peneliti dan	Tersedianya dukungan untuk	Terlaksananya rekrutmen terbuka	Tersedianya percepatan kenaikan	Tersedianya pengembangan

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Pendukung Riset Dan Inovasi Di Daerah Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Daerah	Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	dosen berdasarkan jenjang pendidikan dan bidang keahlian	pendidikan lanjut untuk SDM riset yang potensial	peneliti dari luar daerah	jabatan fungsional penelitian dan dosen sesuai kriteria publikasi dan kinerja riset	SDM riset sebagai bagian dari RPJMD dan Renstra OPD, khususnya untuk BRIDA, Dinas Pertanian, dan perguruan tinggi
Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan Antar Lembaga	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dan Sektor Swasta Terkait Riset Dan Inovasi Jeruk Keprok	Terpetakannya potensi mitra kerja sama strategis seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta	Terfasilitasinya perjanjian kerja sama dengan UMKM dan koperasi untuk hilirisasi hasil riset jeruk keprok	Terjalinnnya kerja sama dengan sektor swasta besar dalam kerja sama riset dan pengembangan seperti unit pengolahan jeruk keprok	Terbentuknya cluster riset jeruk keprok berbasis MoU/MoA agar terintegrasi	Terdaftarnya Pusat Kemitraan Jeruk Keprok ke dalam platform kolaborasi nasional (BRIN, Kemendagri, dan Kemendikbud)
Peningkatan Difusi Inovasi	Jumlah Adopsi/Implementasi Hasil Riset Jeruk Keprok	Terinventarisasinya seluruh hasil riset jeruk keprok yang telah dihasilkan	Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan adopsi inovasi untuk kelompok petani, penyuluh, dan UMKM	Tersedianya skema inkubasi bisnis inovasi berbasis riset jeruk keprok untuk UMKM dan koperasi	Terintegrasinya hasil riset jeruk keprok ke dalam regulasi daerah atau juknis program OPD	Ditetapkannya Kawasan Adopsi Inovasi Jeruk Keprok sebagai percontohan riset terapan daerah
Peningkatan Praktik Baik Dan Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Kepada Pelaku Inovasi	Jumlah Hasil Riset Terkait Jeruk Keprok Yang Didiseminasikan	Tersusunnya Rencana Induk Diseminasi Riset Jeruk Keprok	Diterbitkannya Buletin Riset Jeruk Keprok Daerah dua kali setahun yang berisi ringkasan hasil riset, kisah	Terdistribusinya media diseminasi ke kelompok petani, penyuluh, koperasi, dan sekolah pertanian	Terintegrasinya hasil riset yang telah didiseminasikan ke dalam pelatihan resmi OPD	Terselenggaranya diseminasi terbuka untuk setiap riset jeruk keprok yang dibiayai APBD

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
			sukses, dan teknologi terapan			
Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi						
Promosi Dan Kampanye Inovasi	Jumlah Inovasi Per Tahun Atau Ketersediaan Forum Inovasi Daerah Terkait Pengembangan Jeruk Keprok	Terbentuknya tim penggerak inovasi jeruk keprok daerah dibawah BRIDA atau OPD terkait	Terbentuknya inkubator inovasi jeruk keprok berbasis UPTD, politeknik, atau mitra industri	Terintegrasinya hasil inovasi ke dalam katalog produk inovatif daerah	Terjalinnnya kolaborasi inovasi jeruk keprok antar daerah	Terbentuknya Forum Inovasi Jeruk Keprok Daerah sebagai bagian tetap dari agenda BRIDA dan Pemda
Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Penghargaan/Kompetisi Inovasi Yang Diikuti Oleh Daerah	Terbentuknya tim fasilitator inovasi daerah	Tersedianya sistem dokumentasi lengkap atas inovasi jeruk keprok daerah	Terselenggaranya kompetisi inovasi jeruk keprok tingkat lokal sebagai seleksi untuk mengikuti kompetisi nasional/internasional	Terbentuknya Galeri Inovasi Jeruk Keprok Daerah dalam bentuk fisik dan digital untuk promosi	Terbentuknya Pusat Kompetensi dan Promosi Inovasi Jeruk Keprok Daerah untuk memfasilitasi ajang inovasi jangka panjang dan keikutsertaan kompetisi inovasi sebagai indikator kinerja BRIDA dan OPD teknis
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	Jumlah Start-Up Atau Umkm Jeruk Keprok Yang Dibina Melalui Inkubasi Daerah	Terbentuknya Inkubator Inovasi Bisnis Jeruk Keprok Daerah	Terlaksananya program inkubasi terstruktur batch 1 selama 6 – 12 bulan	Terbentuknya skema inkubasi jeruk keprok tematik	Terciptanya mitra hilirisasi hasil riset jeruk keprok daerah dari UMKM/Start-up binaan	Terbentuknya akademi UMKM Jeruk Keprok Digital berbasis daring untuk

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
						pembinaan berkelanjutan
Inventarisasi, Pengembangan, Dan Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat	Jumlah Pengetahuan Atau Teknologi Masyarakat Lokal Yang Dimanfaatkan Dalam Pengembangan Jeruk Keprok	Tersusunnya database pengetahuan lokal jeruk keprok	Terintegrasinya pengetahuan lokal ke dalam desain riset dan inovasi daerah	Terselenggaranya pelatihan berbasis teknologi lokal untuk petani atau pelaku usaha	Terselenggaranya promosi nilai budaya dan ekonomi dari teknologi lokal melalui festival jeruk keprok, lomba inovasi lokal, dan promosi UMKM	Terciptanya strategi riset dan inovasi daerah melalui pemanfaatan pengetahuan lokal dalam Renstra BRIDA/OPD
Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah						
Prakarsa Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah Dan/Atau Mengatasi Permasalahan Daerah	Jumlah Tema Riset Yang Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Jeruk Keprok)	Tersusunnya <i>Research Roadmap</i> berbasis potensi, permasalahan, dan kebutuhan pasar	Terselenggaranya <i>call for proposal</i> riset jeruk keprok dengan topik sesuai roadmap	Terintegrasinya tema riset jeruk keprok dalam forum ilmiah daerah atau seminar tahunan riset daerah	Terjalinnnya kemitraan dengan UMKM/koperasi untuk ujian adopsi hasil riset jeruk keprok	Terbentuknya kebijakan riset daerah dalam RPJMD atau regulasi BRIDA melalui tema riset jeruk keprok
Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Pertanian Berbasis Produk	Jumlah Klaster Inovasi Pertanian Jeruk Keprok Yang	Tersedianya pemetaan wilayah sentra jeruk keprok di kabupaten	Tersedianya kelembagaan klaster	Terbentuknya replikasi klaster di wilayah baru yang memiliki potensi	Terciptanya klaster sebagai pusat hilirisasi berbasis inovasi	Tersusunnya Business Plan berkelanjutan untuk tiap klaster

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Unggulan Daerah	Terbentuk Dan Aktif Dalam 1 Tahun			namun belum terorganisasi		
Kesesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Kegiatan/Program Riset Jeruk Keprok Yang Tercantum Dalam Dokumen Rpjmd Dan Renstra	Tersedianya minimal 2 program riset jeruk keprok prioritas lintas sektor yang diusulkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra	Tersedianya database usulan kegiatan untuk dimasukkan ke SIPD atau sistem e-planning daerah	Tersusunnya usulan DAK Nonfisik atau Dana Inovasi Daerah berbasis riset jeruk keprok	Terjalinnnya kerja sama dengan pemprov untuk mendorong integrasi dalam dokumen perencanaan provinsi	Terintegrasinya kegiatan riset jeruk keprok dalam dokumen APBD tahunan secara reguler
Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global						
Peningkatan Kepedulian Isu Internasional Yang Mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset Dan Inovasi Di Daerah	Ketersediaan Program Daerah Yang Mengintegrasikan Pengembangan Jeruk Keprok Dengan Isu Global (Perubahan Iklim Dan Pangan)	Tersusunnya 1 – 2 <i>policy brief</i> program integratif	Terintegrasinya konsep program jeruk keprok, iklim, dan pangan ke dalam dokumen daerah	Terselenggaranya penerapan program yang melibatkan masyarakat lokal dan UMKM	Terbentuknya model <i>Best Practice</i> Daerah dalam pengelolaan jeruk keprok adaptif iklim dan berorientasi pangan	Terbentuknya monitoring system indikator perubahan iklim dan ketahanan pangan berbasis jeruk keprok
Penguatan Kerjasama Internasional	Jumlah Kerjasama Internasional Dalam Rangka Pengembangan Jeruk Keprok	Teridentifikasinya lembaga internasional dan negara mitra potensial beserta bidang kerja sama	Terbentuknya kerja sama dengan mitra terpilih yang dikembangkan melalui MoU draft atau LoI via BRIDA, Bappeda,	Terlaksananya kerja sama riset atau pelatihan luar negeri terkait jeruk keprok	Terjalin kerja sama dari riset ke aspek hilirisasi dan komersialisasi jeruk keprok	Terjalinnnya kerja sama jangka panjang (>-5 tahun) berbasis <i>roadmap</i> bersama

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
			Kemendagri, dan Kemenlu			
Produk Unggulan Ke-4: Pengembangan Pariwisata						
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah						
Reformasi Kebijakan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Jumlah Kajian/Policy Brief Berbasis Riset Pariwisata	Terbentuknya tim kerja riset jeruk keprok lintas lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan kajian dan tersusunnya roadmap riset pariwisata	Ditetapkannya standar format kajian dan <i>policy brief</i> yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah	Terselenggaranya pelatihan untuk peneliti lokal, penyuluh, dan staf OPD dan terbentuknya pusat data dan informasi pariwisata di tingkat kabupaten	Teridentifikasinya permasalahan aktual pelaku pariwisata dan terbentuknya hasil riset untuk dikaji ulang melalui FGD lintas stakeholder	Terdiseminasinya hasil kajian dan <i>policy brief</i> secara rutin melalui rapat koordinasi, publikasi elektronik, media lokal, serta forum pelaku usaha
Penataan Basis Data Riset Dan Inovasi	Jumlah Dataset Riset/Inovasi Pariwisata Yang Terunggah Dalam Satu Platform Digital Resmi	Teridentifikasinya sumber – sumber data dan riset pariwisata eksisting	Terbangunnya platform digital resmi untuk pengunggahan dataset riset/inovasi pariwisata	Terjalinnnya kemitraan dengan perguruan tinggi, pusat studi, dan pelaku industri	Terwujudnya pengembangan dashboard analitik untuk visualisasi tren kunjungan, tipologi wisatawan, potensi daya tarik, dan indeks keberlanjutan destinasi	Terintegrasinya platform wisata daerah dengan sistem nasional dan regional (Bappenas, BRIN, Satu Data)
	Keberadaan Sistem Informasi (Sisfo) Di Pemerintahan Daerah (Ada/Tidak), Tingkat Penggunaan Alat Komunikasi Dan Internet Oleh Asn (%)	Terbentuknya fondasi sistem dan <i>digital awareness</i> misalnya dalam bentuk penyusunan perencanaan pengembangan	Terbentuknya fitur komunikasi internal dan terselenggaranya pelatihan lanjutan pemanfaatan	Terintegrasinya SIRIPADA dengan sistem lainnya dan ke seluruh kecamatan dan OPD terkait	Terbentuknya aplikasi mobile SIRIPADA dan diterapkannya dashboard kinerja ASN terkait aktivitas riset pariwisata	Terintegrasinya data dan penggunaan sistem informasi dengan pusat (BRIN,BPS, Kemendagri, dan Kominfo)

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Sistem Informasi Riset Pariwisata Daerah (SIRIPADA)	internet dan sistem berbasis cloud			
Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset Dan Dan Inovasi	Jumlah Lab, Kelengkapan Alat (Menunjang Aspek Analisis Tanah, Air, Lingkungan Mikro Tanaman, Serta Uji Kimia-Fisiologis Sederhana)	Teridentifikasinya lokasi pariwisata unggulan	Terevitalisasinya ruang laboratorium di lokasi pariwisata	Terbukanya laboratorium yang berfungsi ganda sebagai pusat edukasi wisata dan riset (edutourism)	Terbentuknya kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha pariwisata untuk pengembangan konten ekowisata berbasis data ilmiah	Terintegrasinya fungsi laboratorium dalam dokumen tata kelola destinasi (RTBL, masterplan pariwisata daerah)
	Cakupan Internet Pada Lembaga Riset (%) Yang Mendukung Pengembangan Komoditas Pariwisata	Tersusunnya masterplan perluasan dan peningkatan cakupan internet	Terbangunnya pusat data mini di lembaga riset utama sebagai pusat dokumentasi riset pariwisata	Terintergrasinya jaringan internet lembaga riset ke sistem informasi riset daerah dan nasional	Terbangunnya mekanisme pelaporan berbasis internet untuk semua kegiatan riset pariwisata	Tersedianya akses internet bagi seluruh lembaga riset komoditas pariwisata untuk kegiatan riset dan diseminasi
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Ketersediaan Program Riset Di Kebun Raya Daerah (Gojang)	Teridentifikasinya lahan yang dapat dikembangkan untuk pariwisata	Tersedianya fasilitas pendukung riset sederhana seperti kebun percobaan, laboratorium pemuliaan dan bioteknologi tanaman, rumah kaca, dll	Terjalinnnya kerja sama riset dengan minimal tiga pihak: BRIN, Universitas, dan LSM konservasi	Tersedianya hasil riset dalam jurnal nasional, atau menjadi bahan <i>policy brief</i> untuk pengembangan komoditas pariwisata	Ditetapkannya program riset pariwisata sebagai program unggulan kebun raya Gojang dan masuk ke dalam jaringan nasional (BRIN, Kementerian Pertanian, LIPI)

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Penyediaan Anggaran Riset Dan Inovasi	Persentase Anggaran Riset Dari Total Anggaran Belanja Apbd (Beserta Nilai Nominalnya)	Tersusunnya peta kebutuhan pembiayaan riset pariwisata dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah	Terlaksananya 2 – 3 kegiatan riset pariwisata dengan pembiayaan APBD	Ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang data riset/inovasi daerah dan terjalinnnya kerjasama pembiayaan riset pariwisata lintas sumber	Terbentuknya penggunaan anggaran riset pariwisata yang efektif dengan evaluasi berbasis output dan outcome	Terbentuknya <i>Research Trust Fund</i> Daerah berbasis APBD, CSR, dan lembaga donor untuk keberlanjutan riset pariwisata
Peningkatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Ide/Paten/Inovasi Yang Terkait Dengan Pariwisata					
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi						
Penguatan Kolaborasi Riset Dan Inovasi Di Daerah Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kerja Sama Riset Terkait Pariwisata	Tersusunnya dokumen strategi kemitraan riset pariwisata berisi format kerja sama, prioritas topik riset, dan kontribusi masing-masing pihak	Terlaksananya riset kolaboratif awal dengan mitra lokal seperti universitas daerah, SMK, atau UPTD Kementerian Pariwisata	Terjalinnnya kemitraan riset lintas sektor	Terjalinnnya kemitraan strategis dengan swasta (pelaku usaha pariwisata, koperasi, UMKM olahan) untuk riset berbasis kebutuhan pasar	Terbentuknya Consorsium Riset Pariwisata Daerah yang melibatkan mitra kampus, industri, komunitas, dan pemerintah
Penyediaan Sarana Pendukung Riset Dan Inovasi Di	Jumlah Sdm Peneliti (Termasuk Dosen) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Teridentifikasinya jumlah peneliti dan dosen berdasarkan jenjang pendidikan	Tersedianya dukungan untuk pendidikan lanjut	Terlaksananya rekrutmen terbuka peneliti dari luar daerah	Tersedianya percepatan kenaikan jabatan fungsional penelitian dan dosen	Tersedianya pengembangan SDM riset sebagai bagian dari

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Daerah Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Daerah		dan bidang keahlian	untuk SDM riset yang potensial		sesuai kriteria publikasi dan kinerja riset	RPJMD dan Renstra OPD, khususnya untuk BRIDA, Dinas Pertanian, dan perguruan tinggi
Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan Antar Lembaga	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dan Sektor Swasta Terkait Riset Dan Inovasi Pariwisata	Terpetakannya potensi mitra kerja sama strategis seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta	Terfasilitasinya perjanjian kerja sama dengan UMKM dan koperasi untuk hilirisasi hasil riset pariwisata	Terjalinnnya kerja sama dengan sektor swasta besar dalam kerja sama riset dan pengembangan seperti unit pengolahan pariwisata	Terbentuknya cluster riset pariwisata berbasis MoU/MoA agar terintegrasi	Terdaftarnya Pusat Kemitraan Pariwisata ke dalam platform kolaborasi nasional (BRIN, Kemendagri, dan Kemendikbud)
Peningkatan Difusi Inovasi	Jumlah Adopsi/Implementasi Hasil Riset Pariwisata	Terinventarisasinya seluruh hasil riset pariwisata yang telah dihasilkan	Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan adopsi inovasi untuk kelompok pelaku usaha dan UMKM	Tersedianya skema inkubasi bisnis inovasi berbasis riset pariwisata untuk UMKM dan koperasi	Terintegrasinya hasil riset pariwisata ke dalam regulasi daerah atau juknis program OPD	Ditetapkannya Kawasan Adopsi Inovasi Pariwisata sebagai percontohan riset terapan daerah
Peningkatan Praktik Baik Dan Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Kepada Pelaku Inovasi	Jumlah Hasil Riset Terkait Pariwisata Yang Didiseminasikan	Tersusunnya Rencana Induk Diseminasi Riset Pariwisata	Diterbitkannya Buletin Riset Pariwisata Daerah dua kali setahun yang berisi ringkasan hasil riset, kisah sukses, dan teknologi terapan	Terdistribusinya media diseminasi ke kelompok pelaku usaha, koperasi, dan sekolah pertanian	Terintegrasinya hasil riset yang telah didiseminasikan ke dalam pelatihan resmi OPD	Terselenggaranya diseminasi terbuka untuk setiap riset pariwisata yang dibiayai APBD

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi						
Promosi Dan Kampanye Inovasi	Jumlah Inovasi Per Tahun Atau Ketersediaan Forum Inovasi Daerah Terkait Pengembangan Pariwisata	Terbentuknya tim penggerak inovasi pariwisata daerah dibawah BRIDA atau OPD terkait	Terbentuknya inkubator inovasi pariwisata berbasis UPTD, politeknik, atau mitra industri	Terintegrasinya hasil inovasi ke dalam katalog produk inovatif daerah	Terjalinnnya kolaborasi inovasi pariwisata antar daerah	Terbentuknya Forum Inovasi Pariwisata Daerah sebagai bagian tetap dari agenda BRIDA dan Pemda
Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Penghargaan/Kompetisi Inovasi Yang Diikuti Oleh Daerah	Terbentuknya tim fasilitator inovasi daerah	Tersedianya sistem dokumentasi lengkap atas inovasi pariwisata daerah	Terselenggaranya kompetisi inovasi pariwisata tingkat lokal sebagai seleksi untuk mengikuti kompetisi nasional/internasional	Terbentuknya Galeri Inovasi Pariwisata Daerah dalam bentuk fisik dan digital untuk promosi	Terbentuknya Pusat Kompetensi dan Promosi Inovasi Pariwisata Daerah untuk memfasilitasi ajang inovasi jangka panjang dan keikutsertaan kompetisi inovasi sebagai indikator kinerja BRIDA dan OPD teknis
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	Jumlah Start-Up Atau UMKM Pariwisata Yang Dibina Melalui Inkubasi Daerah	Terbentuknya Inkubator Inovasi Bisnis Pariwisata Daerah	Terlaksananya program inkubasi terstruktur batch 1 selama 6 – 12 bulan	Terbentuknya skema inkubasi pariwisata tematik	Terciptanya mitra hilirisasi hasil riset pariwisata daerah dari UMKM/Start-up binaan	Terbentuknya akademi UMKM Pariwisata Digital berbasis daring untuk pembinaan berkelanjutan
Inventarisasi, Pengembangan, Dan Perlindungan	Jumlah Pengetahuan Atau Teknologi Masyarakat Lokal Yang Dimanfaatkan	Tersusunnya database pengetahuan lokal pariwisata daerah	Terintegrasinya pengetahuan lokal ke dalam	Terselenggaranya pelatihan berbasis teknologi lokal untuk pelaku usaha	Terselenggaranya promosi nilai budaya dan ekonomi dari teknologi lokal melalui	Terciptanya strategi riset dan inovasi daerah melalui

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat	Dalam Pengembangan Pariwisata		desain riset dan inovasi daerah		festival pariwisata, lomba inovasi lokal, dan promosi UMKM	pemanfaatan pengetahuan lokal dalam Renstra BRIDA/OPD
Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah						
Prakarsa Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah Dan/Atau Mengatasi Permasalahan Daerah	Jumlah Tema Riset Yang Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Pariwisata)	Tersusunnya <i>Research Roadmap</i> berbasis potensi, permasalahan, dan kebutuhan pasar	Terselenggaranya <i>call for proposal</i> riset pariwisata dengan topik sesuai roadmap	Terintegrasinya tema riset pariwisata dalam forum ilmiah daerah atau seminar tahunan riset daerah	Terjalinnnya kemitraan dengan UMKM/koperasi untuk ujian adopsi hasil riset pariwisata	Terbentuknya kebijakan riset daerah dalam RPJMD atau regulasi BRIDA melalui tema riset pariwisata
Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah	Jumlah Klaster Inovasi Pariwisata Yang Terbentuk Dan Aktif Dalam 1 Tahun	Tersedianya pemetaan wilayah sentra pariwisata di kabupaten	Tersedianya kelembagaan klaster	Terbentuknya replikasi klaster di wilayah baru yang memiliki potensi namun belum terorganisasi	Terciptanya klaster sebagai pusat hilirisasi berbasis inovasi	Tersusunnya Business Plan berkelanjutan untuk tiap klaster
Kesesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat Dan	Ketersediaan Kegiatan/Program Riset Pariwisata Yang Tercantum Dalam	Tersedianya minimal 2 program riset pariwisata prioritas lintas sektor yang	Tersedianya database usulan kegiatan untuk dimasukkan ke SIPD atau sistem	Tersusunnya usulan DAK Nonfisik atau Dana Inovasi Daerah berbasis riset pariwisata	Terjalinnnya kerja sama dengan pemprov untuk mendorong integrasi dalam	Terintegrasinya kegiatan riset pariwisata dalam dokumen APBD

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Pemerintah Daerah	Dokumen RPJMD Dan Renstra	diusulkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra	e-planning daerah		dokumen perencanaan provinsi	tahunan secara reguler
Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global						
Peningkatan Kepedulian Isu Internasional Yang Mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset Dan Inovasi Di Daerah	Ketersediaan Program Yang Mengintegrasikan Pengembangan Pariwisata Dengan Isu Global (Perubahan Iklim Dan Pangan)	Tersusunnya 1 – 2 <i>policy brief</i> program integratif	Terintegrasinya konsep program pariwisata, iklim, dan pangan ke dalam dokumen daerah	Terselenggaranya penerapan program yang melibatkan masyarakat lokal dan UMKM	Terbentuknya model <i>Best Practice</i> Daerah dalam pengelolaan pariwisata adaptif iklim dan berorientasi pangan	Terbentuknya monitoring system indikator perubahan iklim dan ketahanan pangan berbasis pariwisata
Penguatan Kerjasama Internasional	Jumlah Kerjasama Internasional Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata	Teridentifikasinya lembaga internasional dan negara mitra potensial beserta bidang kerja sama	Terbentuknya kerja sama dengan mitra terpilih yang dikembangkan melalui MoU draft atau LoI via BRIDA, Bappeda, Kemendagri, dan Kemenlu	Terlaksananya kerja sama riset atau pelatihan luar negeri terkait pariwisata	Terjalin kerja sama dari riset ke aspek hilirisasi dan komersialisasi pariwisata	Terjalannya kerja sama jangka panjang (>-5 tahun) berbasis <i>roadmap</i> bersama

Tabel 6. 2 Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Tema Prioritas Daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Tema Prioritas 1: Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi						
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief terkait produktivitas daerah	Teridentifikasinya kebutuhan dan isu – isu produktivitas daerah	Tersusunnya 2 kajian terkait produktivitas daerah dan terjalannya kemitraan riset	Tersusunnya 3 kajian tematik terkait produktivitas daerah dan terimplementasinya rekomendasi kajian di beberapa lokasi	Tersusunnya 3 kajian replikasi dan tersinkronisasi dengan RPJMD, Renstra Dinas, dan RKPD	Tersusunnya rekomendasi jangka Panjang dan penguatan institusi penghasil kajian
	2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah terkait produktivitas daerah	Teridentifikasinya regulasi eksisting dan kebutuhan regulasi baru terkait produktivitas daerah	Tersusunnya draf awal dan harmonisasi antar perangkat daerah	Terbentuknya regulasi awal dan pelatihan perangkat pelaksana	Terwujudnya perluasan regulasi ke komoditas lain dan integrasi lintas sektor	Terkonsolidasi dan terevaluasinya seluruh regulasi, perbaikan kelembagaan, dan penguatan hukum terkait produktivitas daerah
Penataan basis data Riset dan Inovasi	1) Jumlah dataset riset/inovasi produktivitas daerah yang terunggah dalam satu platform digital resmi	Terpetakannya kebutuhan, infrastruktur digital, dan tata Kelola data awal terkait produktivitas daerah	Terunggahnya dataset prioritas awal dan legalisasi platform sebagai kanal resmi terkait produktivitas daerah	Tereksponsinya dataset dan kolaborasi multipihak terkait produktivitas daerah	Terciptanya visualisasi dan user interface untuk meningkatkan nilai guna dataset terkait produktivitas daerah	Terkonsolidasinya penguatan keberlanjutan dan replikasi ke sektor lain terkait produktivitas daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah terkait produktivitas daerah	Teridentifikasinya kebutuhan, audit teknologi eksisting, dan rencana pengembangan Sisfo terkait produktivitas daerah	Terbentuknya pengembangan awal sistem informasi digital berbasis web/intranet terkait produktivitas daerah	Terbentuknya perluasan sistem informasi ke seluruh komoditas dan pemanfaatan lintas OPD terkait produktivitas daerah	Terwujudnya penguatan hukum, perluasan akses publik, dan replikasi ke daerah lain terkait produktivitas daerah	Terselenggaranya evaluasi kinerja sistem dan perbaikan berkelanjutan terkait produktivitas daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1) Jumlah lab dan kelengkapan alat yang dapat menunjang produktivitas daerah	Terselenggaranya audit fasilitas eksisting, identifikasi kebutuhan terkait produktivitas daerah	Terselenggaranya renovasi/penguatan lab eksisting dan pengadaan alat strategis terkait produktivitas daerah	Terbentuknya pembangunan/penguatan lab baru terkait produktivitas daerah dan standarisasi	Terciptanya interkoneksi antar-lab dan peningkatan layanan publik terkait produktivitas daerah	Terkonsolidasinya kelembagaan dan replikasi model laboratorium daerah terkait produktivitas daerah
	2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung pengembangan produktivitas daerah	Terselenggaranya audit konektivitas lembaga riset dan perencanaan peningkatan jaringan terkait produktivitas daerah	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Dasar terkait produktivitas daerah	Terekspansi dan terintegrasinya Data Riset Online terkait produktivitas daerah	Terciptanya penguatan layanan dan penyediaan dukungan tambahan untuk riset digital terkait produktivitas daerah	Tercapaiannya penyempurnaan cakupan dan perencanaan keberlanjutan terkait produktivitas daerah
Pengelolaan kebun raya daerah	Ketersediaan program riset di kebun raya daerah (Gojang)	Teridentifikasinya potensi, perencanaan program, dan penguatan kelembagaan riset	Terlaksananya program awal dan pembentukan jaringan kerja sama riset terkait	Terdiversifikasinya Program Riset & Diseminasi terkait produktivitas daerah	Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas program riset yang	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan replikasi model riset Kebun Raya Gojang

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		terkait produktivitas daerah	produktivitas daerah		mendukung terkait produktivitas daerah	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (beserta nilai nominalnya) untuk pengembangan produktivitas daerah	Teridentifikasinya Advokasi, dan Penganggaran Awal terkait produktivitas daerah	Terbentuknya skema Dana Hibah Riset dan Penguatan Lintas OPD terkait produktivitas daerah	Tercapainya peningkatan Alokasi dan Pembentukan Skema Matching Fund terkait produktivitas daerah	Tercapainya ekspansi dana riset dan fokus Pemanfaatan Inovasi terkait produktivitas daerah	Tercapainya konsolidasi dan target anggaran riset 1% APBD terkait produktivitas daerah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait produktivitas daerah	Terpetakannya potensi inovasi dan menyiapkan sistem pendukung ide dan paten terkait produktivitas daerah	Tercapainya penciptaan ide dan prototipe awal inovasi terkait produktivitas daerah	Terwujudnya perlindungan hukum dan pengakuan formal atas inovasi terkait produktivitas daerah	Terwujudnya adopsi hasil inovasi oleh pasar/UMKM/masyarakat terkait produktivitas daerah	Terwujudnya inovasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah terkait produktivitas daerah
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait produktivitas daerah	Teridentifikasinya potensi kolaborasi dan penguatan dasar hukum kerja sama terkait produktivitas daerah	Terimplementasinya awal kerja sama melalui proyek kecil terkait produktivitas daerah	Terwujudnya perluasan jaringan mitra dan sistem koordinasi kerja sama terkait produktivitas daerah	Tercapainya pendalaman kerja sama menuju pemanfaatan hasil dan dampak langsung terkait produktivitas daerah	Terwujudnya kerja sama riset sebagai bagian permanen dalam pembangunan daerah terkait produktivitas daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Ketersediaan website jaringan dalam rangka pengembangan produktivitas daerah	Tersusunnya dasar kelembagaan dan desain sistem jaringan terkait produktivitas daerah	Terbangunnya 2–3 website aktif dan integrasi awal data terkait produktivitas daerah	Terwujudnya website sebagai pusat layanan dan interaksi public terkait produktivitas daerah	Tercapainya interkoneksi website komoditas unggulan dan kemitraan digital terkait produktivitas daerah	Terwujudnya website yang tetap aktif, relevan, dan mendukung transformasi ekonomi terkait produktivitas daerah
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah						
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Jumlah mitra untuk pengembangan produktivitas daerah	Teridentifikasi dan terbangunnya dasar kelembagaan kolaborasi terkait produktivitas daerah	Terbentuknya kemitraan awal secara nyata terkait produktivitas daerah	Tercapainya kemitraan dari berbagai sektor guna memperdalam kerja sama terkait produktivitas daerah	Tercapainya kemitraan sebagai bagian dari sistem pembinaan dan hilirisasi terkait produktivitas daerah	Terwujudnya kemitraan sebagai fondasi transformasi ekonomi daerah terkait produktivitas daerah
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset produktivitas daerah	Tersusunnya daftar riset yang relevan, siap terap, dan dibutuhkan pelaku lapangan terkait produktivitas daerah	Terwujudnya kelayakan hasil riset di lapangan melalui percontohan terbuka terkait produktivitas daerah	Terimplementasinya dukungan pendanaan dan kebijakan terkait produktivitas daerah	Terwujudnya replikasi dan pengakuan formal terhadap hasil riset yang berhasil diadopsi terkait produktivitas daerah	Tercapainya adopsi hasil riset sebagai bagian dari kebijakan permanen terkait produktivitas daerah
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait produktivitas daerah	Tersedianya basis data hasil riset yang relevan dan layak diseminasi terkait produktivitas daerah	Tersedianya berbagai sarana penyebarluasan hasil riset terkait produktivitas daerah	Terdiseminasinya hasil riset langsung ke sasaran penerima manfaat terkait produktivitas daerah	Terimplementasinya hasil riset melalui mitra eksternal terkait produktivitas daerah	Tercapainya peningkatan kualitas diseminasi dan keberlanjutan penyebaran terkait produktivitas daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah						
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait pengembangan produktivitas daerah	Terbangunnya kelembagaan, regulasi, dan ekosistem awal inovasi terkait produktivitas daerah	Terfasilitasinya ide inovasi dan menciptakan ajang temu pelaku terkait produktivitas daerah	Terdorongny penerapan inovasi dan memperluas jejaring terkait produktivitas daerah	Tercapainya inovasi yang berkembang secara berkelanjutan dan memberi nilai tambah terkait produktivitas daerah	Terwujudnya inovasi daerah sebagai identitas dan pendorong transformasi ekonomi terkait produktivitas daerah
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah terkait pengembangan produktivitas daerah	Terbangunnya kesiapan sistemik dan mengenali peluang penghargaan/inovasi terkait produktivitas daerah	Terlaksananya lomba tingkat provinsi/nasional dan membangun budaya kompetitif internal terkait produktivitas daerah	Tercapainya peningkatan jumlah inovasi yang siap bersaing dan memperluas partisipasi terkait produktivitas daerah	Tercapainya hasil kompetisi menjadi aset citra positif daerah terkait produktivitas daerah	Terwujudnya kompetisi inovasi sebagai siklus tahunan tetap dan prestisius terkait produktivitas daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM yang mengembangkan produktivitas daerah	Terbangunnya kelembagaan, SDM, dan desain program inkubasi terkait produktivitas daerah	Terseleksi dan terbinanya batch pertama UMKM/start-up sektor unggulan terkait produktivitas daerah	Tercapainya peningkatan jumlah tenant dan menjembatani ke akses permodalan terkait produktivitas daerah	Terdorongnya produk binaan masuk ke pasar yang lebih luas dan berkelanjutan terkait produktivitas daerah	Terwujudnya inkubasi sebagai sistem berkelanjutan dan menyebarluaskan dampaknya terkait produktivitas daerah
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan dalam pengembangan produktivitas daerah	Tersusunnya basis data pengetahuan/teknologi lokal yang relevan dengan komoditas terkait produktivitas daerah	Terimplementasi nya teknologi/pengetahuan lokal yang layak dimanfaatkan secara luas terkait produktivitas daerah	Tercapainya pengetahuan lokal sebagai sumber inovasi terapan terkait produktivitas daerah	Terwujudnya pengakuan hukum dan ekonomi terhadap pemilik pengetahuan lokal terkait produktivitas daerah	Tercapainya pengetahuan lokal sebagai sumber ekonomi dan inovasi yang berkelanjutan terkait produktivitas daerah
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan produktivitas daerah	Tersusunnya arah riset berbasis kebutuhan daerah dan potensi terkait produktivitas daerah	Terbentuknya tema riset prioritas per tahun dan menyiapkan dukungan riset terkait produktivitas daerah	Terbentuknya jumlah dan kualitas riset tematik terkait produktivitas daerah	Terwujudnya pengembangan riset ke aspek sosial, kelembagaan, dan ekonomi digital terkait produktivitas daerah	Tercapainya riset tematik sebagai landasan pengembangan komoditas dan transformasi ekonomi terkait produktivitas daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah kluster inovasi produktivitas daerah	Tersusunnya dasar ekosistem kluster berbasis potensi lokal dan pelaku kunci terkait produktivitas daerah	Terbentuknya kluster inovasi awal dan memperkuat ekosistem kolaborasi terkait produktivitas daerah	Tercapainya peningkatan produktivitas dan nilai tambah dalam kluster terkait produktivitas daerah	Tercapainya peningkatan visibilitas, koordinasi, dan daya saing antar-kluster terkait produktivitas daerah	Terwujudnya kluster sebagai model transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan terkait produktivitas daerah
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program terkait produktivitas daerah	Tersedianya basis data dan identifikasi gap antara kebutuhan daerah dan perencanaan pusat terkait produktivitas daerah	Terkoneksinya dokumen perencanaan daerah dengan dokumen pusat secara aktif dan formal terkait produktivitas daerah	Terlaksananya riset bersama dan menunjukkan hasil sebagai model nasional terkait produktivitas daerah	Terwujudnya program riset tematik daerah yang masuk dalam dokumen resmi pemerintah pusat terkait produktivitas daerah	Terimplementasinya program riset komoditas unggulan dan berdampak nasional terkait produktivitas daerah
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan pengembangan produktivitas daerah	Terbangunnya kesadaran dan landasan integrasi isu global dalam konteks lokal terkait produktivitas daerah	Tersusun dan terujinya coba program yang menyatukan komoditas unggulan dan isu global terkait produktivitas daerah	Terciptanya perluasan cakupan program dan perkuat peran aktor pelaksana terkait produktivitas daerah	Terwujudnya program daerah sebagai bagian resmi dalam sistem pembangunan daerah terkait produktivitas daerah	Terimplementasinya model daerah dan terreplikasinya model tersebut antardaerah terkait produktivitas daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Penguatan kerjasama internasional	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan produktivitas daerah	Terbangunnya dasar dan teridentifikasinya peluang kerja sama internasional terkait produktivitas daerah	Terjalannya komunikasi resmi dan kerja sama awal terkait produktivitas daerah	Terlaksananya proyek kolaboratif dan menunjukkan capaian kinerja terkait produktivitas daerah	Tercapainya peningkatan jumlah dan cakupan proyek serta aktor kerja sama terkait produktivitas daerah	Terjalannya kerja sama internasional sebagai bagian strategis pembangunan daerah terkait produktivitas daerah
Tema Prioritas 2. Peningkatan kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Sosial						
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief terkait pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar	Teridentifikasinya regulasi eksisting terkait pendidikan, pelatihan, dan inovasi SDM.	Terdorongnya riset kolaboratif antara pemerintah daerah, BRIDA, dan akademisi..	Terfasilitasinya penulisan policy brief berbasis data sosial, pendidikan, gender, dan inklusi.	Terdiseminasinya policy brief pada forum-forum pengambilan keputusan daerah.	Terevaluasinya pemutakhiran policy brief berdasarkan perkembangan sosial masyarakat.
	2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah terkait pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar	Teridentifikasinya kekosongan regulasi daerah tentang penguatan riset sosial dan pendidikan lokal.	Tersusunnya draft Perda/Perkada tentang penguatan ekosistem inovasi SDM.	Terselenggaranya konsultasi publik dan harmonisasi naskah akademik.	Terwujudnya legalisasi perda dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.	Termonitoringnya implementasi perda dalam program-program strategis daerah
Penataan basis data Riset dan Inovasi	1) Jumlah dataset riset/inovasi pendidikan dan kesehatan yang terunggah dalam satu platform digital resmi	Terinventarisasinya data SDM daerah (pendidikan, pelatihan, demografi produktif).	Terwujudnya pengembangan sistem digitalisasi dan dashboard data SDM.	Terintegrasinya data ke portal resmi pemerintah daerah.	Terlaksananya pelatihan operator dan pemutakhiran dataset.	Terwujudnya penggunaan dataset dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan SDM.

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah terkait pengembangan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)	Terintegrasinya perencanaan sistem informasi SDM lintas sektor.	Terbangunnya platform berbasis kebutuhan perencanaan tenaga kerja dan pendidikan.	Tervalidasinya data dari OPD dan mitra pendidikan/pelatihan.	Terwujudnya penggunaan sistem dalam penyusunan kebijakan SDM.	Terlaksananya evaluasi kebermanfaatan dan pengembangan fitur sistem informasi.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1) Jumlah lab dan kelengkapan alat yang dapat menunjang produktivitas sumber daya manusia	Terpetakannya kebutuhan laboratorium pelatihan vokasi dan keterampilan kerja.	Tersedianya penganggaran pengadaan alat praktik dan laboratorium soft skill.	Terjalinnya kerja sama dengan SMK, politeknik, dan BLK untuk perluasan fungsi pelatihan.	Terlaksananya penambahan alat digital learning dan teknologi simulatif.	Terlaksananya evaluasi efektivitas pelatihan berbasis laboratorium terhadap peningkatan SDM.
	2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar	Terlaksananya survei dan pemetaan akses internet di pusat pelatihan dan sekolah daerah	Terwujudnya kolaborasi dengan Diskominfo dan provider untuk peningkatan jaringan	Terinstalasinya internet di lokasi strategis (BLK, PAUD, PKBM, SLB, dll)	Terwujudnya pemanfaatan internet untuk pelatihan daring dan sistem hybrid learning	Termonitoringnya dampak konektivitas terhadap kualitas pelatihan dan pembelajaran.
Pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah pengelola atau tenaga kerja di kebun raya daerah (Gojang)	Teridentifikasinya kebutuhan SDM pengelola kebun raya daerah	Tersusunnya kurikulum pelatihan pengelolaan kebun raya daerah	Terlaksananya pelatihan intensif dan sertifikasi untuk pengelola kebun raya daerah	Terbentuknya pengelolaan semi-mandiri dengan model BLUD atau kemitraan BUMDes di kebun raya daerah	Terwujudnya ekspansi fungsi edukatif dan wisata di kebun raya daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (beserta nilai nominalnya) untuk bidang pendidikan dan kesehatan (SDM)	Terlaksananya audit proporsi belanja APBD untuk program pendidikan, pelatihan, dan literasi	Tersusunnya kebijakan alokasi minimal anggaran pengembangan SDM.	Terlaksananya penguatan perencanaan anggaran berbasis evidence dari data SDM.	Teroptimalisasinya dana DAK pendidikan, dana CSR, dan program bantuan sosial.	Terlaksananya evaluasi efektivitas anggaran terhadap transformasi sosial berbasis SDM
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan)	Terpetakannya ide kreatif lokal dari komunitas, guru, pelajar, dan tokoh masyarakat	Terlaksananya pelatihan penyusunan paten dan hak kekayaan intelektual (HAKI) sosial	Terwujudnya inkubasi ide sosial dan teknologi tepat guna untuk masyarakat	Terlaksananya kompetisi inovasi daerah berbasis sosial dan pendidikan.	Terlaksananya diseminasi dan registrasi nasional/internasional atas ide/paten lokal
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait pengembangan SDM (perbaikan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar)	Teridentifikasinya potensi kolaborasi dan penguatan dasar hukum kerja sama terkait pengembangan SDM	Terimplementasinya kerja sama awal melalui proyek kecil berbasis pengembangan SDM	Terwujudnya perluasan jaringan mitra dan sistem koordinasi kerja sama	Tercapainya pendalaman kerja sama menuju pemanfaatan hasil dan dampak langsung	Terwujudnya kerja sama riset sebagai bagian permanen dalam pembangunan daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Ketersediaan website jaringan dalam rangka pengembangan SDM	Terbentuknya desain portal informasi SDM dan pelatihan berbasis data daerah	Terlaksananya pengembangan konten (peluang kerja, program pelatihan, beasiswa).	Terlaksananya peluncuran dan pelatihan pemanfaatan website oleh publik	Terintegrasinya website dengan data pemerintah daerah dan sistem nasional	Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran rutin website dengan fitur interaktif.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah						
Penguatan kemitraan antarakelompok	Jumlah mitra untuk pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar	Teridentifikasinya pemangku kepentingan (sekolah, LSM, swasta, universitas)	Tersusunnya peta kemitraan strategis dan ruang lingkup kerja sama	Terlaksananya program kemitraan SDM (pelatihan, literasi, kepemimpinan).	Terlaksananya evaluasi hasil kerja sama dan dokumentasi praktik baik.	Terwujudnya perluasan jejaring mitra ke tingkat regional dan nasional
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset pengembangan SDM di Kabupaten Kepulauan Selayar	Terpetakannya hasil riset yang aplikatif dan siap pakai	Tersosialisasinya hasil riset ke komunitas dan OPD terkait	Tersedianya pilot project implementasi hasil riset sosial/pendidikan	Terlaksananya monitoring dan pendampingan keberlanjutan penerapan	Terciptanya pengembangan model replikasi riset berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>)
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait pengembangan SDM yang didiseminasikan/disebarluaskan	Tersusunnya sistem dokumentasi dan publikasi hasil riset	Tersedianya penerbitan hasil riset dalam media digital dan jurnal lokal	Terlaksananya forum diseminasi daerah (seminar, gelar inovasi)	Terciptanya kolaborasi diseminasi lintas sektor (media, pendidikan, pemerintah).	Terwujudnya peningkatan kualitas publikasi untuk jurnal nasional.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait pengembangan pendidikan dan kesehatan (SDM)	Terbentuknya forum inovasi sosial dan pendidikan berbasis daerah	Terlaksananya kompetisi dan penghargaan ide inovatif komunitas	Tercapainya peningkatan kapasitas anggota forum dan inkubasi ide	Terintegrasinya forum dalam RPJMD dan kegiatan OPD	Terwujudnya pengembangan forum sebagai jejaring nasional
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah terkait pengembangan SDM	Teridentifikasi dan terkurasinya potensi partisipasi lomba inovasi nasional	Terlaksananya pelatihan proposal dan kesiapan kompetisi inovasi	Terlaksananya pengiriman peserta ke ajang inovasi pemerintah/publik	Terlaksananya promosi hasil penghargaan di media dan lingkungan kerja	Terwujudnya insentif dan fasilitasi keberlanjutan inovator daerah.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM yang dibina melalui inkubasi daerah	Terbentuknya pendataan kelompok rentan yang potensial didampingi	Terlaksananya pelatihan wirausaha sosial dan bisnis berbasis komunitas.	Terbentuknya inkubasi usaha pemula dan pemuda terampil	Tersedianya akses pembiayaan dan pasar untuk start-up binaan	Terbentuknya koperasi sosial dan jejaring bisnis SDM lokal.
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan	Teridentifikasinya praktik sosial-budaya lokal yang relevan.	Terdokumentasinya pengetahuan atau teknologi lokal dan tercapainya penguatan narasi edukatif	Tersedianya hibah riset sosial inovatif untuk pemuda dan perempuan	Terlaksananya evaluasi kebermanfaatan tema terhadap transformasi sosial	Tercapainya publikasi dan replikasi riset SDM.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan SDM daerah	Tersusunnya roadmap riset SDM daerah (literasi, gender, pendidikan).	Terjalannya kolaborasi riset lintas lembaga	Tersedianya hibah riset sosial inovatif untuk pemuda dan perempuan	Terlaksananya evaluasi kebermanfaatan tema terhadap transformasi sosial	Tercapainya publikasi dan replikasi riset SDM.
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah klaster inovasi yang memberdayakan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar	Terpetakannya kelompok komunitas pembelajar, pelaku sosial, dan inovator	Terbentuknya klaster inovasi daerah (misal: digital, pendidikan, budaya	Tercapainya penguatan kelembagaan klaster dan kurikulum inovasi.	Terwujudnya sinergi antar-klaster dan kolaborasi lintas sektor	Terwujudnya replikasi dan pengembangan model klaster SDM lainnya.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset pengembangan SDM yang tercantum dalam dokumen RPJMN, RPJPN, atau Kementerian	Tersedianya basis data dan identifikasi gap antara kebutuhan daerah dan perencanaan pusat	Terkoneksinya dokumen perencanaan daerah dengan dokumen pusat secara aktif dan formal	Terlaksananya riset bersama dan menunjukkan hasil sebagai model nasional	Terwujudnya program riset tematik daerah yang masuk dalam dokumen resmi pemerintah pusat	Terimplementasinya program riset pengembangan SDM dan berdampak nasional
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan pengembangan SDM dengan isu global	Terbangunnya kesadaran dan landasan integrasi isu global dalam konteks lokal	Tersusun dan terujinya coba program yang menyatukan pengembangan SDM dan isu global	Terciptanya perluasan cakupan program dan perkuat peran aktor pelaksana	Terwujudnya program daerah sebagai bagian resmi dalam sistem pembangunan daerah	Terimplementasinya model daerah terkait pengembangan SDM dan terreplikasinya model tersebut antardaerah
Penguatan kerjasama internasional	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Selayar	Terbangunnya dasar dan teridentifikasinya peluang kerja sama internasional	Terjalannya komunikasi resmi dan kerja sama awal	Terlaksananya proyek kolaboratif dan menunjukkan capaian kinerja	Tercapainya peningkatan jumlah dan cakupan proyek serta aktor kerja sama	Terjalannya kerja sama internasional sebagai bagian strategis pembangunan daerah
Tema Prioritas 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung transformasi sosial (Penurunan Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran)						
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar	Teridentifikasinya isu ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran lokal	Terwujudnya kolaborasi riset antara BRIDA, akademisi, dan pemda	Tersusunnya policy brief berbasis data sosial ekonomi.	Terlaksananya Diseminasi dalam forum pembangunan dan Musrenbang	Terintegrasinya rekomendasi kajian/policy brief ke dalam kebijakan daerah.
	2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran di	Terlaksananya review regulasi eksisting terkait penanggulangan kemiskinan	Tersusunnya draft perda/perkada inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.	Terlaksananya konsultasi publik dan pengesahan regulasi	Terlaksananya sosialisasi dan pelaksanaan melalui program prioritas	Terwujudnya evaluasi dan perbaikan kebijakan

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Kabupaten Kepulauan Selayar					
Penataan basis data Riset dan Inovasi	1) Jumlah dataset riset/inovasi terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran yang terunggah dalam satu platform digital resmi	Terlaksananya pemetaan dan pengumpulan data kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terwujudnya digitalisasi dan integrasi data dalam satu sistem informasi	Tercapainya penguatan kapasitas pengelola data di daerah	Terwujudnya pemanfaatan data untuk perencanaan dan targeting program	Tercapainya pengembangan sistem terbuka berbasis dashboard publik.
	2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran	Terlaksananya pengembangan sistem informasi terpadu penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya penginputan data by name by address penerima bantuan	Terintegrasinya sistem informasi dengan DTKS dan database nasional	Teroptimalisasinya sistem untuk targeting bansos dan program kerja.	Terlaksananya evaluasi efektivitas sistem dan pembaruan berkala.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1) Jumlah lab dan kelengkapan alat yang dapat menunjang riset kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terpetakannya kebutuhan laboratorium yang dapat menunjang riset kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Tersedianya penganggaran pengadaan alat praktik dan laboratorium soft skill.	Terjalinnnya kerja sama dengan pihak – pihak yang dapat menunjang riset kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.	Terlaksananya penambahan alat digital learning dan teknologi simulatif.	Terlaksananya evaluasi efektivitas pelatihan berbasis laboratorium terhadap pengentasan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung riset terkait kemiskinan, ketimpangan, pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar	Terlaksananya survei kebutuhan akses internet di wilayah miskin dan pusat pelatihan	Tercapainya perluasan jaringan dengan provider dan Diskominfo.	Terselenggaranya pengadaan akses wifi publik di desa/kelurahan	Terselenggaranya pengembangan pelatihan daring berbasis komunitas.	Terwujudnya monitoring dan perluasan konektivitas ke pusat usaha mikro
Pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah pengelola atau tenaga kerja di kebun raya daerah (Gojang)	Teridentifikasinya potensi sosial – ekonomi kebun raya daerah	Terselenggaranya keterampilan kerja hijau bagi masyarakat rentan	Terlaksananya rekrutmen inklusif tenaga kerja baru	Terbentuknya inovasi pembiayaan kegiatan inklusif	Terselenggaranya evaluasi dampak sosial – ekonomi kebun raya
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (beserta nilai nominalnya) untuk penanganan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran	Terlaksananya audit anggaran belanja sosial dan pengentasan kemiskinan	Tersusunnya kebijakan alokasi minimal 10% belanja langsung	Terlaksananya penguatan sinergi program antar-OPD berbasis sdgs.	Teroptimalisasinya pendanaan dari pusat dan hibah luar negeri	Terwujudnya evaluasi anggaran berbasis output dan outcome
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait penanganan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terlaksananya lomba ide inovatif penanggulangan pengangguran dan kemiskinan	Terbentuknya inkubasi inovasi sosial dari komunitas dan pemuda	Terwujudnya pendanaan dan pelatihan inkubator inovasi lokal	Terregistrasinya HAKI dan publikasi inovasi untuk ide/paten/inovasi	Terwujudnya replikasi inovasi untuk wilayah lain.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Teridentifikasinya potensi kolaborasi dan penguatan dasar hukum kerja sama terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terimplementasinya kerja sama awal melalui proyek kecil berbasis riset kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terwujudnya perluasan jaringan mitra dan sistem koordinasi kerja sama	Tercapainya pendalaman kerja sama menuju pemanfaatan hasil dan dampak langsung	Terwujudnya kerja sama riset terkait kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran sebagai bagian permanen dalam pembangunan daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Ketersediaan website jaringan untuk riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terbentuknya desain portal informasi program kesejahteraan.	Terintegrasinya data penerima dan program bantuan	Terselenggaranya pelatihan pengelola dan operator data	Tercapainya pengembangan fitur interaktif	Terlaksananya evaluasi pemanfaatan publik dan transparansi
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah						
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Jumlah mitra untuk riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Teridentifikasinya mitra CSR, BUMD, LSM, dan universitas	Terlaksananya penandatanganan kerja sama multisektor	Terimplementasinya program inklusif bersama mitra	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kontribusi mitra	Tercapainya peningkatan cakupan kerja sama penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset penanggulangan kemiskinan,	Teridentifikasinya hasil riset yang relevan dan dapat diadopsi.	Tersosialisasinya hasil riset dan pelatihan adopsi hasil riset.	Terlaksananya pendampingan penerapan hasil riset	Terlaksananya evaluasi hasil implementasi	Terwujudnya pengembangan model kebijakan berbasis riset

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar					
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang didiseminasikan/disebarluaskan	Terlaksananya pengumpulan dan kurasi hasil riset	Tercapainya diseminasi hasil riset melalui media dan forum	Terwujudnya kolaborasi diseminasi hasil riset dengan media dan universitas	Terpublikasinya hasil riset di jurnal nasional dan internasional.	Terintegrasinya hasil riset ke dalam dokumen perencanaan.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah						
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi per tahun atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terbentuknya forum inovasi daerah	Terlaksananya kompetisi inovasi sosial daerah	Terwujudnya pemberian insentif dan fasilitasi ide terpilih	Tercapainya penguatan kelembagaan forum	Terintegrasinya riset dan inovasi ke kebijakan daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah terkait penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Teridentifikasinya event nasional yang akan diikuti oleh daerah.	Terfasilitasinya peserta dari komunitas untuk ikut serta dalam event nasional	Terlaksananya pelatihan penulisan proposal inovasi sosial	Terpublikasinya hasil capaian event nasional yang diikuti	Terlaksananya pengembangan kompetisi lokal berjenjang
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau usaha mikro yang dibina melalui inkubasi daerah	Terpetakannya UMKM pemula dan kelompok rentan	Terlaksananya pendampingan kelembagaan dan permodalan	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan	Tercapainya akses pemasaran digital dan kemitraan bagi UMKM atau start-up	Terlaksananya penilaian dampak terhadap penyerapan tenaga kerja pada start-up atau UMKM binaan
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Teridentifikasinya praktik sosial-budaya lokal yang relevan dengan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terdokumentasinya pengetahuan atau teknologi lokal dan tercapainya penguatan narasi edukatif	Tersedianya hibah riset sosial inovatif untuk penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terlaksananya evaluasi kebermanfaatan tema terhadap penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Tercapainya publikasi dan replikasi riset mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Jumlah tema riset yang mendukung penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Terlaksananya penentuan topik riset prioritas bersama perguruan tinggi	Tersedianya dana riset terapan sosial-ekonomi.	Terwujudnya kolaborasi lintas OPD dan sektor	Terselenggaranya pelatihan peneliti muda dan penyebaran hasil riset	Terintegrasinya hasil riset ke program prioritas daerah
Penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah kluster inovasi untuk pengadaan riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran	Teridentifikasinya potensi kluster inklusi sosial dan ekonomi lokal	Terbentuknya kluster ekonomi kerakyatan dan sosial.	Terlaksananya penguatan kelembagaan dan akses pasar	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan kolaborasi lintas kluster	Tersedianya replikasi model kluster untuk wilayah tertinggal.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang tercantum dalam dokumen RPJMN, RPJPN, atau Kementerian	Tersedianya basis data dan identifikasi gap antara kebutuhan daerah dan perencanaan pusat	Terkoneksinya dokumen perencanaan daerah dengan dokumen pusat secara aktif dan formal	Terlaksananya riset bersama dan menunjukkan hasil sebagai model nasional	Terwujudnya program riset tematik daerah yang masuk dalam dokumen resmi pemerintah pusat	Terimplementasinya program riset kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dan berdampak nasional
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dengan isu global	Terbangunnya kesadaran dan landasan integrasi isu global dalam konteks lokal	Tersusun dan terujinya coba program yang menyatukan penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dan isu global	Terciptanya perluasan cakupan program dan perkuat peran aktor pelaksana	Terwujudnya program daerah sebagai bagian resmi dalam sistem pembangunan daerah	Terimplementasinya model daerah terkait kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dan terreplikasinya model tersebut antardaerah
Penguatan kerjasama internasional	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar	Terbangunnya dasar dan teridentifikasinya peluang kerja sama internasional	Terjalannya komunikasi resmi dan kerja sama awal	Terlaksananya proyek kolaboratif dan menunjukkan capaian kinerja	Tercapainya peningkatan jumlah dan cakupan proyek serta aktor kerja sama	Terjalannya kerja sama internasional sebagai bagian strategis pembangunan daerah
Tema Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik						
Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah						
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1) Jumlah kajian/policy brief terkait kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Teridentifikasinya permasalahan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, administrasi).	Terwujudnya kolaborasi riset dengan akademisi dan BRIDA untuk penyusunan policy brief	Tersusunnya rekomendasi kebijakan berbasis data pelayanan.	Terselenggaranya forum konsultasi publik untuk validasi hasil kajian	Terintegrasinya rekomendasi dalam perbaikan SOP dan regulasi layanan.

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	2) Jumlah perda/perkada tentang riset dan inovasi daerah terkait pengembangan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Terlaksananya review regulasi layanan publik eksisting	Tersusunnya draft perda/perkada inovasi pelayanan.	Terlaksananya konsultasi publik dan pengesahan	Terselenggaranya sosialisasi dan pelaksanaan inovasi layanan	Terwujudnya evaluasi implementasi dan revisi.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	1) Jumlah dataset riset/inovasi terkait layanan publik yang terunggah dalam satu platform digital resmi	Terbentuknya digitalisasi data pelayanan publik	Terintegrasinya data antar-OPD dalam satu sistem.	Tersedianya dashboard pelayanan untuk publik	Tercapainya peningkatan interoperabilitas dengan sistem nasional.	Terwujudnya evaluasi efektivitas penggunaan data.
	2) Keberadaan sistem informasi (Sisfo) di pemerintahan daerah terkait layanan publik	Terlaksananya pemetaan dan audit sistem layanan elektronik	Tercapainya pengembangan sistem pelayanan terpadu	Terlaksananya pelatihan pegawai dalam penggunaan sistem	Terintegrasinya system informasi dengan layanan daring dan mobile.	Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan kualitas sistem.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1) Jumlah lab dan kelengkapan alat yang dapat menunjang kualitas layanan publik	Terlaksananya pemetaan kebutuhan laboratorium layanan publik.	Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium pelayanan	Terselenggaranya pelatihan inovasi pelayanan publik bagi ASN	Terimplementasinya prototipe inovasi layanan publik	Terlaksananya evaluasi dan replikasi inovasi layanan publik.
	2) Cakupan internet pada lembaga riset (%) yang mendukung kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Terlaksananya pemetaan titik layanan yang belum terjangkau internet	Tercapainya perluasan jaringan kerja sama dengan penyedia layanan.	Terintegrasinya internet ke semua unit pelayanan	Tercapainya peningkatan kapasitas bandwidth	Terlaksananya monitoring kualitas layanan daring.

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah pengelola atau tenaga kerja di kebun raya daerah (Gojang)					
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Persentase anggaran riset dari total anggaran belanja APBD (beserta nilai nominalnya) untuk pengembangan kualitas layanan publik	Terlaksananya audit belanja pelayanan publik	Tercapainya penetapan proporsi minimal untuk kualitas layanan.	Terwujudnya realokasi anggaran untuk reformasi birokrasi.	Terlaksananya evaluasi dampak anggaran	Teroptimalisasinya belanja berbasis kinerja layanan.
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah ide/paten/inovasi yang terkait layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Teridentifikasinya kompetisi ASN dan komunitas untuk inovasi layanan	Terwujudnya inkubasi dan pelatihan pengembangan inovasi.	Tercapainya registrasi HAKI dan hak cipta atas inovasi	Terwujudnya replikasi ide/paten/inovasi ke unit layanan lain	Terdokumentasinya praktik baik ide/paten/inovasi layanan publik
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerja sama riset terkait kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Teridentifikasinya potensi kolaborasi dan penguatan dasar hukum kerja sama terkait riset layanan publik	Terimplementasinya awal kerja sama melalui proyek kecil berbasis riset layanan publik	Terwujudnya perluasan jaringan mitra dan sistem koordinasi kerja sama	Tercapainya pendalaman kerja sama menuju pemanfaatan hasil dan dampak langsung	Terwujudnya kerja sama riset layanan publik sebagai bagian permanen dalam pembangunan daerah

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Ketersediaan website jaringan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik	Tersedianya portal integrasi layanan publik	Tersosialisasi dan terselenggaranya penggunaan website layanan public oleh masyarakat.	Tersedianya fitur interaktif dan pengaduan layanan publik	Terselenggaranya pemeliharaan dan update rutin	Terwujudnya evaluasi keterjangkauan dan responsivitas.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah						
Penguatan kemitraan antarlembagaan	Jumlah mitra untuk pengembangan kualitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Terpetakannya mitra potensial (universitas, swasta, NGO).	Terlaksananya penandatanganan kerja sama	Terimplementasinya kerja sama program layanan	Terlaksananya monitoring dampak kerja sama	Terbentuknya replikasi dan ekspansi kemitraan
Peningkatan difusi Inovasi	Jumlah adopsi/implementasi hasil riset mengenai layanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Tersedianya kurasi hasil riset layanan relevan	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan adopsi hasil riset	Terlaksananya pilot implementasi adopsi di unit pelayanan.	Terselenggaranya evaluasi dampak dan umpan balik	Terintegrasinya hasil riset ke dalam kebijakan daerah.
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah hasil riset terkait kualitas layanan publik yang didiseminasikan/disebarluaskan	Terbentuknya forum ilmiah dan diseminasi hasil riset layanan	Tersedianya publikasi hasil riset pada jurnal kebijakan publik.	Tersedianya media digital dan kolaborasi lintas sektor	Terintegrasinya hasil riset ke kurikulum pelatihan ASN	Tercapainya penguatan jejaring riset layanan.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Promosi dan kampanye Inovasi;	Jumlah inovasi atau ketersediaan forum inovasi daerah terkait kualitas layanan publik	Terbentuknya forum inovasi pelayanan daerah.	Terlaksananya kompetisi dan insentif ide pelayanan publik	Tersedianya dukungan anggaran dan inkubasi terkait kualitas layanan publik	Tersedianya publikasi hasil riset dan transfer antar-OPD.	Terbentuknya komunitas inovator ASN
Apresiasi prestasi Inovasi;	Jumlah penghargaan/kompetisi inovasi yang diikuti oleh daerah terkait peningkatan kualitas layanan publik	Terselenggaranya KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik)	Terlaksananya pendampingan dan persiapan proposal	Tersedianya fasilitasi presentasi dan media publikasi	Terintegrasinya inovasi unggulan ke sistem pelayanan	Terbentuknya replikasi inovasi dari para juara ke OPD lain.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;	Jumlah start-up atau UMKM binaan yang berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas layanan publik	Teridentifikasinya UMKM dengan potensi dukung pelayanan publik	Terlaksananya pelatihan dan inkubasi layanan publik oleh UMKM	Tersedianya pengadaan berbasis UMKM lokal	Terselenggaranya penguatan ekosistem layanan publik swasta	Terwujudnya kemitraan strategis berbasis kontrak layanan
Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Jumlah pengetahuan atau teknologi masyarakat lokal yang diintegrasikan ke dalam sistem layanan publik	Terinventarisasinya teknologi tepat guna lokal	Terselenggaranya uji coba dan validasi teknologi layanan	Tersedianya adopsi teknologi dalam unit layanan daerah	Terwujudnya skala up penerapan teknologi ke dalam system layanan publik	Terwujudnya pengembangan sistem layanan berbasis teknologi lokal.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Jumlah tema riset yang mendukung pengembangan kualitas layanan publik	Terbentuknya tema riset strategis layanan publik.	Tersedianya hibah riset layanan untuk mahasiswa dan ASN.	Terwujudnya kolaborasi riset dengan lembaga nasional	Terlaksananya monitoring dan evaluasi efektivitas riset	Tercapainya pengembangan kebijakan berbasis hasil riset.
Penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Jumlah kluster inovasi yang meningkatkan kualitas layanan publik Kabupaten Kepulauan Selayar	Teridentifikasinya potensi kluster inovasi pelayanan antar-OPD	Terbentuknya kluster layanan tematik (kesehatan, pendidikan, administrasi).	Terbentuknya inkubasi inovasi per kluster	Terbentuknya sinergi antar-kluster dan jejaring inovator.	Terintegrasinya kluster inovasi ke sistem pengelolaan pelayanan publik.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kegiatan/program riset peningkatan kualitas layanan publik yang tercantum dalam dokumen RPJMN, RPJPN, atau Kementerian	Tersedianya basis data dan identifikasi gap antara kebutuhan daerah dan perencanaan pusat	Terkoneksinya dokumen perencanaan daerah dengan dokumen pusat secara aktif dan formal	Terlaksananya riset bersama dan menunjukkan hasil sebagai model nasional	Terwujudnya program riset tematik daerah yang masuk dalam dokumen resmi pemerintah pusat	Terimplementasinya program riset kualitas layanan publik dan berdampak nasional
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global						

Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Indikator	Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Ketersediaan program daerah yang mengintegrasikan peningkatan kualitas layanan publik dengan isu global	Terbangunnya kesadaran dan landasan integrasi isu global dalam konteks lokal	Tersusun dan terujinya coba program yang menyatukan kualitas layanan publik dan isu global	Terciptanya perluasan cakupan program dan perkuat peran aktor pelaksana	Terwujudnya program daerah sebagai bagian resmi dalam sistem pembangunan daerah	Terimplementasinya model daerah mengenai kualitas layanan publik dan terreplikasinya model tersebut antardaerah
Penguatan kerjasama internasional	Jumlah kerjasama internasional dalam rangka pengembangan kualitas layanan publik Kabupaten Kepulauan Selayar	Terbangunnya dasar dan teridentifikasinya peluang kerja sama internasional	Terjalinnnya komunikasi resmi dan kerja sama awal	Terlaksananya proyek kolaboratif dan menunjukkan capaian kinerja	Tercapainya peningkatan jumlah dan cakupan proyek serta aktor kerja sama	Terjalinnnya kerja sama internasional sebagai bagian strategis pembangunan daerah

6.2 Program Indikatif Riset dan Inovasi di Daerah

Tabel 6. 3 Program Indikatif Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Produk Unggulan Daerah

Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Produk Unggulan Daerah 1: Pengembangan Kelapa	Elemen 1: Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan infrastruktur dan kebijakan riset dan inovasi produk unggulan kelapa	Jumlah kebijakan/regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi kelapa	Terbentuknya ekosistem riset-inovasi berbasis kelapa	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan

Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
					UMKM; BUMDes dan Koperasi
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi produk unggulan kelapa	Jumlah kelembagaan riset dan inovasi daerah yang diperkuat/ditingkatkan kapasitasnya	Terbangunnya jejaring riset dan inovasi yang solid antara Pemda, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas.	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM; BUMDes dan Koperasi
	Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program pengembangan kemitraan riset dan inovasi produk unggulan kelapa	Jumlah kemitraan riset dan inovasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset	Terwujudnya inovasi berbasis kebutuhan pasar dan sumber daya lokal.	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM; BUMDes dan Koperasi
	Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan budaya riset dan inovasi dalam pengembangan produk unggulan kelapa	Jumlah inovasi lokal dari masyarakat/UMKM terkait pengolahan kelapa yang didokumentasikan	Terbangunnya budaya riset dan inovasi di seluruh lapisan masyarakat.	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM; BUMDes dan Koperasi
	Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program keterpaduan riset dan inovasi produk unggulan kelapa secara terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan/program riset dan inovasi kelapa yang terintegrasi antar-OPD	Tersusunnya kebijakan dan program berbasis bukti (evidence-based) terkait pengembangan kelapa.	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM

Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Program penyelarasan produk unggulan kelapa dengan standar dan tren global	Jumlah kerja sama internasional (NGO, donor, pelaku pasar luar negeri) dalam pengembangan kelapa	Terbukanya akses ekspor dan investasi luar negeri berbasis produk kelapa.	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM; BKPSDM
Produk Unggulan Daerah 2: Perikanan Tangkap	Elemen 1: Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi untuk perikanan tangkap	Jumlah kebijakan/regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi perikanan tangkap	Terciptanya ekosistem inovatif yang menunjang industri perikanan tangkap secara berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.	Bappeda; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM; UPTD Pelabuhan Perikanan
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi sektor perikanan tangkap	Jumlah kelembagaan riset/inovasi sektor perikanan tangkap yang dibentuk/diperkuat	Terwujudnya kelembagaan riset yang responsif terhadap kebutuhan dan potensi sumber daya laut lokal	Bappeda; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM; UPTD Pelabuhan Perikanan
	Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program pengembangan kemitraan riset dan inovasi perikanan	Jumlah proyek riset kolaboratif antara Pemda, swasta, dan akademisi	Terbangunnya ekosistem kolaboratif yang mempercepat inovasi dalam	Bappeda; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, perdagangan,

Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
		tangkap berbasis potensi lokal		sektor perikanan tangkap.	koperasi, dan UMKM; Koperasi Perikanan
	Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penumbuhan budaya riset dan inovasi dalam pengembangan perikanan tangkap	Jumlah kegiatan edukasi dan promosi riset dan inovasi di sektor perikanan tangkap	Terbangunnya kesadaran dan kebiasaan berpikir ilmiah dan solutif di masyarakat nelayan.	Bappeda; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM; Komunitas Nelayan
	Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan keterpaduan dan sinkronisasi riset dan inovasi sektor perikanan tangkap	Jumlah dokumen perencanaan/program riset perikanan tangkap yang terintegrasi lintas OPD	Terwujudnya sistem riset daerah yang efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap permasalahan nyata sektor perikanan	Bappeda; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM
	Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Program penyelarasan sistem dan produk perikanan tangkap dengan standar dan tren global	Jumlah produk hasil tangkapan yang telah memenuhi standar mutu internasional (HACCP, ISO, MSC)	Terwujudnya sistem penangkapan ikan yang berkelanjutan, transparan, dan ramah lingkungan.	Bappeda; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM; Koperasi Perikanan

Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Produk Unggulan Daerah 3: Pengembangan Jeruk Keprok	Elemen 1: Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi jeruk keprok Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah kebijakan/peraturan daerah yang mendukung riset dan inovasi komoditas jeruk keprok	Terwujudnya kebijakan pengembangan jeruk keprok berbasis data ilmiah dan hasil riset lokal.	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindagkop dan UMKM
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi jeruk keprok Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah lembaga/unit kerja riset dan inovasi pertanian (khususnya jeruk keprok) yang terbentuk/diperkuat	Terintegrasinya hasil riset ke dalam program pengembangan kawasan jeruk keprok secara sistemik.	Bappeda; Dinas Pertanian; BKPSDM
	Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan kemitraan riset dan inovasi komoditas jeruk keprok Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah inovasi hasil kolaborasi (budidaya, pengolahan, pemasaran) yang diimplementasikan	Terbentuknya ekosistem riset-inovasi yang inklusif dan berbasis kebutuhan petani.	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindagkop dan UMKM; Koperasi Tani
	Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penumbuhan budaya riset dan inovasi masyarakat pada komoditas jeruk keprok	Jumlah karya inovatif lokal (alat budidaya, olahan, teknologi sederhana) yang lahir dari masyarakat	Terjadinya peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk berbasis ide dan kreativitas lokal.	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindagkop dan UMKM; Koperasi Tani
	Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan keterpaduan dan koherensi sistem riset dan inovasi	Jumlah forum koordinasi riset dan inovasi jeruk keprok	Terciptanya ekosistem riset jeruk keprok yang terarah,	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindagkop dan

Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
		komoditas jeruk keprok	lintas sektor (quad-helix)	efisien, dan tidak tumpang tindih antar program.	UMKM; Koperasi Tani
	Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Program harmonisasi sistem dan produk jeruk keprok dengan standar global dan tren inovasi internasional	Jumlah produk jeruk keprok yang memenuhi standar mutu internasional (GAP, HACCP, ISO)	Terciptanya sistem produksi jeruk yang berkelanjutan dan efisien.	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Perindagkop dan UMKM; Koperasi Tani
Produk Unggulan Daerah 4: Pengembangan Pariwisata	Elemen 1: Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi sektor pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah kebijakan atau regulasi daerah yang mendukung riset dan inovasi sektor pariwisata	Terbentuknya ekosistem riset-inovasi yang berkelanjutan di sektor pariwisata daerah.	Bappeda; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perindagkop dan UMKM
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah lembaga/unit kerja riset dan inovasi kepariwisataan yang dibentuk/diperkuat	Terbangunnya ekosistem riset pariwisata yang kuat, sistematis, dan berorientasi pada pemecahan masalah lokal.	Bappeda; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perindagkop dan UMKM
	Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penguatan kemitraan riset dan inovasi pariwisata berbasis kolaborasi Quad-Helix	Jumlah kerja sama riset dan inovasi pariwisata antara pemerintah, kampus, dan pelaku usaha	Tersusunnya model kemitraan riset yang berkelanjutan antara pemerintah, akademisi,	Bappeda; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perindagkop dan UMKM

Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
				masyarakat, dan dunia usaha.	
	Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program penumbuhan budaya riset dan inovasi pariwisata berbasis komunitas	Jumlah kegiatan edukatif (pelatihan, workshop, dialog publik) tentang riset dan inovasi pariwisata	Terwujudnya destinasi wisata yang berbasis pengetahuan dan berdaya saing tinggi.	Bappeda; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perindagkop dan UMKM
	Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program integrasi riset dan inovasi dalam tata kelola pengembangan pariwisata daerah	Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra OPD, Ripparda) yang terintegrasi dengan hasil riset pariwisata	Terciptanya sinergi antar lembaga dalam mengembangkan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan inovatif.	Bappeda; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perindagkop dan UMKM
	Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Program harmonisasi pengembangan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tren dan standar global	Jumlah destinasi wisata yang menerapkan standar internasional (CHSE, ekowisata, berkelanjutan, dll.)	Tumbuhnya ekosistem wisata yang adaptif terhadap dinamika global, berkelanjutan, dan inklusif.	Bappeda; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perindagkop dan UMKM

Tabel 6. 4 Program Indikatif Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Tema Prioritas Daerah

Tema Prioritas	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Tema Prioritas 1: Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi	Elemen 1: Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penguatan Kebijakan dan Infrastruktur Riset Terintegrasi terkait produktivitas daerah	Jumlah kebijakan daerah yang mendukung riset dan inovasi terkait produktivitas daerah	Terbitnya minimal 3 regulasi/peraturan daerah yang mengatur arah riset dan inovasi terkait produktivitas daerah	Bapperida
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Pendukung Riset dan Inovasi terkait produktivitas daerah	Persentase Ketersediaan perangkat dan sistem informasi pendukung riset dan inovasi	Terbentuknya minimal 1 Forum Inovasi Daerah (FID) yang aktif dan terintegrasi terkait produktivitas daerah	Bapperida
	Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penguatan Kemitraan Strategis Riset dan Inovasi antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (Quadruple Helix) terkait produktivitas daerah	Jumlah mou atau perjanjian kerja sama riset dan inovasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Terbentuknya konsorsium riset inovasi daerah yang melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas	Bapperida
	Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Peningkatan Literasi, Partisipasi, dan Apresiasi Terhadap Riset dan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum inovasi atau	Terbentuknya komunitas inovasi berbasis masyarakat di	Bapperida

Tema Prioritas	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
		Inovasi di Masyarakat terkait produktivitas daerah	program riset kolaboratif	setiap kecamatan yang berperan aktif dalam adopsi inovasi terkait produktivitas daerah	
	Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penguatan Integrasi Perencanaan Riset dan Inovasi dalam Dokumen Pembangunan Daerah dan Sinkronisasi Antar-Sektor terkait produktivitas daerah	Jumlah integrasi antara riset akademik dan kebijakan/program pengembangan daerah	Sinkronisasi program riset daerah dengan arah riset nasional dan provinsi tercapai secara optimal	Bapperida
	Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Program Adaptasi Strategi Pengembangan Daerah terhadap Isu Global dan Standar Internasional terkait produktivitas daerah	Jumlah inovasi daerah yang mengadopsi teknologi baru berbasis digitalisasi dan ramah lingkungan	Terbangunnya kesadaran lintas sektor terhadap pentingnya kesesuaian dengan agenda global seperti sdgs, perubahan iklim, dan bioekonomi	Bapperida
Tema Prioritas 2: Peningkatan kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Sosial	Elemen 1: Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Pengembangan Kebijakan dan Fasilitas Riset Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial untuk Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Jumlah kebijakan daerah terkait riset pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial	Tersusunnya minimal 3 regulasi riset SDM berbasis bukti	Bapperida Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Kominfo Bagian Hukum Setda

Tema Prioritas	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Peneliti Lokal dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial	Jumlah SDM daerah yang terlatih dalam riset pendidikan dan sosial	Terwujudnya kerja sama kelembagaan SDM dengan 5 lembaga pendidikan tinggi	Bapperida BKPSDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Sosial
	Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Kemitraan Strategis dalam Riset Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Sosial Berbasis Komunitas	Jumlah kemitraan riset dengan universitas dan lembaga sosial	Minimal 10 kemitraan aktif antara pemda dan lembaga riset SDM	Bapperida Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Kominfo Lembaga Swadaya Masyarakat
	Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penumbuhan Budaya Riset di Kalangan Pelajar, Guru, dan Tenaga Kesehatan melalui Gerakan Literasi Ilmiah	Jumlah festival/kompetisi riset pelajar dan inovasi sosial	Budaya riset menjadi bagian dari pengembangan profesi guru dan tenaga kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapperida Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Kominfo
	Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Integrasi Agenda Riset SDM dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Program Lintas Sektor	Tingkat integrasi antara riset akademik dan program daerah	Forum Koordinasi Riset SDM Daerah berjalan rutin setiap tahun	Bapperida Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Sosial OPD teknis terkait
	Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Program Penguatan Kompetensi Global dan Soft Skills Abad 21 melalui Pendidikan Adaptif dan Pelatihan Digital-Sosial	Jumlah pelatihan berbasis standar global (digital, green, SDGs, lifelong learning)	Lulusan pendidikan dan pelatihan lokal siap bersaing secara regional dan nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Bapperida Dinas Kominfo Dinas Sosial

Tema Prioritas	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
					Dinas Ketenagakerjaan Bagian Kerja Sama Setda
Tema Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung transformasi sosial (Penurunan Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran)	Elemen 1: Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penguatan Kebijakan dan Infrastruktur Riset Sosial-Ekonomi Daerah untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Jumlah kebijakan daerah berbasis riset yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Terbit minimal 3 kebijakan daerah berbasis riset ketimpangan dan kemiskinan	Bapperida Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penguatan Kelembagaan dan SDM Riset Sosial-Ekonomi Daerah Berbasis Data Ketimpangan dan Kemiskinan	Jumlah lembaga lokal yang terlibat aktif dalam riset dan intervensi sosial	Terbentuknya Forum Riset Kesejahteraan Daerah yang aktif	Bapperida BKPSDM Dinas Sosial Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Kemitraan Inovasi Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Kolaborasi Multi-Pihak	Jumlah kemitraan riset inovatif antara pemda, kampus, swasta, dan LSM	Terbentuknya inkubasi sosial di sektor informal dan desa tertinggal	Bapperida Dinas Sosial Dinas Koperasi dan UKM Dinas Tenaga Kerja
	Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penanaman Budaya Inovasi Sosial dan Ekonomi Produktif di	Jumlah komunitas yang mengembangkan solusi berbasis riset/inovasi lokal	Festival atau kompetisi inovasi sosial dilaksanakan setiap tahun	Dinas Sosial Dinas Koperasi dan UKM Dinas Tenaga Kerja Bapperida

Tema Prioritas	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
		Masyarakat Rentan dan Komunitas Lokal			Dinas Kominfo
	Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Sinkronisasi Agenda Riset Ketimpangan, Kemiskinan, dan Ketenagakerjaan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kebijakan sektoral yang terintegrasi dengan hasil riset sosial	Seluruh program prioritas sosial-ekonomi berbasis pada hasil kajian daerah	Bapperida Dinas Sosial Dinas Koperasi dan UKM Dinas Tenaga Kerja
	Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Program Adaptasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan terhadap Agenda Global: SDGs, Ekonomi Inklusif, dan Green Economy	Jumlah pelatihan keterampilan global (green jobs, digital skills, inklusi keuangan) bagi kelompok rentan	Terjalin minimal 3 kerja sama luar negeri (CSR, grant, atau technical assistance) di bidang pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan	Bapperida Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Bagian Kerja Sama Setda
Tema Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Elemen 1: Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penguatan Kebijakan dan Pembangunan Infrastruktur Digital untuk Mendukung Layanan Publik yang Responsif dan Berbasis Data	Jumlah hasil riset tentang kepuasan dan kebutuhan layanan publik yang digunakan oleh OPD	Minimal 5 kebijakan layanan publik berbasis riset dan evaluasi masyarakat	Bapperida Dinas Kominfo Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan DPMPTSP

Tema Prioritas	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penguatan Unit Inovasi Layanan Publik	Jumlah SOP layanan publik yang ditinjau ulang berdasarkan riset atau feedback masyarakat	Revisi dan penyederhanaan SOP berbasis riset dilakukan di minimal 80% layanan utama	BKPSDM Bapperida Dinas Kominfo DPMPTSP Inspektorat
	Elemen 3: Kemitraan Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Kolaborasi Lintas Sektor untuk Inovasi Layanan Publik dan Transformasi Digital Pemerintahan	Jumlah kerja sama riset layanan publik dengan perguruan tinggi atau sektor swasta	Terbentuknya 5 kolaborasi riset dan inovasi layanan publik dengan mitra eksternal	Bapperida Dinas Kominfo DPMPTSP Inspektorat Dinas Sosial
	Elemen 4: Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Penumbuhan Budaya Inovasi Layanan Publik melalui Kompetisi, Apresiasi, dan Literasi Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat pemahaman ASN tentang pentingnya layanan berbasis kebutuhan masyarakat	Budaya inovatif dan responsif melekat dalam etos kerja ASN dan lembaga	Bapperida BKPSDM Dinas Kominfo Inspektorat Bagian Organisasi Setda
	Elemen 5: Keterpaduan Atau Koherensi Riset Dan Inovasi Di Daerah	Program Integrasi Agenda Inovasi Layanan Publik dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Sistem Pengelolaan Kinerja	Jumlah program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra OPD yang berbasis inovasi layanan	Terintegrasinya hasil riset layanan ke dalam sistem SAKIP dan reformasi birokrasi	Bapperida Inspektorat Bagian Organisasi Setda BKPSDM Dinas Kominfo
	Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Program Penerapan Prinsip Good Governance dan Layanan Publik Digital Sesuai Standar Internasional	Jumlah layanan publik yang mengadopsi prinsip Open Government dan ISO pelayanan	Terintegrasinya pelayanan publik dalam satu platform digital daerah	Dinas Kominfo DPMPTSP Bapperida Bagian Organisasi Setda BKPSDM

Tema Prioritas	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
					Bagian Kerja Sama Setda

BAB VII PENUTUP

Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen strategis pendukung dalam penyusunan RPJMD, sekaligus sebagai panduan arah pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, yang mengamanatkan peran aktif pemerintah daerah dalam memajukan IPTEK untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah.

Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan empat produk unggulan daerah sebagai fokus utama dalam RIPJPID, yakni kelapa, perikanan tangkap termasuk produk olahan seperti emping dan ikan kering, jeruk keprok sebagai komoditas hortikultura khas daerah, serta sektor pariwisata bahari dan budaya. Keempat produk ini dipilih berdasarkan keunggulan komparatif serta potensi nilai tambah yang besar jika dikembangkan melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi. Selain itu, terdapat empat tema prioritas pembangunan daerah yang menjadi sorotan utama, yaitu: (1) peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah untuk mendukung transformasi ekonomi; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi sosial; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran; serta (4) peningkatan kualitas layanan publik sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan.

Seluruh perencanaan dan analisis dalam dokumen RIPJPID ini dilakukan berdasarkan enam elemen ekosistem riset dan inovasi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Keenam elemen tersebut mencakup: (1) kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah; (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; (3) kemitraan riset dan inovasi; (4) budaya riset dan inovasi; (5) keterpaduan riset dan inovasi; serta (6) penyelarasan dengan perkembangan global.

Secara keseluruhan, analisis dalam dokumen ini dilakukan untuk menentukan produk unggulan dan tema prioritas, mengidentifikasi tantangan dan peluang dari kondisi

aktual riset dan inovasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta menemukan kesenjangan antara kondisi tersebut dengan harapan jangka menengah ke depan. Selanjutnya, strategi yang dirancang dalam dokumen ini diarahkan untuk memperkuat elemen-elemen ekosistem yang sudah terbentuk, membangun komponen yang masih lemah, dan menyusun langkah-langkah terstruktur untuk pengembangan riset dan inovasi selama lima tahun ke depan. Adapun peta jalan yang disusun mencakup agenda riset yang mendukung pengembangan produk unggulan serta menjawab permasalahan pokok pembangunan daerah. Rencana ini tidak hanya mendorong penguatan sektor-sektor prioritas, tetapi juga memastikan bahwa riset dan inovasi menjadi bagian dari solusi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam membangun daerah yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**